

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKJ-IP) TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2018

Kata Pengantar

Assalammualaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,.



Alhamdullilahi robbil'alamin, kami panjatkan segal puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya Pemerintah Kota Dumai telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2016 - 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek - aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Dumai.

Wassalaamu'alaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,

WALIKOTA DUMAI

Drs. H. ZULKIFLI, AS. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. LATAR BELAKANG I-2

B. MAKSUD DAN TUJUAN I-2

C. GAMBARAN UMUM I-3

1. Kondisi Geografis I-3

a. Topografi I-4

b. Geologi I-5

c. Hidrologi I-5

d. Klimatologi I-6

2. Kondisi Demografis I-8

3. Pencapaian Sektor Prioritas Pembangunan I-10

a. Sektor Kesehatan 1-10

b. Sektor Pendidikan 1-23

c. Sektor Pertumbuhan Ekonomi / PDRB 1-29

d. Sektor perkembangan Investasi..... 1-49

e. Sektor Infrastruktur Wilayah 1-51

D. SISTEMATIKA PENULISAN 35

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1

A. PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA DUMAI 2017 .. III-1

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 III-14

Sasaran Strategis 1 ..... III-14

Sasaran Strategis 2 ..... III-18

Sasaran Strategis 3 ..... III-26

Sasaran Strategis 4 ..... III-30

Sasaran Strategis 5 ..... III-32
Sasaran Strategis 6 ..... III-33
Sasaran Strategis 7 ..... III-37
Sasaran Strategis 8 ..... III-44
Sasaran Strategis 9 ..... III-52
Sasaran Strategis 10..... III-10
Sasaran Strategis 11..... III-65
Sasaran Strategis 12..... III-72
Sasaran Strategis 13..... III-74
Sasaran Strategis 14..... III-79
Sasaran Strategis 15..... III-82
Sasaran Strategis 16..... III-85
Sasaran Strategis 17..... III-88
Sasaran Strategis 18..... III-89
Sasaran Strategis 19..... III-91
Sasaran Strategis 20..... III-94
Sasaran Strategis 21..... III-98
Sasaran Strategis 22..... III-103
Sasaran Strategis 23..... III-110
Sasaran Strategis 24..... III-112
Sasaran Strategis 25..... III-117
Sasaran Strategis 26..... III-118
Sasaran Strategis 27..... III-121
Sasaran Strategis 28..... III-123
Sasaran Strategis 29..... III-125
Sasaran Strategis 30..... III-127
Sasaran Strategis 31..... III-139
Sasaran Strategis 32..... III-141
Sasaran Strategis 33..... III-147
Sasaran Strategis 34..... III-152
Sasaran Strategis 35..... III-154
Sasaran Strategis 36..... III-164

Sasaran Strategis 37..... III-169
Sasaran Strategis 38..... III-171
Sasaran Strategis 39..... III-173
Sasaran Strategis 40..... III-177
Sasaran Strategis 41..... III-187
Sasaran Strategis 42..... III-189
Sasaran Strategis 43..... III-190
Sasaran Strategis 44..... III-191

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2. Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
3. Capaian Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Strategis
4. Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah APBD Tahun 2017
5. Capaian Realisasi Belanja Daerah APBD Tahun 2017
6. Hasil Reviu Inspektorat Kota Dumai Tahun 2017

DAFTAR TABEL

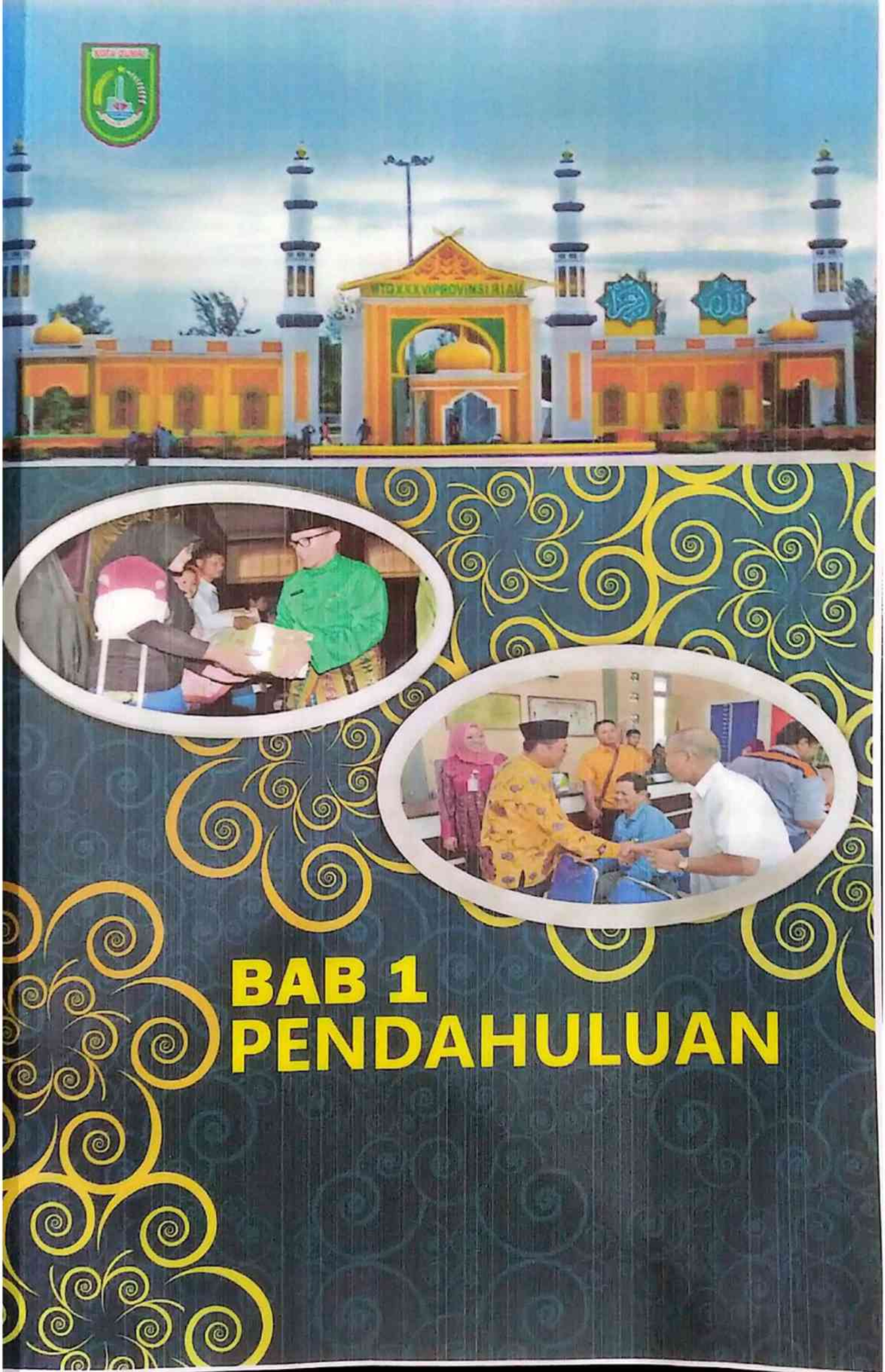
BAB 1	**PENDAHULUAN**	
Tabel 1.1	Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai	I-6
Tabel 1.2	Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016	I-7
Tabel 1.3	Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016	I-7
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Dumai per Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2016	I-9
Tabel 1.5	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2015	I-15
Tabel 1.6	Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Dumai Tahun 2010-2016	I-26
Tabel 1.7	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2011-2016	I-26
Tabel 1.8	Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2010-2016	I-28
Tabel 1.9	PDRB ADHB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	I-30
Tabel 1.10	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016	I-31
Tabel 1.11	Struktur Perekonomian Sektoral (Share Sektoral) Kota Dumai Tahun 2012-2016	I-33
Tabel 1.12	Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2012-2016 Berdasarkan 3 (Tiga) Kelompok Sektor Utama	I-35
Tabel 1.13	PDRB ADHK 2010 Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	I-37
Tabel 1.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016	I-40
Tabel 1.15	Kriteria Tipologi Klassen - Perkembangan Ekonomi Wilayah	I-43
Tabel 1.16	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2011-2016	I-43
Tabel 1.17	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2012-2016	I-44
Tabel 1.18	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau	I-46
Tabel 1.19	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2010-2016	I-48
Tabel 1.20	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai	I-50
Tabel 1.21	Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2010- 2015	I-50
Tabel 1.22	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Dumai	I-51
Tabel 1.23	Persentase Nilai Realisasi PMDNdan PMA Kota Dumai	I-51
Tabel 1.24	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2010 – 2015	I-52
Tabel 1.25	Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2014	I-53
BAB 2	**PERENCANAAN KINERJA**	
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017	II-3
Tabel 2.2	Program dan Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2017	II-11

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1	Skala Penilaian Kinerja Kota Dumai Tahun 2017	III-2
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	III-15
Tabel 3.2	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-17
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	III-18
Tabel 3.4	Perbandingan Panjang Jalan yang dibangun dari Tahun 2012 – 2017	III-19
Tabel 3.5	Perbandingan Pembangunan Turap dari Tahun 2012 – 2017	III-21
Tabel 3.6	Perbandingan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- gorong dari Tahun 2012- 2017	III-22
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-25
Tabel 3.8	Pengukuran Capain Kinerja Sasaran Strategis 3	III-27
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapain Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-29
Tabel 3.10.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	III-30
Tabel 3.11	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan PRJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-31
Tabel 3.12.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	III-32
Tabel 3.13	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan PRJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-33
Tabel 3.14.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	III-34
Tabel 3.15	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-35
Tabel 3.16.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	III-37
Tabel 3.17.	Perbandingan Pencapain Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-38
Tabel 3.18.	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2015	III-44
Tabel 3.19.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	III-45
Tabel 3.20	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-46
Tabel 3.21	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9	III-52
Tabel 3.22	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-53
Tabel 3.23	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	III-56
Tabel 3.24	Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Dumai Tahun 2017	III-58
Tabel 3.25	Jumlah Tempat Tidur pada periode 2013-2017 Rumah Sakit Umum Kota Dumai Tahun 2017	III-59
Tabel 3.26	Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Cara Masuk RSUD Kota Dumai Tahun 2017	III-60
Tabel 3.27	Cara Bayar Pasien Rawat jalan RSUD Kota Dumai Tahun 2017	III-61
Tabel 3.28	Laporan Bulanan Instalasi Rawat Darurat Tahun2017	III-62
Tabel 3.29	Perbandingan Tahun Kunjungan Gawat Darurat RSUD Kota Dumai Tahun 2017	III-62
Tabel 3.30	Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD Kota Dumai	III-63
Tabel 3.31	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai 2016-2021	III-64
Tabel 3.32	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	III-66
Tabel 3.33	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-70
Tabel 3.34	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	III-72
Tabel 3.35	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-73
Tabel 3.36	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13	III-74
Tabel 3.37	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-77

Tabel 3.38	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14	III-79
Tabel 3.39	Perkecamatan se Kota Dumai Tahun 2017	III-81
Tabel 3.40	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-82
Tabel 3.41	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15	III-82
Tabel 3.42	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-84
Tabel 3.43	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16	III-85
Tabel 3.44	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-87
Tabel 3.45	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17	III-88
Tabel 3.46	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-89
Tabel 3.47	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18	III-89
Tabel 3.48	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-90
Tabel 3.49	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19	III-91
Tabel 3.50	Data pencapaian Penegakan Perda/Perwako	III-92
Tabel 3.51	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-94
Tabel 3.52	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22	III-95
Tabel 3.53	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-97
Tabel 3.54	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III-98
Tabel 3.55	Pebandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-102
Tabel 3.56	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22	III-103
Tabel 3.57	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24 yang di uraikan per kecamatan.	III-105
Tabel 3.58	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Thun 2016-2021	III-109
Tabel 3.59	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23	III-111
Tabel 3.60	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-111
Tabel 3.61	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24	III-112
Tabel 3.62	Target dan Realisasi PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2017	III-114
Tabel 3.63	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-116
Tabel 3.64	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29	III-117
Tabel 3.65	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-118
Tabel 3.66	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29	III-119
Tabel 3.67	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-120
Tabel 3.68	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 27	III-121
Tabel 3.69	Jumlah kejadian kebakaran di Kota Dumai Tahun 2017	III-121
Tabel 3.70	Data Kejadian Kebakaran Di Kota Dumai Dirinci Menurut Kecamatan dan Lokasi Tahun 2017	III-122
Tabel 3.71	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-122
Tabel 3.72	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 28	III-123
Tabel 3.73	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-124
Tabel 3.74	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29	III-125
Tabel 3.75	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-126

Tabel 3.76	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30	III-127
Tabel 3.77	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang di uraikan per Kecamatan.	III-128
Tabel 3.78	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-137
Tabel 3.79	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 31	III-139
Tabel 3.80	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-140
Tabel 3.81	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 32	III-142
Tabel 3.82	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-146
Tabel 3.83	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 33	III-147
Tabel 3.84	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-151
Tabel 3.85	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 34	III-152
Tabel 3.86	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-153
Tabel 3.87	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 35	III-154
Tabel 3.88	Jumlah Lowongan Kerja Dan Realisasi Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2017	III-155
Tabel 3.89	Penempatan Tenaga Kerja	III-159
Tabel 3.90	Data pencari kerja yang terdaftar pada Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota dumai Menurut kelompok Umur Tahun 2017	III-160
Tabel 3.91	Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017	III-161
Tabel 3.92	Perbandinga Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-163
Tabel 3.93	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategi 36	III-164
Tabel 3.94	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-168
Tabel 3.95	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 37	III-169
Tabel 3.96	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-170
Tabel 3.97	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 38	III-171
Tabel 3.98	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-172
Tabel 3.99	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 39	III-173
Tabel 3.100	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-175
Tabel 3.101	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 40	III-177
Tabel 3.102	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-178
Tabel 3.103	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 41	III-179
Tabel 3.104	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-179
Tabel 3.105	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 42	III-180
Tabel 3.106	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-180
Tabel 3.107	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 43	III-181
Tabel 3.108	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-182
Tabel 3.109	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 44	III-182
Tabel 3.110	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	III-183



BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capalan kinerja selama Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai ini mendasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021, berpedoman pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) periode Tahun 2016 - 2021. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Dumai selama Tahun Anggaran 2017;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2017;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Dumai di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Dumai dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM KOTA DUMAI

1. Kondisi Geografis

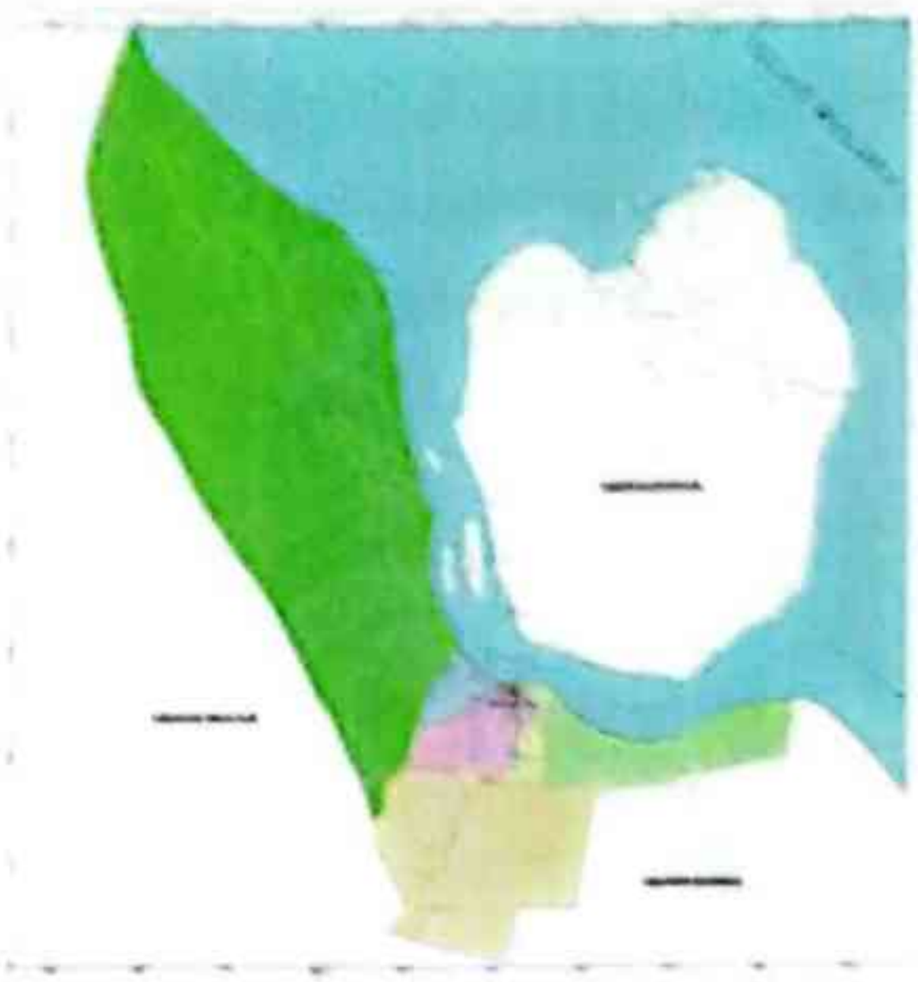
Kota Dumai terletak di Propinsi Riau, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian menjadi 5 (lima) Kecamatan

dengan bertambahnya 2 Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai.

Secara geogafis, Kota Dumai berada pada posisi 1°23"- 1°24"23" Bujur Timur dan 101°23"37"- 101°28"13" Lintang Utara. Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar 1.727,38 km^2 dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat;
- Sebelas Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar 1.1. Peta Kota Dumai



Sumber : Bidang Infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA, 2016

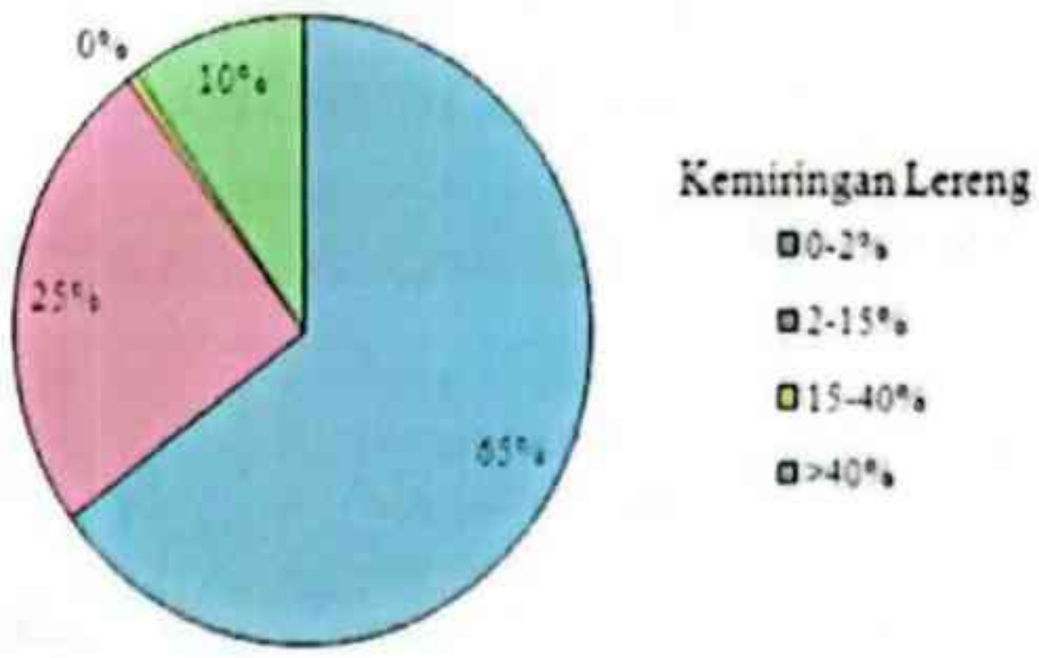
Kota Dumai dengan luas 1.727,38 Km2 terdiri dari 7 Kecamatan, yaitu Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Kota, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan dan Medang Kampai. Berdasarkan letak Geografisnya, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur pulau Sumatera. Pantai Kota Dumai terlindung oleh pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan.

a. Topografi

Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0< 3 %, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang.Kota Dumai berada pada ketinggian antara 1–50 meter di atas permukaan laut, dan secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2%, sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan

daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40%, yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Perbandingan antara luas dan kondisi kemiringan lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar I.2.

Gambar 1.2. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai



b. Geologi

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi Alluvium Muda dan Alluvium Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai. Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuarter yang membentuk lahan bergambut.

Pada umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari jenis *Podsolid* Merah Kuning dari batuan endapan dan jenis *alluvial* di kawasan yang relatif tinggi (bagian Selatan Kota Dumai), serta tanah jenis organosol (tanah bergambut) dan *gley* hamus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah di wilayah pesisir Kota Dumai. Karakter negatif lahan gambut ini memiliki bahan organik yang tinggi, volume udara tanah yang besar dan mudah menyerap air sehingga akan mengurangi daya tekan dan daya beban.

c. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai

yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 51 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 1.1. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Tabel 1.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	-
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perpat 6. Sungai Parit 7. Sungai Sepi 8. Sungai Tiram 9. Sungai Pauh 10. Sungai Bakau Tua 11. Sungai Teluk Dalam 12. Sungai Teluk Kijuk 13. Sungai Tengar Besar 14. Sungai Tengar Kecil 15. Sungai Tawar Kecil 16. Sungai Tawar Besar 17. Sungai Sempit Kecil 18. Sungai Sempit Besar 19. Sungai Tembuan 20. Sungai Tianjung 21. Sungai Santahalu 22. Sungai Penempul 23. Sungai Geniot 24. Sungai Geniot Kecil 25. Sungai Buluhala 26. Sungai Teras 27. Sungai Penyengat 28. Sungai Ilir 29. Sungai Danau 30. Sungai Hulu 31. Sungai Sembilan 32. Sungai Mampu 33. Sungai Mampu Kecil 34. Sungai Nerbit Kecil 35. Sungai Nerbit Besar 36. Sungai Paul 37. Sungai Mesjid 38. Sungai Banain 39. Sungai Saliyo 40. Sungai Bulu Ala 41. Sungai Tambuan 42. Sungai Teritib 43. Sungai Selat Mati
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	-
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	-

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2017

3. Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2016 berkisar antara 21°C-36,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2016 terjadi pada bulan Mei sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari dengan nilai berturut-turut sebesar 358,3 mm^3 dan 59,3 mm^3. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Maret dan Agustus yaitu sebanyak 9 hari. Perkembangan banyaknya hari dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2010 sampai 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dn Tabel 2.4. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 1.2 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016

Bulan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Januari	15	19	13	13	13	13	16
Februari	12	6	11	11	11	11	11
Maret	12	15	11	11	11	11	9
April	13	16	11	11	11	11	17
Mei	17	5	14	14	14	14	15
Juni	13	9	7	7	7	7	15
Juli	17	9	14	14	14	14	13
Agustus	13	8	18	18	18	18	9
September	tad	15	7	7	7	7	13
Oktober	tad	22	17	17	17	17	15
Nopember	tad	26	21	21	21	21	21
Desember	tad	14	24	24	24	24	20
	112	164	168	168	168	168	174

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2016

Tabel 1.3 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016

Bulan	Curah Hujan (mm^3)						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Januari	144,0	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6
Februari	58,0	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3
Maret	329,0	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0
April	207,0	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2
Mei	330,0	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3
Juni	331,0	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6

Bulan	Curah Hujan (mm^3)						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Juli	425,0	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4
Agustus	188,0	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7
September	tad	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7
Oktober	tad	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3
Nopember	tad	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0
Desember	tad	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5
	2.012,0	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2016

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi data oleh BPS Kota Dumai adalah 255.096 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 148 jiwa/km^2. Sedangkan berdasarkan data yang di*publish* BPS tahun 2017, jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2016 mengalami pertumbuhan dari tahun 2010 sebesar 14,43% menjadi 291.908 jiwa (51,31% laki-laki dan 48,69% perempuan) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 169 jiwa/km^2. Artinya selama periode 2010-2016, penduduk Kota Dumai semakin padat, dengan pertambahan tingkat kepadatan penduduk sebesar 21 jiwa/km^2.

Angka pertumbuhan penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan wilayah untuk menentukan rencana pembangunan baik ekonomi, sosial maupun sarana dan prasarana wilayah.



Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat pelayanan publik di tingkat kota maupun kecamatan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai dari tahun 2010 sampai tahun 2016 adalah sebesar 2,27% per tahun, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 2,48% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi di Kecamatan Dumai Kota yaitu sebesar 2,03%. Data jumlah penduduk sangat berguna untuk menentukan ambang batas (treshold) penyediaan fasilitas/sarana

dan prasarana pelayanan publik disuatu daerah sesuai dengan standard yang dikeluarkan oleh badan standarisasi nasional.

Meskipun memiliki laju pertumbuhan yang rendah, Kecamatan Dumai Kota merupakan kecamatan terpadat di Kota Dumai selama periode 2010-2016 dengan tingkat pertambahan penduduk sebesar 408 jiwa/km2. Adapun tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Dumai Kota tahun 2016 sebesar 3.603 jiwa/km2. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah berdasarkan Rancangan peraturan Daerah (ranperda) Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Kepadatan penduduk tentu akan sangat mempengaruhi penataan ruang khususnya distribusi pemukiman penduduk. Kepadatan penduduk sangat mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah baik secara positif maupun negatif. Kecamatan dengan kepada yang tinggi akan menjadi pusat kegiatan sebuah kota baik untuk pemukiman, sosial maupun ekonomi. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}}{\text{Luas wilayah}}$$

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Dumai per Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	
			2010	2016	2010	2016
1.	Bukit Kapur	200,00	38.375	44.447	192	222
2.	Medang Kampai	373,00	10.246	11.701	27	31
3.	Sungai Sembilan	975,38	27.659	31.860	28	33
4.	Dumai Barat	449,80	36.032	41.479	801	922
5.	Dumai Timur	735,00	55.106	62.932	1.160	1.324
6.	Dumai Kota	475,20	41.535	46.844	3.195	3.603
7.	Dumai Selatan	130,00	46.143	52.645	628	716

Sumber : Buku data dan informasi bappeda Tahun 2017

3. Pencapaian Sektor Prioritas Pembangunan

A. Sektor Kesehatan

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program – program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan kreativitas dan produktivitas serta mampu bersaing dan berkiprah menuju masyarakat yang madani, maka kesehatan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai. Secara gambaran umum Kesehatan, terutama berkaitan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)

❖ Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 90 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demiktian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 13,73 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 1.1 berikut ini :

3. Pencapaian Sektor Prioritas Pembangunan

A. Sektor Kesehatan

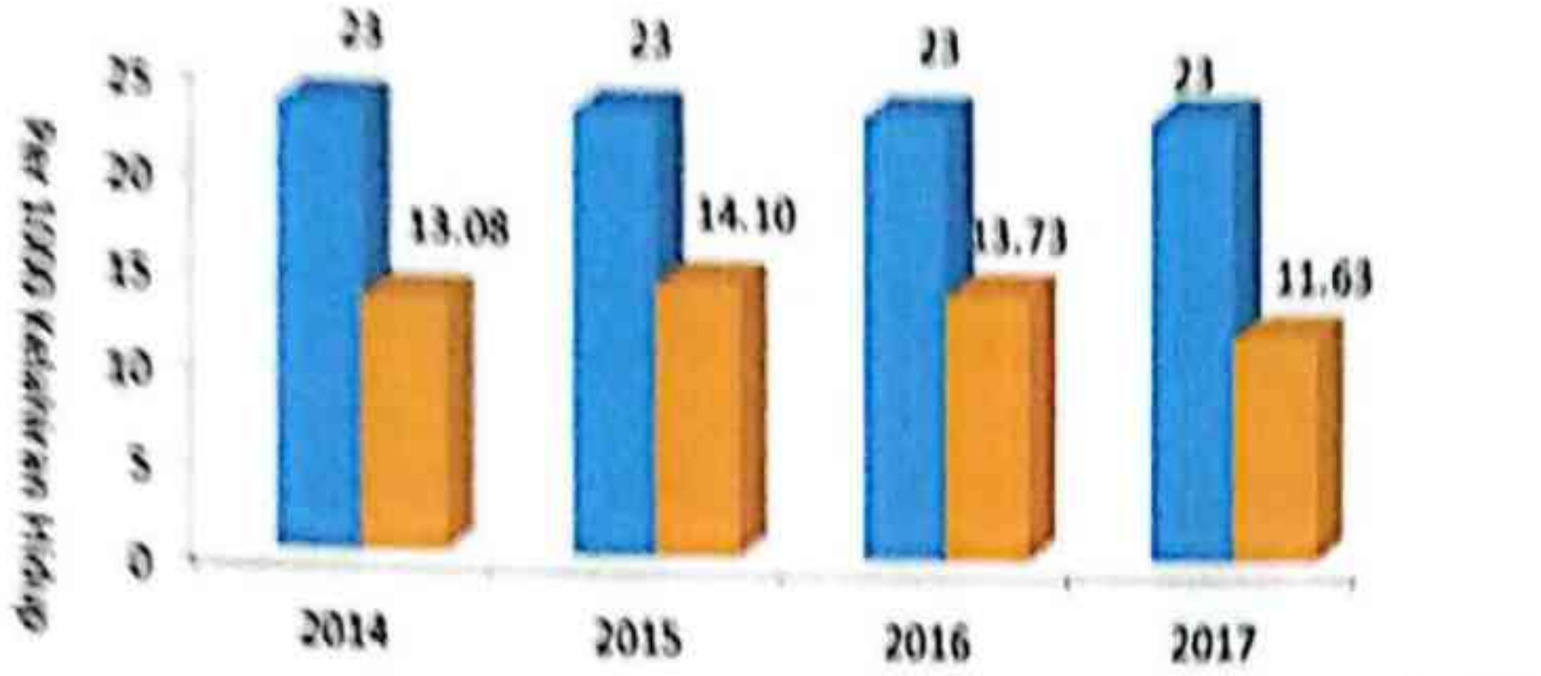
Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program - program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan kreativitas dan produktivitas serta mampu bersaing dan berkiprah menuju masyarakat yang madani, maka kesehatan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai. Secara gambaran umum Kesehatan, terutama berkaitan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)

- ❖ Angka Kematian Bayi

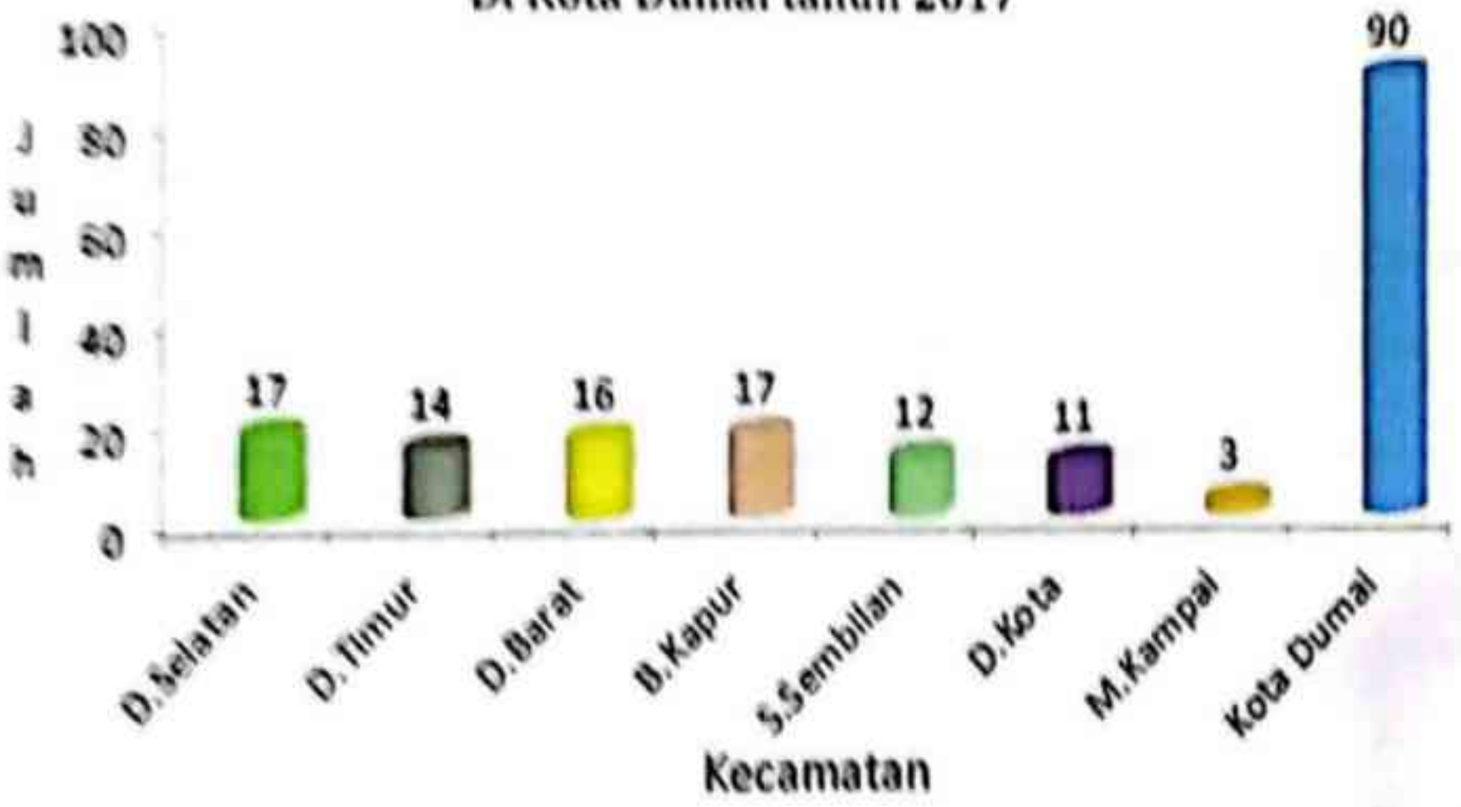
Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 90 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 13,73 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 1.1 berikut ini :

Grafik. 1.1. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2017



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan dan Bukit Kapur yakni sebanyak 17 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 16 kasus, seperti terlihat pada grafik 1.2 berikut ini :

Grafik 1.2. Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai tahun 2017



Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.

- **Angka Kematian Balita**

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 104 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2017 di Kota Dumai sebesar 13,44 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 16,88 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka

kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 1.3 berikut ini :

Grafik 1.3. Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2017



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Bukit Kapur yakni sebanyak 20 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 19 kasus, seperti terlihat pada grafik 1.4 berikut ini :

Grafik 1.4. Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2017



Penyebab kematian balita masih didominasi oleh Asfiksia dan Penyebab lain.

❖ Angka Kematian Ibu

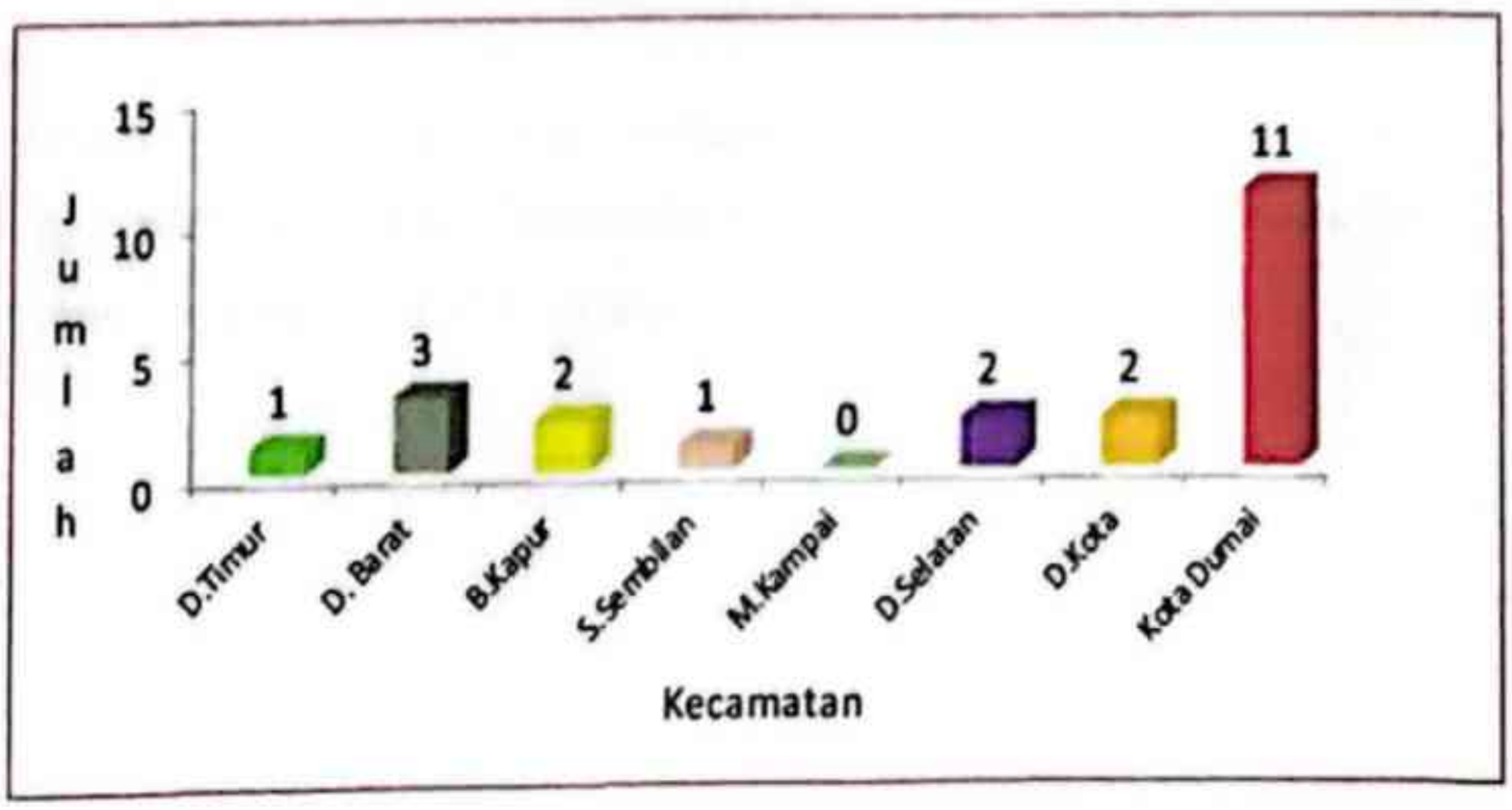
Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 11 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2017 di Kota Dumai sebesar 142,16 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, di mana angka kematian ibu sebesar 109,32 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 120 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini diatas target (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang baik). Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.5 berikut ini :

Grafik 1.5. Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2017



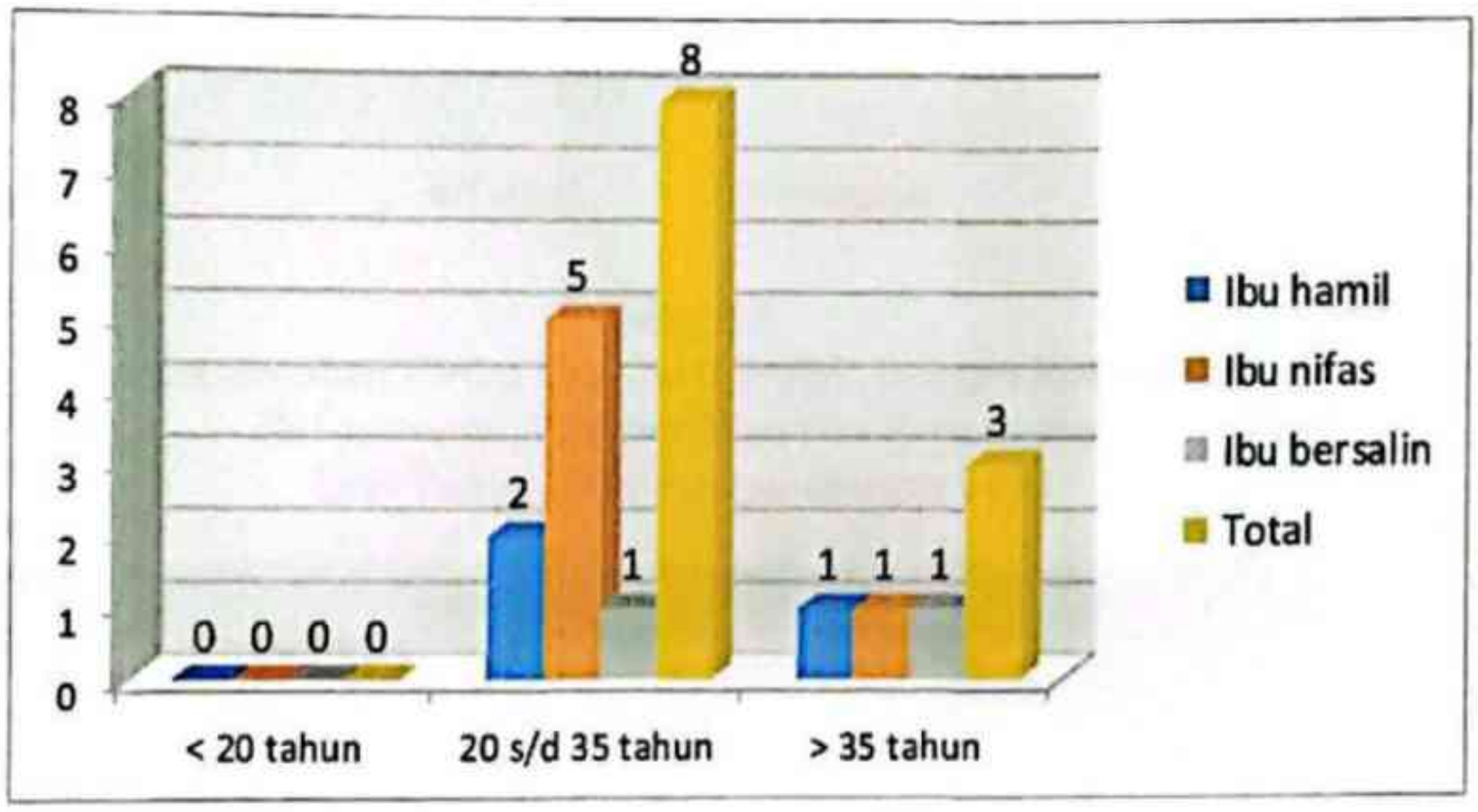
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 3 kasus, seperti terlihat pada grafik 1.6 berikut ini :

Grafik 1.6. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2017



Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena penyebab tidak langsung sebanyak 5 kasus disusul dengan pre eklmasi berat sebanyak 4 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 8 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terbanyak pada kelompok ibu nifas sebanyak 6 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.7. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur Di Kota Dumai Tahun 2017

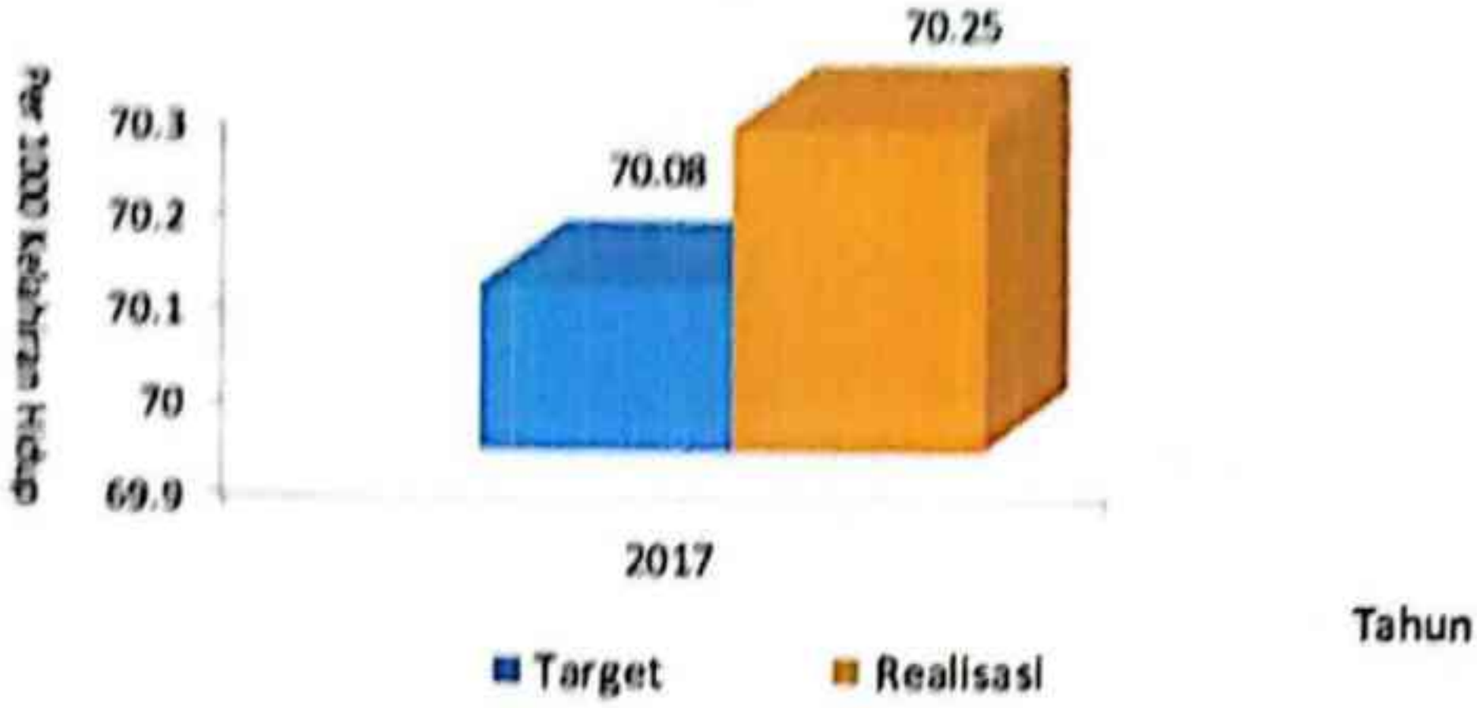


❖ Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Mulai tahun 2017, karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan mengunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2017 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 70,25 tahun (diasumsikan sama dengan tahun 2016 karena data terbaru dari BPS belum ada). Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2017 dapat di lihat pada grafik 1.8 berikut ini :

Grafik 3.8
Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai
Tahun 2017



Tabel 1.5
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru
Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2015

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2010	69,81	70,15	69,93
2.	2011	70,01	70,32	69,95
3.	2012	70,20	70,49	70,02
4.	2013	70,40	70,67	70,04
5.	2014	70,59	70,76	70,05
6.	2015	70,70*	70,93	70,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2016
* UN, World Population Prospects the 2012 revision

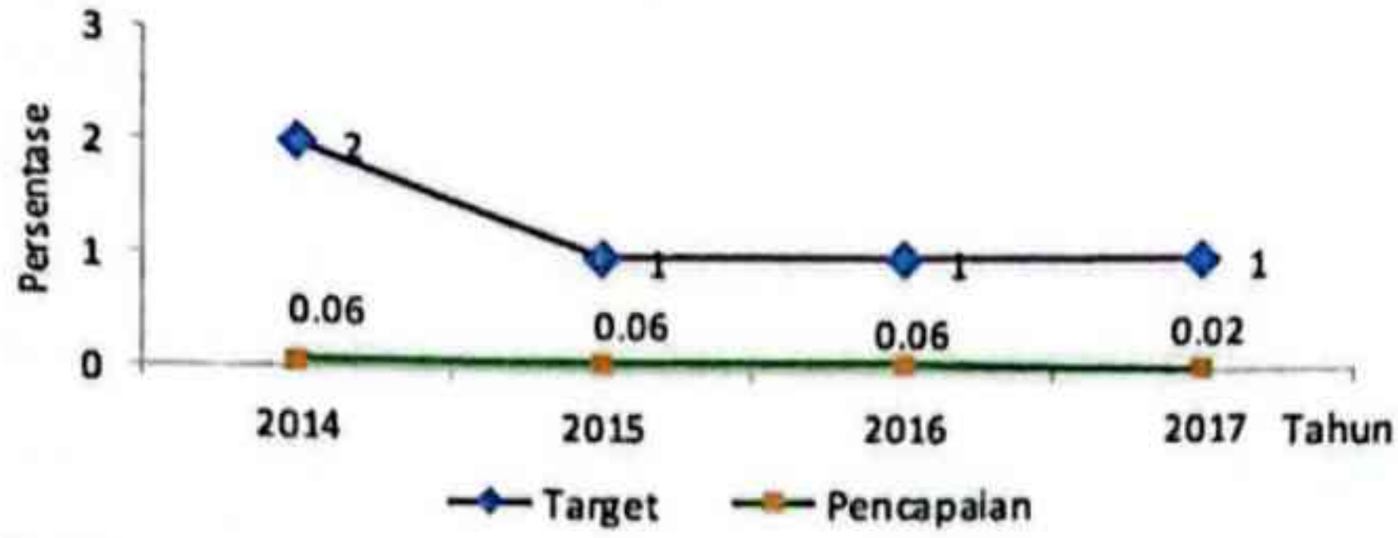
2. Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

- **Angka Kesakitan Malaria**

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 944 kasus malaria klinis. Dari 944 kasus yang ada terdapat 5 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,02 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,06 per 1.000 penduduk, terlihat pencapaiannya meningkat. Bila dibandingkan dengan target Indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat

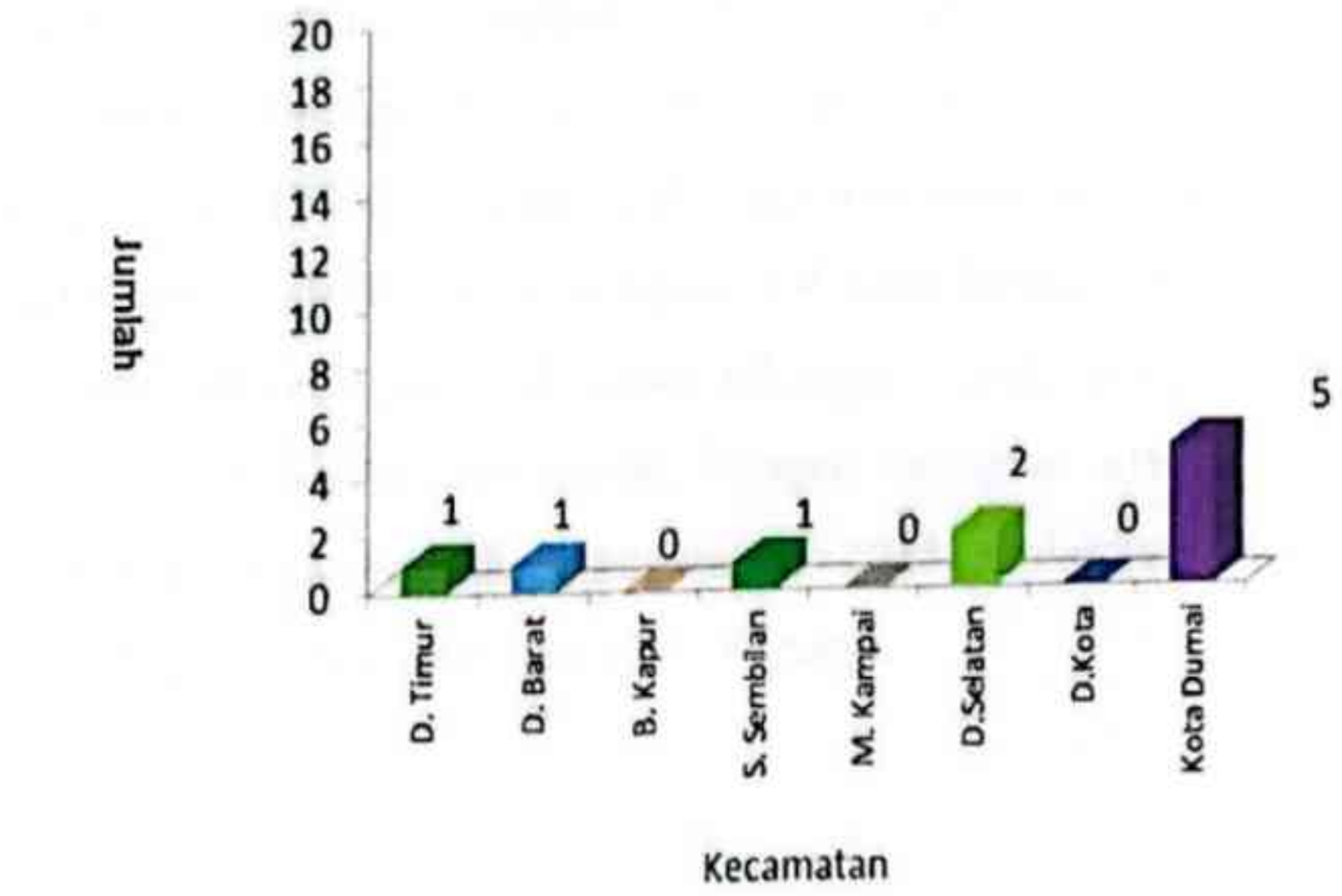
pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari grafik 1.9 dibawah ini :

Grafik 1.9
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 2 kasus (40%). Hal tersebut disebabkan tingginya mobilitas penduduk baik warga lokal maupun warga pendatang dari luar Kota Dumai dan pembukaan lahan perkebunan yang berpotensial berkembangnya nyamuk malaria. Hal ini cukup mengejutkan mengingat daerah yang selama ini dikenal dengan daerah high endemis Malaria adalah Kecamatan Sungai Sembilan. Dengan faktor resiko tersebut maka satu wilayah Kecamatan Bukit Kapur menjadi daerah high endemis Malaria. Kecamatan Sungai Sembilan merupakan kecamatan terbanyak kedua ditemukannya kasus Malaria positif yakni sebanyak 1 kasus, seperti terlihat pada grafik 1.10 berikut ini :

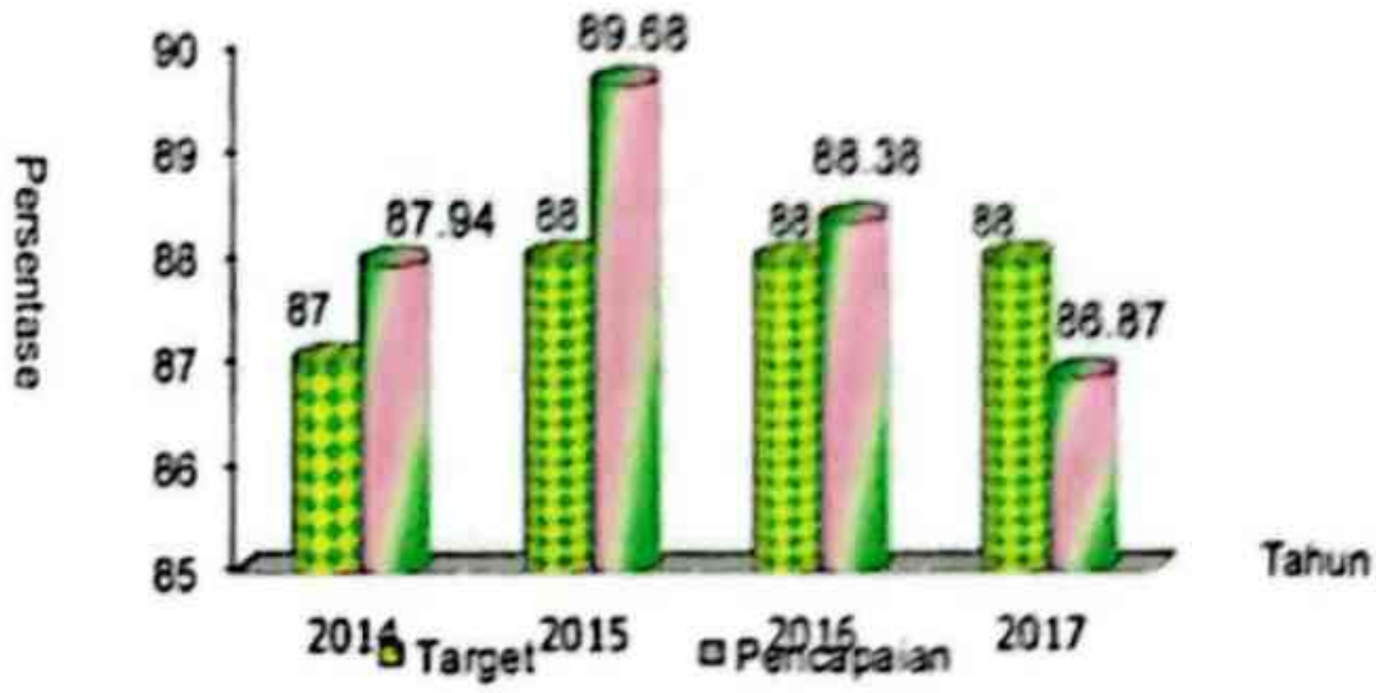
Grafik 1.10. Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2017



- Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2017 dari total 297 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 86,87%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 88,38%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2017 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan dapat dilihat dari grafik 1.11 berikut ini :

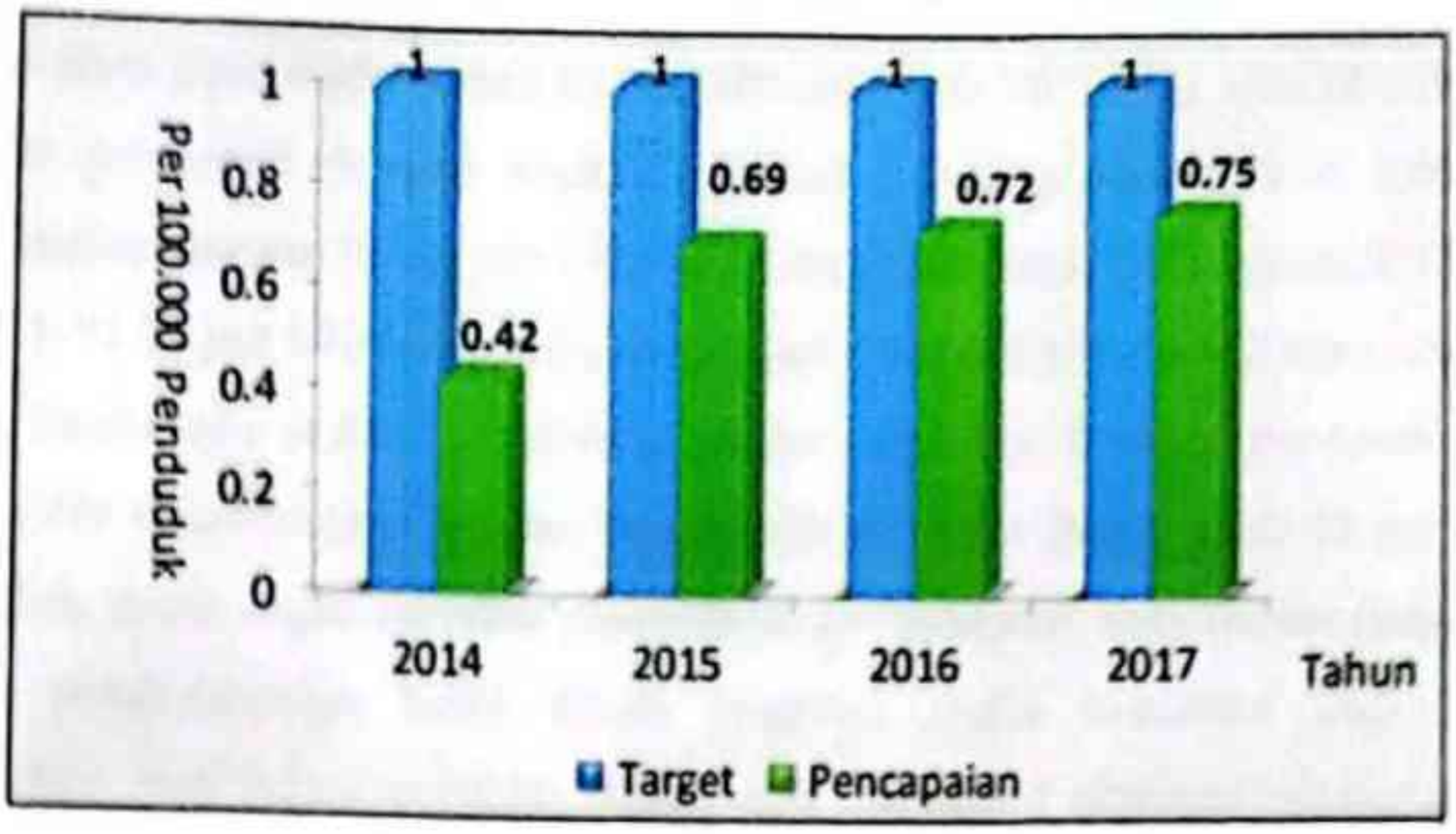
Grafik 1.11. Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +
Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017



- Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 398 kasus yang terdiri dari 341 kasus lama dan 57 kasus baru yang ditemukan tahun 2017. Dari 398 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 153 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 245 orang. Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2017 adalah sebesar 0,75% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 32.719 orang).

Grafik 1.12. Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0,72%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2017 sebesar < 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

Grafik 1.13. Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai Dari Tahun 2014 s/d 2017



- **Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)**

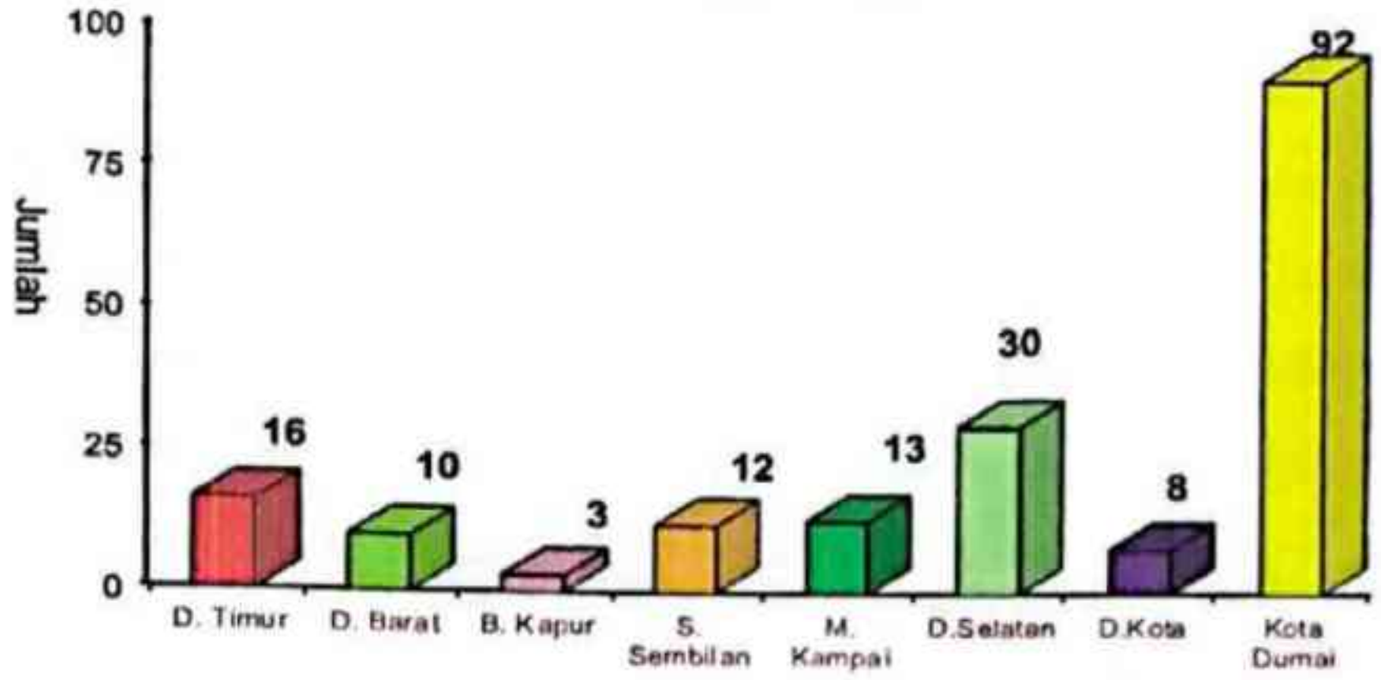
  Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2017 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 92 kasus atau IR = 30,91 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 1 orang atau CFR = 1,09%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 290 kasus atau IR = 91,58 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 2 kasus atau CFR = 0,69%, maka ada sedikit penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun bila dibandingkan dengan target Indikator Kota Dumai yaitu 59 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut dibawah target Indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti ± 80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Grafik. 1.14. Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 30 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 16 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.15 berikut ini :

Grafik 3.15. Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2017



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektit dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 100 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

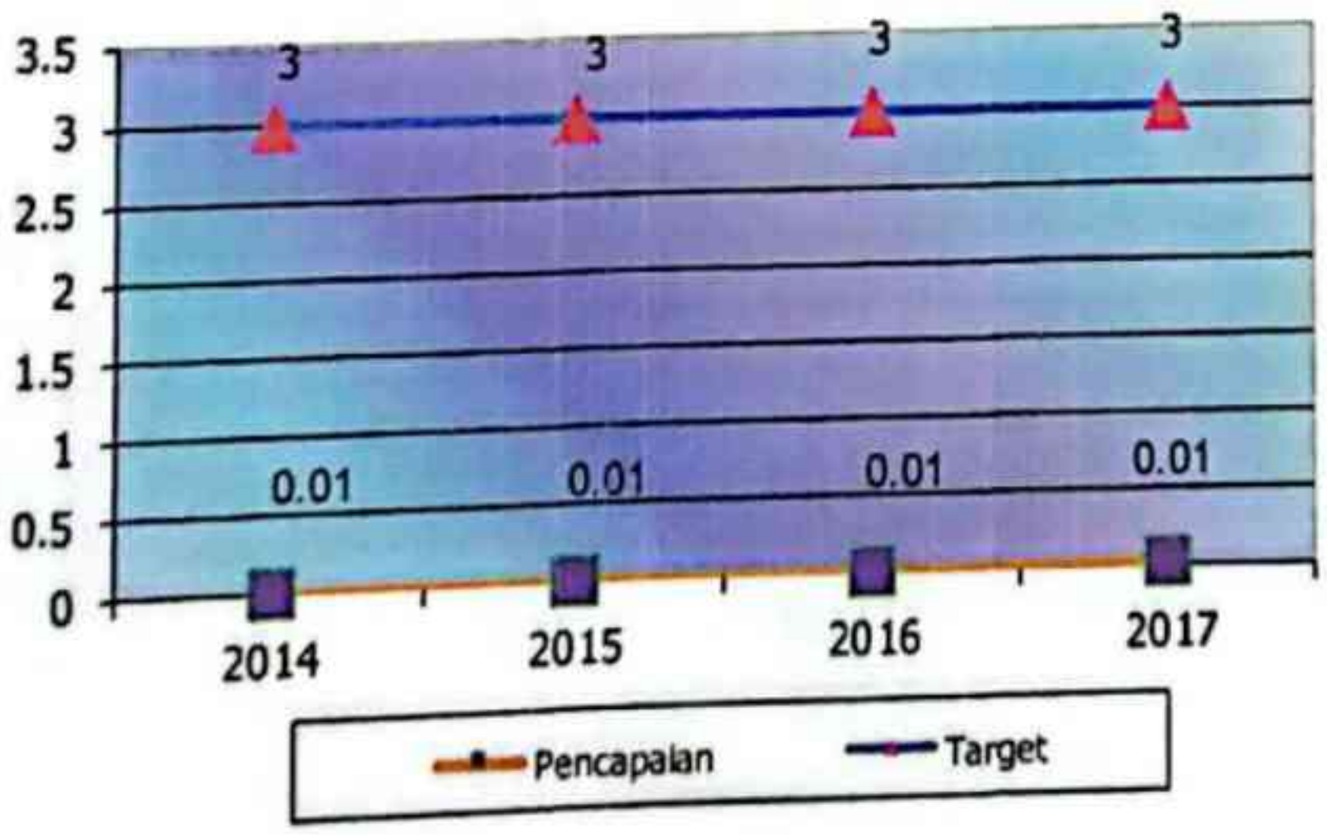
3. Meningkatnya Status Gizi

❖ Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat

badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2013 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal Ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2017 ditemukan 5 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Dumai Kota, Sungai sembilan, Medang Kampai, Purnama dan Bukit Kayu Kapur. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 0,02%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 3 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2017 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 1.16. Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2017

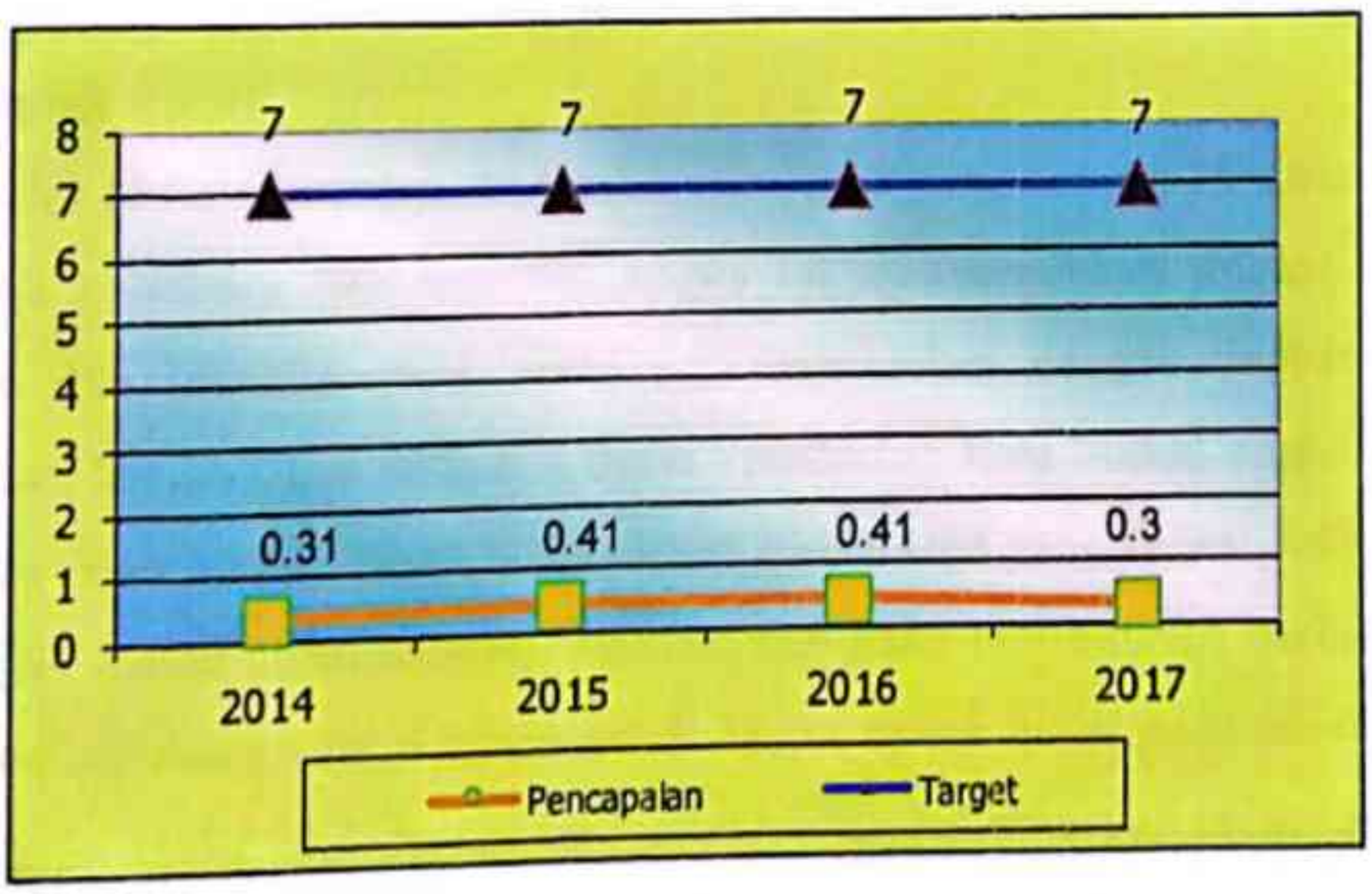


Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

❖ Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Selama tahun 2017 kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 104 kasus dari 34.278 balita yang ditimbang, sehingga persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 0,30%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 152 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,41%, terlihat ada penurunan kasus balita dengan gizi kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2017 yakni sebesar 7%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 1.17. Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang
Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2017



Melalui pelaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yakni pelacakan kasus balita dengan gizi kurang selama tahun 2017 ditemukan 232 kasus balita gizi kurang dan balita BGM. Setelah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu yaitu sebanyak 80 gram selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pada akhir tahun 2017 jumlah kasus

balita gizi kurang dan balita BGM berkurang menjadi 38 kasus balita gizi kurang. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi.

B. Sektor Pendidikan

Di bidang pendidikan ini, pihaknya juga telah memperbaiki kualitas pendidikan yang diwujudkan melalui kebijakan alokasi anggaran sesuai amanah UU nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dalam hal ini telah meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program serta kegiatan yang menunjang kualitas serta kuantitas mutu pendidikan, diantaranya dengan memberikan bantuan dana beasiswa serta meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Untuk itu pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentuka keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum persoalan yang dihadapi pada sektor pendidikan di kota dumai, terutama berkaitan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2010 hingga tahun 2016 menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2010 angka melek huruf sebesar 99,31%, dan pada tahun-tahun berikutnya, selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Angka melek huruf pada tahun 2013-2016 konstan pada angka 99,43%, hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai.

Grafik. 1.18. Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai



2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

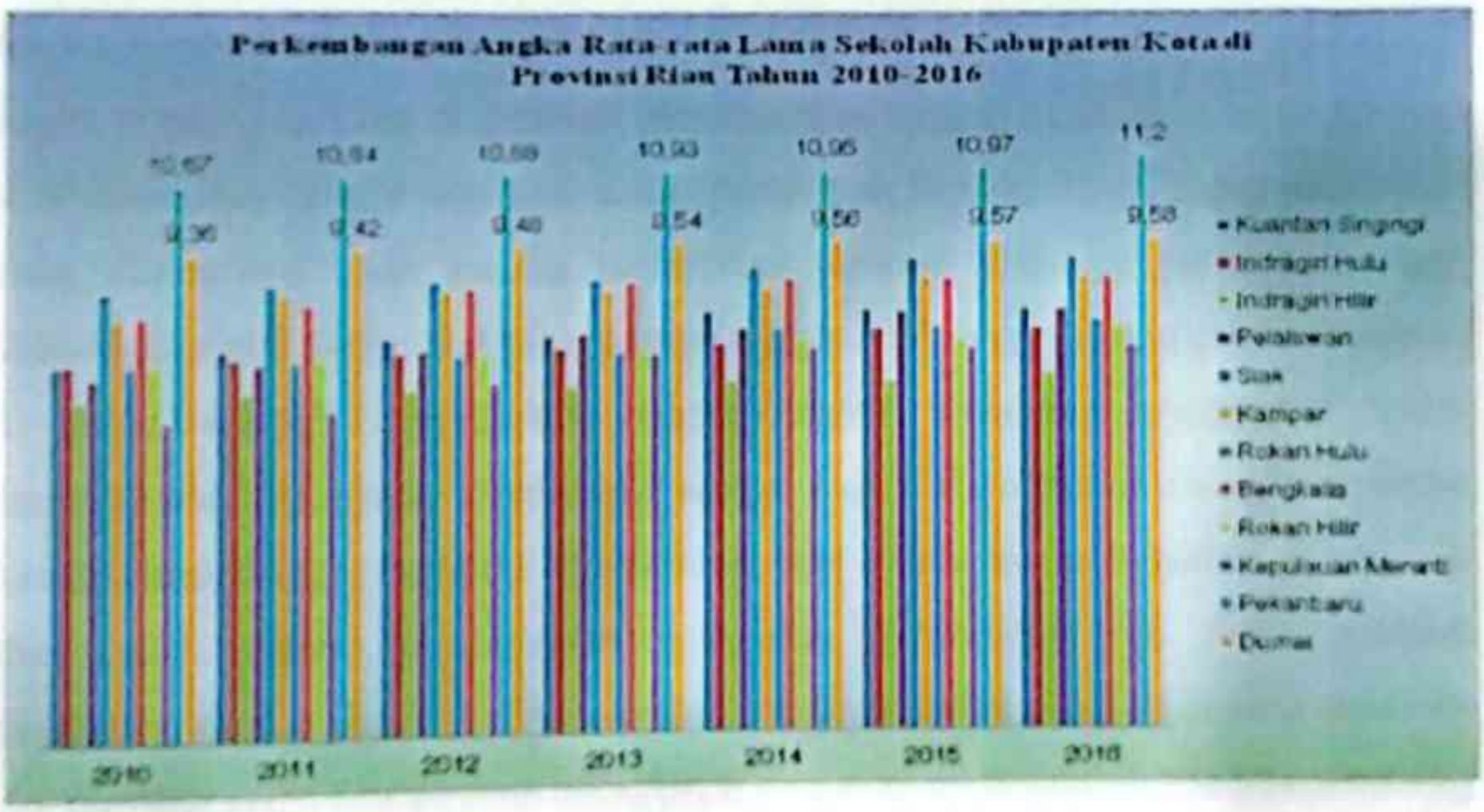
Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partsipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijasah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2016 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Gambar 2.17 dan Gambar 2.18. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Dumai terus meningkat dalam membiayai pendidikan mereka. Untuk tingkat Provinsi Riau, angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai menempati urutan nomor 2 setelah Kota Pekanbaru.

Gambar 1.19. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017



Grafik 1.20 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017



3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 1.6. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APK SD/MI	113,80	115,05	>100	>100	107,27	107,20	107,79
APK SMP/MTs	108,38	110,20	>100	>100	89,67	91,58	100,18
APK SMA/SMK/MA	84,22	85,37	75,37	85,68	73,45	78,36	87,97

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2010 hingga tahun 2016 pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA menunjukkan tren perkembangan yang sedikit fluktuatif. Secara umum, pada tahun 2016 APK Kota Dumai untuk semua jenjang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada APK SMP/MTs yaitu dari 91,58 pada tahun 2015 meningkat menjadi 100,18 pada tahun 2016.

4. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam persentase. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu misalnya perguruan tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Tabel 1.7. Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
di Kota Dumai Tahun 2011-2016

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tdk/Belum Pernah Sekolah	28,10%	NA	NA	32,10%	34,30%	9,38%
Tidak/Belum tamat SD	12,10%			11,00%	10,30%	
SD/MI/Sederajat	17,80%			16,80%	16,20%	30,70%

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SLPT/MTs	13,00%			12,20%	12,00%	13,34%
SMA/SMK	23,20%			22,40%	21,90%	36,74%
D I/II	0,70%			0,60%	0,60%	0,85%
AKADEMI/D III	1,80%			1,80%	1,70%	2,54%
S1/Sarjana	3,10%			3,00%	2,90%	6,45%
S2/S3/Pasca Sarjana	0,10%			0,10%	0,10%	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum sampai tahun 2016 persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SMA/SMK. Selama 6 tahun, mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Pada tahun 2016 sebanyak 36,74% penduduk Kota Dumai menamatkan pendidikan SMA/SMK. Disamping itu jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali menurun drastis dari ±45% menjadi 9,38%. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dua hal yang patut menjadi perhatian pemeritah Kota Dumai diantaranya: (1) masih ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau belum lulus jenjang pendidikan SD; dan (2) masih rendahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3. Rendahnya persentase lulusan pendidikan tinggi ini bisa disebabkan oleh kurangnya perguruan tinggi yang tersedia di Kota Dumai, juga rendahnya akreditasi perguruan tinggi yang ada sehingga banyak lulusan SMA/SMK/MA yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kota Dumai.

5. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang oenddikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

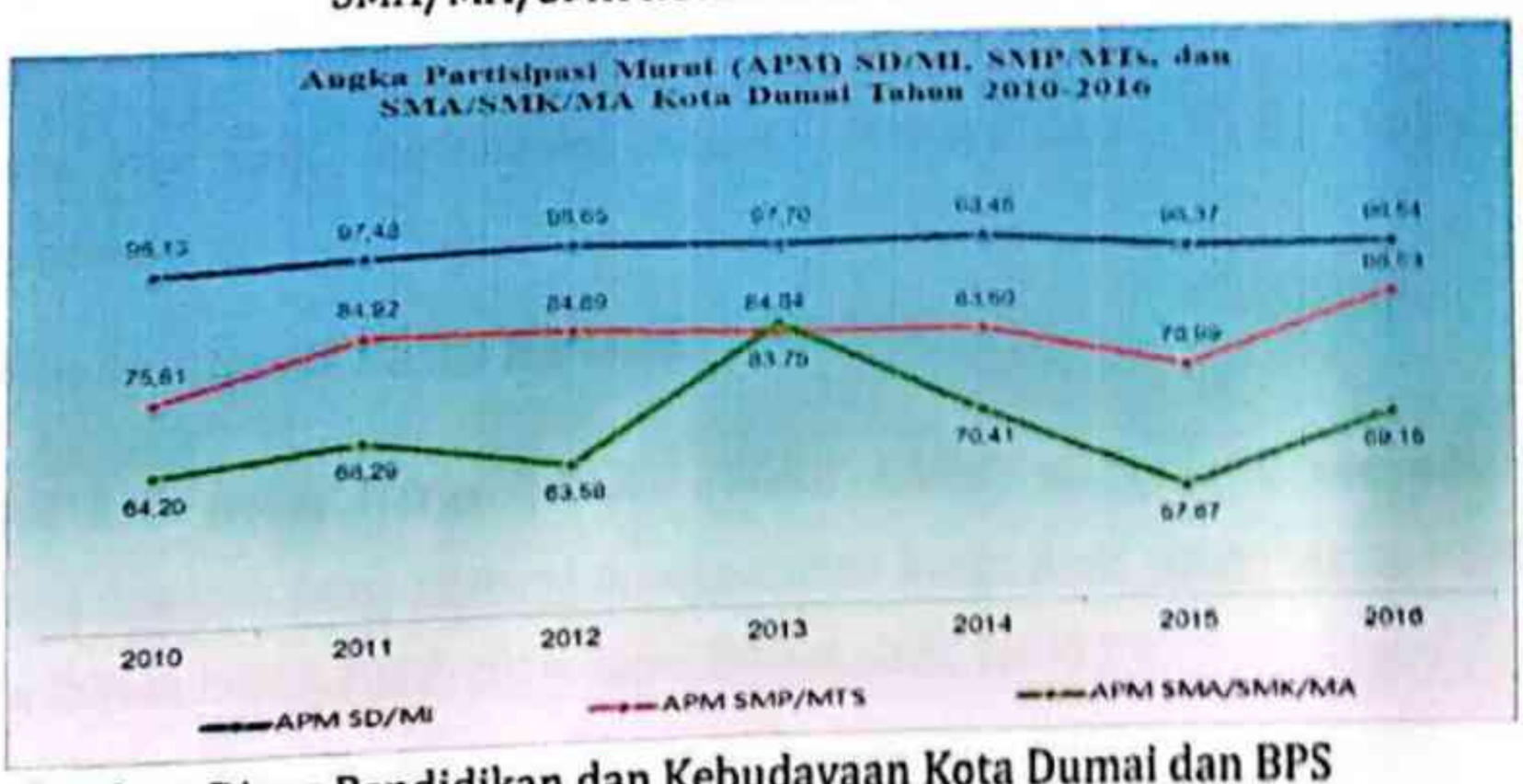
Tabel 1.8. Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2010-2016

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APM SD/MI	96,13	97,48	98,65	97,70	98,45	96,37	96,54
APM SMP/MTs	75,81	84,92	84,89	83,75	83,60	76,99	88,53
APM SMA/SMK/MA	64,20	68,29	63,58	84,84	70,41	57,67	69,15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2010 hingga tahun 2016 fluktuatif. Pada tahun 2010, nilai APM SD/MI adalah sebesar 96,13%, kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif sampai tahun 2016 dengan angka partisipasi murni di tahun 2016 sebesar 96,54%. Sama halnya dengan nilai APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2010-2016. Secara umum nilai APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2010 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.25 diatas. Disamping itu, diantara ketiga jenjang pendidikan, nilai APM yang terendah ada pada jenjang SMA/SMK/MA. Berfluktuatifnya nilai APM tersebut, terutama untuk jenjang SMA sederajat, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata sampai ke pinggiran Kota Dumai sehingga membuat orang tua kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Befluktuatuifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA.

Gambar 1.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2016



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dan BPS

C. Sektor Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Dari rangkaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2017 di sektor Industri dan Perdagangan di Kota Dumai telah memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan dunia usaha, bila dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha sektor industri dan perdagangan serta pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, meskipun dalam persentase yang rendah. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan dunia usaha di Kota Dumai dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut ini :

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah, terdapat dua tipe perhitungan PDRB yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Sedangkan untuk menghitung PDRB terdapat tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan produksi; (2) pendekatan pendapatan; dan (3) pendekatan pengeluaran.

Data PDRB yang disajikan pada buku ini mengGrafik kan perekonomian di masa lalu, yang sedang terjadi, dan prediksi di masa yang akan datang, dimana data-data yang digunakan adalah data-data yang di*publish* oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 sampai tahun 2017 yang disajikan dalam 17 sektor perekonomian. Pada buku ini, data PDRB digunakan untuk menghitung tren pertumbuhan wilayah, struktur dan transformasi perekonomian wilayah, struktur perekonomian regional (*share regional*), *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), investasi yang dibutuhkan.

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mengGrafik kan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB ADHB Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.9

Tabel 1.9. PDRB ADHB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

NO.	SEKTOR/SUB SEKTOR	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.247.513,76	1.290.663,15	1.437.574,71	1.551.170,34	1.687.641,38
2.	Pertambangan dan Penggalian	90.719,37	93.218,95	108.904,95	120.471,72	121.859,63
3.	Industri Pengolahan	9.345.365,12	10.909.915,76	12.499.495,37	13.521.271,09	15.058.108,05
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7.674,18	7.555,57	11.694,09	18.026,24	24.522,43
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.520,36	3.454,51	3.653,86	4.044,55	4.293,05
6.	Konstruksi	2.337.085,15	2.556.624,71	2.562.176,39	2.869.884,03	3.214.657,79
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.861.649,38	4.014.813,24	4.589.145,67	4.691.523,15	5.000.294,68
8.	Transportasi dan Pergudangan	551.241,25	615.012,00	727.106,64	807.763,79	877.796,94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126.321,93	162.081,92	200.381,58	235.071,24	260.520,57
10.	Informasi dan Komunikasi	173.009,54	198.535,24	234.989,02	270.710,40	294.246,73
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	462.454,81	578.397,53	366.129,13	355.025,11	365.887,32
12.	Real Estate	92.715,08	100.011,55	113.119,61	127.215,13	134.709,46
13.	Jasa Perusahaan	965,13	1.070,51	1.223,74	1.419,08	1.554,95
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	453.573,61	474.552,02	494.473,40	524.615,72	541.616,22
15.	Jasa Pendidikan	89.696,05	96.837,53	122.921,41	142.978,73	149.543,32
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29.852,50	33.349,65	37.775,23	46.880,43	49.787,22
17.	Jasa lainnya	83.006,22	95.672,32	117.702,05	142.498,86	158.356,28
PDRB ADHB		**18.956.363,44**	**21.231.766,16**	**23.628.466,85**	**25.430.569,61**	**27.945.396,02**

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai)

PDRB ADHB digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi wilayah, struktur dan transformasi ekonomi wilayah.

2. Analisis Struktur dan Transformasi (Pergeseran) Ekonomi Wilayah

Struktur ekonomi wilayah dapat diGrafik kan dari data distribusi persentase PDRB. Struktur perekonomian wilayah, khususnya menurut lapangan usaha memiliki dasar teoritis tentang transformasi ekonomi wilayah, dimana perkembangan wilayah umumnya diikuti dengan perubahan peran sektor dalam perekonomian regional. Transformasi struktur ekonomi merupakan proses pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Transformasi ekonomi dapat terjadi disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan ekonominya. Analisis struktur dan transformasi ekonomi wilayah bermanfaat untuk: (1) mengetahui peran perekonomian sub wilayah terhadap wilayah yang lebih besar; (2) peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah; (3) identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi; (4) analisis proses dan tahap transformasi struktural; dan (5) mampu menunjukkan level atau tingkat industrialisasi suatu wilayah. Analisis struktur ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

3. Struktur Perekonomian Regional (*Share Regional*)

Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Perkembangan peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2012-2016 terlihat pada Tabel 1.10 dan Grafik 1.22

Tabel 1.10. Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

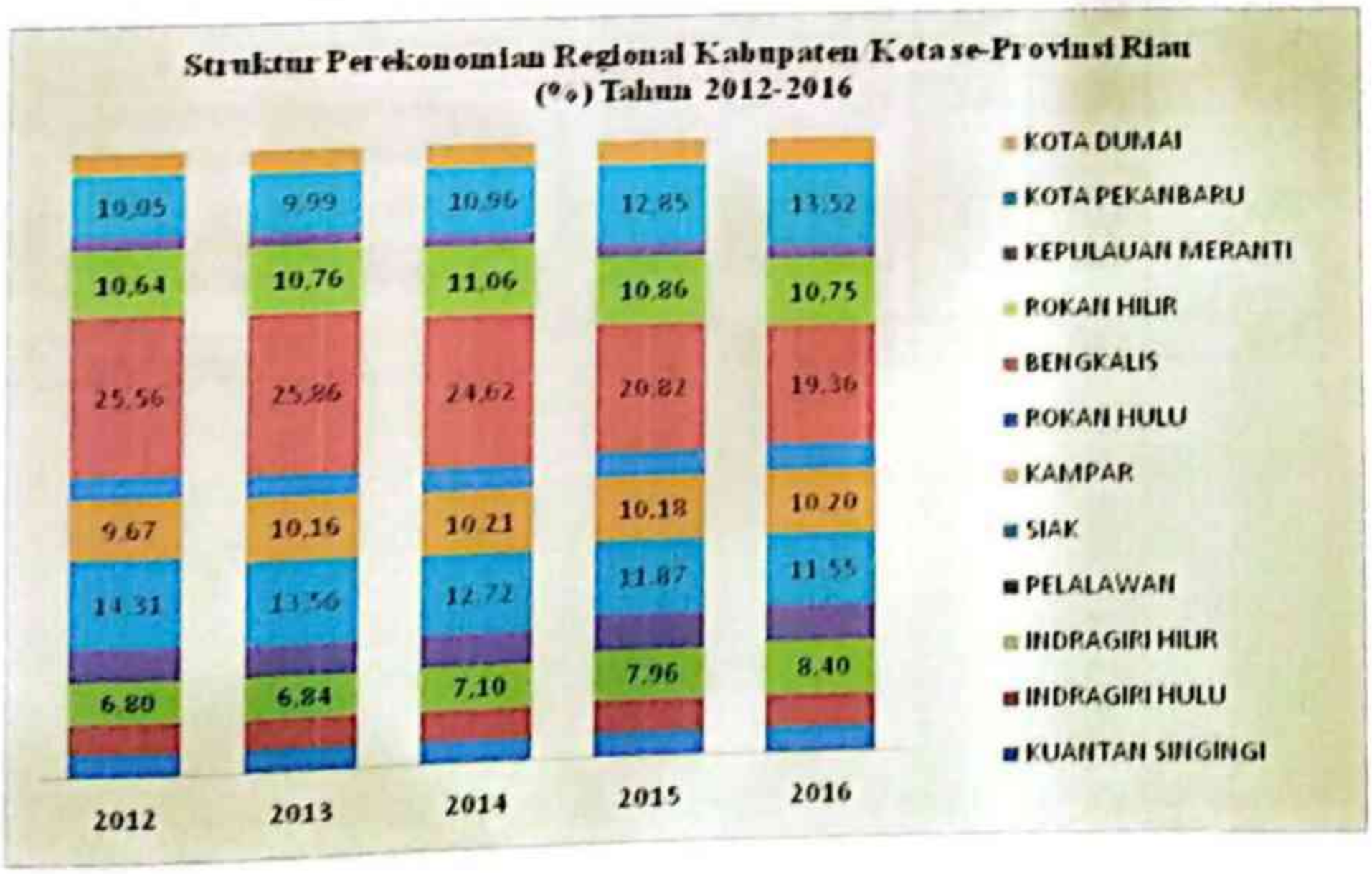
Tahun	PDRB Kota Dumai (Juta Rupiah)	PDRB Provinsi Riau (Juta Rupiah)	*Share Regional* (%)
2012	18.956.363,45	558.492.724,75	3,39
2013	21.231.766,16	607.498.449,77	3,49
2014	23.628.466,85	679.387.741,74	3,48
2015	25.430.569,61	652.386.422,51	3,90
2016	27.945.396,02	682.351.091,85	4,10

Grafik.1.22. Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016



Dari tabel dan Grafik di atas terlihat bahwa peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan dengan besar kontribusi rata-rata 3-4%, namun besarnya kontribusi tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 2012-2016 berturut-turut adalah Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, seperti yang terlihat pada Grafik 1.23.

Grafik 1.23. Struktur Perekonomian Regional (*Share Regional*) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2012-2016



4. Struktur Perekonomian Sektoral (*Share Sektoral*)

Struktur perekonomian sektoral digunakan untuk menganalisis peran sektor dalam pembangunan wilayah. Analisis dominasi peran suatu sektor dalam perekonomian dapat menunjukkan basis perekonomian wilayah. Struktur perekonomian sektoral Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.11 dan Grafik 1.24.

Tabel 1.11. Struktur Perekonomian Sektoral (*Share Sektoral*) Kota Dumai Tahun 2012-2016

No.	Sektor	Kontribusi Sektoral (%)					Pergeseran (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	-0,54
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,44	0,46	0,47	0,44	-0,04
3.	Industri Pengolahan	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	4,58
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
6.	Konstruksi	12,33	12,04	10,84	11,29	11,50	-0,83
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	-2,48
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,91	2,90	3,08	3,18	3,14	0,23
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67	0,76	0,85	0,92	0,93	0,27
10.	Informasi dan Komunikasi	0,91	0,94	0,99	1,06	1,05	0,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,72	1,55	1,40	1,31	-1,13
12.	Real Estate	0,49	0,47	0,48	0,50	0,48	-0,01
13.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	2,24	2,09	2,06	1,94	-0,45
15.	Jasa Pendidikan	0,47	0,46	0,52	0,56	0,54	0,06
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,02
17.	Jasa lainnya	0,43	0,45	0,50	0,56	0,57	0,13

Grafik 1.24. Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai
Tahun 2012-2016 (%)



Dari tabel dan Grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2016 struktur perekonomian Kota Dumai didominasi oleh peran sektor Industri pengolahan. Artinya, identifikasi awal sektor utama di Kota Dumai sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah **sektor Industri pengolahan.**

Peran sektor industri dapat digunakan untuk menilai level Industrialisasi suatu wilayah, misalnya dengan menggunakan criteria dari UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*), yaitu :

1. PDB atau PDRB sektor industri < 10%, dikelompokkan sebagai negara atau wilayah non industri;
2. PDB atau PDRB sektor industri 10-20%, menunjukkan negara atau wilayah memasuki proses industrialisasi;
3. PDB atau PDRB sektor industri 20-30%, berarti negara atau wilayah tergolong semi industri;
4. PDB atau PDRB sektor industri > 30%, masuk dalam kategori negara atau wilayah industri.

Dari Tabel dan Grafik dapat dilihat bahwa kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terus mengalami

peningkatan dengan besar kontribusi rata-rata >50%, berdasarkan kriteria dari UNIDO Kota Dumai masuk dalam kategori **wilayah industri.**

5. Transformasi Ekonomi Wilayah

Struktur perekonomian wilayah memiliki dasar teoritis tentang transformasi ekonomi wilayah, dimana perkembangan wilayah umumnya diikuti dengan perubahan peran sektor dalam perekonomian regional. Transformasi struktur ekonomi merupakan proses pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan lapangan usaha, maka sektor-sektor ekonomi dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:

1. Sektor Primer, terdiri dari: (1) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan (2) sektor pertambangan dan penggalian.
2. Sektor Sekunder, terdiri dari: (1) sektor industri pengolahan; (2) sektor pengadaan listrik dan gas; (3) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan (4) sektor konstruksi.
3. Sektor Tersier, terdiri dari: (1) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (2) sektor transportasi dan pergudangan; (3) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) sektor informasi dan komunikasi; (5) sektor jasa keuangan dan asuransi; (6) sektor real estate; (7) sektor jasa perusahaan; (8) sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; (9) sektor jasa pendidikan; (10) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (11) sektor jasa lainnya.

Jika dikelompokkan ke dalam 3 kelompok utama , maka besarnya pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 1.12.

Tabel 1.12 Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2012-2016
Berdasarkan 3 (Tiga) Kelompok Sektor Utama

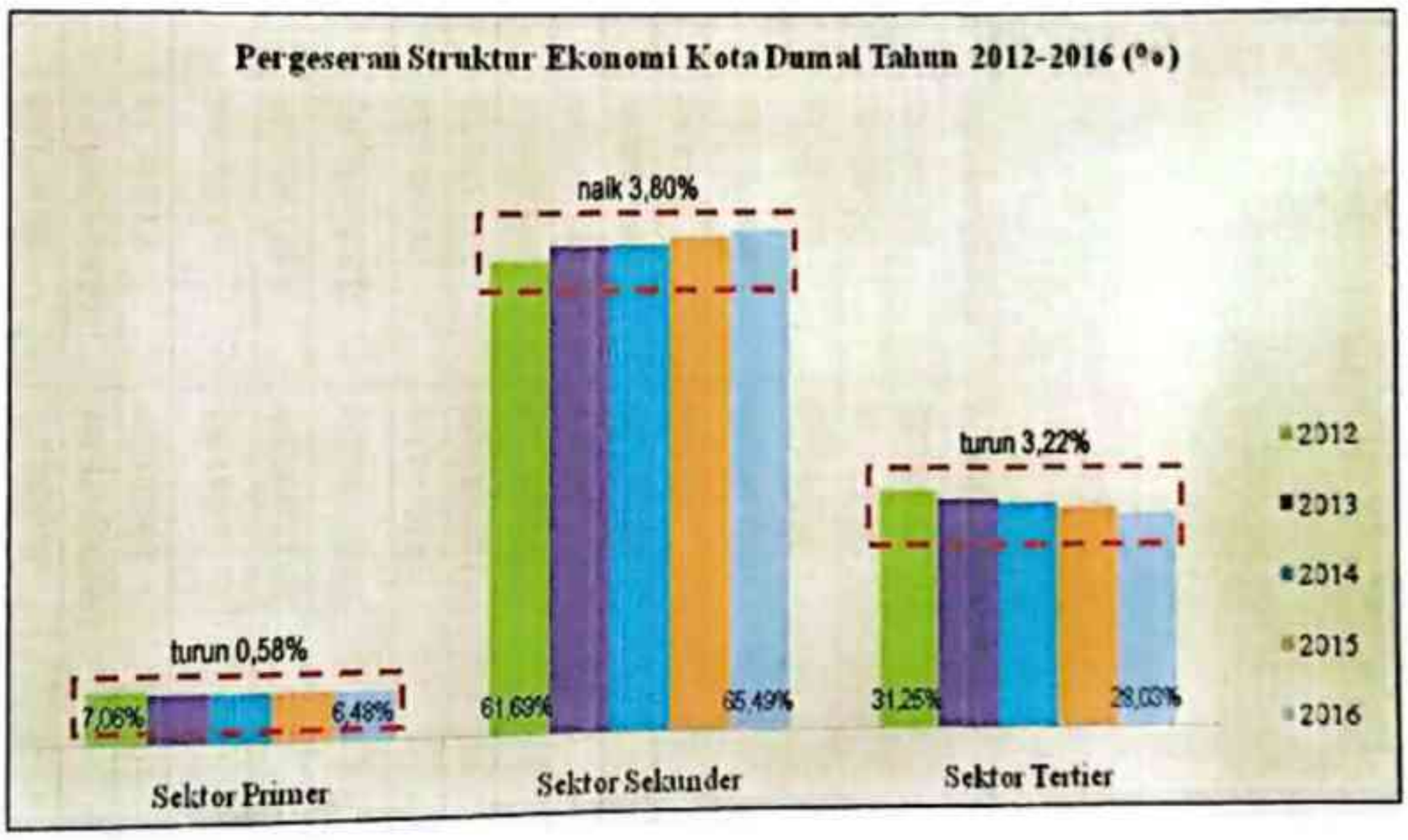
No	Sektor	Kontribusi Sektoral (%)					Pergeseran (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Sektor Primer	7,06	6,52	6,54	6,57	6,48	-0,58
2.	Sektor Sekunder	61,69	63,48	63,81	64,54	65,49	3,80
3.	Sektor Tersier	31,25	30,00	29,65	28,89	28,03	-3,22

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa peran sektor sekunder mendominasi peran sektoral pada PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor sekunder ini terus meningkat

dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dengan total pergeseran selama kurun waktu 2012-2016 sebesar 3,80%. Disisi lain, terlihat bahwa peran sektor primer dan tersier terus mengalami penurunan dengan total pergeseran masing-masing selama kurun waktu 2012-2016 berturut-turut adalah sebesar -0,58% dan -3,22%. Dari kondisi ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor sekunder merupakan sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai dengan kontribusi di atas 61% setiap tahunnya, namun peran sektor primer dan tersier tetap harus dikembangkan karena sektor primer berperan sebagai sumber input pada sektor sekunder, dan sektor tersier berperan dalam peningkatan output sektor sekunder. Besarnya pergeseran struktur ekonomi Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 4.4.

Grafik 1.25. Pergeseran Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016 (%)
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)



PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

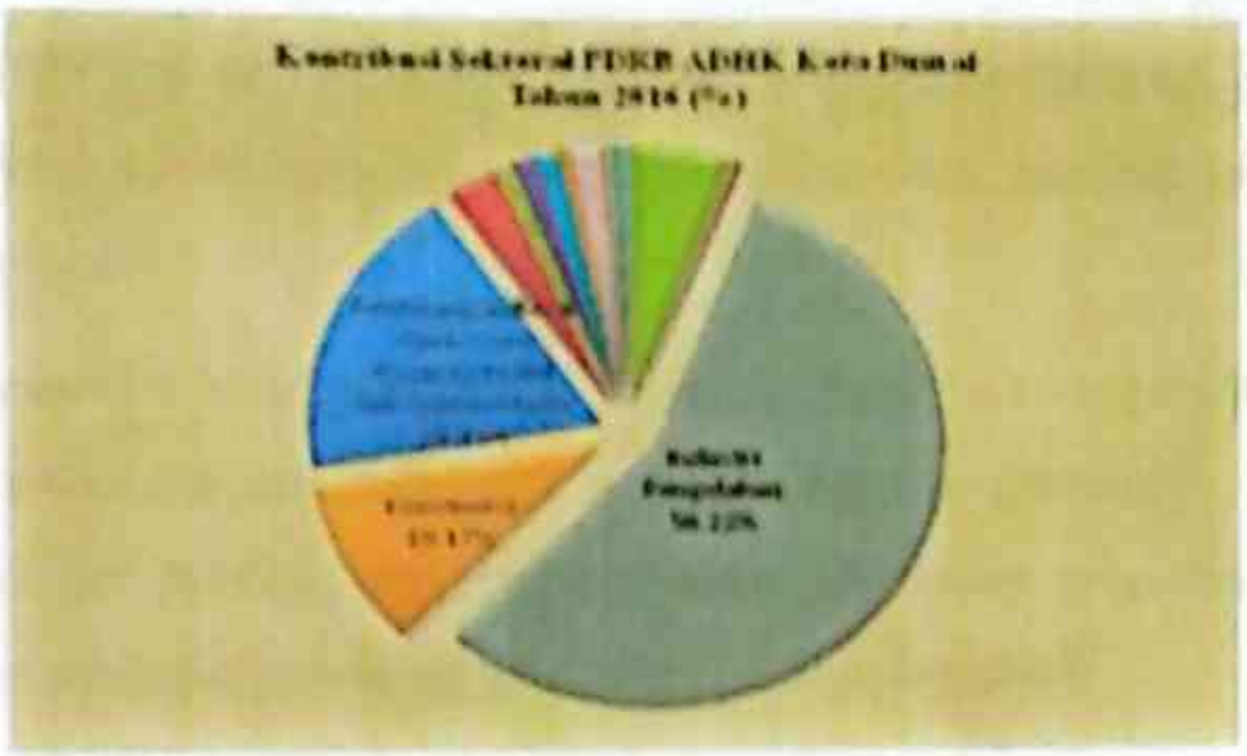
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana tahun dasar yang digunakan pada buku ini adalah tahun dasar 2010. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) serta investasi yang dibutuhkan. PDRB ADHK Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13. PDRB ADHK 2010 Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

NO.	SEKTOR/SUB SEKTOR	NILAI PDRB ADHK 2010 (JUTA RUPIAH)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.131.619,66	1.119.969,79	1.138.071,39	1.139.159,31	1.152.198,89
2.	Pertambangan dan Penggalian	86.416,17	86.479,50	87.258,58	87.421,17	83.885,46
3.	Industri Pengolahan	10.035.476,89	10.414.550,79	11.059.234,35	11.357.155,83	12.069.822,54
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.521,20	11.612,14	13.196,96	14.483,65	17.107,96
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.341,93	3.363,44	3.428,96	3.523,70	3.517,99
6.	Konstruksi	2.117.406,69	2.181.412,05	2.081.314,46	2.119.777,32	2.184.087,17
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.652.938,24	3.735.616,92	3.771.270.34	3.776.043,56	3.887.613,26
8.	Transportasi dan Pergudangan	503.239,11	537.461,38	590.801,20	602.752,39	632.138,13
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	123.319,23	134.378,76	146.744,72	150.191,31	154.066,50
10.	Informasi dan Komunikasi	170.547,14	206.134,11	229.294,86	245.697,40	255.850,29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	397.959,44	471.332,89	285.154,19	265.536,84	265.883,62
12.	Real Estate	83.055,84	86.988,13	90.248,56	94.773,07	96.113,61
13.	Jasa Perusahaan	831,69	883,50	958.60	1.032,15	1.069,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	412.483,99	419.717,32	421.465,77	429.988,77	430.683,13
15.	Jasa Pendidikan	78.210,66	82.520,25	89.917,60	94.631,35	95.277,88
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26.531,16	28.650,41	29.384.74	32.305,65	32.586,29
17.	Jasa lainnya	75.946,65	84.596,52	94.630,46	102.020,06	106.501,69
PDRB ADHK		**18.909.845,69**	**19.605.667,87**	**20.132.375,74**	**20.516.493,53**	**21.468.403,79**

Sama seperti struktur pembentuk PDRB ADHB, dari tabel di atas terlihat bahwa tiga sektor utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB ADHK Kota Dumai berturut-turut adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi. Adapun besaran masing-masing kontribusi sektor tersebut seperti terlihat pada Grafik 4.5.

Grafik 1.26. Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2016



Dari Grafik di atas terlihat bahwa pada PDRB ADHK Kota Dumai tahun 2016 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya yaitu sebesar 56,22%. Dua sektor lain yang memberikan kontribusi besar selain sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 18,11% dan sektor konstruksi 10,17 %. Perkembangan nilai PDRB ADHK Kota Dumai tahun 2010-2016 dapat dilihat pada Grafik 1.27..



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PDRB ADHK ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) serta investasi yang dibutuhkan.

6. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;
2. Menyusun tipologi perkembangan wilayah (Tipologi Klassen);
3. sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. Sebagai dasar bagi perumusan kebutuhan investasi;
6. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat seperti yang tersaji pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai
Tahun 2012-2016

No	Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) Tahunan (%)					r Rata-rata (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,06	-1,03	1,62	0,10	1,14	0,45
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,01	0,07	0,90	0,19	-4,04	-0,74
3.	Industri Pengolahan	2,70	3,78	6,19	2,69	6,28	4,72
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	10,37	13,65	9,75	18,12	12,92
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	0,64	1,95	2,76	-0,16	1,29
6.	Konstruksi	3,73	3,02	-4,59	1,85	3,03	0,78
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,08	2,26	0,95	0,13	2,95	1,57
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,34	6,80	9,92	2,02	4,88	5,87
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,20	8,97	9,20	2,35	2,58	5,72
10.	Informasi dan Komunikasi	17,88	20,87	11,24	7,15	4,13	10,67
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	36,21	18,44	-39,50	-6,88	0,13	-9,59
12.	Real Estate	1,59	4,73	3,75	5,01	1,41	3,72
13.	Jasa Perusahaan	7,68	6,23	8,50	7,67	3,61	6,49
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,60	1,75	0,42	2,02	0,16	1,09
15.	Jasa Pendidikan	4,35	5,51	8,96	5,24	0,68	5,06
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,60	7,99	2,56	9,94	0,87	5,27
17.	Jasa lainnya	5,54	11,39	11,86	7,81	4,39	8,82
18.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kota Dumai (%)	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64	3,22

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada 1 (satu) sektor ekonomi pun pada PDRB Kota Dumai yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Bahkan sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, pada tahun 2014 dapat dikatakan tidak tumbuh. Sektor industri pengolahan ini di tahun 2016 mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode 2012-2016, tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor ini memiliki laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2012-2016 sebesar 4,72%. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2012-2016 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu

sebesar 12,92%. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor ini mengalami perlambatan di tahun 2014 dan pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode 2012-2016.

Secara umum, berdasarkan olahan data pada Tabel 4.6 terlihat bahwa perekonomian Kota Dumai terus mengalami perlambatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015, kemudian akhirnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,64% di tahun 2016. Selama periode 2012-2016, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Dumai sebesar 3,22%, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar 1,91%. Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dengan Provinsi Riau selama periode 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 1.28.

Grafik 1.28. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau



Dari Grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2012-2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, kecuali di tahun 2012 dan 2014. Meskipun demikian, secara umum perekonomiannya sama-sama mengalami perlambatan sebelum akhirnya mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2016. Di tahun 2015 perekonomian Kota Dumai dan Provinsi Riau mengalami titik pertumbuhan terendah atau dapat dikatakan perekonomiannya tidak tumbuh.

7. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional, bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional, tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah adalah Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya dan membandingkan PDRB perkapita wilayah dengan PDRB perkapita wilayah acuannya. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Adapun pengklasifikasian wilayah berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersaji pada Tabel 1.15.

Tabel 1.15. Kriteria Tipologi Klassen - Perkembangan Ekonomi Wilayah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri > r	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
ri < r	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Dimana:

ri : laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota i

r : laju pertumbuhan PDRB Provinsi

Yi : PDRB per kapita Kabupaten/Kota i

Y : PDRB per kapita Provinsi

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel 1.15 di atas, pada Tabel 1.16 di bawah ini tersaji hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota Dumai tahun 2011-2016. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mulai tahun 2015 Kota Dumai masuk dalam kategori **wilayah cepat maju dan cepat tumbuh** karena memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada table 1.16 dibawah ini :

Tabel 1.16 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2011-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Uraian	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	70,19	70,55	71,53	71,87	71,74	73,55
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	71,64	72,40	72,30	72,39	70,77	70,60
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	4,27	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,23
Klasifikasi Wilayah	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah berkembang cepat	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh

Grafik 1.29. PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai vs Provinsi Riau Tahun 2011-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan (BPS, 2017). Akan tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Menyikapi hal tersebut, maka BPS menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka. Apabila porsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan lebih tinggi daripada porsi pengeluaran kebutuhan makanan, maka rumah tangga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Tabel 1.17. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Perkapita Makanan					
Nominal (Rp)	456.904	492.336	479.722	511.316	574.717
Persentase (%)	53,39	53,10	50,96	45,46	48,32
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan					

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Nominal (Rp)	398.847	434.894	461.705	613.344	614.756
Persentase (%)	46,61	46,90	49,04	54,54	51,68
Jumlah Pengeluaran Perkapita	855.751	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2012-2016 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 855.751,- menjadi Rp. 1.189.473,- Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 53,39% pada tahun 2012 menjadi 48,32% di tahun 2016. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,61% pada tahun 2012 menjadi 51,68% di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

8. Tingkat Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan *(poverty line)* untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2010-2016 fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 1.18, Grafik 1.30 dan Grafik 1.31.

Tabel 1.18. Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2010-2016
Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata r (% per tahun)
Kota Dumai								
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	287.975	298.127	311.891	328.158	341.525	353.079	369.624	4,34
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	16,50	13,97	14,20	14,11	13,62	14,97	13,76	(2,98)
Persentase penduduk miskin (%)	6,45	5,27	5,24	4,98	4,83	5,26	4,74	(2,48)
Provinsi Riau								
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	301.190	296.379	310.603	350.129	379.223	399.211	426.001	8,22
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	558,00	472,45	481,30	476,46	498,28	531,39	515,40	1,73
Persentase penduduk miskin (%)	10,01	8,17	8,05	8,42	7,99	8,42	7,98	(0,22)

Grafik 1.30. Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2010-2016
Provinsi Riau



Grafik 1.32. Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2010-2016
Kota Dumai dan Provinsi Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 6,45%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,48% menjadi 4,74% di tahun 2016. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Dumai yang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,98%, 16,5% pada tahun 2010 menjadi 13,76% di tahun 2016. Berbeda dengan dua komponen kemiskinan sebelumnya, garis kemiskinan Kota Dumai selama periode 2010-2016 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 4,34%, Rp.207.975,00/kapita/bulan pada tahun 2010 menjadi Rp.369.624,00/kapita/bulan di tahun 2016. Meskipun demikian, selama periode 2010-2016 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Grafik. 1.33. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2016
Kota Dumai dan Provinsi Riau



Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) dengan persamaan sebagai berikut:

$GK = GKM + GKNM$, dimana:

GK : Garis kemiskinan

GKM : Garis kemiskinan makanan

GKNM : Garis kemiskinan non makanan

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh

World Bank yaitu US$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalam kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan kemiskinan *(Poverty Severity Index*, P2*)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tabel 1.19 dan Grafik 1.34 berikut tersaji perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2016 (tanpa data tahun 2013).

Tabel 1.19 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2014	2015	2016
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,07	0,57	0,99	0,38	0,59	0,62
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,29	0,06	0,11	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Grafik 1.34. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2010-2016



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman tertinggi terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 1,07, kemudian turun menjadi 0,57 di tahun 2011, tetapi kembali memburuk dengan angka indeks 0,99 di tahun 2012. Selama tiga tahun terakhir (2014-2016) angka indeks kedalaman kemiskinan Kota Dumai mengalami kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2012, hanya saja tetap perlu menjadi perhatian bersama khususnya Pemerintah Kota karena angka indeksnya cenderung mengalami peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode 2014-2016 angka indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,06 menjadi 0,12. Ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat.

D. Sektor Perkembangan Investasi

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. . Dari tahun 2010-2015, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.20. Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perusahaan PMDN	32	42	47	53	57	60
Jumlah Perusahaan PMA	43	52	56	62	66	69

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, 2016

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai investasi PMA terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar US$.323.454.900dan PMDN pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.208.541.817.224.221 Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.21. Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2010- 2015

Indikator	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PMDN (Rp)	9.298.199.166.847	9.300.899.166.847	11.678.354.664.368	208.541.817.224.221	1.151.992.600.000	7.883.708.910.124
PMA ($)	1.783.183.393,38	1.858.728.004,49	9.300.899.166.849	5.960.870.100,00	323.454.900	977.359.893

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 2016

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing, selain banyak tenaga kerja Indonesia. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.22. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Dumai

Uraian	Tahun											
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA
Jumlah Seluruh PMA/ PMDN	11242	91	11229	67	11862	67	11864	-	11864	-	11864	21
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3994	47	4611	47	9307	37	9307	13	9307	12	9307	8

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, 2016

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya. Pertumbuhan realisasi investasiPMDN dan PMA tertinggi terjadi pada tahun 2010 meningkat hingga mencapai 1457,5 %. Pada tahun 2007-2008, Kota Dumai mengalami penurunan nilai investasi PMA dan PMDN hingga -95,3%, tetapi pada tahun 2010-2012 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 1.23. Persentase Nilai Realisasi PMDNdan PMA Kota Dumai

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Nilai Realisasi PMDN	9,99%	1,95%	24,10%	0,11%	0,74%
Persentase Nilai Realisasi PMA	0,02%	21,46%	9,60%	0,45%	1,27%

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, 2016,

E. Sektor Infrastruktur Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Permendagri 54/2010 menjelaskan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan

panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Namun tidak ada penjelasan secara lebih mendetail yang menjelaskan mengenai tingkat ketersediaan sarana jalan terhadap akses tiap kendaraan. Berikut adalah tabel yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 1.24. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai
Tahun 2010 – 2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang jalan (m)	1.561.240.000	1.561.240.000	1.561.240.000	1.561.240.000	1.561.240.000	1.561.240.000
Jumlah kendaraan	1.628.201,21	1.544.282,21	1.698.710,43	1.868.581,47	2.055.439,62	2.260.983,58
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	9,59	10,11	9,19	8,36	7,59	6,91

Sumber : Dinas Perhubungan, 2016

Melihat tren perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2015berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, yakni 9,59 di tahun 2010 menjadi 10,11 pada tahun 2011, namun terjadi penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015berturut-turut menjadi9,19, 8,36, 7,59, 6,91. Hal ini disebabkan jumlah kendaran yang terdaftar setiap tahunnya bervariasi,. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

Grafik 1.35. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2010 – 2015



2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum memiliki kesamaan dengan indikator jumlah arus penumpang angkutan umum pada urusan perhubungan dalam aspek pelayanan umum. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum dirinci berdasarkan jumlah barang dan status barang. Berikut adalah jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum di Kota Dumai.

Tabel 1.25. Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2014

Prasarana Angkutan	ORANG/ BARANG	JENIS PENUMPANG	2010	2011	2012	2013	2014
PELABUHAN	ORANG	BERANGKAT	281.666	260.860	270.503	269.925	233.365
		DATANG	278.897	260.879	273.990	253.645	211.070
	BARANG	MUAT	20.752.066	25.714.399	24.386.535	32.582.663	22.193.164
		BONGKAR	4.322.453	4.147.173	4.476.741	3.685.665	9.134.493
BANDARA	ORANG	BERANGKAT	25.643	24.533	22.163	22.116	10.625
		DATANG	25.256	2.480	21.320	20.852	10.876
		TRANSIT	10.869	9.422	8.952	8.580	1.385
	BARANG	BONGKAR	146.389	107.074	93.236	65.486	9.764
		MUAT	13.420	22.804	11.596	9.192	1.259
	BAGASI	BONGKAR	349.552	319.043	290.804	257.022	348.342
		MUAT	301.785	415.432	256.849	249.696	103.900
	POS PAKET	BONGKAR	0	0	0	0	0
		MUAT	0	0	0	0	0
TERMINAL	ORANG	BERANGKAT	234.639	149.734	174.680	116	
		DATANG	230.503	155.692	176.902	116	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2016

Melihat dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah barang yang melalui pelabuhan laut dalam rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 mendominasi pengangkutan barang di Kota Dumai, hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan.

3. Penataan Ruang

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah

kebanjiran, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Luasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016. 7.716,98 Ha atau 15,2 % dari luas seluruh wilayah budidaya (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016). Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 195.386,2 Ha. Sedangkan luas wilayah kebanjiran adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

4. Jumlah Penginapan/ Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2010, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 21 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota dengan 12 unit hotel. Data selengkapnya dapat dilihat

Tabel 1.26. Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2010-2015

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bukit Kapur	1	1	1	1	1	1
2	Medang Kampai	0	0	0	0	0	0
3	Sungai Sembilan	0	0	0	0	1	0
4	Dumai Barat	2	2	3	3	4	4
5	Dumai Timur	7	7	7	7	8	8
6	Dumai Kota	10	10	11	11	12	12
7	Dumai Selatan	1	1	1	1	2	2
	Jumlah	21	21	23	23	28	27

Sumber: Dinas Pariwisata, kebudaya, pemuda dan olahraga, 2016

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Kota Dumai serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan target RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun Pemerintah Kota Dumai tahun 2017, Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2017, Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 Tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Dumai Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tentang Kebijakan Umum APBD Kota Dumai Tahun 2016 Nomor : 21/NK-PPAS/DPRD/2016 Tanggal 21 Desember 2016 serta Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Dumai Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 20/NK-KU/APBD/DPRD/2016 Tanggal 21 Desember 2016 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Dumai untuk mencapainya dalam Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (PAN & RB RI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021
"Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021"

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	1 Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	1 Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	7
		2 Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	%	3.42
		3 Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.79
		4 Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	5.92
		5 Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	Ha	3,638
	2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan	1 Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun	%	2.23
		2 Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	3.42
		3 Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	%	4.2

MISI	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017
			4	Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	%	24
			5	Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air	%	19
			6	Persentase Fasilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan Infrastruktur ke Pu-an	%	25
	3	Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	1	Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	Dokumen	2
	4	Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah lingkungan	1	Kualitas Air	%	75
			1	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	65
	5	Terjaganya lingkungan kawasan pesisir	1	Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat	Kelompok	2
			2	Luas penanaman mangrove	Hektare	0
	6	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	1020
			2	Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	Unit/Jenis	201
			3	Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	6
			4	Rasio izin trayek	Dokumen	8
			5	Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	Unit	2,173
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing	7	Menurunnya Mortalitas	1	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	23
			2	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	32
			3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per100.000 KH	120
			4	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70.08
	8	Menurunnya Morbiditas	1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 KH	1
			2	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	per 1.000 KH	88

MISI	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017
			3	Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	per100.000 KH	< 1
			4	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Tahun	59
	9	Meningkatnya Status Gizi	1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3
			2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	7
	10	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.	1	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	78
			2	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3
			3	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1.5
			4	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	78
			5	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	%	31
			6	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit	%	20
	11	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah	1	Angka melek huruf	%	99.44
			2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100
			3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100
			4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
			5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88.76
	12	Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/satuan pendidikan	1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah:		
				-SD/MI	(per 1000 siswa)	0.277
				-SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0.37
	13	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	13.33
			2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	16

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
		3 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	72
		4 Rasio KDRT	Rasio	1:6253
		5 Kota Layak Anak	Status	Madya
	14 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	1 Rasio akseptor KB	Rasio	01:48.7
		2 Cakupan peserta KB aktif	%	65
	15 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1 Jumlah Sarana Sosial	Lembaga	13
		2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	13,500
		3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	62
	16 Meningkatnya kualitas pendidikan, mutu dan kreatifitas masyarakat	1 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan Kewirausaan	Orang	16
Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan	17 Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat	1 Jumlah koperasi yang aktif	Koperasi	139
	18 Meningkatnya daya saing produk UMKM	1 Jumlah UMKM aktif yang dibina	UMKM	875
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.	19 Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	1 Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konfliksosial yang ditindaklanjuti	%	60
		2 Persentase perda yang ditegakan	%	40
	20 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Kriteria Penilaian LPPD	Peringkat	7

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
		2 Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	%	95
		3 Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	%	85
		4 Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	Orang	360
	21 Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	%	15
		2 Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70
		3 Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	%	30
	22 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Penyelesaian konflik tanah masyarakat	kasus	3 Kasus
		2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74
		3 Kepemilikan KTP Elektronik	%	67.7
		4 Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85
		5 Kepemilikan Akta Perkawinan	%	65
		6 Kepemilikan KIA	%	10
		7 Kepemilikan KK	%	93
		8 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	65
	23 Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Media	20
			Radio	5
			TV	3
	24 Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	1 Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi (kondisi awal 2015 = 98.989.908.086,00)	%	95400.362A 33 (0A8%)

MISI	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017
			2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (kondisi awal 2015 = 29.450.000.000,00)	%	41.129.837.394 (18,68%)
	25	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tri fungsi tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD	1	Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD	%	80
	26	Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	1	Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	%	10%
			2	Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE	SKPD	8
			3	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	website	1
	27	Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	1	Tingkat waktu tanggap darurat	Pemukiman	< 30
					Lahan	< 45
					Hutan	< 70
	28	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	%	75
			2	Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya	Dokumen	5
	29	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase belanja pendidikan	%	20
			2	Persentase belanja kesehatan	%	10
	30	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Binaan PKK	260
			2	PKK Aktif	PKK	41
			3	Posyandu aktif	Posyandu aktif	241
			4	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	65

MISI	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017
			5	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	65
Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan	31	Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat	1	Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31
			2	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	3 Kasus
			3	Angka Kecukupan Protein	gr/kap/hari	50
	32	Meningkatnya Produksi pertanian dan perikanan	1	Produksi perikanan budidaya	ton	203.24
			2	Produksi perikanan tangkap	Ton	275
			3	Populasi ternak unggulan	Satuan ternak	5,673
			4	Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	Ton	104,131
			5	Jumlah penyuluh teriatih	org	2
	33	Meningkatnya Pendapatan petani/peternak/ nelayan	1	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	Kasus	3 Kasus
			2	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	33
			3	Cakupan bina kelompok pembudidaya	kelompok	28
			4	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	25
			5	Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	ton	29
	34	Mengurangi angka penyakit hewan menular dan zoonosis	1	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	30
			2	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	29
Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan, Industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah	35	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal	1	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	orang	1,210
			2	Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1
			3	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	org	16

MISI	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017
	36	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan independen, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Kasus	24
			2	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	416
	37	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	1	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp.	257.314.633.379.132
	38	Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB*	Rupiah (juta)	4.923.602.95
			2	Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar	unit	2
			3	Jumlah pengusaha Dagang terlatih	Unit Usaha	5
			4	Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasamma usaha.	Unit Usaha	10
	39	Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai	1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Rupiah (juta)	13.029.529.00
			2	Kawasan Industri	Kawasan	2
			3	Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif	Pengusaha	943
Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu	40	Meningkatnya aktualisasi nilai keagamaan, seni dan budaya dan peranan pemuda serta keolahragaan dalam kehidupan masyarakatdan pembangunan	1	Jumlah grup kesenian	group	40
			2	Jumlah klub olahraga	klub	112

MISI	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
	41	Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta	1 Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	sanggar	85
	42	Meningkatkan sarana dan prasana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian	2 Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	2
	43	Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten	1 Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	28
	44	Peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai – nilai tradisi, permusiuman dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepartwisataan	1 Kunjungan wisata (Mancanegara)	Pengunjung	12,757
			2 Kunjungan wisata (Domestik)	pengunjung	39,263

Tabel 2.2 Program dan Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2017

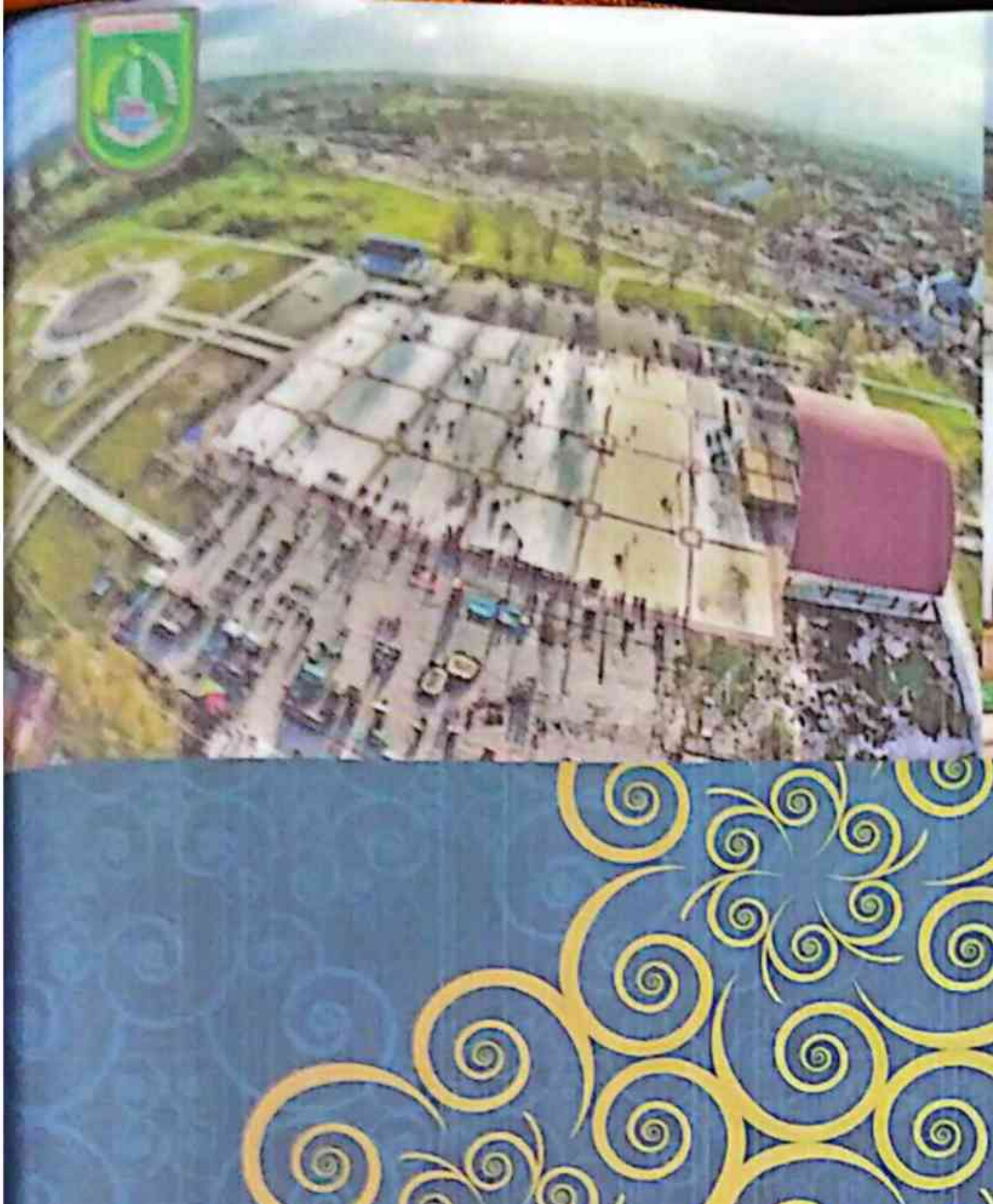
NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp 986,111,600
2	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 5,422,212,477
3	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp 282,345,000
4	Pengembangan Perumahan	Rp 6,246,101,000
5	Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp 986,111,600
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 80,230,795,296
7	Rehabilitas / Pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp 18,829,872,831
8	Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 6,339,510,400
9	Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	Rp 15,261,374,000
10	Pengendalian Banjir	Rp 1,819,620,900
11	Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp 3,434,591,800

NO	PROGRAM	JUMLAH/RP
12	Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	Rp 2.137.879.851
13	Perencanaan Tata Ruang	Rp 425.543.201
14	pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp 317.965.001
15	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp 4.861.225.601
16	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 3.633.171.813
17	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 2.734.389.001
18	pada Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj	Rp 596.328.221
19	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 1.315.187.501
20	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Rp 127.716.001
21	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 4.111.324.889
22	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 28.141.611.101
23	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp 104.145.551
24	Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 82.501.001
25	Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 483.971.551
26	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 1.516.971.901
27	Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 174.671.385
28	Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (dapur, loundry, ruang pasien, ruang tunggu dan lain lain)	Rp 82.783.053.412
29	Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp 3.831.053.412
30	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD	Rp 8.953.001.001
31	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp 71.001.001.001
32	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 87.565.382.152
33	Pendidikan Menengah	Rp 149.791.001
34	Pendidikan Non Formal	Rp 102.766.001
35	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 17.542.249.596
36	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 2.264.671.375
37	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Rp 93.871.001
38	peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Rp 219.358.482
39	Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	Rp 1.946.705.001
40	Pelayanan Kontrasepsi	Rp 270.746.001
41	Keluarga Berencana	Rp 663.505.001
42	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp 250.001.001
43	Penguatan kelembagaan pengasutamaan gender dan anak	Rp 508.316.201
44	pembinaan panti asuhan/panti jompo	Rp 128.961.001
45	pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Rp 408.229.001
46	pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Rp 298.341.501
47	pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp 1.186.236.201
48	pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 90.697.901
49	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp 181.719.001
50	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 262.338.351

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
51	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	443,978,400
52	Penciptaan iklim Usaha-usaha kecil menengah yang kondusif	Rp	283,497,450
53	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp	202,780,650
54	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp	1,670,100,000
55	Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	95,000,000
56	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	121,626,000
57	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp	55,600,000
58	Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	135,000,000
59	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp	174,460,000
60	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	1,366,833,000
61	Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp	176,675,000
62	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	469,893,300
63	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	3,677,119,000
64	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	42,023,100
65	Perencanaan Pembangunan daerah	Rp	1,670,968,975
66	Perencanaan Pembangunan ekonomi	Rp	253,210,700
67	Perencanaan Pembangunan sosial budaya	Rp	626,333,850
68	Kerja sama Pembangunan	Rp	226,910,000
69	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Rp	332,338,550
70	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	328,000,000
71	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Rp	739,620,000
72	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	2,808,399,070
73	Pendataan Administrasi Kependudukan	Rp	200,000,000
74	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Bukit Kapur)	Rp	997,427,060
75	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Barat)	Rp	972,698,650
76	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Kota)	Rp	886,884,400
77	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Selatan)	Rp	873,863,023
78	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Timur)	Rp	1,123,403,085
79	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Medang Kampai)	Rp	870,017,250
80	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Sungai Sembilan)	Rp	1,192,883,000
81	Kerjasama informsi dan media massa	Rp	2,671,403,000
82	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	5,951,412,713
83	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp	380,000,000
84	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah	Rp	12,821,480,000
85	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Rp	158,258,500
86	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp	65,946,850
87	Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Rp	11,082,275
88	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Rp	8,807,900
89	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	2,672,480,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
90	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Rp	489,830,000
91	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp	403,750,000
92	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp	82,517,000
93	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	91,765,000
94	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Rp	631,328,000
95	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Rp	2,012,219,115
96	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	6,459,635,261
97	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	556,966,345
98	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	179,476,200
99	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	493,373,100
100	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Bukit Kapur)	Rp	272,925,000
101	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Barat)	Rp	287,630,000
102	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Kota)	Rp	361,165,000
103	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Selatan)	Rp	343,940,000
104	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Timur)	Rp	399,492,000
105	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Medang Kampai)	Rp	242,576,000
106	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Sungai Sembilan)	Rp	302,700,000
107	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Bukit Kapur)	Rp	25,700,000
108	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Barat)	Rp	44,300,000
109	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Kota)	Rp	39,743,000
110	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Selatan)	Rp	31,550,000
111	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Timur)	Rp	19,780,000
112	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Medang Kampai)	Rp	71,910,000
113	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Sungai Sembilan)	Rp	32,200,000
114	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan	Rp	49,650,000
115	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Rp	1,500,986,765
116	Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp	454,611,800
117	Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	235,585,000
118	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	710,034,700
119	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Rp	586,178,893
120	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Rp	289,050,000
121	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	547,412,500

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
122	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Rp	1,500,986,765
123	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Rp	289,050,000
124	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	396,058,000
125	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	388,680,000
126	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	1,162,705,750
127	Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	235,585,000
128	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan	Rp	49,650,000
129	Pengembangan budidaya perikanan	Rp	454,611,800
130	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Rp	174,504,996
131	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	388,680,000
132	Peningkatan kesempatan kerja	Rp	314,549,900
133	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	262,338,350
134	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Rp	144,425,100
135	Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Rp	174,635,000
136	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	899,728,000
137	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	715,122,000
138	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp	36,670,000
139	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp	96,500,000
140	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	495,042,425
141	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	58,860,000
142	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	495,042,425
143	Peningkatan sarana & prasarana olahraga	Rp	150,000,000
144	Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp	624,838,000
145	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Rp	171,963,100
146	Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	Rp	891,873,500
147	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	559,572,900
148	Pengembangan destinasi pariwisata	Rp	316,170,000
149	Pengembangan kemitraan	Rp	246,599,000







BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2017

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2017 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam angka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Dumai sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian Visi RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Makmur dan Madani pada Tahun 2021. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Dumai tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjunya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode

ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode yang digunakan tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi hasil. Kondisi inilah yang belum sepenuhnya dapat disajikan pada LKj-IP Tahun 2017 ini. Sampai saat ini keberhasilan program - program Pemerintah Kota Dumai lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator output, walaupun sebagian OPD sudah mencatumkan indikator outcome dan secara bertahap Pemerintah Kota Dumai akan terus melakukan berbagai tindakan penyempurnaan agar program-program tersebut dapat diukur keberhasilannya dari sisi manfaat (*outcome*).

Tabel 3.1. Skala Penilaian Kinerja Kota Dumai Tahun 2017

No	Interval Kinerja Tahun 2017	Kriteria Kinerja Tahun 2017	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Capaian realisasi capaian kinerja sasaran strategis kurun tahun 2016 – 2021 yang merupakan target dalam RPJMD Kota Dumai terlihat di lampiran III dokumen Laporan Kinerja ini, sedangkan pencapaian realisasi kinerja yang tertuang dalam misi pada tahun 2017 sebagai berikut :

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar							
1	Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	1	Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	7	7	100
		2	Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	%	3.42	2.73	80
		3	Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.79	7.5	277.78
		4	Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	5.92	1.86	168.58
		5	Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	Ha	3,638	3,638	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		145.27
2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	1	Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun	%	2.23	2.05	91.98
		2	Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	3.42	3.31	96.68
		3	Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	%	4.2	3.9	92.78
		4	Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	%	24	22.42	93.43
		5	Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air	%	19	18.36	96.63
		6	Persentase Fasilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an	%	25	24.11	96.45
					Rata-rata Capaian Kinerja		94.66
3	Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	1	Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	Dokumen	2	1	50
					Rata-rata Capaian Kinerja		50

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
4	Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah lingkungan	1	Kualitas Air	%	75	65	86
		2	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	65	60	92
					Rata-rata Capaian Kinerja		89
5	Terjaganya lingkungan kawasan pesisir	1	Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat	Kelompok	2	0	0
		2	Luas penanaman mangrove	Hektare	0	0	0
					Rata-rata Capaian Kinerja		0
6	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	1020	1726	168
		2	Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	Unit/Jenis	201	237	118
		3	Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	6	4	67
		4	Rasio izin trayek	Dokumen	8	112	1400
		5	Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	Unit	2,173	485	22
					Rata-rata Capaian Kinerja		355
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing							
7	Menurunnya Mortalitas	1	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	23	11.63	100
		2	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	32	13.44	100
		3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per100.000 KH	120	142.63	81.14
		4	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70.08	70.25	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		195.29

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
8	Menurunnya Morbiditas	1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 KH	1	0.06	100
		2	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	per 1.000 KH	88	86.87	98.72
		3	Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	per100.000 KH	< 1	0.75	100
		4	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Tahun	59	30.91	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		99.68
9	Meningkatnya Status Gizi	1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3	0.02	199.33
		2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	7	0.3	195.71
					Rata-rata Capaian Kinerja		197.52
10	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.	1	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	78	81.19	104
		2	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	3.57	81
		3	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1.5	1.06	71
		4	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	78	64.8	83
		5	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	%	31	34.31	89.31
		6	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit	%	20	14.23	128.85
					Rata-rata Capaian Kinerja		92.86
11	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah	1	Angka melek huruf	%	99.44	99.53	100.09
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100	121.6	121.6

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100	125.07	125.07
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	107.33	107.33
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88.76	100.89	113.67
					Rata-rata Capaian Kinerja		113.55
12	Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/satuan pendidikan	1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah:				
			-SD/MI	(per 1000 siswa)	0.277	0.32	115.52
			-SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0.37	0.293	79.18
					Rata-rata Capaian Kinerja		97.35
13	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	13.33	13.33	100
		2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	16	16	100
		3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	72	75	75
		4	Rasio KDRT	Rasio	1:6253	6:7000	83.42
		5	Kota Layak Anak	Status	Madya	Madya	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		89.61
14	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	1	Rasio akseptor KB	Rasio	01:48.7	02:09.8	143.84

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
		2	Cakupan peserta KB aktif	%	65	69.79	107.37
					Rata-rata Capaian Kinerja		125.61
15	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1	Jumlah Sarana Sosial	lembaga	13	21	100
		2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	13,500	11919	88
		3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	62	127	205
					Rata-rata Capaian Kinerja		131
16	Meningkatnya kualitas pendidikan, mutu dan kreatifitas masyarakat	1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan Kewirausaan	orang	16	16	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
Misi 3 : Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan							
17	Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat	1	Jumlah koperasi yang aktif	Koperasi	139	161	115.83
					Rata-rata Capaian Kinerja		115.83
18	Meningkatnya daya saing produk UMKM	1	Jumlah UMKM aktif yang dibina	UMKM	875	875	100%
					Rata-rata Capaian Kinerja		100%
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.							
19	Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	1	Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konfliksosial yang ditindaklanjuti	%	60	60	100
		2	Persentase perda yang ditegakan	%	40	40	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
20	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Kriteria Penilaian LPPD	Peringkat	7	7	100

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
		2	Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	%	85	97.47	114.67
		3	Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	%	85	85	100
		4	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	Orang	360	374	103.89
					Rata-rata Capaian Kinerja		106.19
21	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	%	15	13.1	60.4
		2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70	96.6	99
		3	Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	%	30	17.9	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		86.47%
22	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1	Penyelesaian konflik tanah masyarakat	kasus	3 Kasus	3 Kasus	100
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	75.99	102.69
		3	Kepemilikan KTP Elektronik	%	67.7	95.81	141.52
		4	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85	94.06	110.66
		5	Kepemilikan Akta Perkawinan	%	65	61.29	94.29
		6	Kepemilikan KIA	%	10	25.63	256.3
		7	Kepemilikan KK	%	93	100	107.53
			Cakupan sarana prasarana perkantoran	%	65	93.19	143.37

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
		8	pemerintahan yang baik				
					Rata-rata Capaian Kinerja		
23	Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Media	20	15	75
				Radio	5	3	60
				TV	3	3	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		78,33
24	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	1	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi (kondisi awal 2015 = 98.989.908.086,00)	%	Rp. 95.400.362.433	Rp. 97621918641,91	102,33
		2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (kondisi awal 2015 = 29.450.000.000,00)	%	41.129.837.394 (18,68%)	Rp.50.418.075,56 5,00 (45,48%)	122,58
					Rata-rata Capaian Kinerja		112,46
25	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tri fungsi tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD	1	Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD	%	80	100	125%
					Rata-rata Capaian Kinerja		112,46
26	Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	1	Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	%	10%	8,5	85
		2	Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE	SKPD	8	8	100
		3	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	website	1	1	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		95
27	Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	1	Tingkat waktu tanggap darurat	pemukiman	< 30	< 30	100

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
				lahan	< 45	< 45	100
				hutan	< 70	< 65	107.14
					Rata-rata Capaian Kinerja		102.38
28	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	%	75	69.15	92.21
		2	Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya	Dokumen	5	3	60
					Rata-rata Capaian Kinerja		76.11
29	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase belanja pendidikan	%	20	30.38	151.9
		2	Persentase belanja kesehatan	%	10	21.78	217.8
					Rata-rata Capaian Kinerja		184.85
30	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Binaan PKK	260	260	100
		2	PKK Aktif	PKK	41	41	100
		3	Posyandu aktif	Posyandu aktif	241	241	100
		4	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	65	94.73	145.74
		5	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	65	100	153.85
					Rata-rata Capaian Kinerja		119.92
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan							
31	Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat	1	Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31	31	100
		2	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	3 Kasus	7 Kasus	233
		3	Angka Kecukupan Protein	gr/kap/hari	50	52	104

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
				lahan	< 45	< 45	100
				hutan	< 70	< 65	107.69
					Rata-rata Capaian Kinerja		102.33
28	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	%	75	69.15	92.21
		2	Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya	Dokumen	5	3	60
					Rata-rata Capaian Kinerja		76.11
29	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase belanja pendidikan	%	20	30.38	151.9
		2	Persentase belanja kesehatan	%	10	21.78	217.8
					Rata-rata Capaian Kinerja		184.85
30	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Binaan PKK	260	260	100
		2	PKK Aktif	PKK	41	41	100
		3	Posyandu aktif	Posyandu aktif	241	241	100
		4	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	65	94.73	145.74
		5	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	65	100	153.85
					Rata-rata Capaian Kinerja		119.92
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan							
31	Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat	1	Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31	31	100
		2	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	3 Kasus	7 Kasus	233
		3	Angka Kecukupan Protein	gr/kap/hari	50	52	104

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
					Rata-rata Capaian Kinerja		145.67
32	Meningkatnya Produksi pertanian dan perikanan	1	Produksi perikanan budidaya	Ton	203.24	342.4	168.47
		2	Produksi perikanan tangkap	Ton	275	930.81	338
		3	Populasi ternak unggulan	Satuan ternak	5,673	5,775	101.79
		4	Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	Ton	104,131	105,525	101.34
		5	Jumlah penyuluh terlatih	org	2	4	200
					Rata-rata Capaian Kinerja		181.92
33	Meningkatnya Pendapatan petani/peternak/nelayan	1	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	Kasus	3 Kasus	7 Kasus	233
		2	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	33	33	100
		3	Cakupan bina kelompok pembudidaya	kelompok	28	28	100
		4	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	25	25	100
		5	Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	ton	29	29	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		126.6
34	Mengurangi angka penyakit hewan menular dan zoonosis	1	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	30	30	100
		2	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	29	15	233
					Rata-rata Capaian Kinerja		166.5
Misi 6 : Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah							

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
35	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal	1	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	orang	1,210	1,210	100
		2	Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1	1	100
		3	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	org	16	16	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
36	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan indenpenden, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	1	Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Kasus	24	24	100
		2	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	416	416	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
37	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	1	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp.	257,314,633,379,132	261,712,742,159,132	101.71
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
38	Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB*	Rupiah (juta)	4,923,602.95	5,000,294.68	102
		2	Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar	unit	2	3	150
		3	Jumlah pengusaha Dagang terlatih	Unit Usaha	5	3	60
		4	Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha.	Unit Usaha	10	5	50
					Rata-rata Capaian Kinerja		90.5
39	Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai	1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Rupiah (juta)	13,029,529.00	20,361,588.50	100
			Kawasan industri	Kawasan	2	2	100

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
		2					
		3	Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif	Pengusaha	943	847	89.82
					Rata-rata Capaian Kinerja		
Misi 7 : Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu							
40	Meningkatnya aktualisasi nilai keagamaan, seni dan budaya dan peranan pemuda serta keolahragaan dalam kehidupan masyarakatdan pembangunan	1	Jumlah grup kesenian	group	40	35	87.5
		2	Jumlah klub olahraga	klub	112	112	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		
41	Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta	1	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	sanggar	85	40	47.06
					Rata-rata Capaian Kinerja		
42	Meningkatkan sarana dan prasana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian	1	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	2	2	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		
43	Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten	1	Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	28	32	114
					Rata-rata Capaian Kinerja		
44	Peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai – nilai tradisi, permusiuman dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan	1	Kunjungan wisata (Mancanegara)	pengunjung	12,757	12,515	98.10
		2	Kunjungan wisata (Domestik)	pengunjung	39,263	32,825	83.60
					Rata-rata Capaian Kinerja		90.85

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yanf sudah ditargetkan dalam dukumen perencanaan. Sehingga pada tahun 2017 yang merupakan tahun pertama implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, yang secara bertahap dan konsisten telah diupayakan untuk mewujudkan misi dan tujuan melalui 44 (empat puluh empat) sasaran strategis dan 112 (seratus dua belas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kota Dumai.

Misi Pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan Pelayanan Air Bersih Yang Terjangkau Dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar"** Pencapaian misi pertama ini melalui 6 (enam) sasaran strategis, 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terciptanya Ruang Kota Yang Hijau, Nyaman, Humanis, Teratur dan Merata

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Hijau, Humanis Dan Merata"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman. Untuk mengukur sasaran Misi pertama ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.1 berikut di bawah ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	5	7	7	100
2	Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	%	1.07	3,42	2,73	80
3	Presentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	1,49	2,79	7,5	277,78
4	Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	2,04	5,92	1,86	168,58
5	Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	Ha	3.638	3.638	3.638	100
Rata-rata Capaian Kinerja						145,27

Terlihat dari tabel 3.1 diatas pada sasaran misi pertama ini 5 (lima) indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Fasilitas lahan untuk Pemakaman Umum

Pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh OPD terkait yaitu Tempat Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Pahlawan berjumlah 2 (dua) lokasi dengan program dan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman.

2. Panjang Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan

Untuk melaksanakan indikator sasaran maka dilaksanakan beberapa program :

a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk membangun jalan lingkungan (semenisasi dan infrastruktur lainnya).
b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program ini bertujuan untuk membangun jalan dan jembatan pedesaan :

Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Tahun 2017 jumlah kegiatan infrastruktur berjumlah 42 ruas jalan/gang dengan lebar lebih kecil dari atau sama dengan 3

meter. Adapun realisasinya 2,34 % dengan capaian realisasinya 68,42%. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

1. OPD DPRKP merupakan pemekaran dari SKPD PU dan SKPD DTKKP pada tahun 2016/2017.
2. Persentase target dan realisasi belum termasuk kegiatan infrastruktur pada UPT OPD DPUPR

Dibandingkan pada tahun 2016 pada SKPD sebelum pemekaran yaitu SKPD PU memiliki nilai realisasi pencapaian 1,07 %

3. **Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat**

Sesuai dengan buku MPS kota Dumai tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa selain tangki septic on site, jumlah yang direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit yaitu IPAL, Tangki septic komunal dan MCK ++. Berdasarkan realisasi tahun 2017 telah terbangun 3 unit dengan realisasi IKU nya 7,5 %. Adapun capaian realisasinya berjumlah 277,78 % atau melebih target 2017 yang bersumber APBD Kota Dumai. Dibandingkan pada tahun 2016 pada SKPD sebelum pemekaran yaitu SKPD PU memiliki nilai realisasi pencapaian 1,49 %.

4. **Persentase pembangunan rumah tidak layak huni**

Berdasarkan data yang bersumber Bidang Perumahan OPD DPRKP, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 3779 RTLH. Yang dilaksanakan pada tahun 2017 lebih kurang 544 unit, yang brsumber dari DAK, Dana Dekonsentrasi (regular), APBD provinsi dan APBD Kota Dumai. Adapaun realisasinya (rencana-(realisasi-rencana))/rencana x 100) =1,86 % dengan capaian realisasinya 243,24% atau melebihi dari target 2017.

5. **Luas Wilayah Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum**

Indikator ini dilaksanakan dengan satu program, yaitu Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan 2 kegiatan yang bertujuan melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Dumai.

Tabel 3.2. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	5	7	13	53,85
2	Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	%	1,07	2,73	3,55	76,90
3	Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	1,49	7,5	75	10
4	Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	2,04	1,86	3,05	139,02
5	Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	Ha	3,638	3.638	3.6788	9,98

Terlihat dari tabel 3.2 diatas pada sasaran misi pertama ini 5 (lima) indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Fasilitas lahan untuk pemakaman umum**

   Target dari indikator sasaran ini adalah Fasilitas lahan untuk pemakaman umum dengan target akhir RPJM yaitu 13 Ha dan pada tahun 2017 terealisasi 7 Ha dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 53,85%.

2. **Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan**

   Target dari indikator sasaran ini adalah Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan dengan target akhir RPJM yaitu 3,55% dan pada tahun 2017 terealisasi 2,73% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 76,90.

3. **Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat**

   Target dari indikator sasaran ini Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat dengan target akhir RPJM yaitu 75% dan pada tahun 2017 terealisasi 7,5% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 10%.

4. **Persentase pembangunan rumah tidak layak huni**

Target dari indikator sasaran ini adalah Persentase pembangunan rumah tidak layak huni dengan target akhir RPJM yaitu 3,05% dan pada tahun 2017 terealisasi 1,86% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 139,02%.

5. **Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum**

Target dari indikator sasaran ini adalah Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum dengan target akhir RPJM yaitu 3.6788 Ha dan pada tahun 2017 terealisasi 3.638 Ha dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 9,98%.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya infrastruktur perkotaan

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Hijau, Humanis Dan Merata**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk mengukur sasaran misi pertama ini terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.3 berikut dibawah ini :

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun	%	1,22	2,23	2,05	91,98
2	Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	1,07	3,42	3,31	96,68
3	Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	%	1,51	4,20	3,90	92,78
4	Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	%	17,76	24	22,42	93,43
5	Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air	%	1,96	19	18,36	96,63
6	Persentase Fasiilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an	%	14,13	25	24,11	96,45
Rata-rata Capaian Kinerja						94,66

Terlihat dari tabel 3.3 di atas pada sasaran pertama ini 6 (enam) indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Prosentase Jalan dan Jembatan Yang Dibangun

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program ini bertujuan :

1. Untuk membangun jalan dan jembatan baru (jalan dan jembatan yang tidak ada menjadi ada);
2. Untuk meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada.

b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program ini bertujuan untuk merehabilitasi / memelihara jalan dan jembatan dalam Kota Dumai.

c. Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program ini bertujuan untuk membangun jalan atau jembatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pembangunan Jalan di Kota Dumai pada Tahun 2017 difokuskan :

a. Peningkatan Jl. Kelakap Tujuh/Ratu Sima – Rigid Pavement (DAK)

b. Peningkatan Jl. Prof. M. Yamin (Jl. Budi Kemuliaan) – Rigid Pavement

c. Jl. Sultan Syarif Kasim – Overlay (DAK)

Tabel 3.4 Perbandingan Panjang Jalan yang dibangun dari Tahun 2012 – 2017

Tahun	Panjang Jalan Yang Dibangun (M)	Keterangan
2012	47.514,50	
2013	70.000	
2014	67.568	
2015	40.000	
2016	16.107,85	
2017	19.543	

Sumber : Dinas PU PR, 2017

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas, guna meningkatkan pembangunan transportasi dengan prioritas pada upaya peningkatan sarana dan prasarana untuk ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas terutama pada pusat permukiman, perdagangan, kawasan terisolir, daerah wisata dan industri dengan memperhatikan faktor keselamatan, keamanan dan pemerataan pelayanan umum keseluruh wilayah. Capaian sasaran dilakukan melalui 3 (tiga) program, dengan 12 (dua belas) kegiatan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian sasaran tersebut.

2. Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh

a. Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh diantaranya kegiatan :

1. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota
2. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur
3. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat
4. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan
5. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur
6. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang kampai
7. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan

3. Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh :

a. Program pembangunan turap/talud/bronjong, Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi. Pembangunan Turap di Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 difokuskan kepada :

1. Pembangunan Turap Saluran Primer di Kelurahan Buluh Kasap
2. Pembangunan Turap Saluran Jl. Meranti Darat

Tujuan dari pelaksanaannya untuk mencapai dalam pengendalian Merehabilitasi/memelihara bantaran dan tanggul sungai Kota Dumai,

Mengendalikan banjir yang sesuai dengan kondisi permasalahan serta Merencanakan pusat-pusat pengendali banjir di Kota Dumai. Dalam pelaksanaanya tidak terdapat hambatan dala pencapaian indikator sasaran.

Tabel 3.5. Perbandingan Pembangunan Turap dari Tahun 2012 – 2017

Tahun	Turap Yang Dibangun (M')	Keterangan
2012	1.031	
2013	850	
2014	850	
2015	235	
2016	120	
2017	92	

Sumber : Dinas PU PR, 2017

b. Program pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program ini bertujuan untuk :

1. Melaksanakan normalisasi saluran sungai;
2. Merehabilitasi / memelihara saluran sungai;
3. Membangun jaringan distribusi, sambungan rumah serta; penyambungan pipa untuk SPAM.

Pembangunan Normalisasi di Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 difokuskan kepada :

a. Normalisasi Saluran di Kelurahan Teluk Makmur
b. Normalisasi Saluran di Kelurahan Bukit Nenas
c. Normalisasi Saluran di Kelurahan Mekar Sari
d. Normalisasi Saluran di Kelurahan Bagan Keladi

4. Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh :

a. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program ini bertujuan untuk :

1. Melaksanakan pembangunan saluran drainase yang baru
2. Memelihara saluran drainase yang sudah ada

Tabel 3.6. Perbandingan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong dari Tahun 2012 – 2017

Tahun	Saluran Drainase/ Gorong-gorong Yang Dibangun (M')	Keterangan
2012	14.696	
2013	53.800	
2014	4.204	
2015	2.165	
2016	871	
2017	1940	

Sumber : Dinas PU PR, 2017

5. Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh :

a. Program Pengendalian Banjir, Program ini bertujuan untuk :

1. Merehabilitasi/memelihara bantaran dan tanggul sungai Kota Dumai
2. Mengendalikan banjir yang sesuai dengan kondisi permasalahan
3. Merencanakan pusat-pusat pengendali banjir

6. Prosentase Fasiilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh :

a. Program peningkatan saran dan prasarana kebinamargaan, Program ini bertujuan untuk :

1. Mengadakan alat-alat berat
2. Mengadakan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
3. Memelihara alat-alat berat
4. Memelihara alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

Pelaksanaan kegiatan pada dasarnya adalah proses produksi, yang merupakan kendala utama pada tahap pelaksanaan kegiatan dalam proses tersebut adalah waktu, biaya dan mutu, disamping propesionalitas dari penyedia jasa yang terkait satu dengan lainnya sehingga komponen waktu, biaya dan mutu perlu dikelola secara menyeluruh dan lebih terpadu. Pencapaian persyaratan mutu sesuai spesifikasi pada tingkatan memuaskan pengguna jasa khususnya dan masyarakat Kota Dumai pada umumnya menjadi hal yang terpenting, karena sesudah suatu proyek dilaksanakan, penilaian biasanya ditekankan pada masalah kualitas (*mutu*), penampakan penyelesaian akhir suatu pekerjaan (*Finishing*) yang juga menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Penerimaan kualitas pekerjaan pada umumnya didasarkan atas pemenuhan persyaratan sesuai spesifikasi. Dalam satu dan lain hal, kualitas pekerjaan dapat tidak memenuhi syarat yang disebabkan oleh :

1. Kendala Waktu

Penetapan jadwal pelaksanaan yang terlalu singkat menyebabkan setiap kegiatan (terutama kegiatan-kegiatan pada lintasan kritis) dilaksanakan tergesa - gesa bahkan pada jam-jam lembur dimana kondisi akan tidak menguntungkan (malam hari), kondisi fisik pada pekerja sudah pada lelah, faktor cuaca juga sangat menentukan dalam mencapai pekerjaan yang berkualitas.

2. Kendala Biaya

Nilai kontrak (*Lump Sum Contract*) yang terlalu rendah menyebabkan penyedia jasa harus mengadakan penghematan dalam penggunaan material maupun upah.

3. Kendala Material

Sebaik apapun proses pelaksanaan, dari bahan baku yang buruk tidak akan menghasilkan produk yang bermutu baik.

4. Kendala Spesifikasi

Penetapan Spesifikasi mutu yang terlampau tinggi yang sulit dicapai dengan keterampilan dan peralatan yang ada.

5. Kendala Sumber Daya Manusia

Pengguna dan penyedia jasa seharusnya menguasai dan mengerti aspek-aspek teknis pelaksanaan, sehingga tidak semata hanya memikirkan keuntungan Pribadi (Profit Oriented) tetapi juga harus menjiwai dan mempunyai komitmen yang kuat

untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada, juga harus mempunyai rasa memiliki terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan.

6. Perancangan Sistem tata laksana yang tidak terinci menyebabkan ketidaksempurnaan pelaksanaan.
7. Ketidaktepatan penggunaan peralatan atau peralatan yang tidak layak operasi.
8. Perubahan Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor. 80 Tahun 2003 juga mempengaruhi proses pelelangan yang berakibat harga penawaran yang terlalu rendah,sehingga mempengaruhi kualitas suatu pekerjaaan.

Kegiatan-kegiatan pada proyek Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai masih jauh dari yang diharapkan terutama masih banyaknya rekanan yang tidak dapat bekerja efektif dan seefisien mungkin mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selalu memberikan teguran- teguran dan rapat bersama dengan para kontraktor untuk mengatasi apa-apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diatasi dengan baik, diberikan pembinaan-pembinaan secara langsung maupun tidak langsung, hal seperti ini hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi dilakukan (Pre Construction Meeting).

Partisipasi masyarakat diperlukan juga dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga sangat diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya pelaksanaan pekerjaan tersebut bagi masyarakat, sehingga masyarakat mendukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Pemberian Sertifikat dari Pemerintah bagi rekanan yang mempunyai kuantitas dan kualitas kerja yang bagus dalam memenuhi target "tepat waktu, mutu dan laku" sangat diperlukan guna memacu semangat para rekanan dalam meyelesaikan pekerjaannya.

Selanjutnya Riset dan Quantity Control (QC) dilapangan sangat kurang sehingga diperlukan laboratorium yang memadai untuk mendukung penelitian dan mengontrol kualitas pekerjaan dilapangan, serta konsultan pengawas yang tepat untuk dapat secara kontinue memantau langsung kegiatan dilapangan.

Manajemen proyek harus dapat digunakan secara efektif untuk membangun, mendukung dan menangangi sistem kualitas suatu pelaksanaan proyek untuk menjamin keselamatan dan toleransi terhadap kerusakan konstruksi, maka sangat

diperlukan adanya Total Quality Management (TQM). Ada 4 elemen dasar untuk mendapatkan Total Quality Management (TQM) ; Komitmen manajemen, kerja tim, teknis dan sistem mutu.

Memenuhi persyaratan mutu dengan waktu dan biaya yang telah ditentukan merupakan tantangan yang harus diatasi oleh pengguna dan penyedia jasa didalam penyelenggaraan proyek.

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun	%	1,22	2,05	16,95	31,76
2	Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	1,07	3,31	15,92	40,05
3	Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	%	1,51	3,90	56,58	13,09
4	Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	%	17,76	22,42	198,76	21,22
5	Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air	%	1,96	18,36	107,96	20,68
6	Persentase Fasiilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an	%	14,13	24,11	163,13	33,25

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun

Target dari indikator sasaran ini adalah Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun dengan target akhir RPJM yaitu 16,95% dan pada tahun 2017 terealisasi 2,05% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 31,76%.

b. Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan

Target dari indikator sasaran ini adalah Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan dengan target akhir RPJM yaitu 15,92% dan pada tahun 2017 terealisasi 3,31% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 40,05%.

c. **Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih**

Target dari indikator sasaran ini adalah Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih dengan target akhir RPJM yaitu 56,58% dan pada tahun 2017 terealisasi 3,90% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 13,09%.

d. **Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai**

Target dari indikator sasaran ini adalah Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai dengan target akhir RPJM yaitu 198,76% dan pada tahun 2017 terealisasi 22,42% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 21,22 %.

e. **Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air**

Target dari indikator sasaran ini adalah Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air dengan target akhir RPJM yaitu 107,96% dan pada tahun 2017 terealisasi 18,36% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 20,68%.

f. **Persentase Fasiilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an**

Target dari indikator sasaran ini Persentase Fasiilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an dengan target akhir RPJM yaitu 163,13% dan pada tahun 2017 terealisasi 24,11% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 33,25%.

Sasaran Strategis 3

Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Hijau, Humanis Dan Merata"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.** Untuk mengukur sasaran misi pertama ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.8 berikut di bawah ini :

Tabel 3.8. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	Dokumen	1	2	1	50
Rata-rata Capaian Kinerja						**50**

Terlihat dari tabel 3.8 di atas pada sasaran misi pertama ini dengan 1 (satu) indikator sasaran tersebut tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah

Kota Dumai pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Tahun 2002 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2002 dan mengalami revisi menjadi Perda Nomor 27 tahun 2005 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai.

Sejak terbitnya undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Dumai telah melakukan revisi RTRW Kota Dumai dan telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Surat Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : HK.01 03-Dr/328 tentang Persetujuan Substansi atas Raperda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai 2012-2032. Selanjutnya telah dilakukan pembahasan draf Raperda RTRW Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai dan telah mendapatkan persetujuan untuk menjadikan Raperda RTRW Kota Dumai menjadi Perda RTRW Kota Dumai melalui Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/DPRD/2014.

Selanjutnya Pemerintah Kota Dumai telah melengkapi dokumen persyaratan Perda RTRW Kota Dumai kepada Gubernur Riau untuk mendapatkan Evaluasi Gubernur, tetapi sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian dikarenakan RTRW Propinsi Riau belum disahkan oleh Mendagri. Meskipun demikian perencanaan pembangunan wilayah Kota Dumai telah diselaraskan dengan Rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional.

Dengan demikian selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang

memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah, melalui instrumen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Kota Dumai sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pengukuran indikator kinerja Utama Bappeda Kota Dumai untuk Tahun Anggaran 2016 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan dokumen yang ditetapkan}}{\text{Jumlah target dokumen dalam Renstra}} x100\,\%$$

Berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) buah, sedangkan Jumlah target dokumen peraturan dalam renstra sebanyak 1 (satu) buah, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2017 sebesar 100 %, perlu disampaikan bahwa Rancangan Perda Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan RI dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI dan belum disahkannya Perda RTRW Propinsi Riau. Meskipun demikian perencanaan pembangunan wilayah Kota Dumai telah diselaraskan dengan Rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional.

Dengan demikian selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah, melalui instrumen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Kota Dumai sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	Dokumen	1	1	5	20

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah**

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah ranperda tentang penataan ruang daerah dengan target akhir RPJM yaitu 5 dokumen dan pada tahun 2017 terealisasi 1 dokumen dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 20%.

Permasalahan dan Solusi

Adapun yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

Rancangan Perda Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai belum mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI dan belum disahkannya Perda RTRW Propinsi Riau. Meskipun demikian perencanaan pembangunan wilayah Kota Dumai telah diselaraskan dengan Rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional.

Dengan demikian selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah, melalui instrumen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Kota Dumai sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Solusi yang bisa diambil adalah :

1. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Riau
2. Komitmen dari kementerian kehutanan dengan diterbitkannya SK. Menhut No. 878 tahun 2014 dan SK. Menhut No. 314 tahun 2016.

3. Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Kota Dumai telah melakukan penyelarasan dengan rancangan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional serta Program-program Nasional.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah lingkungan

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Hijau, Humanis Dan Merata**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Lingkungan Hidup.**

Untuk mengukur sasaran misi pertama ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.12 berikut dibawah ini :

Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kualitas Air	%	70	75	65	86
2	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	-	65	60	92
	Rata-rata Capaian Kinerja					89

Terlihat dari tabel 3.12 di atas pada sasaran misi pertama ini dengan 2 (dua) indikator sasaran tersebut tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Kualitas Air**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas air dengan perlakuan pengambilan sampel air sumur sebanyak 7 sampel, air sungai sebanyak 15 sampel, air laut sebanyak 10 sampel, air drainase sebanyak 10 sampel, air hujan sebanyak 2 sampel di Kota Dumai.

b. **Prosentase Jumlah sampah yang tertangani**

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup yaitu presentase jumlah sampah yang tertangani selama 1 tahun telah mencapai target yang diinginkan yaitu Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat.

Tahun 2017, jumlah anggaran untuk 9 (Sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Kegiatan ini tercapai dengan keluaran meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat selama 12 bulan.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pada Kegiatan ini realisasi terwujudnya Kota Dumai yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.

b. Pencemaran air

Pada Kegiatan ini realisasi telah mencapai target yang diinginkan yaitu Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air.

c. Pengembangan laboratorium lingkungan hidup

Pada Kegiatan ini yang dilaksanakan adalah belanja bahan-bahan kimia untuk analisa air dan beberapa peralatan laboratorium seperti Portable turbidity meter, Generator listrik, DO meter, TDS, Digital termometer, pH meter.

d. Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)

Pada Kegiatan ini realisasi dengan target keluaran terlaksananya kegiatan pengawasan dokumen lingkungan (Amdal. UKL-UPL).

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Kualitas Air	%	70	65	85	76,47
2	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%		60	90	66,67

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Kualitas Air**

Target dari indikator sasaran ini adalah yaitu Kualitas Air dengan target akhir RPJM yaitu 85% dan pada tahun 2017 terealisasi 65% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 76,47%.

b. **Prosentase Jumlah sampah yang tertangani**

Target dari indikator sasaran ini adalah yaitu Persentase Jumlah sampah yang tertangani dengan target akhir RPJM yaitu 90% dan pada tahun 2017 terealisasi 60% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 66,67%.

Sasaran Strategis 5

Terjaganya Lingkungan Kawasan Pesisir

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Hijau, Humanis Dan Merata**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perikanan.

Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.14 berikut di bawah ini :

Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat	Kelompok	2	2	0	0
2	Luas penanaman mangrove	Hektare	0	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja						0

Terlihat dari tabel 3.14 di atas pada sasaran misi pertama ini dengan 2 (dua) indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat**

Target dari indikator sasaran ini yaitu 2 kelompok pengawas masyarakat, namun kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terkait dengan kewenang pembinaan terhadap kelompok pengawas sudah berada di Provinsi atau Daerah Tingkat I,

sehingga kegiatan inipun tidak mendapatkan anggaran tahun 2017, tapi tetap di usulkan ke pemerintah Provinsi Riau, dan bentuk tindak lanjut mereka provinsi memberikan bantuan alat transportasi berupa speed boat untuk kelompok pecinta alam Bahari.

b. Luas Penanaman Mangrove

Indikator capaian kegiatan ini tidak dilaksanakan dan tidak mencapai target dikarenakan merupakan kewenangan provinsi sejak tahun 2017.

Tabel 3.13 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2016	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat	Kelompok	2	0	4	0
2	Luas penanaman mangrove	Hektare	0	0	4	0

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat

Target dari indikator sasaran ini adalah dibina dan dibentuknya kelompok pengawas masyarakat dengan target akhir RPJM yaitu 4 kelompok dan pada tahun 2017 terealisasi 0 kelompok dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 50%.

b. Luas penanaman mangrove

Target dari indikator sasaran ini adalah menanam magrove dengan target akhir RPJM yaitu 4 Ha dan pada tahun 2017 belum terealisasi, dan pencapaian terhadap target RPJM belum bisa diukur.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Hijau, Humanis Dan Merata".**

Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perhubungan.

Untuk mengukur sasaran misi pertama ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran.

Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.14 berikut di bawah ini :

Tabel 3.14. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	4078	1020	1726	168
2	Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	Unit/Jenis	185	201	237	118
3	Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	5	6	4	67
4	Rasio izin trayek	Dokumen	46	8	112	1400
5	Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	Unit	1.573	2.173	485	22
Rata-rata Capaian Kinerja						355

Terlihat dari tabel 3.14 di atas pada sasaran misi pertama ini dengan 5 (lima) indikator sasaran tersebut tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Kepemilikan KIR Angkutan Umum di dalam indikator ini ditargetkan 1.020 dalam realisasinya sudah dapat terlaksana 168% dikarenakan tingkat kesadaran pemilik kendaraan sudah mulai membaik untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang lulus uji serta sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor yang sudah mulai memadai.
2. Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan di dalam indikator ini ditargetkan 200 unit/jenis dalam realisasinya sudah melebihi target sebanyak 237 Unit/jenis.
3. Jumlah Terminal Darat, Laut dan Udara yang sesuai standar di dalam indikator ini ditargetkan 6 terminal namun dalam realisasinya baru 4 Terminal yang diantaranya terminal Barang, Bandar Udara Pinang Kampai, Pelabuhan Penumpang, Terminal Penumpang / Penyeberangan Ro-Ro. Belum tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan Besarnya data yang diolah sehingga merealisasikannya butuh dana dan waktu yang yang bertahap.

4. Rasio izin trayek di dalam indikator ini ditargetkan 8 Dokumen dalam realisasinya sudah 112 Dokumen yang diantaranya izin trayek yang telah dikeluarkan Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah izin trayek angkutan perkotaan. tercapainya Indikator Kinerja dimaksud sehubungan dengan dilaksanakannya operasi penertiban dokumen angkutan penumpang dan barang dikota Dumai.
5. Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi di dalam indikator ini ditargetkan 1.573 unit namun dalam realisasinya hanya 485 Unit yang diantaranya pengadaan rambu pembatas Tonase, Papan Rambu RPPJ, rambu Tiang Tunggal dan Papan Nama Jalan.

Tabel 3.15 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	4078	1726	10.500	16,44
2	Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	Unit/Jenis	185	237	205	115,61
3	Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	5	4	7	57,14
4	Rasio izin trayek	Dokumen	46	112	10	
5	Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	Unit	1.573	485	2.973	16,31

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah unitangkutan umum yang telah memiliki KIR dengan target akhir RPJM yaitu 10.500 unit dan pada tahun 2017 terealisasi 1726 unit dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 16,44%.

b. **Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan**

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah jumlah dan jenis angkutan umum perkotaan dengan target akhir RPJM yaitu 205 unit/ jenis dan pada tahun 2017 terealisasi 237 unit/ jenis dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 115,61%.

c. **Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar**

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah terminal darat, laut dan udara yang telah sesuai standar dengan target akhir RPJM yaitu 7 terminal dan pada tahun 2017 terealisasi 4 terminal dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 57,14%.

d. **Rasio izin trayek**

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah dokumen izin trayek yang telah dikeluarkan dengan target akhir RPJM yaitu 10 dokumen dan pada tahun 2017 terealisasi 112 dokumen.

e. **Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi**

Target dari indikator sasaran ini adalah unit rambu-rambu lalu lintas yang dibangun dengan target akhir RPJM yaitu 2.973 unit dan pada tahun 2017 terealisasi 485 unit dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 16,31%.

Misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing"** Pencapaian misi Kedua ini melalui 10 (sepuluh) sasaran strategis, 35 (tiga puluh lima) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 7

Menurunnya Mortalitas

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.16 berikut di bawah ini :

Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	13,73	23	11,63	100
2	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	16,88	32	13,44	100
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per100.000 KH	109,32	120	142,63	81,14
4	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70,25	70,08	70,25	100
Rata-rata Capaian Kinerja						195,29

Terlihat dari tabel 3.16 diatas pada misi kedua ini 4 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Angka Kematian Bayi**

   Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi pencapaian kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup adalah sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (baik).

2. **Angka Kematian Balita**

Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi pencapaian kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup adalah sebesar 13,44 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (baik).

3. **Angka Kematian Ibu**

Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 120 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi pencapaian kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah sebesar 142,63 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 81,14% (kurang baik).

4. **Angka Harapan Hidup Waktu Lahir**

Target kinerja Angka Harapan Hidup Waktu Lahir Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 70,08 tahun, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Harapan Hidup Waktu Lahir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau untuk Kota Dumai adalah sebesar 70,25 tahun. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (baik).

Tabel 3.17. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	13,73	11,63	18	64,61
2	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	16,88	13,44	25	53,76
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per100.000 KH	109,32	142,63	102	139,83
4	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70,25	70,25	71,04	98,89

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian bayi

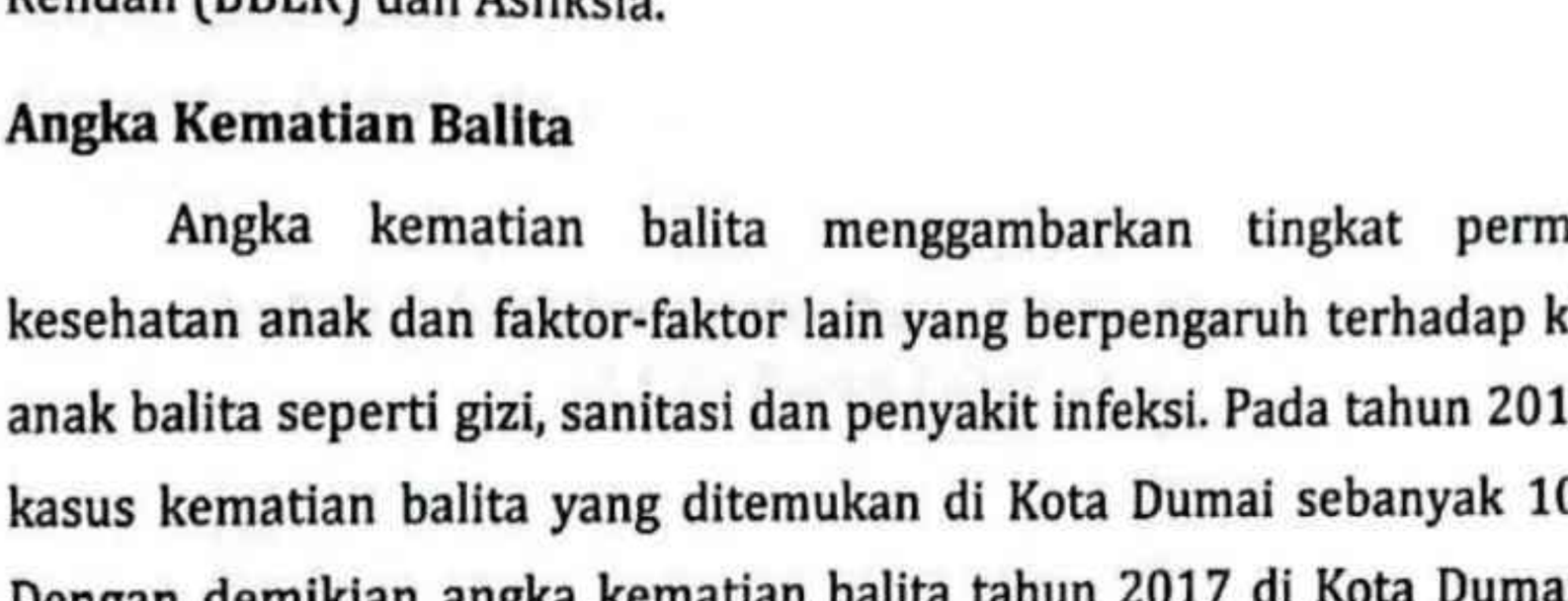
yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 90 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 13,73 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.1 berikut ini :

Grafik 3.1. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan dan Bukit Kapur yakni sebanyak 17 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 16 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.2 berikut ini :

Grafik 3.2. Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai tahun 2017



Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.

2. Angka Kematian Balita

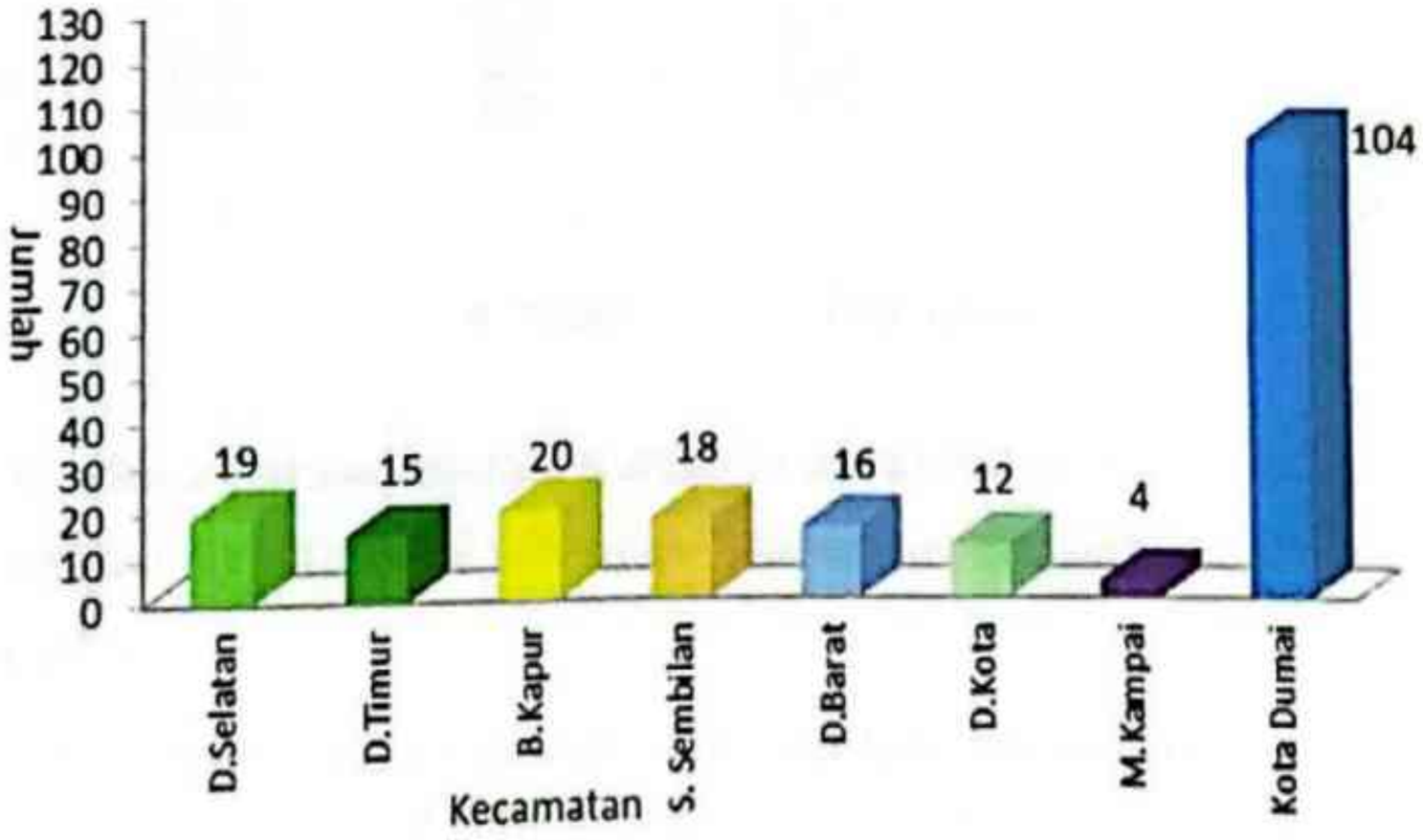
Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 104 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2017 di Kota Dumai sebesar 13,44 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 16,88 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.3 berikut ini :

Grafik 3.3. Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2017



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Bukit Kapur yakni sebanyak 20 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 19 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.4 berikut ini :

Grafik 3.4. Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2017



Penyebab kematian balita masih didominasi oleh Asfiksia dan Penyebab lain.

3. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu

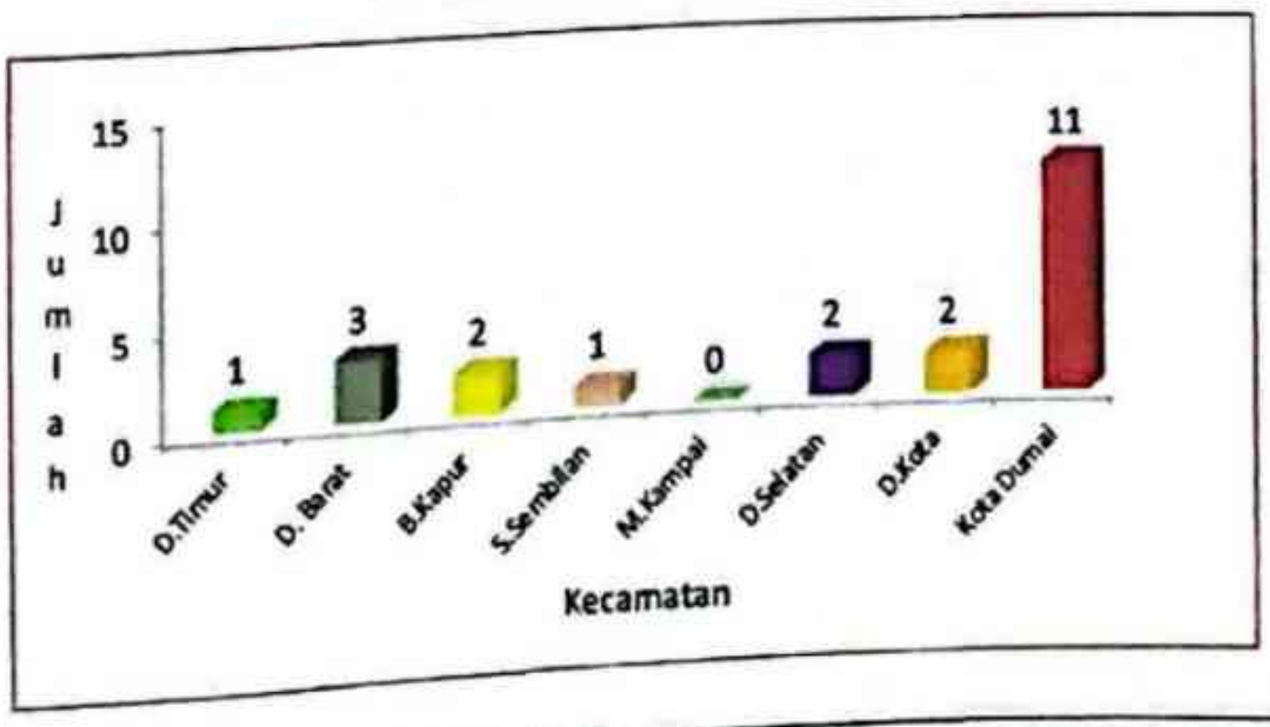
melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 11 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2017 di Kota Dumai sebesar 142,16 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, di mana angka kematian ibu sebesar 109,32 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 120 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini diatas target (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang baik). Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.5 berikut ini :

Grafik 3.5. Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2017



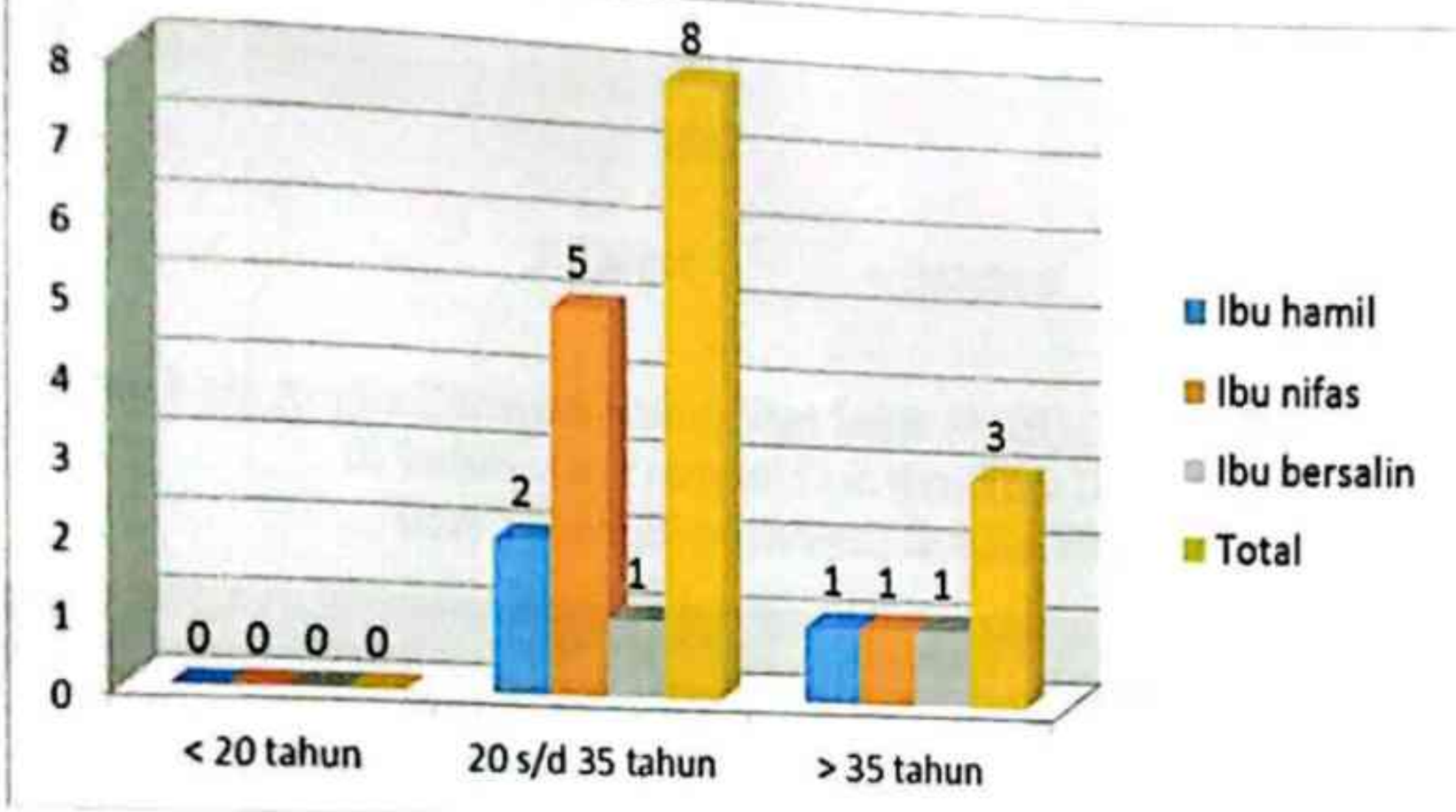
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 3 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.6 berikut ini :

Grafik 3.6. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2017



Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena penyebab tidak langsung sebanyak 5 kasus disusul dengan pre eklmasi berat sebanyak 4 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 8 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terbanyak pada kelompok ibu nifas sebanyak 6 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.7. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur Di Kota Dumai Tahun 2017



4. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Mulai tahun 2017, karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan mengunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2017 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 70,25 tahun (diasumsikan sama dengan tahun 2016 karena data terbaru dari BPS belum ada). Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2017 dapat di lihat pada grafik 3.8 berikut ini :

Grafik 3.8. Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai
Tahun 2017



Tabel 3.18. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru
Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2015

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2010	69,81	70,15	69,93
2.	2011	70,01	70,32	69,95
3.	2012	70,20	70,49	70,02
4.	2013	70,40	70,67	70,04
5.	2014	70,59	70,76	70,05
6.	2015	70,70*	70,93	70,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2016
* UN, World Population Prospects the 2012 revision

Sasaran Strategis 8

Menurunnya Morbiditas

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.4 berikut di bawah ini :

Tabel 3.19. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 KH	1	1	0,06	100
2	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	per 1.000 KH	88	88	86,87	98,72
3	Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	per100.000 KH	< 1	< 1	0,75	100
4	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Tahun	60	59	30,91	100
					Rata-rata Capaian Kinerja	99,68

Terlihat dari tabel 3.19 diatas pada sasaran misi kedua ini dengan 4 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Angka Kesakitan Malaria**

   Target kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (Annual Parasite Incidence) Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 1 per 1.000 penduduk, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (Annual Parasite Incidence) adalah sebesar 0,53 per 1.000 penduduk. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (baik).

2. **Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +**

   Target kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 88%, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 86,87%. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 98,72%(kurang baik).

3. **Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko**

   Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar < 1%, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko adalah sebesar 0,75%. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (baik).

4. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 59 per 100.000 penduduk, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah sebesar 30,91 per 100.000 penduduk. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (baik).

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran menurunnya Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2017 adalah sebesar 86,84% yang berarti tingkat pencapaiannya baik.

Tabel 3.20 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 KH	1	0,06	1	194
2	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	per 1.000 KH	≥88	86,87	≥88	98,72
3	Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	per100.000 KH	< 1	0,75	< 1	125
4	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Tahun	60	30,91	55	143

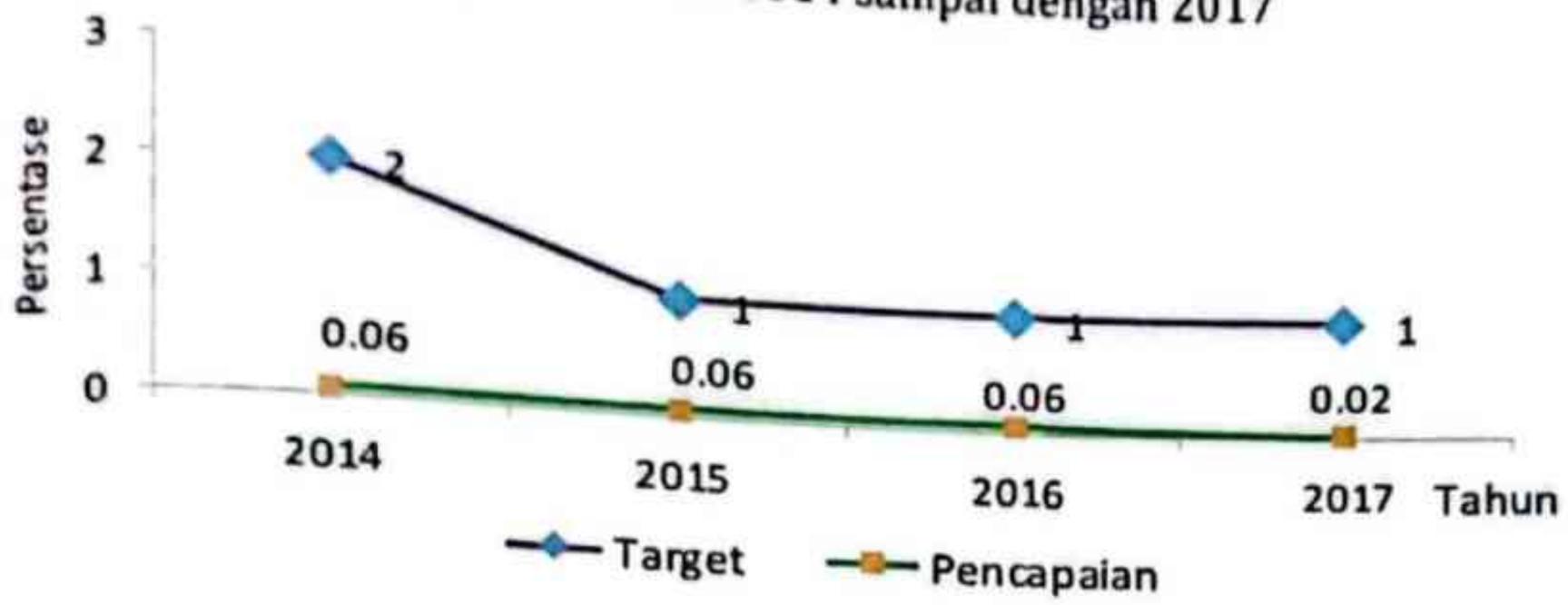
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 944 kasus malaria klinis. Dari 944 kasus yang ada terdapat 5 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,02 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,06 per 1.000 penduduk, terlihat pencapaiannya meningkat. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita

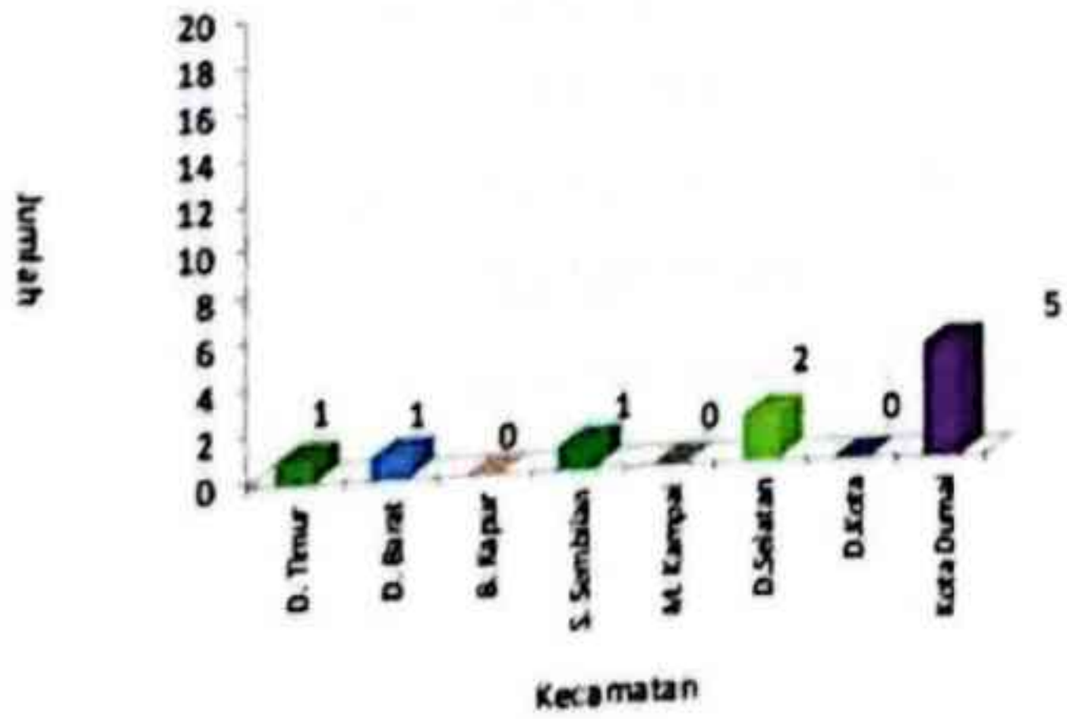
Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari grafik 3.9 dibawah ini :

Grafik 3.9. Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 2 kasus (40%). Hal tersebut disebabkan tingginya mobilitas penduduk baik warga lokal maupun warga pendatang dari luar Kota Dumai dan pembukaan lahan perkebunan yang berpotensial berkembangnya nyamuk malaria. Hal ini cukup mengejutkan mengingat daerah yang selama ini dikenal dengan daerah high endemis Malaria adalah Kecamatan Sungai Sembilan. Dengan faktor resiko tersebut maka satu wilayah Kecamatan Bukit Kapur menjadi daerah high endemis Malaria. Kecamatan Sungai Sembilan merupakan kecamatan terbanyak kedua ditemukannya kasus Malaria positif yakni sebanyak 1 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.10 berikut ini :

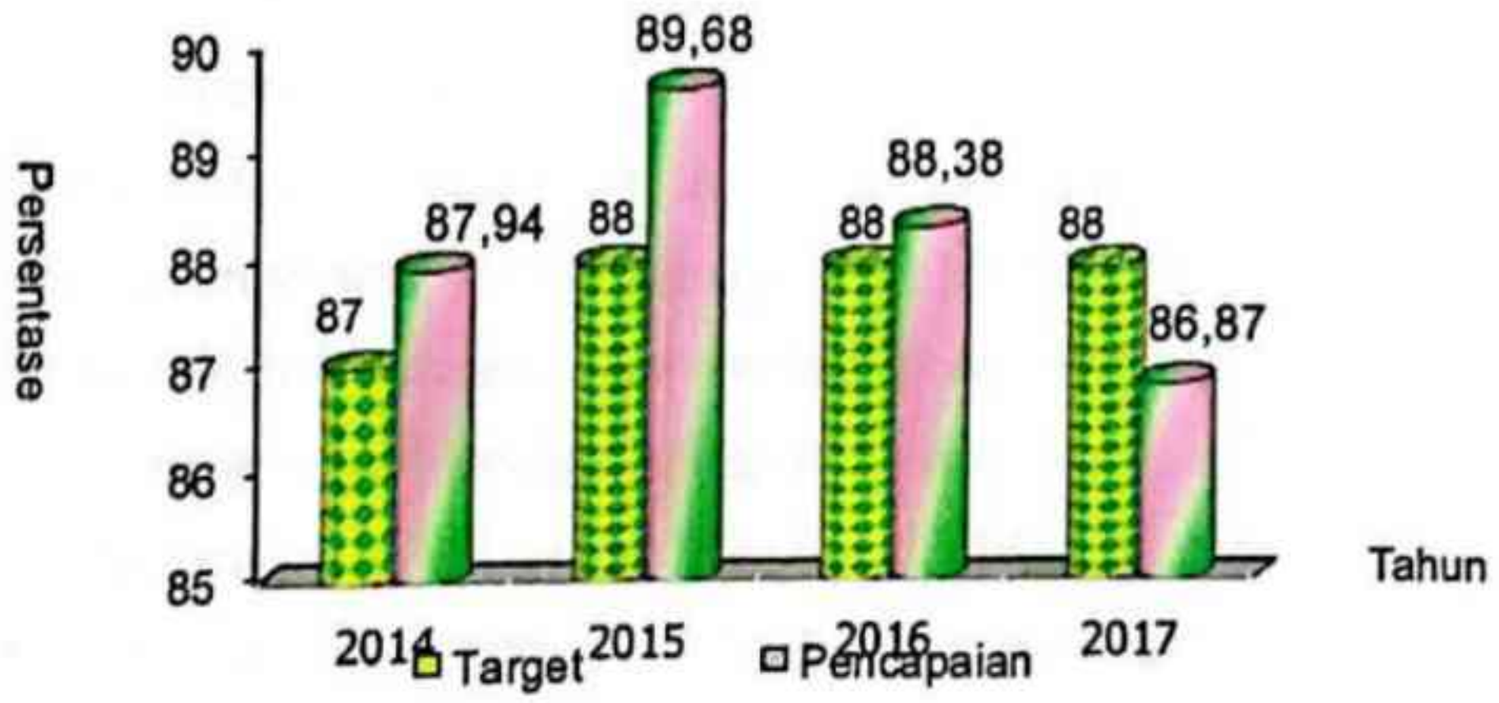
Grafik 3.10. Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2017



2. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2017 dari total 297 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 86,87%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 88,38%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2017 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan dapat dilihat dari grafik 3.11 berikut ini :

Grafik 3.11. Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +
Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017



3. Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 398 kasus yang terdiri dari 341 kasus lama dan 57 kasus baru yang ditemukan tahun 2017. Dari 398 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 153 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 245 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2017 adalah sebesar 0,75% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 32.719 orang).

Grafik 3.12. Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0,72%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2017 sebesar < 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

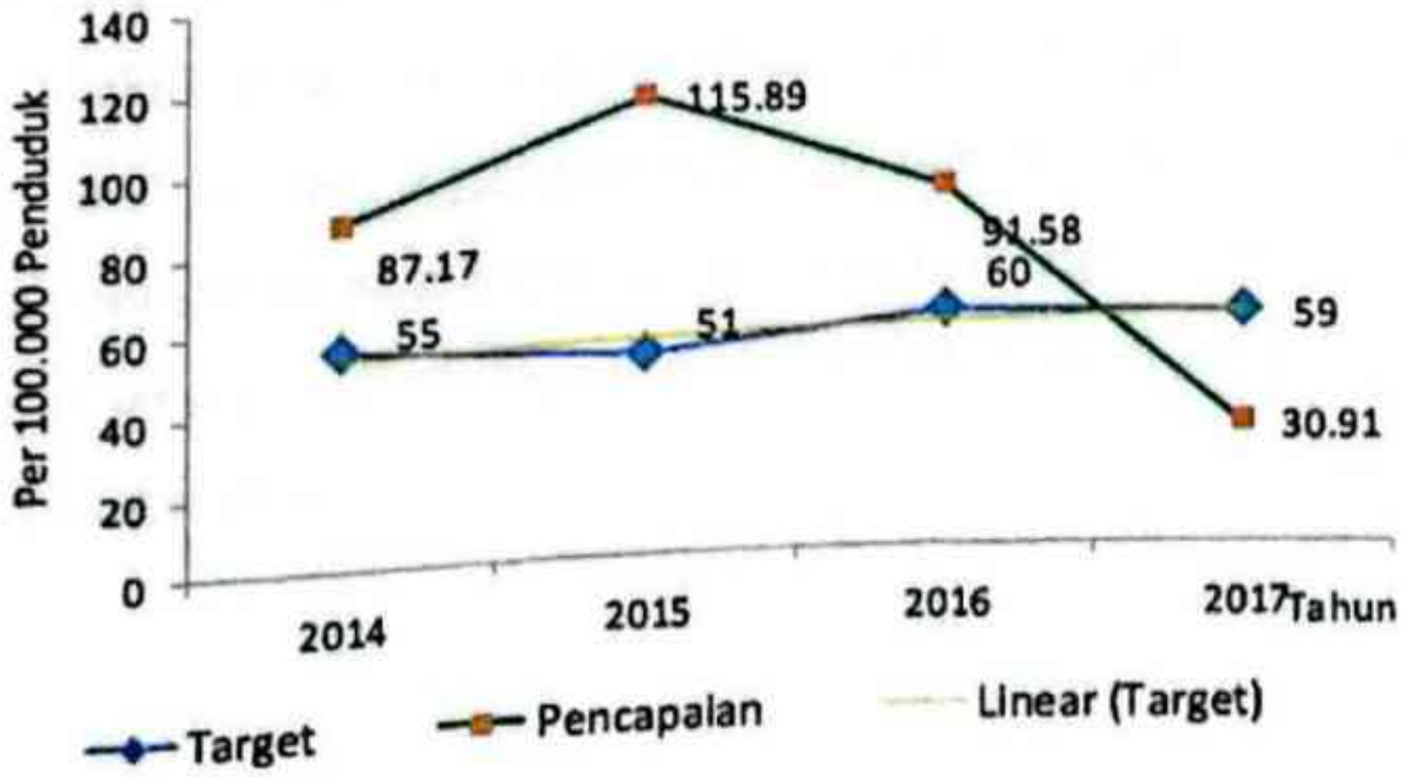
Grafik 3.13. Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai Dari Tahun 2014 s/d 2017



4. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

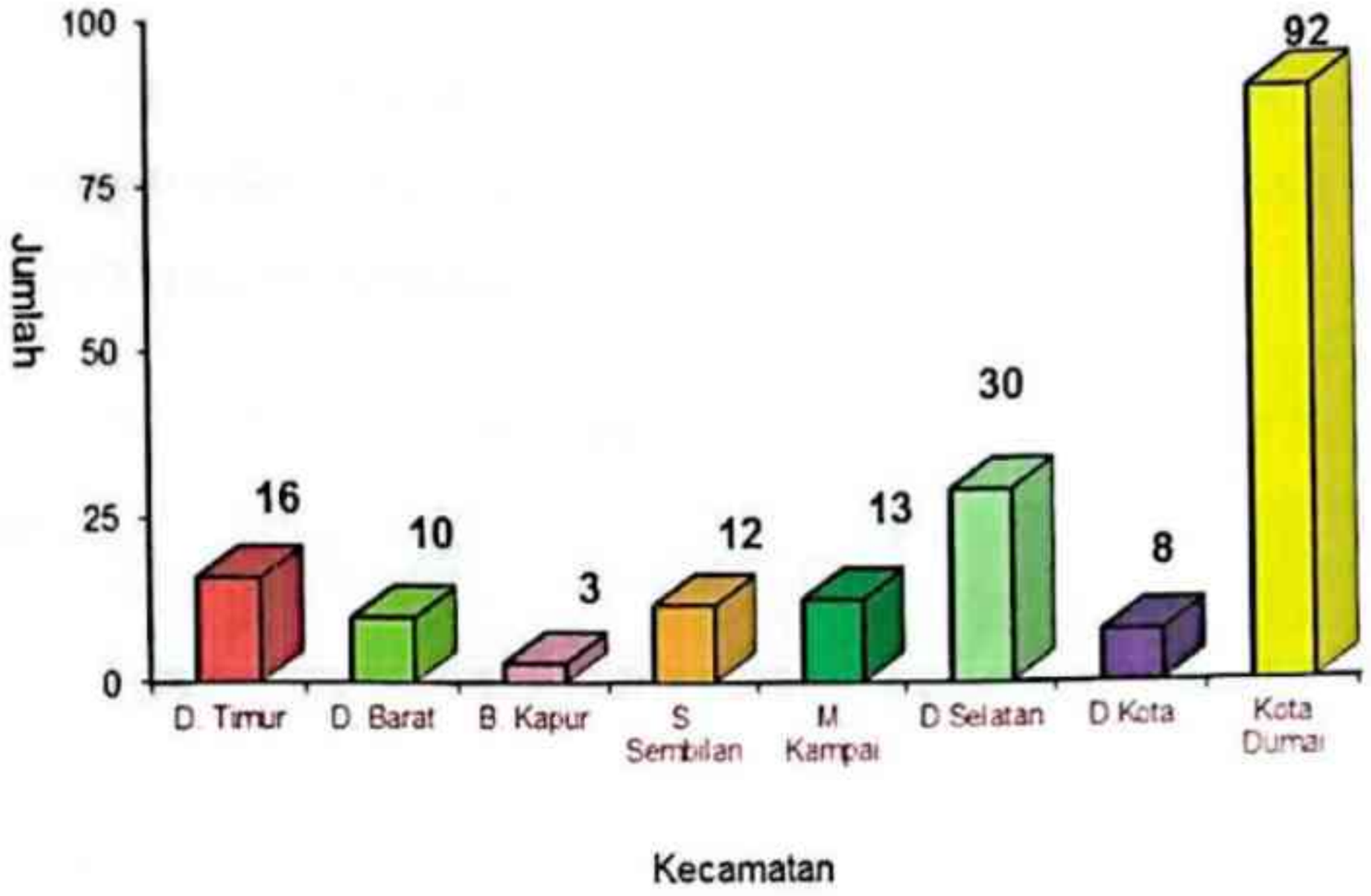
Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2017 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 92 kasus atau IR = 30,91 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 1 orang atau CFR = 1,09%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 290 kasus atau IR = 91,58 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 2 kasus atau CFR = 0,69%, maka ada sedikit penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 59 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut dibawah target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti ± 80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Grafik 3.14. Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 30 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 16 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.15 berikut ini :

Grafik 3.15. Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2017



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektit dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 100 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Status Gizi

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kesehatan. Untuk mengukur misi kedua ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.21 berikut di bawah ini :

Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	0,01	3	0,02	199,33
2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	0,41	7	0,30	195,71
Rata-rata Capaian Kinerja						197,52

Terlihat dari tabel 3.21 diatas pada misi kedua ini 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Persentase Balita Dengan Gizi Buruk**

   Target kinerja Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai pada tahun 2017adalah sebesar 3%, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Persentase Balita Dengan Gizi Buruk adalah sebesar 0,02%. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 199,33% (baik).

2. **Persentase Balita Dengan Gizi Kurang**

   Target kinerja Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 7%, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Persentase Balita Dengan Gizi Kurang adalah sebesar 0,30%. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 195,71% (baik).

Tabel 3.22. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

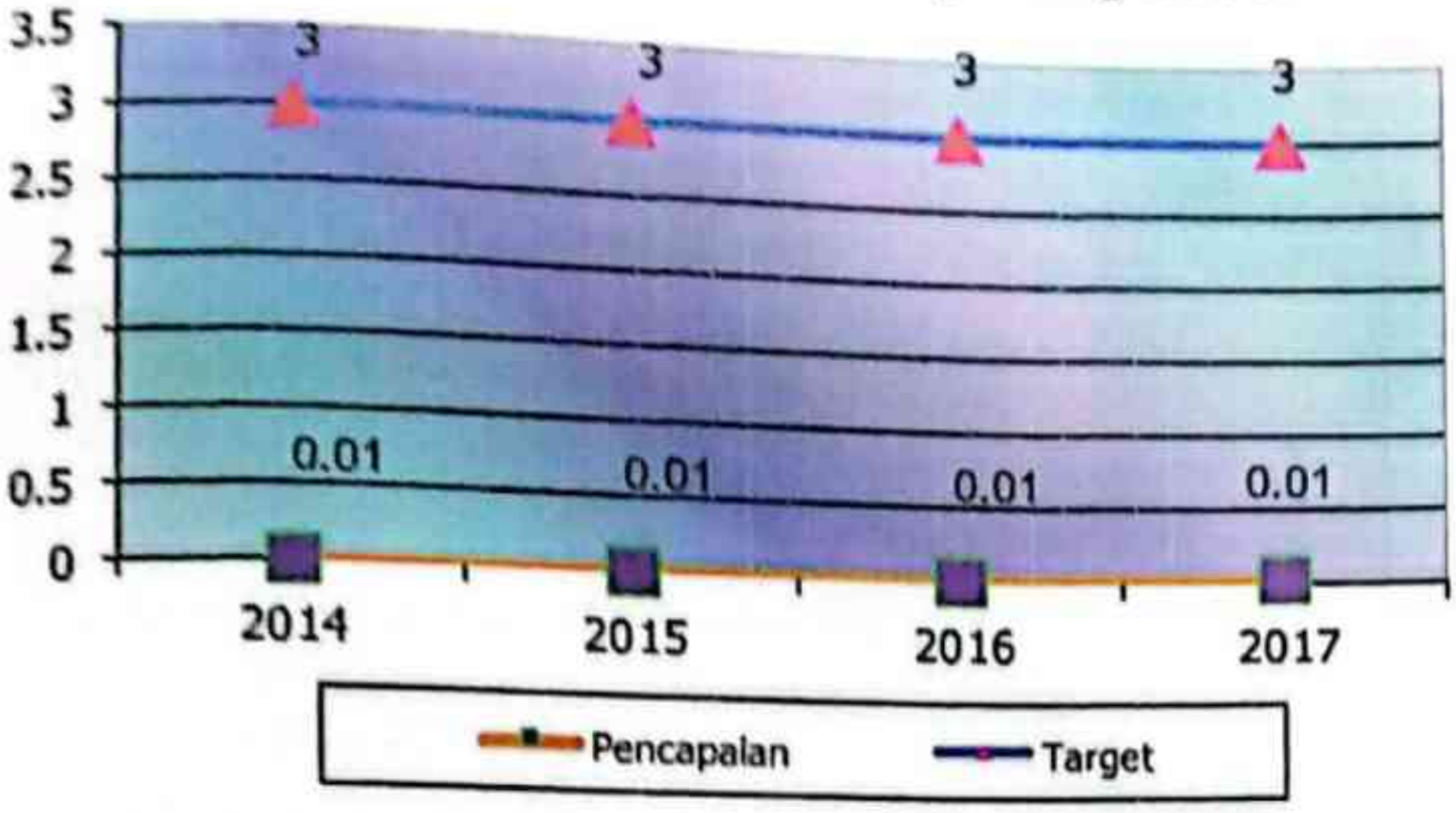
No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	0,01	0,02	1	198
2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	0,41	0,30	3	190

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2013 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal Ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2017 ditemukan 5 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Dumai Kota, Sungai sembilan, Medang Kampai, Purnama dan Bukit Kayu Kapur. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 0,02%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 3 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2017 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 3.16. Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2017



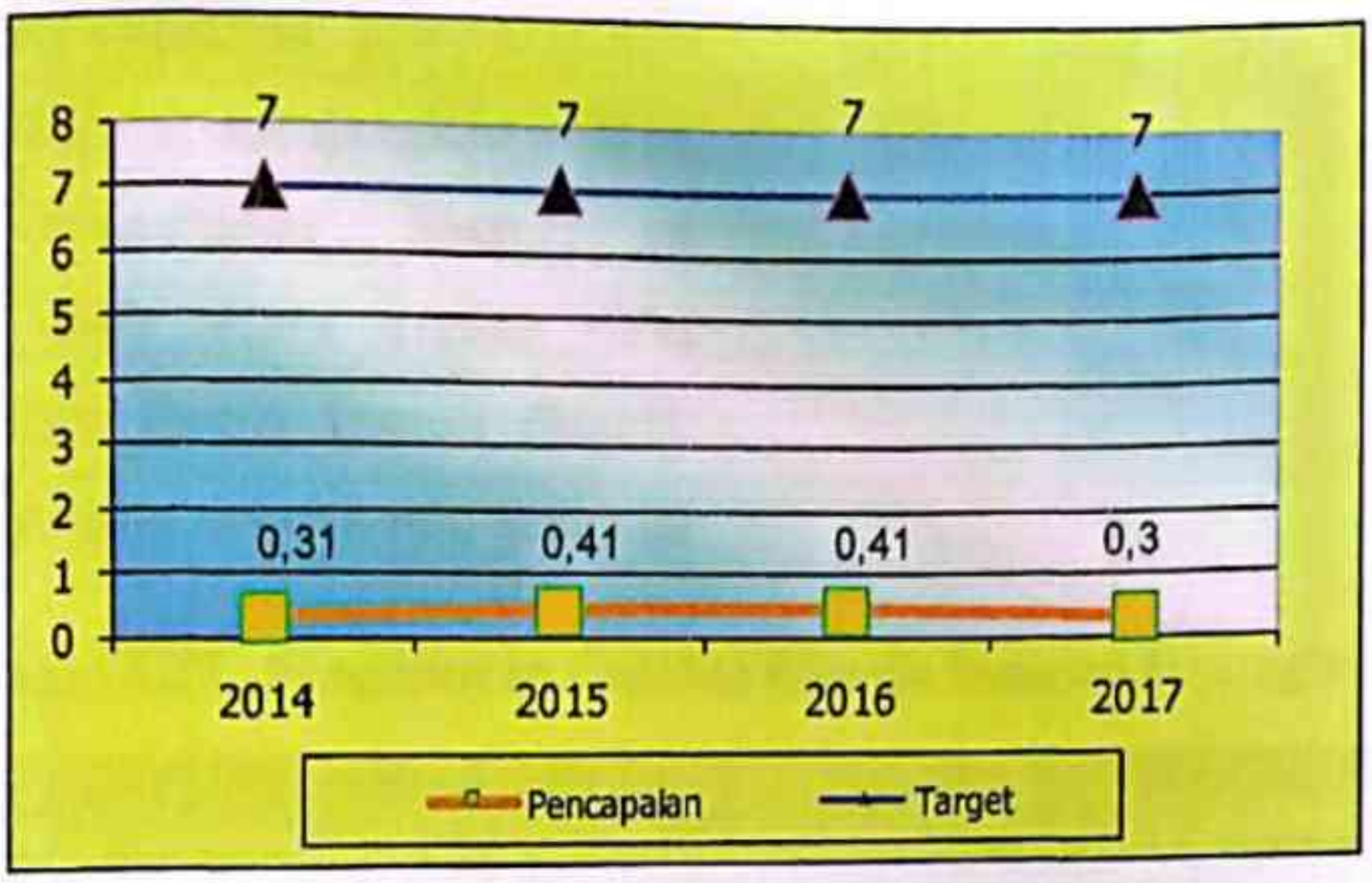
Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

2. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Selama tahun 2017 kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 104 kasus dari 34.278 balita yang ditimbang, sehingga persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 0,30%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 152 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,41%, terlihat ada

penurunan kasus balita dengan gizi kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2017 yakni sebesar 7%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 3.17. Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang
Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2017



Melalui pelaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yakni pelacakan kasus balita dengan gizi kurang selama tahun 2017 ditemukan 232 kasus balita gizi kurang dan balita BGM. Setelah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu yaitu sebanyak 80 gram selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pada akhir tahun 2017 jumlah kasus balita gizi kurang dan balita BGM berkurang menjadi 38 kasus balita gizi kurang. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 6 (enam) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.23 berikut di bawah ini :

Tabel 3.23. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	75,87	78	81,19	104
2	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3,79	3	3,57	81
3	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,54	1,5	1,06	71
4	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	57,41	78	64,80	83
5	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	%	37,06	31	34,31	89,31
6	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit	%	17,56	20	14,23	128,85
					Rata-rata Capaian Kinerja	92,86

Terlihat dari tabel 3.23 diatas pada sasaran kesepuluh ini 6 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)**

Dengan terbangunnya gedung ruang rawat inap I,II,III dan telah dioperasinalkannya gedung tersebut terutama lantai I dengan bertambahnya

jumlah tempat tidur tersebut , Angka persentasi tempat tidur yang digunakan di RSUD Kota Dumai selama tahun 2017 yaitu 81,19. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas perawatan Rumah sakit oleh masyarakat telah Ideal.Adapun standar ideal BOR menurut depkes 2005 adalah 60 – 85%.

2. **ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang di rawat di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian Rata rata lamanya seorang pasien dirawat di rumah sakit (hari) menjadi 3,57 hari dengan capaian 100% selama tahun 2017.

3. **TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang di rawat di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu antara waktu sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien, sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya yaitu 1,06 hari dengan capaian kurang dari 100% selama tahun 2017. Hal ini terjadi karena panjangnya antrean pasien yang akan menempati ruangan perawatan.

4. **BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang di rawat di RSUD Kota Dumai.Dengan demikian tingkat penggunaan sebuah tempat tidur selama tahun 2017 adalah 64,80 kali sedangkan batas ideal BTO adalah 40 – 50 kali/ pasien. Hal ini

menunjukkan bahwa BTO RSUD Kota Dumai Kurang efisien artinya dari angka tersebut terlihat bahwa perlu penambahan tempat tidur di RSUD Kota Dumai.

5. **GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit.**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksannya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dimana angka kematian umum untuk setiap penderita keluar Rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai sebesar 34,31% dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien yang keluar Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien masih dalam batas normal. Hal ini sesuai dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.

6. **NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit.**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksannya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Indikator kinerja sasaran ini menunjukkan angka kematian 48 jam setelah di rawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar di RSUD Kota Dumai selama tahun 2017 adalah sebesar 14,23%,dengan capaian 71%. Sedangkan nilai batas ideal NDR adalah kurang dari 25 orang dari setiap 1000 penderita keluar.

Tabel 3.24. Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Dumai Tahun 2017

RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	TT x 365 HARI	PASIEN KELUAR				JUMLAH PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT
			HIDUP	MATI					
				<48 JAM	>48 JAM	JML			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
RAWAT INAP A	44	16060	3137	96	111	207	3344	18075	14320
RAWAT INAP B	52	18980	2876	6	11	17	2893	12725	9932
RAWAT INAP C	28	10220	1887	12	8	20	1907	6415	4733
RAWAT INAP D	23	8395	1230	65	50	115	1345	7098	5840
RAWAT INAP KB	48	17520	3377	11	4	15	3392	15329	11907
RAWAT INAP PERINATOLOGI	24	8760	598	41	27	68	666	3451	2785
RAWAT INAP INTENSIF	7	2555	326	116	37	153	479	2064	1583
VIP A	33	12045	2255	10	4	14	2269	10219	7804
VIP B	23	8395	1961	10	8	18	1979	8198	6245
Total	282	102930	17647	367	260	627	18274	83574	65149
Kelas III	74	27010	6695	147	104	251	6946	33430	26060
PERBANDINGAN									
2017	282	102930	17647	367	260	627	18274	83574	65149
2016	251	91866	13877	281	253	534	14411	69698	54635
2015	225	82125	13510	246	259	505	14015	59320	46192
2014	211	77015	13808	270	234	504	14312	59078	45438
2013	211	77015	15388	287	187	474	15895	66071	50212

Dari Tabel 3.24 Indikator Pelayanan RSUD Kota Dumai tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tempat tidur tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penambahan. Penambahan Ruang Rawat Inap Kelas I,II dan III sudah selesai di bangun dengan sistem multiyears dan di tahun 2016 sudah di gunakan untuk lantai dasar dan tahun 2018 lantai II segera di operasikan. Jumlah Lama pada periode 2013 s/d 2017 dirawat dengan dengan persentase standard an tidak terlalu mengalami kenaikan dan penurunan yang drastis dari tahun ke tahun. Berikut di lampirkan data temapat tidur pada periode 2013 s/d 2017.

Tabel. 3.25. Jumlah Tempat Tidur pada periode 2013-2017
Rumah Sakit Umum Kota Dumai Tahun 2017

Instansi	Jumlah TT (Tempat Tidur) dan Tahun				
	TT /2013	TT /2014	TT /2015	TT /2016	TT /2017
RAWAT INAP A	29	34	34	44	44
RAWAT INAP B	31	34	34	40	52
RAWAT INAP C	29	29	29	27	28
RAWAT INAP D	21	22	22	24	23
RAWAT INAP KB	35	35	35	46	48
RAWAT INAP PERINATOLOGI	7	7	7	20	24
RAWAT INAP INTENSIF	15	20	20	7	7
VIP A & E	18	18	18	18	33
VIP B & C	26	116	26	25	23
Total	211	315	225	251	282

Data diatas Jumlah tempat tidur pada periode 2013 s/d 2017 mengalami penambahan cukup baik guna.

Dari tabel perbandingan diatas cara masuk pasien rujukan dan non rujukan RSUD Kota Dumai tahun 2016 dapat kita rincikan berdasarkan nama poliklinik, berikut Tabel. 3.26

Tabel.3.26 Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Cara Masuk RSUD Kota Dumai Tahun 2017

NO	NAMA POLIKLINIK	RUJUKAN	NON RUJUKAN
1	ANAK	2931	3033
2	INTERNE	16474	2295
3	KEBIDANAN	5803	1820
4	BEDAH	10551	2657
5	UMUM	7	3232
6	GIGI	238	759
7	MATA	7858	1516
8	SYARAF	4070	625
9	THT	2376	1314
10	FISIOTERAPY	7914	1685
11	BEDAH ORTHOPEDI	1301	200
12	BEDAH MULUT	550	145
13	KULIT & KELAMIN	1943	1131
14	PISKIATRI	2089	208
15	PARU-PARU	2687	510
JUMLAH		**66.792**	**21.130**

Grafik 3.18. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Masuk



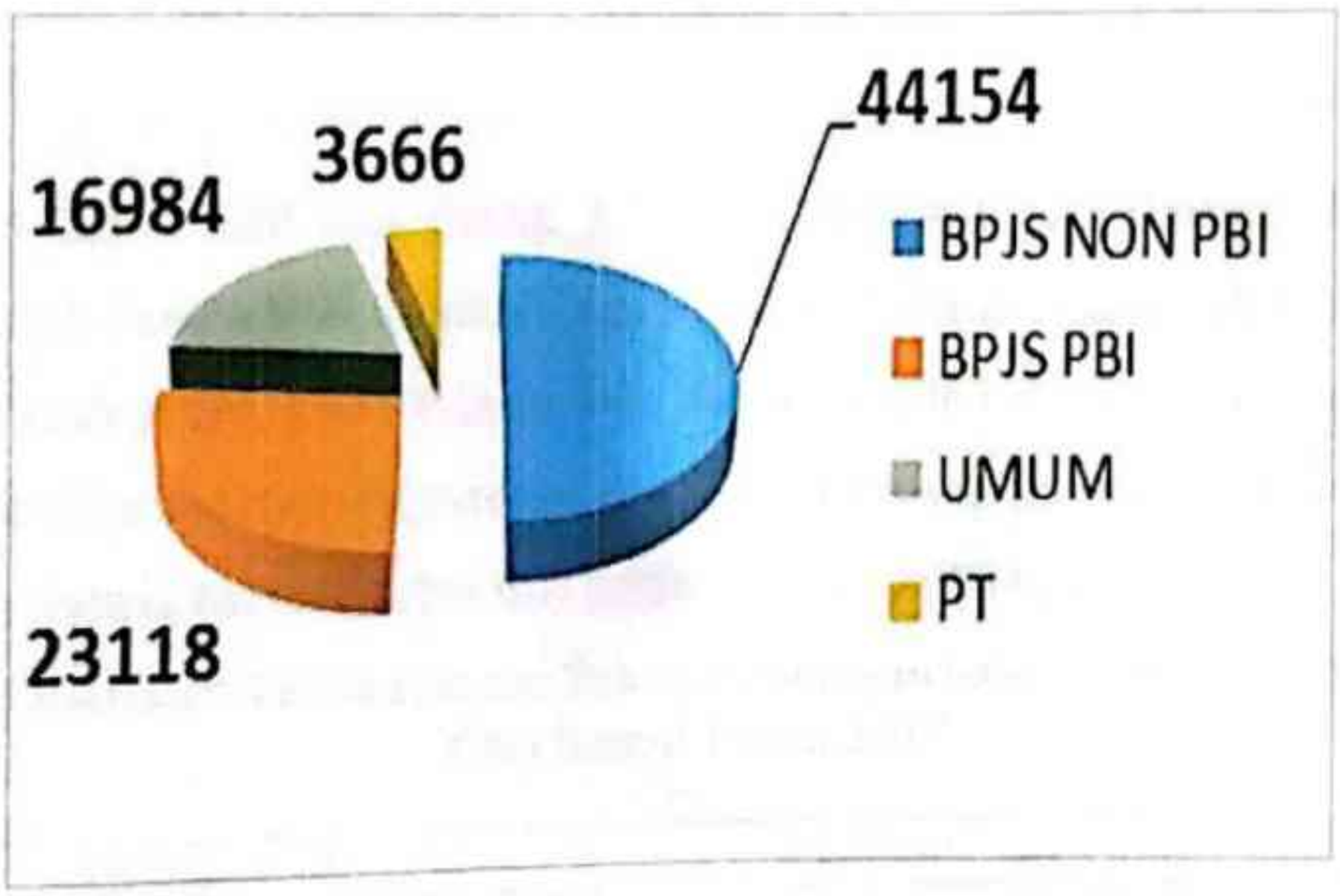
Dari Tabel 3.27 dan Grafik 3.18 Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Cara Masuk Tahun 2017 dapat dilihat Kunjungan pasien rujukan terbanyak ada pada Poli Penyakit Dalam sebesar 16.474 dan Paling Sedikit ada pada Poli Umum yaitu 7, sedangkan untuk pasien non rujukan yang paling banyaka adalah poli anak sebesar 3.033 dan paling sedikit adala pasien Bedah mulut sebesar 145 pasien.

Hal tersebut tidak kalah pentingnya dengan cara bayar pasian di RSUD Kota Dumai, dengan table sebeagai berikut:

Tabel 3.27. Cara Bayar Pasien Rawat jalan RSUD Kota Dumai Tahun 2017

No	POLIKLINIK	CARA BAYAR				JUMLAH
		BPJS NON PBI	BPJS PBI	UMUM	PT	
1	INTERNE	11193	5325	1812	446	18776
2	ANAK	2022	879	2584	476	5961
3	KEBIDANAN	3653	2178	1570	218	7619
4	BEDAH	6453	4401	1896	462	13212
5	MATA	5083	2808	1033	449	9373
6	GIGI	221	16	622	166	1025
7	THT	1641	739	1087	222	3689
8	SYARAF	2746	1332	527	80	4685
9	UMUM	0	0	3212	10	3222
10	REHABILITASI MEDIK	6093	1909	797	799	9598
11	BEDAH ORTHOPEDI	1005	316	138	44	1503
12	KULIT DAN KELAMIN	1330	602	956	190	3078
13	BEDAH MULUT	363	187	116	30	696
14	PARU-PARU	1297	1388	451	55	3191
15	JIWA/PISKIATRI	1054	1038	183	19	2294
JUMLAH		44154	23118	16984	3666	87922

Grafik 3.19. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2017



Dari Tabel 3.27 dan Grafik 3.19 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan yang tertinggi adalah Pasien BPJS Non PBI sebesar 44.154 Pasien, Kedua Pasien BPJS PBI sebesar 23.118 Pasien dan Ketiga Pasien Umum Sebesar 16.984 Pasien, dan hal yang demikian tetap menjadi perioritas pelaporan Instalasi Rawat Darurat RSUD Kota Dumai dengan table sebagai berikut:

Tabel 3.28. Laporan Bulanan Instalasi Rawat Darurat Tahun 2017

Jenis Pelayanan	Rujukan	Non Rujukan	Jumlah	TINDAK LANJUT PELAYANAN			
				Rawat	Rujuk	Pulang	Mati Sbl Dirawat
BEDAH	153	3976	4129	1402	77	2638	12
NON BEDAH	273	12745	13018	6972	38	5889	119
KEBIDANAN	408	2702	3110	2791	21	292	6
JUMLAH	834	19423	20257	11165	136	8819	137

Grafik 3.20. Cara Masuk Gawat Darurat Pasien RSUD Kota Dumai Tahun 2017

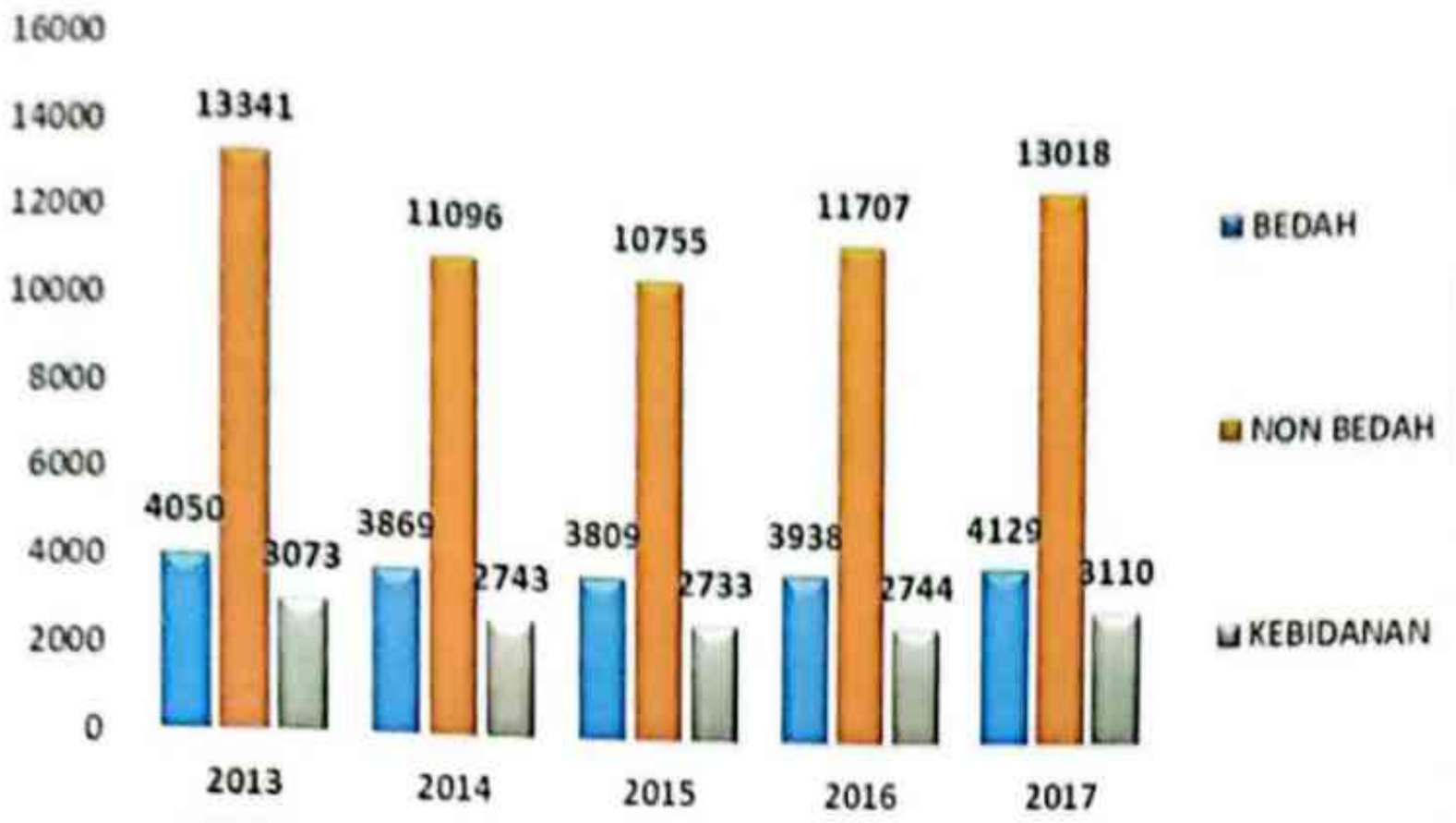


Dari Tabel 3.28 dan Grafik 3.20 Cara Masuk Gawat Darurat dapat dilihat bahwa Jumlah Pasien Non Rujukan Non Bedah terbanyak sebesar 19.423 pasien dan Pasien Rujukan sebesar 834 Pasien. Dan dalam perode berjalan dari tahun 2013 s/d 2017 Instalasi gawat darurat menjadi perhatian serius dalam menetukan nilai kinerja RSUD Kota Dumai, berikut table IGD dalam Periode 2013 s/ 2017:

Tabel 3.29. Perbandingan Tahun Kunjungan Gawat Darurat RSUD Kota Dumai Tahun 2017

JENIS PELAYANAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
BEDAH	4050	3869	3809	3938	4129
NON BEDAH	13341	11096	10755	11707	13018
KEBIDANAN	3073	2743	2733	2744	3110
JUMLAH	20464	17708	17297	18389	20257

Grafik 3.21. Perbandingan Tahun Kunjungan Gawat Darurat RSUD Kota Dumai Tahun 2017



Dari Tabel. 3.29 dan Grafik 3.21 Pelayanan Gawat Darurat di RSUD Kota Dumai dapat dilihat Pasien Non Bedah mengalami Kenaikan sampai Tahun 2017 rata-rata 1.000 atau sebesar 10%.

Selaian Instalasi Gawat Darurat ada beberapa instalasi yang menjadi penilaian kinerja RSUD Kota Dumai periode 2013 s/d 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.30. Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD Kota Dumai

RUANGAN / INSTALASI	BOR (%)	LOS (Hari)	TOI (Hari)	BTO	GDR (0/00)	NDR (0/00)
RAWAT INAP A	112.55	4.28	-0.60	76.00	61.90	33.19
RAWAT INAP B	67.04	3.43	2.16	55.63	5.88	3.80
RAWAT INAP C	62.77	2.48	2.00	68.11	10.49	4.20
RAWAT INAP D	84.55	4.34	0.96	58.48	85.5	37.17
RAWAT INAP KB	87.49	3.51	0.65	70.67	4.42	1.18
RAWAT INAP PERINATOLOGI	39.39	4.18	7.97	27.75	102.10	40.54
RAWAT INAP INTENSIF	80.78	3.30	1.03	68.43	319.10	77.24
VIP A	84.84	3.44	0.8	68.76	6.17	1.76
VIP B	97.65	3.16	0.1	86.04	9.1	4.04
Total	81.19	3.57	1.06	64.80	34.31	14.23
Kelas III	123.77	3.75	-0.92	93.87	36.11	14.97
PERBANDINGAN						
2017	**81.19**	**3.57**	**1.06**	**64.8**	**34.31**	**14.23**
2016	75.87	3.79	1.54	57.41	37.06	17.56
2015	72.23	3.30	1.63	62.29	36.29	18.48
2014	**76.71**	**3.17**	**1.25**	**67.83**	**35.22**	**16.35**
2013	**85.79**	**3.17**	**0.69**	**75.16**	**29.89**	**11.79**

Dari Tabel 3.30 diatas dapat dilihat bahwa Tahun 2017 Jumlah BOR sebesar 81.19% mengalami penurunan diakibatkan jumlah pasien yang banyak sementara jumlah tempat tidur masih sama dari tahun ke tahun.

Tabel 3.31. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	75,87	81,19	80	101,49
2	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3,79	3,57	3	81,00
3	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,54	1,06	1.4	124,29
4	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	57,41	64,80	78	116,92
5	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	%	37,06	34,31	31	89,32
6	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit	%	17,56	14,23	20	128,85

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)

Target dari indikator sasaran ini adalah persentasi tempat tidur yang digunakan di RSUD Kota Dumai dengan target akhir RPJM yaitu 80% dan pada tahun 2017 terealisasi 81,19% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 101,49%.

b. ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini lamanya seorang pasien dirawat di rumah sakit dengan target akhir RPJM yaitu 3 hari dan pada tahun 2017 terealisasi 3,57 hari dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 81%.

c. TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini waktu sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien, sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya dengan target akhir

RPJM yaitu 1.4 hari dan pada tahun 2017 terealisasi 1,06 hari dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 124,29%.

d. BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur

Target dari indikator sasaran ini tingkat penggunaan sebuah tempat tidur dengan target akhir RPJM yaitu 78 kali dan pada tahun 2017 terealisasi 64,80 kali dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 116,92%.

e. GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar

Target dari indikator sasaran ini adalah menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien yang keluar Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien dengan target akhir RPJM yaitu 31% dan pada tahun 2017 terealisasi 34,31% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 89,32%.

f. NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit

Target dari indikator sasaran ini adalah menunjukkan angka kematian 48 jam setelah di rawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar di RSUD dengan target akhir RPJM yaitu 20% dan pada tahun 2017 terealisasi 14,23% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 128,85%.

Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Sasaran strategis 11 (sebelas) ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.** Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.32 berikut di bawah ini :

Tabel 3.32. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2016		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka melek huruf	%	99,52	99,44	99,53	100,09
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100	>100	121,60	121,60
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100	>100	125,07	125,07
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,54	100	107,33	107,33
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,46	88,76	100,89	113,67
					Rata-rata Capaian Kinerja	113,55

Terlihat dari tabel 3.31 di atas pada sasaran misi kedua ini dengan 5 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Angka melek huruf

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Angka melek huruf maksud adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bias baca tulis.target capaian kondisi akhir 2016 adalah 99,52% sedangkan realisasi 2017 adalah 99,53% yang berarti capaian telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian yaitu 100,09%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak meningkatkan angka melek huruf yaitu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SD dan jenjang SMP. Selain itu untuk penduduk yang putus sekolah, pada program ini terdapat kegiatan penyelenggaraan Paket A dan Paket B untuk menekan angka buta huruf.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi kasar atau APK SD/MI/Paket A yang menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI/ Paket A. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A (berapapun usianya) terhadap jumlah

penduduk usia 7 sampai 12 tahun. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Capaian indikator ini sampai tahun 2016 sudah lebih besar dari 100% begitu juga realisasi pada tahun 2017 yang mencapai 121,60%. Hal ini menunjukkan daya serap penduduk pada jenjang SD/MI di Kota Dumai sangat baik.

Nilai APK yang lebih dari 100% disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Pada jenjang SD/MI, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD/MI atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD/MI. Hal lain yang menyebabkan besarnya APK ini yaitu banyaknya perpindahan penduduk ke Kota Dumai yang masuk ke sekolah, tetapi belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga jumlah penduduk usia sekolah lebih sedikit dari jumlah peserta didik yang ada pada jenjang SD/MI.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pada program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian APK SD/MI/Paket A. Diantaranya seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kegiatan-kegiatan lain yang meningkatkan partisipasi penduduk untuk masuk sekolah.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi kasar atau APK SMP/MTs/Paket B yang menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada

jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. Capaian indikator ini sampai tahun 2016 sudah lebih besar dari 100% begitu juga realisasi pada tahun 2017 yang mencapai 125,07%. Hal ini menunjukkan daya serap penduduk pada jenjang SMP/MTs/Paket A di Kota Dumai sangat baik.

Nilai APK yang lebih dari 100% disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Pada jenjang SMP/MTs, banyak anak-anak usia diatas 15 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SMP/MTs atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 13 tahun tetapi telah masuk SMP/MTs. Hal lain yang menyebabkan besarnya APK ini yaitu banyaknya perpindahan penduduk ke Kota Dumai yang masuk ke sekolah, tetapi belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga jumlah penduduk usia sekolah lebih sedikit dari jumlah peserta didik yang ada pada jenjang SMP/MTs.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pada program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian APK pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Diantaranya seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kegiatan-kegiatan lain yang meningkatkan partisipasi penduduk untuk masuk sekolah.

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SD/MI/Paket A yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni

(APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian indikator ini sampai tahun 2016 adalah 99,54% sedangkan realisasi tahun 2017 adalah 107,33% yang berarti capaian sudah mencapai target yaitu sebesar 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pencapaian target tersebut dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah. Sebagaimana diketahui dari tahun ke tahun usia masuk sekolah pendidikan dasar cenderung semakin cepat. Menurut data tahun 2016 siswa baru yang memasuki sekolah SD di tingkat pertama atau calon siswa yang mendaftar masuk SD atau sederajat lebih hampir 15% belum mencukupi umur 7 tahun. Bahkan masih ada yang belum mencapai umur 6 tahun.

Hal ini pada dasarnya diharapkan peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu sesuai dengan kematangan psikologi perkembangan anak dan sesuai juga dengan lingkungan pendidikan yang diterimanya. Namun di sisi lain dapat dikatakan bahwa jika banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya meskipun secara usia belum cukup, yang seringkali diasumsikan seiring dengan perkembangan tingkat ekonomi sebuah keluarga atau masyarakat.

Namun tentu saja selain berpengaruh terhadap kesiapan siswa tersebut dalam mengikuti pendidikan secara mental dan emosional, hal ini juga mempengaruhi angka partisipasi murni, dimana indikator ini membandingkan siswa SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun (bukan seluruh siswa SD/ sederajat) dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun.

Hal ini didukung oleh surat edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan umur calon peserta didik bagi sekolah pada saat penerimaan siswa baru. Dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal ini dipandang penting karena jika aturan umur tidak secara ketat dilakukan pada tingkat SD/ sederajat akan mempengaruhi APM di tingkat pendidikan selanjutnya.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Target dari indikator sasaran ini yaitu yaitu angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP/MTs/Paket B yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 13-15 Tahun Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian indikator ini sampai tahun 2016 adalah 80,46% sedangkan realisasi tahun 2017 adalah 100,89% yang berarti capaian sudah melebihi target yaitu sebesar 88,76%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sama seperti APM SD/MI/SDLB/ Paket A, pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah yang dimulai dari pendidikan anak usia dini. Hal ini tentu saja selain berpengaruh terhadap APM di tingkat pendidikan selanjutnya. Diharapkan upaya sosialisasi dan pengetatan usia sekolah ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.33. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Angka melek huruf	%	99,52	99,53	99,48	100,05
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100	121,60	>100	121,60
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100	125,07	>100	125,07
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,54	107,33	>100	107,33
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,46	100,89	>100	100,89

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Angka melek huruf

Target dari indikator sasaran ini adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa baca tulis dengan target akhir RPJM yaitu 99,48% dan pada tahun 2017 terealisasi 99,53% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 100,05%.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Target dari indikator sasaran ini adalah partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI/ Paket A dengan target akhir RPJM yaitu >100% dan pada tahun 2017 terealisasi 121,60% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 121,60%.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Target dari indikator sasaran ini adalah partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B dengan target akhir RPJM yaitu >100% dan pada tahun 2017 terealisasi 125,07% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 125,07%.

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Target dari indikator sasaran ini persentase jumlah anak pada kelompok usia SD/MI/Paket A yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun target akhir RPJM yaitu >100% dan pada tahun 2017 terealisasi 107,33% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 107,33%.

e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Target dari indikator sasaran ini adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP/MTs/Paket B yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 dengan target akhir RPJM yaitu >100% dan pada tahun 2017 terealisasi 100,89% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 100,89%.

Sasaran Strategis 12

Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/ satuan pendidikan

Sasaran strategis 12 (dua belas) ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.34 berikut dibawah ini :

Tabel 3.34. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah:					
	-SD/MI	(per 1000 siswa)	0,320	0,277	0,320	115,52
	-SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0,293	0,370	0,293	79,18
Rata-rata Capaian Kinerja						97,35

Terlihat dari tabel 3.33 di atas pada sasaran misi kedua ini dengan 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah: -SD/MI**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah dengan penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah 1:307,64 hal ini berarti 1 sekolah jenjang SD/MI dapat melayani kurang lebih 307 penduduk usia 7-12 tahun. Capaian tahun 2017 ini cukup baik karna sudah melebihi target yaitu 1:339 dengan persentase capaian yaitu 110,19%.

   Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

2. **Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah:-SMP/MTs**

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah dengan penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah 1:366,35 hal ini berarti 1 sekolah jenjang SMP/MTs dapat melayani kurang lebih 366 penduduk usia 13-15 tahun. Capaian tahun 2017 ini cukup baik karna sudah melebihi target yaitu 1:473 dengan persentase capaian yaitu 129,11%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Tabel 3.35. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah:					
	-SD/MI	(per 1000 siswa)	0,320	0,320	0,277	115,52
	-SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0,293	0,293	0,370	79,19

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah:**

1. SD/MI

Target dari indikator sasaran ini adalah tercukupinya kebutuhan sekolah dengan penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI dengan target akhir RPJM yaitu 0,277 dan pada tahun 2017 terealisasi 0,320 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 115,52%.

2. SMP/MTs

Target dari indikator sasaran ini adalah yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah terhadap penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs dengan target akhir RPJM yaitu 0,370 dan pada tahun 2017 terealisasi 0,293 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 79,19%

Sasaran Strategis 13

Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sasaran strategis 13 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Sosial masyarakat". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.36 berikut di bawah ini :

Tabel 3.36. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	16.66	13,33	13,33	100
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	20.7	16	16	100
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	70	72	75	75
4	Rasio KDRT	Rasio	1:7	1:6253	6:7000	83,42
5	Kota Layak Anak	Status	Pratama	Madya	Madya	100
					Rata-rata Capaian Kinerja	89,61

Terlihat dari tabel 3.36 di atas pada sasaran misi kedua ini dengan 5 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif

Keberhasilan / tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik dimana kegiatan ini melibatkan OPD dan Perempuan Partai Politik dan Legislatif yang berjumlah 50 orang, sehingga diharapkan adanya peningkatan partisipasi perempuan untuk ikut berkecimpung di bidang Politik dan Jabatan Publik. Dimana target Tahun 2017 sebesar 13,3% dikarenakan masih legislatif sekarang masih dalam periode berjalan (2014 - 2019).

b) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercapainya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera dilakukan pada program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan didalam kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dan melakukan 7 kali pembinaan pada 7 Kecamatan yang melibatkan 210 orang warga dan Pembina dengan capaian partisipasi angkatan kerja perempuan pada Tahun 2017, dimana target sebesar 16% dengan realisasi 16% dengan realisasi fisik Rp 144.185.692.

c) Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Keberhasilan / tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh adanya Pendampingan kasus Perempuan dan Anak dengan terlaksana nya Kegiatan Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak . pada tahun 2017 menangani 60 kasus diantaranya ;1.kasus KDRT sebanyak 7 kasus 4 kasus diselesaikan dengan kegiatan konseling keluarga dan 3 kasus masih dalam proses.2. kasus kasus Kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebanyak 4 kasus semuanya telah diselesaikan dengan mediasi dan konseling keluarga 3. Kasus percobaan pencabulan dan Persetubuhan sebanyak 24 kasus , 1 kasus sudah diselesaikan dengan mediasi karenan kasus ini masih dalam tahap percobaan pencabulan dan 23 kasus masih dalam proses dan kami juga melakukan pendampingan melalui konsultasi hukum dan melakukan konseling melalui psikolog. 4. Kasus Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 17 kasus , 11 kasus sudah selesai melalui putusan pengadilan dan difersi di kepolisian dan 6 kasus masih dalam proses ini juga kami lakukan layanan psikolog dan konsultasi hukum.5. Kasus Pemisahan terhadap anak (PTA) sebanyak 4 kasus 1 kasus telah selesai melalui kesepakatan kedua belah pihan dalam layanan mediasi kedua belah pihak orang tua berhak menemui anaknya dengan bergantian mengasuh bagi haridan 3 kasus masih dalam proses ini juga masih dalam proses mediasi .6. Kasus Kekerasan terhadap anak (KTA) sebanyak 2 kasus ,kedua kasus ini sudah diselesaikan melalui mediasi .7 kasus Penelantaran Pendidikan sebanyak 2 kasus , 1 kasus sudah diselesaikan melewati

mediasi dengan pihak keluarga dan sekolah hasilnya anak dapat diterima kembalai disekolah yang bersangkutan.dan 1 kasus masih dalam proses.

d) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rasio KDRT dalam rumah tangga adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 Rumah tangga.

Rasio kdrt tahun 2017 adalah :

$$\frac{7(P2TP2A)+14(Polres)+448(PA)}{73692} = 6{,}36$$

Jadi rasio KDRT dalam tahun 2017 sebanyak 6:73962 Rumah tangga sedangkan untuk target dari indikator sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 1:62030. Kurang berhasil/tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi undang - undang KDRT di masyarakat, masih adanya anggapan masyarakat bahwa KDRT merupakan hal tabu untuk dibicarakan di luar, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor jika ditemukannya kasus KDRT. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut yakni dengan terlaksananya kegiatan pengembangan pusat layanan terpadu masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Dumai. Pusat layanan terpadu masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sekretariatnya berada di exs.Puskesmas Jaya Mukti Jl. Janur Kuning Jaya Mukti Dumai. Pusat layanan terpadu masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) memiliki koordinator Sekretariat P2TP2A 1 orang, petugas pendamping 6 orang dan petugas konselor 1 orang. Pusat layanan terpadu masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam pendampingan kasus petugas pendamping melakukan kerjasama lintas sektoral seperti layanan konseling, layanan hukum dan layanan psikologis. Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak s.d Tahun 2017 yang telah ditangani oleh Pusat Layanan Tepadu masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebanyak 60 kasus, dan dari 60 kasus tersebut dijumpai kasus KDRT sebanyak 7 kasus dan dari 7 kasus tersebut 4 kasus sudah selesai sedangkan 3 kasus lagi dalam proses. Selain itu dari 60 kasus kekerasan perempuan dan anak telah dilakukan layanan Konseling kepada klien sebanyak 40 kasus, layanan konsultasi psikologis sebanyak

28 kasus, layanan konsultasi hukum sebanyak 40 kasus. Dari 60 kasus kekerasan perempuan dan anak yang telah diberikan pendampingan sebanyak 22 kasus selesai ditangani.

e) Kota layak anak

Keberhasilan / tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh terselenggaranya bimbingan teknis terhadap 20 aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kota Dumai, Bimbingan teknis Konveksi hak anak bagi 40 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Dumai, serta Bimtek Sekolah Ramah Anak bagi 100 orang tenaga pendidik di Sekolah Kota Dumai, serta terselenggaranya Pesta Demokrasi Forum Anak Sekota Dumai. Dengan dilaksanakan Kegiatan ini pada Tahun 2017 telah terjadi peningkatan pencapaian Kota Layak Anak pada tahun 2016 dari Tingkat Paratama menjadi Madya, dilihat dari peningkatan kinerja dengan terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kota Dumai yang sebelumnya pada Tahun 2016 berjumlah 2 di Kelurahan menjadi 15 PATBM di Kelurahan, dan telah dikukuhkannya Forum Anak Kota Dumai periode 2017- 2019, serta di kukuhkannya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Dumai. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh meningkatnya kapasitas dan jaringan Forum Anak Dumai melalui pembinaan dan pertemuan Forum Anak dalam mewujudkan Dumai menjadi Kota Layak Anak.

Tabel 3.37 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	16.66	13,33	30	44,43
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	20.7	16	24	66,67
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	70	75	80	93,75
4	Rasio KDRT	Rasio	1:7	6:7000	1:6103	80,58
5	Kota Layak Anak	Status	Pratama	Madya	nindya	90

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif**

Target dari indikator sasaran ini adalah memotivasi perempuan dapat berhasil dalam dunia politik dan meningkatkan peran perempuan kota dumai dalam pembangunan dengan target akhir RPJM yaitu 30% dan pada tahun 2017 terealisasi 13,33% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 44,43%.

b. **Partisipasi angkatan kerja perempuan**

Target dari indikator sasaran ini adalah meningkatnya keluarga sehat dan sejahtera guna mendukung ekonomi keluarga di kota dumai dengan target akhir RPJM yaitu 24% dan pada tahun 2017 terealisasi 16% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 66,67%.

c. **Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan**

Target dari indikator sasaran ini adalah fasilitasi pendampingan kasus bagi anak dan perempuan di kota Dumai dengan target akhir RPJM yaitu 80% dan pada tahun 2017 terealisasi 75% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 93,75%.

d. **Rasio KDRT**

Target dari indikator sasaran ini adalah berupa pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga pendamping kekerasan pada perempuan dan anak dengan target akhir RPJM yaitu 1:6103 dan pada tahun 2017 terealisasi 6:7000 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 80,58%.

e. **Kota Layak Anak**

Target dari indikator sasaran ini adalah penguatan kelembagaan forum anak kota dumai dan pembentukan forum anak kecamatan dengan target akhir RPJM yaitu status nindya dan pada tahun 2017 terealisasi status Madya dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 90%.

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera

Sasaran strategis 14 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Sosial masyarakat". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk mengukur misi kedua ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.38 berikut di bawah ini :

Tabel 3.38. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio akseptor KB	Rasio	1:50	1:48,7	1:69,76	143,84
2	Cakupan peserta KB aktif	%	64.31	*65*	69,79	107,37
	Rata-rata Capaian Kinerja					**125,61**

Terlihat dari tabel 3.38 di atas pada misi kedua ini dengan 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a) Rasio akseptor Keluarga Berencana

Keberhasilan / tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh pentingnya bagi suatu keluarga yang merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB yang dapat meningkatkan kesejahtraan keluarga dan dimotivasi / didukung oleh penyuluh dan petugas lapangan KB dengan target 80% dan tercapai realisasi sebesar 103%. Tercapaianya pencapaian indikator kinerja mengenai alat kontrasepsi juga didukung dengan terlaksananya secara kontinuitas kegiatan pelayanan IBI KB KES, TNI Manunggal KB KES, PKK KB KES dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meninngkatnya peserta akseptor KB.

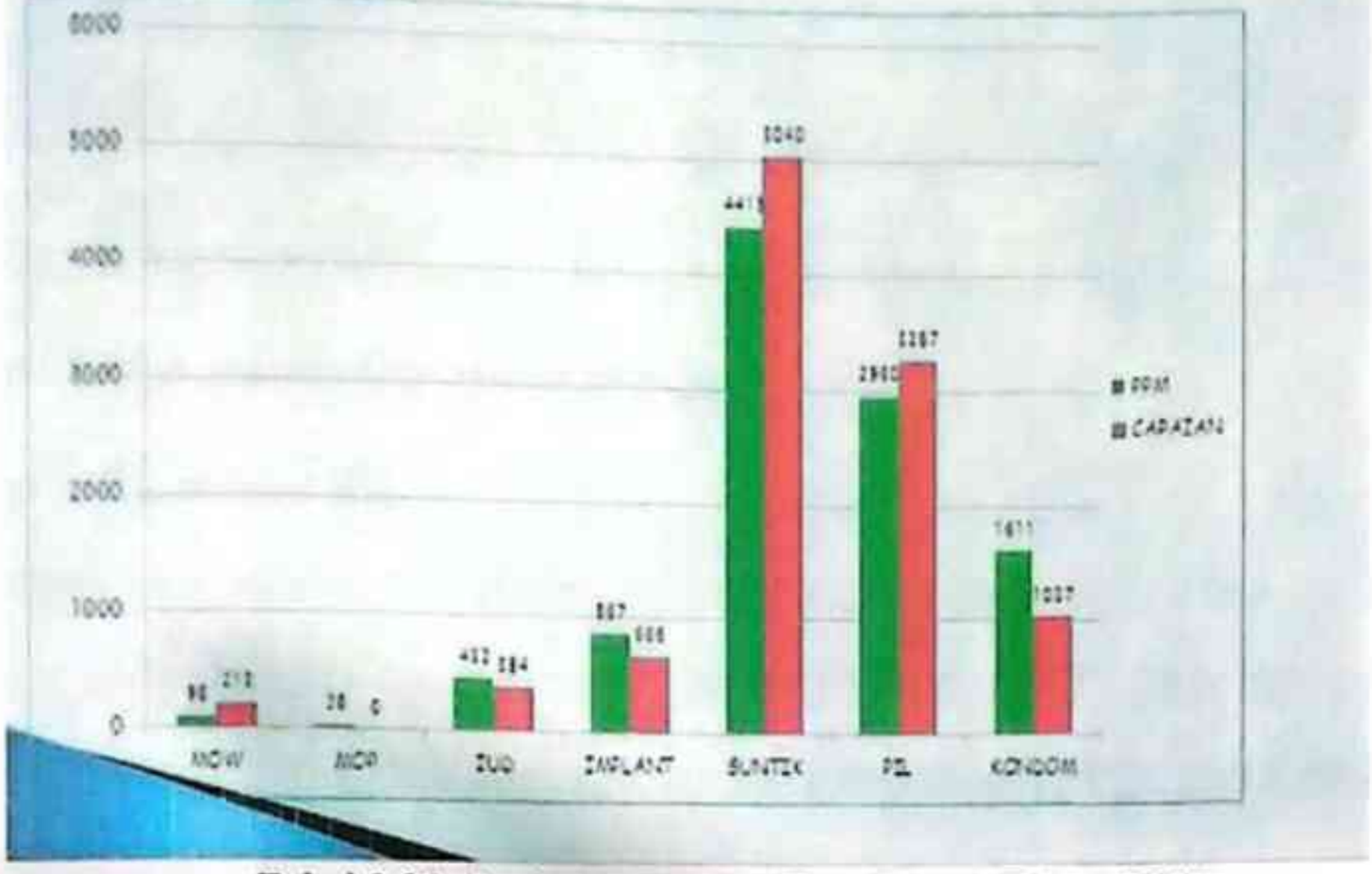
Kendala yang dihadapi diantaranya tidak tercapainya rasio petugas lapangan KB / Penyuluh KB (PKB) disebabkan kurangnya optimal sumber daya manusia yang ada sebagai Pelaksana kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kurangnya minat dan jumlah SDM yang semulanya bertugas sebagai petugas dan penyuluh serta adanya mutasi ke instansi lain menjadi faktor tidak tercapainya indikator ini yang seharusnya memiliki 17 orang, tetapi hanya ada 16 petugas dan penyuluh KB. Untuk permasalahan PUS peserta KB anggota

UPPKS yang ber-KB juga tidak tercapai disebabkan oleh kurangnya motivasi petugas dan penyuluh KB kepada UPPKS bahwa dengan cukupnya jumlah anak tanpa memandang jenis kelamin, perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Adanya anggota UPPKS yang tidak mempunyai suami/janda, yang bukan PUS dan ada yang ingin mempunyai anak. Begitu juga dengan cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need). Kurang berhasilnya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh Usia perkawinan yang terlalu muda, pendidikan wanita yang rendah, jarak ke layanan dan diskriminasi gender terhadap pemilihan jenis kelamin anak adalah karakteristik demografi yang menentukan tingginya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Terdapat perbedaan karakteristik demografi dalam unmet need pelayanan keluarga berencana untuk pembatasan dan penjarangan kelahiran.

b) Cakupan peserta KB aktif

Indikator Cakupan peserta KB aktif menjadi peserta KB aktif (PA/PUS) dari target sebesar 65% dapat terealisasi sebesar 69,79% Ketercapaian melebihi dari target yaitu adanya partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dan berdasarkan jumlah pasangan usia subur sebanyak 47.387 orang terdapat jumlah peserta KB Aktif sebanyak 33.059 orang atau sebesar 69.76%, Faktor pendorong tercapainya target adalah Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, selain pelayanan di KKB dan RSKIA dan KKB Swasta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga mengadakan kegiatan pelayanan KB gratis yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun sesuai dengan momen IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes dan PKK KB Kes sedangkan hambatannya adalah sulitnya melakukan pelayanan dengan anggaran yang sangat terbatas.

Grafik 3.22. Pencapaian Peserta KB Baru Bedasarkan ALKON Januari-Desember 2017



Tabel 3.39. Per kecamatan se Kota Dumai Tahun 2017

NO	Kecamatan	Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase PA terhadap PUS
1	Dumai Barat	4,798	6,645	72.20%
2	Dumai Timur	6,720	10,110	66.47%
3	Bukit Kapur	5,559	8,407	66.12%
4	Sungai Sembilan	4,832	6,027	80.17%
5	Medang Kampai	3,575	4,204	85.04%
6	Dumai Kota	3,599	5,559	64.74%
7	Dumai Selatan	3,976	6,435	61.79%
	Tingkat Kota	33,059	47,387	69.76%

Tabel 3.40. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 201	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Rasio akseptor KB	Rasio	1:50	1:69,76	1 : 53,6	114,23
2	Cakupan peserta KB aktif	%	64.31	69,79	85	82,11

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Rasio akseptor KB**

Target dari indikator sasaran ini penyuluhan pada orang tua atau keluarga yang mempunyai balita dengan target akhir RPJM yaitu 1 : 53,6 dan pada tahun 2017 terealisasi 1:69,76 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 114,23%.

b. **Cakupan peserta KB aktif**

Target dari indikator sasaran ini adalah pelayanan KB gratis dengan target akhir RPJM yaitu 85% dan pada tahun 2017 terealisasi 69,79% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 82,11%.

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Sosial masyarakat". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Sosial. Untuk mengukur misi kedua ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.41 berikut di bawah ini :

Tabel 3.41. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Sarana Sosial	lembaga	21	13	21	100
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	13.404	13.500	11.919	88
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	76	62	127	205
					Rata-rata Capaian Kinerja	131

Terlihat dari tabel 3.41 di atas pada misi kedua ini dengan 3 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a) Jumlah sarana sosial.

Maksud dari indikator ini, dimana adanya 21 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Dumai yang menjadi sarana sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial diantaranya : (1) Adanya 11 (sebelas) panti asuhan anak yang merupakan milik swasta (2) Solidaritas masyarakat peduli sosial (SMPS) (3) Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) (4) Forum komunikasi anak dengan kecacatan (FKADK) (5) LSM Matahati (6) LSM Bahtera (7) Rumah Sosial Fakir Miskin (RSFM) (8) SLB Asyifa Maimanah (9) Panti Jompo Dhu'afa " Sayang Ummi "(10) Wanita Dumai berkarya (Waduya) (11) Perempuan Dumai Berbakti (Pedati). Hal ini menunjukkan bahwa peranan masyarakat sangat berpengaruh didalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial

Uraian dari indikator ini, dimana Pemerintah melaksanakan program raskin/rastra para penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapatkan bantuan berupa beras 15 (lima belas) kg /bulan per RTM yang diperuntukan kepada 8.481 RTM Kota Dumai yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tigapuluh tiga) Kelurahan. Disamping itu bagi keluarga miskin pemerintah Pusat juga menjalankan program keluarga harapan (PKH) dengan dimulai tahun 2013 sampai 2017 dengan jumlah penerima bantuan keluarga penerima manfaat sebanyak 3.360 KPM dengan nilai sebesar Rp. 408.229.000 ,- yang digelontorkan setiap triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sangat miskin telah meningkat kesejahteraannya. Kota Dumai pada tahun 2017 memiliki Kelompok Usaha Bersama yang mendapat bantuan dana sebesar Rp. 600.000.000,- untuk 30 KUBE yaitu 20 (Dua puluh) Kube untuk Kecamatan Sei.Sembilan, 6 (enam) Kube untuk Kecamatan Medang Kampai dan 4 (empat) Kube untuk Kecamatan Dumai Selatan yang berasal dari Dana Dekosentrasi Provinsi Riau. Program ini merupakan program Dinas Sosial Provinsi Riau yang diperuntukan bagi keluarga miskin yang mau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang diperuntukkan bagi lansia miskin dan atau terlantar di Kota Dumai mendapatkan

bantuan langsung dari Kementrian Sosial RI sebanyak 48 orang melalui PT.BNI dengan alokasi dana sebesar Rp. 96.000.000,-

c) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Uraian dari indikator ini, pembinaan terhadap penayandang masalah sosial ini secara komprehensif mengingat keterbatasan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan tersebut. Dengan dikirimnya anak putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai -Pekanbaru sebanyak 7 (tujuh) orang di tahun 2017. Pada tahun 2017 ini juga adanya pengiriman pasien gangguan jiwa yang dikirim Rumah Sakit Jiwa Propinsi Riau sebanyak 30 kasus. Penanganan dan pendampingan melalui Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) sebayak 50 kasus yang ditangani langsung Pekerja Sosial, sedangkan untuk kasus anak berhadapan dengan hukum pada tahun ini sebanyak 40 kasus/orang anak yang penanganannya langsung pendampingannya dilakukan oleh pekerja sosial mulai dari tingkat kelurahan, polres dan kejaksaaan.

Tabel 3.42 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah Sarana Sosial	lembaga	21	21	30	70
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	13.404	11.919	13.500	88,29
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	76	127	293	43,34

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Jumlah Sarana Sosial

Target dari indikator sasaran ini adalah sarana sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dengan target akhir RPJM yaitu 30% dan pada tahun 2017 terealisasi 21% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 70%.

b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Target dari indikator sasaran ini adalah keluarga miskin yang mau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dengan target akhir RPJM yaitu

13.500 KK dan pada tahun 2017 terealisasi 11919 KK dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 88,29 %.

c. **Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial**

Target dari indikator sasaran ini adalah Penanganan dan pendampingan melalui Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) dengan target akhir RPJM yaitu 293 orang dan pada tahun 2017 terealisasi 11919 orang dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 43,34%.

Sasaran Strategis 16

Meningkatnya kualitas pendidikan, mutu dan kreatifitas masyarakat

Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengukur misi kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.43 berikut di bawah ini :

Tabel 3.43. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan Kewirausaan	Orang	112	16	16	100
					Rata-rata Capaian Kinerja	100

Terlihat dari tabel 3.41 di atas pada misi kedua ini dengan 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan**

Indikator kinerja untuk program ini yaitu besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan dimana Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada

tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas ;

1. Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima. ;
2. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan ;
3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia ;
4. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja ;
5. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi.

Perbandingan Jumlah Kegiatan Pelatihan tahun 2016 s/d 2017 :

1. Tahun Anggaran 2016 peserta pelatihan sebanyak 112 orang :
   a. Pelatihan Sertfikasi Welder Angkatan I sebanyak 16 org
   b. Pelatihan Welder Angkatan II sebanyak 16 org (yang belum dilaksanakan)
   c. Pelatihan Sertifikasi Boiler sebanyak 16 org (yang belum dilaksanakan)
   d. Pelatihan Salon dan Tata Rias sebanyak 16 org
   e. Pelatihan Instalasi Listrik sebanyak 16 orag
   f. Pelatihan menjahit sebanyak 16 org
   g. Pelatihan Bordir sebanyak 16 org
2. Tahun Anggaran 2017 peserta pelatihan sebanyak 16 orang
3. Pelatihan Sertfikasi Welder Angkatan I sebanyak 16 org

Sehubungan dengan adanya pengurangan APBD TA 2017 Kota Dumai bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai hanya dapat melaksanakan pelatihan sebanyak 16 orang atau 100% sehingga tidak tercapainya target Capaian Kinerja , adapun pelatihan yang dilaksanakan yaitu pelatihan Welder



Tabel 3.44. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan Kewirausaan	orang	112	16	9256	1,38

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan Kewirausaan

Target dari indikator sasaran ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pencari kerja dengan target akhir RPJM yaitu 9256 orang dan pada tahun 2017 terealisasi 16 orang dan 112 orang pada tahun 2016 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 1,38%.

Misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan""** Pencapaian misi ketiga ini melalui 2 (dua) sasaran strategis, 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 17

Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat

Sasaran strategis 17 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Mengembangkan perekonomian masyarakat"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM. Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.43 berikut dibawah ini :

Tabel 3.45. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah koperasi yang aktif	Koperasi	147	139	161	115,83
Rata-rata Capaian Kinerja						115,83

Terlihat dari tabel 3.43 diatas pada sasaran misi ketiga ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Jumlah koperasi yang aktif**

   Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah Koperasi yang aktif, pada tahun 2017 target sebesar 139 Koperasi sedangkan realisasi sebesar 161 koperasi sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 100%. Dalam hal ini, peningkatan koperasi aktif disebabkan dari hasil pendampingan, pembinaan dan pengawasan terjadi peningkatan koperasi, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan diketahui bahwa dari jumlah koperasi pada tahun 2017 sebanyak 199 terdapat 161 koperasi aktif (80,91%) dan 38 koperasi tidak aktif (19,10%). Jumlah Koperasi di Kota Dumai pada tahun 2017 sebanyak 199 jika dibandingkan tahun 2016 jumlah koperasi yang ada 272 Koperasi.

Terjadi penurunan koperasi di Kota Dumai dikarenakan adanya kurang pemahaman pengurus dan anggota tentang koperasi serta adanya pembubaran koperasi.

Tabel 3.46. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah koperasi yang aktif	Koperasi	147	161	193	83,42
Rata-rata Capaian Kinerja						**83,42**

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Jumlah koperasi yang aktif**

Target dari indikator sasaran ini adalah kondisi akhir jumlah koperasi yang aktif dengan target akhir RPJM yaitu 193 koperasi dan pada tahun 2017 terealisasi 161 koperasi dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 83,42%.

Sasaran Strategis 18

Meningkatnya daya saing produk UMKM

Sasaran strategis 18 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Mengembangkan perekonomian masyarakat"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM. Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.45 berikut dibawah ini :

Tabel 3.47. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah UMKM aktif yang dibina	UMKM	700	875	875	100%
Rata-rata Capaian Kinerja						**100 %**

Terlihat dari tabel 3.45 diatas pada sasaran misi ketiga ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Jumlah UMKM aktif yang dibina**

Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah UMKM aktif yang dibina, dimana pada tahun 2017 target sebesar 875 UMKM, sedangkan realisasi sebesar 875 UMKM sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 100%.

Tabel 3.48. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah UMKM aktif yang dibina	UMKM	700	875	1.575	55,56
Rata-rata Capaian Kinerja						**55,56**

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Jumlah UMKM aktif yang dibina**

Target dari indikator sasaran ini adalah kondisi akhir Jumlah UMKM aktif yang dibina dengan target akhir RPJM yaitu 1.575 UMKM dan pada tahun 2017 terealisasi 875 UMKM dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 55,56%.

Misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan" Pencapaian misi ke empat ini melalui 12 (dua belas) sasaran strategis, 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 19

Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai

Sasaran strategis 20 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan kualitas pelayanan publik"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.49 berikut di bawah ini :

Tabel 3.49. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konfliksosial yang ditindak lanjuti	%	100	60	60	100
2	Persentase perda yang ditegakan	%		40	40	100
Rata-rata Capaian Kinerja						**100**

Terlihat dari tabel 3.49 diatas pada sasaran pertama ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindaklanjuti,

Jumlah laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindak lanjuti 120 laporan dari 120 laporan yang masuk, dengan anggota Kominda sebanyak 33 orang, tidak berubah dari tahun 2017, karena anggota Kominda telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Jumlah Operasi Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dalam pelaksanaan indikator kinerja Perentase Perda/Perwako yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Dumai meliputi 18 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang akan ditegakkan baik dalam bentuk operasi penegakkan Non Yustisi ataupun penegakkan Yustisi.

Dalam target tahun 2017, Satpol PP akan melakukan secara bertahap dengan kekuatan anggaran penegakkan Peraturan Daerah yang meliputi 8 (delapan) Peraturan Daerah Kota Dumai atau sebanyak 40% dari jumlah Perda/Perwako, yaitu :

a. Perda Nomor 12 Tahun 2002 tengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
b. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatatan Sipil;
c. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
d. Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Warnet;
e. Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai;
f. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
g. Perda Nomor 24 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Pariwisata;
h. Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Tabel. 3.50. Data pencapaian Penegakan Perda/Perwako :

No	Jenis Perda	Uraian temuan lapangan	Jumlah	Ditindak lanjuti	Persentase tindak lanjut
1	Perda Nomor 12 Tahun 2002	1. Terjadinya pelanggaran lokasi pedagang kaki lima yang menggunakan fasum Kota Dumai 2. Tidak komitmen pedagang yang menempati lokasi di areal bukit gelanggang dengan masih meninggalkan gerobak. 3. Ditemukan pelanggaran yang langsung diberikan teguran lisan dan tertulis	212	100	40%

No	Jenis Perda	Uraian temuan lapangan	Jumlah	Ditindak lanjuti	Persentase tindak lanjut
2	Perda Nomor 6 Tahun 2017	1. Tidak membawa KTP saat beraktifitas di luar rumah 2. Masih ada penduduk luar Dumai yang bekerja dan menetap tetapi belum meribah domisili 3. Tidak mempunyai KTP walupun usia sudah harus memiliki KTP	309	309	100%
3	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Ditemukan badan usaha/toko yang belum membayar pajak reklame kepada daerah	16	16	100%
4	Perda Nomor 24 Tahun 2010	Menemukan pengusaha warnet yang belum memiliki ijin dan jam buka melewati batas waktu	13	13	100%
5	Perda Nomor 11 Tahun 2002	Ditemukan bangunan yang belum mengurus IMB dan dibuat teguran untuk mengurus ke instansi terkait	12	12	100%
6	Perda Nomor 1 Tahun 2016	Banyak bangunan gedung yang penggunaan atau pemanfaatan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam surat izin bangunan gedung	157	157	100%
7	Perda Nomor 24 Tahun 2017	Ditemukan prosedur dan tata cara pemberian ijin usaha pariwisata yang sudah mati atau tidak sesuai peruntukannya dalam ijin yang dikeluarkan	32	32	100%
8	Perda Nomor 22 Tahun 2011	Ditemukan tempat usaha yang menjual minuman beralkohol melebihi batas maksimun yang diijinkan	26	26	100%

Dalam pencapaian penegakkan Peraturan Daerah tersebut diatas dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian bentukan tindakan di lapangan dengan Operasi Penegakkan Perda Non Yustisi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenagan Menindak terhadap anggota masyarakat atau badan hukum yang melanggar ketentuan dan obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat

Represif Non Yustisial. Yang dimaksud dengan tindakan Represif Non Yustisial adalah Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan Represif atau penindakan pada pelanggar Peraturan Daerah, namun mereka tidak dapat meneruskan tindakan sampai penyidikan seperti halnya aparat Polri kecuali bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Tabel 3.51 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindaklanjuti	%	100	60	90	66,67
2	Persentase perda yang ditegakan	%		40	100	40

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

1. **Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindaklanjuti**

   Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah laporan gangguan kamtibnas dan konflik yang ditindak lanjuti dengan target akhir RPJM yaitu 90% dan pada tahun 2017 terealisasi 60% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 66,67%.

2. **Persentase perda yang ditegakan**

   Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah operasi penegakan perda ketentraman dan ketertiban umum dengan target akhir RPJM yaitu 100% dan pada tahun 2017 terealisasi 40% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 40%.

Sasaran Strategis 20

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran strategis 21 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.52 berikut dibawah ini :

Tabel 3.52. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kriteria Penilaian LPPD	Peringkat	8	7	7	100
2	Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	%	80	85	97,47	114,67
3	Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	%	99,8	85	85	100
4	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	Orang	-	360	374	103,89
Rata-rata Capaian Kinerja						**104,64**

Terlihat dari tabel 3.52 diatas pada sasaran pertama ini 3 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Kriteria Penilaian LPPD

Capaian indikator kinerja sasaran kriteria penilaian LPPD Kota Dumai Tahun 2016 yang dinilai Tahun 2017 adalah peringkat 8 regional/Provinsi Riau, dengan capaian kondisi akhir adalah peringkat 8 dan terealisasi pada peringkat 8 dengan capaian persentase sebesar 100%. Pada tahun anggaran 2018 ini masih menunggu penilaian LPPD Kota Dumai tahun 2017.

b. Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar sebesar 97.47%, diuraikan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada kegiatan :

1. Penempatan PNS, target tahun 2017 sebesar 80% dan realisasi tahun 2017 sebesar 80% yaitu persentase penempatan PNS sesuai formasi jabatan dan kompetensi;
2. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS target tahun 2017 sebanyak 700 orang dan realisasi tahun 2017 sebanyak 629 orang yaitu jumlah PNS yang naik pangkat;

3. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah target tahun 2017 sebanyak 29 SKPD dan realisasi tahun 2017 sebanyak 29 SKPD yaitu jumlah data/informasi kepegawaian daerah;
4. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Arsip Kepegawaian target tahun 2017 sebesar 75% dan realisasi tahun 2017 sebesar 75% yaitu tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai;

c. **Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi.**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi sebesar 85%, diuraikan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur di kegiatan Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengeloaan (LHKPASN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, target tahun 2017 sebanyak 80 orang dan realisasi tahun 2017 berjumlah 92 orang yaitu wajib LHKPN dan LHKASN yang mengumpulkan LHKPN dan LHKASN;

d. **Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja sebanyak 374 orang, diuraikan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada kegiatan :

1. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi, target tahun 2017 sebanyak 400 orang dan realisasi tahun 2017 sebanyak 286 orang yaitu jumlah PNS penerima satya lencana karya satya;
2. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas target tahun 2017 sebanyak 7 orang dan realisasi tahun 2017 sebanyak 7 orang yaitu jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar;
3. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah target tahun 2017 sebanyak 94 orang dan realisasi tahun 2017 sebanyak 81 orang yaitu jumlah CPNS Kota Dumai yang mengikuti diklat prajabatan;

Tabel 3.53 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Kriteria Penilaian LPPD	Peringkat	8	7	9	77,78
2	Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	%	80	97.47 %	95	102,60
3	Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	%	99.8	85 %	95	89,47
4	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	Orang	- (Belum dilaksanakan)	374	580	64,48

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Kriteria Penilaian LPPD

Target dari indikator sasaran ini adalah peningkatan atas keriteria penilaian LPPD dengan target akhir RPJM yaitu peringkat 9 dan pada tahun 2017 terealisasi sebesar peringkat 7 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu sebesar 77,78%.

b. Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar

Target dari indikator sasaran ini adalah besaran persentase data / informasi kepegawaian yang mudah diakses secara tepat dan benar dengan target akhir RPJM yaitu 95% dan pada tahun 2017 terealisasi 97.47 %dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 102,60%.

c. Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi

Target dari indikator sasaran ini besaran persentase atas menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin yang mendapat teguran/ sanksi dengan target akhir RPJM yaitu 95% dan pada tahun 2017 terealisasi 97.47 % dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 89,47%.

d. **Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja**

Target dari indikator sasaran ini adalah meningkatnya kapasitas ASN dalam pengembangan kompetensi dan kinerja dengan target akhir RPJM yaitu 580 orang dan pada tahun 2017 terrealisasi 374 orang dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 64,48%.

Sasaran Strategis 21

Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran strategis 22 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mengukur sasaran misi ke empat ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.56 berikut dibawah ini :

Tabel 3.54. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	%	8,9	15	13,1	60,4
2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	70	96,6	99
3	Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	%	23,8	30	17,9	100
Rata-rata Capaian Kinerja						**86,47%**

Terlihat dari tabel 3.54 diatas pada sasaran pertama ini 3 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain**

Pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan perundangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah; menjamin terdapatnya transparansi, akuntabililitas dan kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.
2. Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, *bottom-up* dan *top down* dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara garis besar kegiatan ini dimaksud agar usulan masyarakat dapat tertampung sepenuhnya di dalam APBD Kota Dumai 2017. Perbandingan antara proporsi usulan masyarakat yang diakomodir didalam APBD terhadap total Usulan stakeholder lain. Dengan demikian maka perhitungan indikator kinerja Bappeda untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Persentase Usulan masyarakat didalam APBD terhadap Usulan stakeholder lain didalam APBD.dengan rumusan sebagai berikut :.

$$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat}}{\text{Jumlah usulan stakeholder lain dalam APBD}} x100\%$$

Berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaika bahwa Jumlah Usulan masyarakat yang telah diakomodir didalam APBD Kota Dumai sebanyak 2827 Usulan, sedangkan Jumlah Usulan Stakeholder lain didalam APBD Kota Dumai sebesar 371 Usulan, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2017 sebesar 13,1 %, hal ini menunjukkan hasil yang secara bertahap capaian IKU Bappeda Kota Dumai dari target 5 (lima tahunan) sebesar 20% maka tingkat capaian sebesar 60,4 %.

b. Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan kebijakan yang menjadi pedoman bagi satuan aparat perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun rencana

strategis sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.Konsistensi perencanaan dan penganggaran dapat dianalisis melalui isi pokok dari setiap dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja-SKPD, RKA/DPA SKPD dan APBD. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien harus ditunjang oleh sejauhmana daerah menjaga konsistensi dengan baik setiap penjabaran kebijakan ke dalam berbagai program yang relevan.

Secara garis besar kegiatan ini dimaksud agar konsistensi antara jumlah program didalam dokumen Rencana Kerja (Renja) pada SKPD dapat tertampung sepenuhnya di dalam Program RKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2017.Dengan demikian maka perhitungan indikator kinerja Bappeda untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Persentase Jumlah program Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD Kota Dumai terhadap jumlah program dalam RKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah program RKPD}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD}} x100\%$$

Berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa Jumlah program RKPD SKPD se-kota Dumai yang telah sesuai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 sebenyak 372 program, sedangkan Jumlah program dalam RPJMD Kota Dumai sebanyak 385 Program, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2017 sebesar 96,6 %, hal ini menunjukkan bahwa jumlah Program dalam RKPD sama Jumlah Program dalam Renja SKPD dikarenakan menggunakan aplikasi yang saling terintregrasi dengan jumlah kegiatan sebanyak 1.432

c. Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah

Sebagai kota perdagangan dan jasa dengan pertumbuhan usaha yang pesat, Kota Dumai memiliki banyak perusahaan kecil, menengah dan besar yang dikelola oleh swasta maupun BUMN dan BUMD. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai bahwa perusahaan kecil, menengah dan besar yang terdata, baru tercatat 10 persen perusahaan yang sudah melakukan CSR baik dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan maupun infrastruktur. Diperkirakan

masih banyak kegiatan CSR yang tidak tercatat yang dilakukan oleh pelaku usaha karena pelaksanaannya tidak diinformasikan kepada pemerintah kota Dumai.

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik bersama dengan para pihak (komunitas lokal, pemerintah setempat, akademisi dan perusahaan itu sendiri) yang dilakukan terpadu dengan kegiatan berkelanjutan. Dengan begitu, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan bukannya pengelola dana CSR, menjadi sangat penting karena pemerintah memiliki akses terhadap informasi mengenai kebutuhan apa saja di masyarakat yang bisa menjadi alternatif program CSR.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan efektifitas pemanfaatan *corporate social responsibility (CSR)* untuk menunjang pembangunan merupakan tema yang sangat menarik. Hal ini karena masyarakat kini telah semakin *well informed*, dan kritis serta mampu melakukan filterisasi terhadap dunia usaha yangg tengah berkembang.

Untuk mengukur adanya peran partisipasi Perusahaan yang ada di Kota Dumai dalam rangka pelaksanaan program *corporate social responsibility (* CSR) dalam pembangunan Daerah Kota Dumai, Bappeda kota Dumai membuat suatu rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah laporan Perusahaan yang berkontribusi pada CSR}}{\text{Jumlah Perusahaan}} x100\%$$

Dengan demikian maka perhitungan indikator kinerja Bappeda untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Persentase Jumlah laporan Perusahaan yang berkontribusi pada CSR terhadap jumlah Perusahaan di Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaika bahwa Jumlah laporan Perusahaan yang berkontribusi pada CSR dengan data dari BPTPM Kota Dumai tahun 2017 sebenyak 10 perusahaan, sedangkan Jumlah Perusahaan di Kota Dumai lebih dari 56 yang menjalankan program CSR, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2017 sebesar 17,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada sosialisasi tahun depan untuk meningkatkan persentase laporan CSR perusahaan yang belum transparan sehingga amanat UU tentang Tanggung Jawab Perusahaan (TJSP) di Wilayah Kota Dumai dapat ditingkatkan.

Tabel 3.55 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	%	8,9	13,1	30	43,67
2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	96,6	100	96,60
3	Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	%	23,8	17,9	30	59,67

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan *stakeholder* lain

   Target dari indikator sasaran ini adalah Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain dengan target akhir RPJM yaitu 30% dan pada tahun 2017 terealisasi 13,1 % dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 43,67%.

b. Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

   Target dari indikator sasaran ini adalah Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target akhir RPJM yaitu 100% dan pada tahun 2017 terealisasi 96,6% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 96,60%.

c. Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah

   Target dari indikator sasaran ini adalah Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target akhir RPJM yaitu 30% dan pada tahun 2017 terealisasi 17,9% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 59,67%.

Sasaran Strategis 22

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Sasaran strategis 22 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan publik". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kecamatan sekota Dumai, Untuk mengukur sasaran misi keempat ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.58 berikut dibawah ini :

Tabel 3.56. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyelesaian konflik tanah masyarakat	kasus	2	3 Kasus	3 Kasus	100
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,59	74	75,99	102,69
3	Kepemilikan KTP Elektronik	%	75	67,7	95,81	141,52
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85	85	94.06	110,66
5	Kepemilikan Akta Perkawinan	%	155 pasangan	65	61,29	94,29
6	Kepemilikan KIA	%	10%	10	25,63	256,30
7	Kepemilikan KK	%	100	93	100	107,53
8	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%		65	93,19	143,37
Rata-rata Capaian Kinerja						**132,05**

Terlihat dari tabel 3.56 diatas pada indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Penyelesaian konflik tanah masyarakat

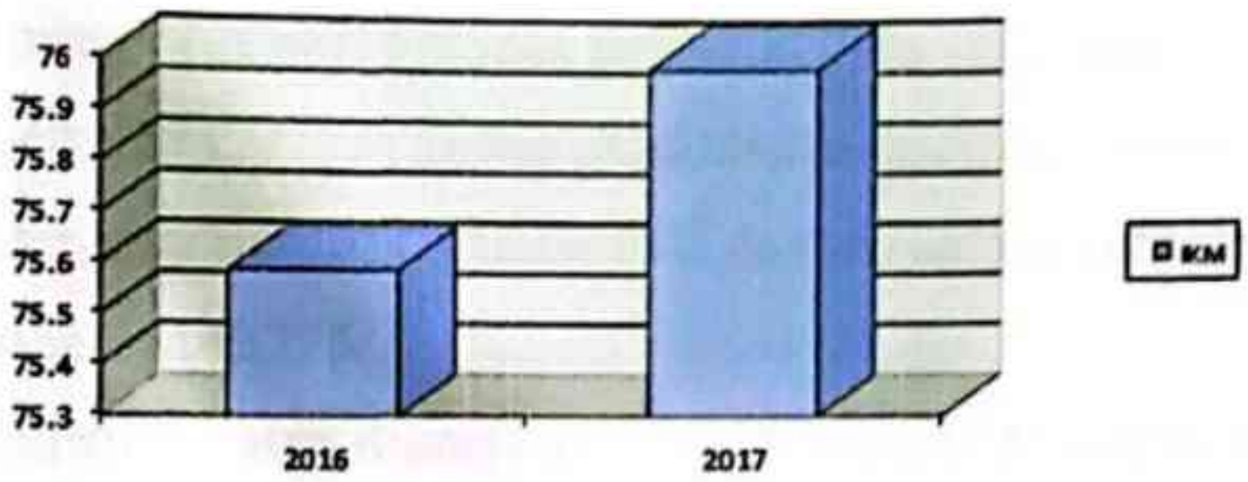
Capaian indikator kinerja sasaran dan penyelesaian konflik tanah masyarakat yaitu 3 kasus yang telah diselesaikan dari target 3 kasus dan terealisasi sebanyak 3 kasus yang telah diselesaikan atau dengan capaian persentase sebesar 100%. Antara lain yang telah diselesaikan adalah terselesainya permasalahan tanah yang berada dikawasan hutan, permasalahan tanah PT. CPI Dumai yang dikuasai oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Dumai serta terselesainya permasalahan tanah Jl. Abdul Rabkan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan.

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2016 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik adalah sebesar 75,59 sedangkan pada tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat menjadi 75,99 termasuk dalam indeks dengan kategori "BAIK"

Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Tahun 2016 – 2017.

Grafik 3.24. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public Tahun 2016 – 2017



Sumber: Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Dumai Tahun 2017

c. Kepemilikan KTP Elektronik

Persentase kepemilikan KTP Elektronik sebesar 67,7%, target dari indicator sasaran yaitu terkumpulnya data bio metric wajib KTP-el dengan pencetakan sebanyak 66.510 dengan capaian sebesar 95,81%.

d. Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 94,06%, dengan indikator yaitu semua anak yang lahir memiliki Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun, untuk tahun 2017 tercatat kelahiran sebanyak 99.377dengan capaian sebesar 94,06%

e. Kepemilikan Akta Perkawinan

Kepemilikan Akta Perkawinan dengan indicator yaitu terlaksananya pencatatan perkawinan bagi masyarakat Non Muslim dengan target awal 65% pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 95 pasangan yang mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dimana capaiannya sebesar 61,29%.

f. **Kepemilikan KIA**

Persentas Kepemilikan KIA dengan indikator yaitu terlaksananya pencetakan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 Tahun kurang 1 hari, dari target awal sebanyak 10% pada tahun 2017 tercetak sebanyak 27.645 dari jumlah Anak Usia 0-17 Tahun sebanyak 107.855

dengan capaian sebesar 25,63%

g. **Kepemilikan KK**

Persentase kepemilikan KK dengan dengan indikator sasaran ini yaitu Jumlah KK yang terdata pada data base kependudukan dengan capaian 100% atau sebanyak 81.192 KK. Dimana seluruh yang terdata di system sudah memiliki KK.

h. **Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik**

Capaian Indikator Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik dengan target tahun 2017 sebesar 65% dan terrealisasi sebesar 93,19% atau capaiannya sebesar 143,375.

Tabel 3.57. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24 yang di uraikan per kecamatan.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kecamatan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
				Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	Bukit Kapur	%	-	65	65	100
		Dumai Barat	%	'-	65	98,27	151,18
		Dumai Kota	%		65	97,40	149,85
		Dumai Selatan	%		65	100	153,85
		Dumai Timur	%		65	96,77	148,88
		Medang kampai	%		65	97,88	150,58
		Sungai Sembilan	%		65	97,02	149,26
Rata-rata Capaian Kinerja					65	93,19	143,37

Terlihat dari tabel 3.57 diatas pada sasaran misi keempat dengan ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik**

a. **<u>Kecamatan Bukit kapur</u>**

Capaian Indikator kinerja Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik yaitu 65 % dengan capaian kondisi akhir tahun 2017

adalah 65 % dan terealisasi sebanyak 65% atau capaian 100%. Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar sehingga arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan publik.

b. **Kecamatan Dumai Barat ;**

Pada Tahun 2017 Realisasi capaian Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik adalah sebesar 98,27% berbanding tahun 2016 mencapai 98,49%, walaupun capaian tahun 2016 lebih besar bukan berarti tidak terjadi peningkatan dan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan.

c. **Kecamatan Dumai Kota ;**

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (97%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2017 ini Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan khususnya pada 5 (lima) Kelurahan.

Kecamatan Dumai Kota mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang petugas yang tersebar pada 5 (lima) Kelurahan. Cakupan pelayanan persampahan adalah lingkungan perumahan. Pelaksanaan ini dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang dianggarkan melalui penganggaran pada Kecamatan. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya dan perlu penyempurnaan, baik dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan

bahan-bahan. Penyusunan RPJMD, RKPD, Renja, Renstra, Laporan Kinerja/LKj (LAKIP), RKA/DPA murni maupun perubahan dan sistem kerja profesional aparatur kecamatan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ini.

d. **Kecamatan Dumai Selatan :**

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik Target kinerja sasaran yang diingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 100%.Sedangkan realisasi pada tahun 2017 adalah sebesar 100%.Untuk hasil ini, Kecamatan Dumai Selatan berupaya untuk untuk meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan maupun kelurahan melalui program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Dumai dan Renstra Kecamatan Dumai Selatan.

Target indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah berjumlah 3 kelurahan. Realisasi pada tahun 2017 adalah sebesar 100%. Untuk hasil ini, Kecamatan Dumai Selatan berupaya untuk terus memenuhi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan prima melalui program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Dumai dan Renstra Kecamatan Dumai Selatan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang persampahan, pada tahun 2013 Kecamatan Dumai Selatan telah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kebersihan kepada masyarakat. Untuk kegiatan pengelolaan persampahan ini hanya dikhususkan kepada 3 (tiga) Kelurahan yakni Kelurahan Ratu Sima, Kelurahan Bumi Ayu dan Kelurahan Bukit Datuk dengan petugas kebersihan masing-masing kelurahan sebanyak 4 (empat) orang. Untuk mendukung operasional kegiatan ini telah disiapkan 1 (satu) unit kendaraan roda tiga untuk 3 (tiga) kelurahan tersebut. Segala pembiayaan yang menyangkut kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kota Dumai melalui DPA Kecamatan Dumai Selatan. Dari kegiatan yang dilaksanakan ini telah mampu mengurangi beban persampahan pada setiap rumah tangga khususnya pada 3 (tiga) kelurahan tersebut.Pola yang dilaksanakan adalah dengan menjemput sampah rumah tangga dengan

menggunakan kendaraan roda tiga dalam jangka waktu tertentu untuk selanjutnya diteruskan ke tempat pembuangan akhir.

e. **Kecamatan Dumai timur :**

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (100%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 96,77%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

f. **Kecamatan Medang Kampai :**

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (100%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 97,88%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana, Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan-bahan. penyusunan RPJMD, RKPD, Renja, Renstra, Laporan Kinerja/LKj (LAKIP), RKA/DPA murni maupun perubahan dan sistem kerja profesional aparatur kecamatan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ini. Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2017 ini Kecamatan Medang Kampai sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan khususnya pada 4 (empat) Kelurahan. Kecamatan Medang Kampai mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 1 (satu)

orang petugas untuk Kantor Camat Medang Kampai. Cakupan pelayanan persampahan hanya dapat dilaksanakan lingkungan Kantor Camat Medang Kampai. Pelaksanaan ini dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang dianggarkan melalui penganggaran pada Kecamatan.

g. **Kecamatan Sungai Sembilan :**

Adapun indikator kinerja adalah Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik dengan target 65% dan terealisasi 97,02%. Capaian Kinerja ini melebihi target yang diinginkan.

Tabel 3.58. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Penyelesaian konflik tanah masyarakat	Kasus	2	3	30	10
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,59	75,99	81,5	93,24
3	Kepemilikan KTP Elektronik	%	75	95,81	93,7	102,25
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85	94,06	95	99,01
5	Kepemilikan Akta Perkawinan	Pasangan	155	61,29	85%	72,11
6	Kepemilikan KIA	%	10	25,63	50	51,26
7	Kepemilikan KK	%	100	100	98	102,04
8	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%		93,19	85	109,64

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

1. **Penyelesaian konflik tanah masyarakat**

Target dari indikator sasaran ini adalah terselesainya sejumlah kasus konflik tanah masyarakat dengan target akhir RPJM yaitu 30 kasus dan pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 3 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu sebesara 10%

2. **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

Target dari indikator sasaran ini yaitu besaran atas nilai indeks kepuasan masyarakat dengan target akhir RPJM yaitu 81,5% dan pada tahun 2017 terealisasi 75,99% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 93,24%.

3. **Kepemilikan KTP Elektronik**

Target dari indikator sasaran ini yaitu besaran kepemilikan KTP elektronik dengan target akhir RPJM yaitu 93,7% dan pada tahun 2017 terealisasi 95,81% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 102,25%.

4. **Kepemilikan Akta Kelahiran**

Target dari indikator sasaran ini yaitu besaran persentase atas kepemilikan akta kelahiran dengan target akhir RPJM yaitu 95% dan pada tahun 2017 terrealisasi 94,06% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 94,06%.

5. **Kepemilikan Akta Perkawinan**

Target dari indikator sasaran ini yaitu besaran persentase atas kepemilikan akta perkawainan dengan target akhir RPJM yaitu 85% dan pada tahun 2017 terrealisasi 61,29% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 72,11%.

6. **Kepemilikan KIA**

Target dari indikator sasaran ini yaitu besaran persentase atas kepemilikan kartu identitas anak dengan target akhir RPJM yaitu 50% dan pada tahun 2017 terrealisasi 25,63% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 51,26%.

7. **Kepemilikan KK**

Target dari indikator sasaran ini yaitu besaran persentase atas kepemilikan kartu keluarga dengan target akhir RPJM yaitu 98% dan pada tahun 2017 terrealisasi 100% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 102,04%.

8. **Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik**

Target dari indikator sasaran ini adalah Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik dengan target akhir RPJM yaitu 85 % dan pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 93,19% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu sebesara 109,64%.

Sasaran Strategis 23

Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran strategis 23 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Sekretariat Daerah. Untuk mengukur sasaran misi keempat ini terdapat 1

(satu) indikator sasaran. Berikut tersaji pada tabel 3.62 berikut dibawah ditampilkan capaian kinerja sasaran yang ini :

Tabel 3.59. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Media	18	20	15	75
		Radio	4	5	3	60
		TV	-	3	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja						78,33

Terlihat dari tabel 3.59 diatas pada sasaran misi keempat ini dengan 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah**

Capaian indikator kinerja sasaran jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017 adalah publikasi 20 media dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dengan realisasi 15 media atau dengan capaian persentase 75% masih dibawah target, untuk radio dari target 5 radio dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dan terealisasi 3 radio atau dengan capaian persentase 60% sedangkan target capaian untuk publikasi 3 TV dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dan terealisasi 3 publikasi di TV atau dengan realisasi dari target yang ditetapkan 100%.

Tabel 3.60. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Media	18	15	28	53,77
		Radio	4	3	7	42,86
		TV	-	3	4	75,00

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah**

Target dari indikator sasaran ini jumlah media cetak elektronik yang digunakan untuk penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target akhir RPJM yaitu 28 media dan pada tahun 2017 terealisasi 15 media dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 53,77%.

Target dari indikator sasaran ini jumlah media cetak elektronik yang digunakan untuk penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target akhir RPJM yaitu 7 radio dan pada tahun 2017 terealisasi 3 radio dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 42,86%.

Target dari indikator sasaran ini jumlah media cetak elektronik yang digunakan untuk penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk televisi dengan target akhir RPJMD yaitu 4 TV dan pada tahun 2017 terealisasi 3 TV dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 75%.

Sasaran Strategis 24

Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sasaran strategis 24 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Badan Pendapatan Daerah. Untuk mengukur sasaran ke sembilan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.66 berikut dibawah ini :

Tabel 3.61. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi (kondisi awal 2015 = 98.989.908.086,00)	%	Rp.94.944.628.218,00 (-4,09%)	95.400.362.433 (0,48%)	Rp.97621918641,91 (2,82%)	102,33
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan	%	Rp.34.656.081.391,00 (17,68)	41.129.837.394 (18,68%)	Rp.50.418.075.565,00 (45,48%)	122,58

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
	Bangunan (kondisi awal 2015 = 29.450.000.000,00)					
Rata-rata Capaian Kinerja						112,46

Terlihat dari tabel 3.61 diatas pada sasaran misi keempat ini dengan 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi

APBD Kota Dumai setelah perubahan tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.295.452.128.604,- pencapaian realisasi pendapatan sebesar Rp 1.184.647.139.864,23 atau 91,45% dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah, target sebesar Rp 228.331.050.400,85 realisasi sebesar Rp 229.030.944.242,62 atau 100,31%.
b. Dana Perimbangan, target sebesar Rp 855.435.909.105,13 realisasi sebesar Rp 755.592.886.590 atau 88,33%.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, target sebesar Rp 211.685.169.098,02 realisasi sebesar Rp 200.023.309.031,61 atau 94,49%.

Grafik 3.25.Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2017



Grafik 3.26. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Dumai Tahun 2017



Grafik 3.27. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah Kota Dumai Tahun 2017



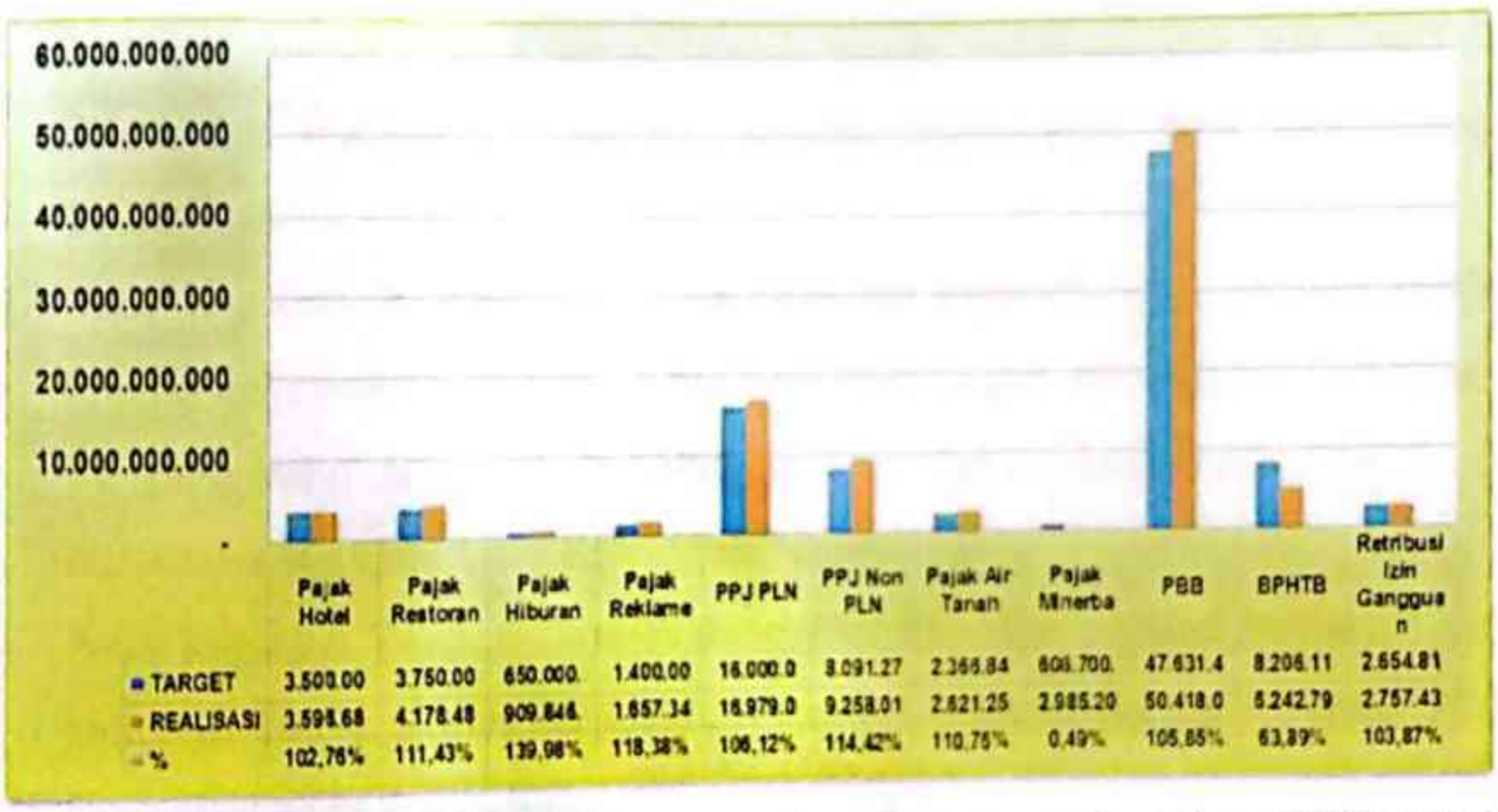
Khusus Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, ditagetkan sebesar Rp 94.857.181.741,92 realisasinya sebesar Rp 97.621.918.641,91 atau 102,91% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.62. Target dan Realisasi PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2017

No.	Uraian	Target APBD-P	Realisasi	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Pajak Hotel	3.500.000.000,00	3.596.681.295,50	102,76%
2.	Pajak Restoran	3.750.000.000,00	4.178.485.984,01	111,43%
3.	Pajak Hiburan	650.000.000,00	909.846.165,05	139,98%

No.	Uraian	Target APBD-P	Realisasi	%
1	2	3	4	5
4.	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.657.347.947,75	118,38%
5.	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.000.000.000,00	16.979.000.148,00	106,12%
6.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	8.091.270.000,00	9.258.015.780,60	114,42%
7.	Pajak Air Bawah Tanah	2.366.844.000,00	2.621.254.094,00	110,75%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	606.700.000,00	2.985.200,00	0,49%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	47.631.438.397,42	50.418.075.565,00	105,85%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	8.206.114.500,30	5.242.795.469,00	63,89%
11.	Retribusi Izin Gangguan	2.654.814.844,20	2.757.430.993,00	103,87%
Jumlah		**94.857.181.741,92**	**97.621.918.641,91**	**102,91%**

Grafik 3.28. Target dan Realisasi PAD yang dikelola Badan Pendapatan daerah Kota Dumai Tahun 2017



Untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pada tahun 2017 ini tidak mencapai target yang direncanakan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 606.700.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.985.200,- atau 0,49% dari target semula. Faktor penghambat yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan ini adalah sebagai berikut :

Adanya Surat Edaran dari Dirjend Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang perizinan pertambangan mineral dan batuabara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya **melarang** Gubernur dan Bupati/Walikota untuk untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sampai

dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Mineral dan Batubara, dengan adanya surat edaran ini, maka Pemko Dumai belum bisa menerbitkan izin baru terhadap pengusaha Galian C, yang berimbas pada rendahnya penerimaan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini.

2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam mendukung capaian indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain :

a. Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang PBB P2, nilai capaian indikator kinerja keluaran 73,85% artinya petugas yang mendapatkan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang PBB P2 sebanyak 48 orang.
b. Pada Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan PBB, nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) kepada masyarakat Kota Dumai pada 7 kecamatan.
c. Pada Kegiatan Penyusunan Basis Data OP PBB P2, nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya Database PBB P2 yang valid sebanyak 2 paket, yaitu updating basis data PBB P2 pada Kelurahan Jayamukti dan Kelurahan Tanjung Palas.
d. Pada Kegiatan Validasi Data Piutang PBB P2, nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya data piutang PBB P2 yang valid pada 7 kecamatan.
e. Pada Kegiatan Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR, nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 pada 4 kelurahan.

Tabel 3.63 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi (kondisi awal 2015 = 98.989.908.086,00)	%	Rp.94.944.628.218,00 (-4,09%)	Rp.97621918641,91 (2,82%)	Rp 103.407.434.651,48 (104,46%)	94,41

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (kondisi awal 2015 = 29.450.000.000,00)	%	Rp.34.656.081.391,00 (17,68)	Rp.50.418.075.565,00 (45,48%)	Rp 39.336.532.910 (133,57%)	128,17

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi**

Target dari indikator sasaran ini yaitu persentase peningkatan atas PAD pada sektor pajak dan retribusi dengan target akhir RPJM yaitu 104,46% atau Rp 103.407.434.651,48 dan pada tahun 2017 terealisasi 2,82% atau Rp.97.621.918.641,91 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 94,41%.

b. **Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Target dari indikator sasaran ini yaitu persntase atas peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan target akhir RPJM yaitu 133,57% atau Rp.39.336.532.910 dan pada tahun 2017 terealisasi 71,20% atau Rp.50.418.075.565,00 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 128,17%.

Sasaran Strategis 25

Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Dalam Mendukung Tri Fungsi DPRD

Sasaran strategis 26 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengukur sasaran misi keempat ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.64 berikut di bawah ini :

Tabel 3.64. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD	%	64%	80	100	125%
Rata-rata Capaian Kinerja						125

Terlihat dari tabel 3.64 di atas pada sasaran misi keempat ini dengan 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

a. Pada Tahun Anggaran 2017 Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam mencapai sasaran "meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam mendukung tri-fungsi DPRD, dan meningkatnya kualitas kinerja dan wawasan sumber daya aparatur untuk peningkatan pelaksanaan tri fungsi dan wewenang DPRD", mendapat alokasi anggaran sesuai penetapan kinerja tahun 2017 sebesar Rp. 9.627.684.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.777.496.196 dengan capaian realisasi anggaran 70,40 %.

Tabel 3.65. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD	%	64	100	100	100

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

1. Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD

Target dari indikator sasaran ini yaitu pelaksanaan fungsi DPRD yang telah dicapai dengan target akhir RPJM yaitu 100% dan pada tahun 2017 terealisasi 100% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 100%.

Sasaran Strategis 26

Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sasaran strategis 26 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip, Bagian Kominfo sekretariat Daerah.. Untuk mengukur sasaran ke sebelas ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.66 berikut dibawah ini :

Tabel 3.66. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 26

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	%	24,51	10%	8,5	85
2	Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE	SKPD	44	8	8	100
3	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	website	1	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja						95,00

Terlihat dari tabel 3.66 di atas pada sasaran kesebelas ini 3 (tiga) indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat**

   Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pada akhir tahun 2016 mencapai target 24.902 pengunjung/ pemustaka, dan realisasi kunjungan masyarakat ke perpustakaan pada tahun 2017 sebesar 28.194 pengunjung/ pemustaka atau naik 13,22%, yang terdiri dari kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah kota dumai, perpustakaan keliling, perpustakaan masyarakat dan kelurahan serta perpustakaan tugu reformasi/ lancang kuning.

2. **Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE**

   Pada IKU tahun 2016, dijelaskan bahwa jumlah SKPD/Kantor/Sarana Publik yang terkoneksi jaringan IT dengan Kantor PADE sebanyak 41 SKPD/Kantor/ Sarana Publik, realisasi tahun 2016 mencapai target 44 SKPD/Kantor atau atau dengan persentase 107%. Sedangkan untuk jumlah Sub Domain dan Email SKPD/Kantor/Instansi jumlah 30 SKPD sedangkan. Dengan perubahan OPD tahun 2017 maka IKU kantor PADE menadi IKU Sekretariat Daerah melalui revisi dengan target indikator 8 jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) dan realisasi 8 OPD atau dengan persentase 100%.

3. **Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah**

Jumlah website pemerintah Kota Dumai sebanyak 1 website (www.dumaikota.go.id) dengan target 12 bulan dan terlaksana 12 bulan atau 100 persen, dengan jumlah kunjungan 295.523 pengunjung/pengakses selama satu tahun. Adapun jumlah berita/dokumen/informasi daerah yang dikelola pada tahun 2017 sebanyak 93 berita/ dokumen/ informasi.

Tabel 3.67. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	%	24,51	8,5	20	42,50
2	Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE	SKPD	44	8	50	16,00
3	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	website	1	1	1	100

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

1. **Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu persentase atas kunjungan ke perpustakaaan dengan target akhir RPJM yaitu 20% dan pada tahun 2017 terealisasi 8,5% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 42,50%.

2. **Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu jumlah sarana publik jaringan yang terkoneksi internet (TIK) dengan target akhir RPJM yaitu 50 OPD dan pada tahun 2017 terealisasi 8 OPD dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 16%.

3. **Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu jumlah website yang dimiliki pemerintah dengan target akhir RPJM yaitu 1 website dan pada tahun 2017 terealisasi 1 website dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 100%.

Sasaran Strategis 27

Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai

Sasaran strategis 27 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan publik". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengukur sasaran ke dua belas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.75 berikut di bawah ini :

Tabel 3.68. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 27

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat waktu tanggap darurat	pemukiman	< 30	< 30	< 30	100
		lahan	< 45	< 45	< 45	100
		hutan	< 75	< 70	< 65	107,14
Rata-rata Capaian Kinerja						**102,38**

Terlihat dari tabel 3.75 diatas pada sasaran kedua belas ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Tingkat waktu tanggap darurat**

   Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memiliki kualifikasi satuan tugas pemadam kebakaran atau telah mengikuti bimbingan teknis/pelatihan Pemadam Fire Fighter 1 dan Fire Fighter 2 yang memenuhi standar kualifikasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 100%.

Adapun intensitas berdasarkan klasifikasi yang terbakar tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.69. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Dumai Tahun 2017

NO	BULAN	PEMUKIMAN	TOKO/ KEDAI /KIOS	HOTEL	KAPAL	HUTAN/ LAHAN	LAIN-LAIN	KORBAN BENDAN	KORBAN JIWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	JANUARI	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-
2.	FEBRUARI	1 kali	-	-	1 kali	-	-	-	-
3.	MARET	2 kali	-	-	-	-	-	-	-
4.	APRIL	2 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-
5.	MEI	2 kali	-	-	-	-	-	-	-
6.	JUNI	2 kali	-	-	-	-	-	-	-

NO	BULAN	PEMUKIMAN	TOKO/ KEDAI /KIOS	HOTEL	KAPAL	HUTAN/ LAHAN	LAIN-LAIN	KORBAN BENDAN	KORBAN JIWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	JULI	1 kali	1kali	-	-	-	1 kali	-	-
8.	AGUSTUS	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
9.	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	1 kali	-	-
10.	OKTOBER	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
11.	NOVEMBER	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
12.	DESEMBER	-	1 kali	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	13 kali	4 kali	-	1 kali	-	4 kali	-	-

Sumber : Laporan Tahunan UPT. Pemadam Kebakaran Kota Dumai, 2017

Tabel 3.70. Data Kejadian Kebakaran Di Kota Dumai Dirinci Menurut Kecamatan dan Lokasi Tahun 2017

No	Wilayah	Pemukiman	Toko/Kedai/Kios	Hotel	Kapal	Hutan/ Lahan	Lain-Lain	Korban Bendan	Korban Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	DUMAI KOTA	5 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-
2.	DUMAI BARAT	2 kali	-	-	-	-	-	-	-
3.	DUMAI TIMUR	3 kali	2 kali	-	-	-	1 kali	-	-
4.	DUMAI SELATAN	2 kali	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	-
5.	SUNGAI SEMBILAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	MEDANG KAMPAI	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BUKIT KAPUR	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-
	JUMLAH	13 kali	4 kali	-	1 kali	-	4 kali	-	-

Sumber : Laporan Tahunan UPT. Pemadam Kebakaran Kota Dumai, 2017

Tabel 3.71 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Tingkat waktu tanggap darurat	pemukiman	< 30	< 30	< 15	0
		lahan	< 45	< 45	< 25	20
		hutan	< 75	< 65	< 45	55,56

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Tingkat waktu tanggap darurat

Target dari indikator sasaran ini yaitu waktu tanggap darurat untuk pemukiman penduduk dengan target akhir RPJM yaitu <15' dan pada tahun 2017 terealisasi <30' dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 0%. Target dari indikator sasaran ini yaitu waktu tanggap darurat untuk lahan dengan target akhir RPJM yaitu

<25' dan pada tahun 2017 terealisasi <45' dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 20%. Target dari indikator sasaran ini yaitu waktu tanggap darurat untuk hutan dengan target akhir RPJM yaitu <45' dan pada tahun 2017 terealisasi <65' dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 55,56%.

Sasaran Strategis 28

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran strategis 28 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu: Inspektorat Untuk mengukur sasaran misi ke empat ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.72 berikut dibawah ini :

Tabel 3.72. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 28

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	%	67,32	75	69,15	92,21
2	Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya	Dokumen	2	5	3	60
Rata-rata Capaian Kinerja						**76,11**

Terlihat dari tabel 3.72 di atas pada sasaran misi keempat ini dengan 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti**

   Pada tahun 2017 jumlah total rekomendasi adalah 402 temuan, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 278 temuan, sebanyak 8 temuan masih dalam proses untuk ditindaklanjuti dan 116 temuan belum di tindaklanjuti.

   Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 69,15%, masih dibawah target 75%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan nilai 92,21%, hal ini menunjukan capain dengan nilai **memuaskan.**

2. **Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya**

Berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD, Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Bahwa inspektorat wajib mereviu setiap tahunnya , pada tahun 2017 target 5 Dokumen sedangkan realisasi 3 Dokumen atau capaian kinerja dengan nilai 60% hal ini menunjukan capaianya dengan nilai **Cukup (Memadai).**

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana yg telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Renstra Inspektorat Kota Dumai yakni "Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti dan Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya dapat kami jelaskan pada Gambar Grafik sebagai Berikut :

Grafik. 3.29. Persentase rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti Tahun 2017



Jika dilihat dari data di atas, Persentase rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti pada Tahun 2017 mengindikasikan bahwa OPD telah komitmen untuk menyelesaikan temuan pada tahun 2017 walaupun masih ada beberapa OPD yang belum menyelesaikan rekomendasi temuan .

Tabel 3.73. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	%	67,32	69,15	75	92,20

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
2	Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya	Dokumen	2	3	6	50

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti**

Target dari indikator sasaran ini yaitu selesainya rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan target akhir RPJM yaitu 75% dan pada tahun 2017 terealisasi 69,15 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 92,20%.

b. **Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya**

Target dari indikator sasaran ini yaitu selesainya banyaknya dokumen yang direviuw setiap tahun dengan target akhir RPJM yaitu 6 dokumen dan pada tahun 2017 3 dokumen dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 50%.

Sasaran Strategis 29

Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Sasaran strategis 29 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk mengukur sasaran misi keempat ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.74 berikut di bawah ini :

Tabel 3.74. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase belanja pendidikan	%		20	30,38	151,90
2	Persentase belanja kesehatan	%		10	21,78	217,80
Rata-rata Capaian Kinerja						184,85

Terlihat dari tabel 3.74 di atas pada sasaran misi keempat ini 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Persentase belanja pendidikan**

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.280.663.488.811,46. Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, adapun persentase belanja pendidikan sebesar 20% yaitu Rp. 256.132.697.762,29. Dalam realisasinya alokasi belanja pendidikan sebesar Rp. 389.037.853.203,00 atau sebesar 30,38%. Dari data di atas, disimpulkan bahwa persentase belanja pendidikan telah melampaui target yang telah ditargetkan sebesar 20%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 151%.

b. **Persentase belanja kesehatan**

Alokasi persentase belanja kesehatan 10% sebesar Rp. 128.066.348.881,15. Dalam realisasinya alokasi belanja kesehatan sebesar Rp. 278.967.303.587,85 atau sebesar 21,78%. Dari data di atas, disimpulkan bahwa persentase belanja kesehatan telah melampaui target yang telah ditargetkan sebesar 10%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 217%.

Tabel 3.75 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Persentase belanja pendidikan	%		30,38	20%	151,90%
2	Persentase belanja kesehatan	%		21,78	10%	217,80%

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Persentase belanja pendidikan**

Target dari indikator sasaran ini yaitu selesainya rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan target akhir RPJM yaitu 20% dan pada tahun 2017 terealisasi 30,38% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 151,90%.

b. **Persentase belanja kesehatan**

Target dari indikator sasaran ini yaitu selesainya banyaknya dokumen yang direviuw setiap tahun dengan target akhir RPJM yaitu 10 % dan pada tahun 2017 21,78% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 217,80%.

Sasaran Strategis 30

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran strategis 30 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan publik". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Sekretariat Daerah, Kecamatan sekota Dumai. Untuk mengukur sasaran misi keempat ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.76 berikut dibawah ini :

Tabel 3.76. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Binaan PKK	132	260	260	100
2	PKK Aktif	PKK	41	41	41	100
3	Posyandu aktif	Posyandu aktif	195	241	241	100
4	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%		65	94,73	145,74
5	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%		65	100	153,85
Rata-rata Capaian Kinerja						119,92

Terlihat dari tabel 3.76 di atas pada sasaran misi ketiga ini 3 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah kelompok binaan pkk

Pencapaian indikator kinerja sasaran rata - rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2017 target sebanyak 260 kelompok binaan PKK dan realisasinya sebanyak 260 kelompok binaan PKK, sehingga capaian sebesar 100%. Dalam hal ini melaksanakan pembinaan melalui, 7 PKK Kecamatan dan 33 PKK Kelurahan di setiap kelurahan terdapat rata - rata 8 binaan PKK.

b. Jumlah PKK aktif

Pencapaian indikator kinerja sasaran PKK aktif pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 41 PKK aktif dengan realisasinya sebanyak 41 PKK aktif sehingga

capaian kinerja sebesar 100%. Dalam hal ini, PKK aktif di Kota Dumai melakukan pembinaan di 7 kecamatan dan di 33 kelurahan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan PKK Kota Dumai tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut: jambore PKK tingkat Nasional dan Kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang diadakan di Jakarta.

c. Jumlah Posyandu aktif

Pencapaian indikator kinerja sasaran Posyandu aktif, pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 241Posyandu aktif dengan realisasinya sebanyak 241 Posyandu aktif, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Dalam hal ini, Posyandu aktif di Kota Dumai melakukan pembinaan di 7 kecamatan dan di 33 kelurahan.

Tabel 3.77. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang diuraikan per Kecamatan.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kecamatan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
				Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	Bukit Kapur	%		65	65	100
		Dumai Barat	%		65	100	153,85
		Dumai Kota	%		65	99,87	153,65
		Dumai Selatan	%		65	100	153,85
		Dumai Timur	%		65	99,15	152,54
		Medang kampai	%		65	99,79	153,52
		Sungai Sembilan	%		65	99,30	152,77
	Rata-rata Capaian Kinerja				65	94,73	145,74
2	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	Bukit Kapur	%		65	65	100
		Dumai Barat	%		65	100	153,85
		Dumai Kota	%		65	100	153,85
		Dumai Selatan	%		65	100	153,85
		Dumai Timur	%		65	100	153,85
		Medang Kampai	%		65	100	153,85
		Sungai Sembilan	%		65	100	153,85
Rata-rata Capaian Kinerja					65	100	153,85

Terlihat dari tabel 3.77 diatas pada sasaran misi keempat dengan ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

a. <u>Kecamatan Bukit Kapur:</u>

Capaian indikator kinerja Kualitas sumber daya lembaga masyarakat yaitu dengan target tahun 2017 adalah 65% dan terealisasi sebanyak 65% atau capaian 100%.

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sementara strategi dari indikator diatas adalah memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat melayani sehingga arah kebijakan meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan.

b. <u>Kecamatan Dumai Barat:</u>

Pada Tahun 2017 dan 2016 Realisasi capaian Kualitas sumber daya lembaga masyarakat adalah sebesar 100%, berarti persentasenya tetap dan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan.

c. <u>Kecamatan Dumai Kota :</u>

Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2017 diadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat

mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Pada tahun 2017 ini Kecamatan Dumai Kota meraih peringkat pertama dalam penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota Dumai dan peringkat kedua Tingkat Propinsi Riau, yaitu Kelurahan Sukajadi. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras sejahtera (rastra) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Kota khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat rastra Kecamatan Dumai Kota sampai tahun 2017 adalah :

1. Kelurahan Laksamana 200 KK
2. Kelurahan Dumai Kota 155 KK
3. Kelurahan Bintan 165 KK
4. Kelurahan Sukajadi 186 KK
5. Kelurahan Rimba Sekampung 265 KK

Jumlah penerima beras rastra sampai tahun 2017 ini adalah 971 KK, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras 15 kg/KK setiap bulannya. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap SITKAMTIBMAS, masyarakat dilingkungan Kecamatan Dumai Kota sudah berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya melalui peningkatan program siskamling, pemberdayaan Linmas maupun penggunaan jasa Satpam. Setiap Lurah di Kecamatan Dumai Kota mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan menyelesaikan masalah sosial di setiap kelurahan. Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT. Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Dumai Kota akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian

dilingkungan Kecamatan Dumai Kota. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Dumai Kota akan aman dan terkendali.

d. **Kecamatan Dumai Selatan :**

Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target dari indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 100% pada tahun 2017. Untuk mencapai sasaran ini Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan 2 (dua) program pada tahun 2017, yakni :

1. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan yakni :
   a. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan;

      Pada kegiatan ini Kecamatan Dumai Selatan berkomitmen untuk menjamin pelayanan kesehatan dasar khususnya terhadap balita dan usila melalui pelayanan Posyandu. Saat ini terdapat 38 Posyandu yang ada di Kecamatan Dumai Selatan dan tersebar pada 5 (lima) kelurahan. Dalam melaksanakan kegiatan ini Kecamatan Dumai Selatan memberdayakan para kader-kader Posyandu dan terus melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam memajukan dan mengintensifikasi pelayanan pada Posyandu. Pada Tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

   b. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

      Untuk mengukur dan menilai sejauh mana kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan telah menjalankan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2017 yang lalu Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja unit pelayanan publik. *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penilaian perlombaan kelurahan se-Kecamatan Dumai Selatan yang terdiri dari lomba kelurahan dan lomba gotong royong masyarakat. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menetapkan Kelurahan Bukit Datuk mewakili Kecamatan Dumai Selatan dalam lomba kelurahan dan Kelurahan Mekar Sari dalam lomba gotong royong masyarakat pada tingkat Kota Dumai.

2. Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT dengan kegiatan pembinaan RT dan LPMK se-Kecamatan Dumai Selatan;

Pada program dan kegiatan ini, Kecamatan Dumai Selatan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya lembaga LPMK dan RT dengan melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta memberikan stimulus berupa bantuan honorarium terhadap Pengurus LPMK dan RT se-Kecamatan Dumai Selatan dalam rangka penyelerasan program-program pembangunan di wilayah kecamatan.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam program-program pembangunan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa PKK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam memotivasi dan menggerakkan keluarga dalam memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki untuk menunjang peningkatan kesejahteraan keluarga.

TP. PKK Kecamatan Dumai Selatan selama ini aktif dalam menjalankan program-program pokok PKK bersama dengan TP. PKK Kelurahan. Hal ini terlihat dari berbagai perlombaan dan penilaian yang dilaksanakan baik pada tingkat kota maupun tingkat provinsi, TP. PKK turut memberi andil dan sumbangsih dalam penilaian tersebut. Selain itu TP. PKK Kecamatan bersama TP. PKK Kelurahan juga secara rutin melaksanakan pertemuan untuk membahas program-program yang akan dan telah dilaksanakan.

Target Renstra untuk indikator kinerja sasaran ini adalah 100% dan realisasi juga sebesar 100%. Tercapainya target ini disebabkan Kecamatan Dumai Selatan berhasil menggerakkan dan memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan PKK. Keberhasilan ini tidak hanya dicapai pada tingkat Kecamatan akan tetapi juga pada tingkat kelurahan.

e. **<u>Kecamatan Dumai Timur :</u>**

Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 99,15%. Dalam pelayanan dibidang kesehatan,

pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Timur sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Pada tahun 2017 ini Kecamatan Dumai Timur meraih peringkat keempat dalam penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota, yaitu Kelurahan Jaya Mukti. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras miskin (raskin) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Timur khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin Kecamatan Dumai Timur sampai tahun 2017 adalah :

1. Kelurahan Tanjung Palas 265 KK
2. Kelurahan Jaya Mukti 194 KK
3. Kelurahan Teluk Binjai 495 KK
4. Kelurahan Buluh Kasap 135 KK
5. Kelurahan Bukit Batrem 404 KK

Jumlah penerima beras raskin sampai tahun 2016 ini adalah 1.493 KK, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras 15 kg/KK.

f. <u>Kecamatan Medang Kampai :</u>

Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 99%. Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Medang Kampai pada tahun 2017 diadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait

masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 4 (empat) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya pembentukan kampung keluarga berencana Kota Dumai (KB), pembentukan Kelompok bina keluarga balita (BKB) "melati", Kelompok bina keluarga lansia (BKL) "dahlia" dan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) 'Sakura" yaitu kelurahan Pelintung. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Medang Kampai sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Pada tahun 2017 ini Kecamatan Medang Kampai meraih peringkat kesatu dan kedua dalam penilaian Lomba yel yel dan pesen show dalam rangka jambore PKK Kota Dumai. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras miskin (raskin) kepada masyarakat Kecamatan Medang Kampai khususnya pada 4 (empat) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin Kecamatan Medang Kampai sampai tahun 2017 adalah :

1. Kelurahan Mundam 722 KK
2. Kelurahan Teluk Makmur 819 KK
3. Kelurahan Guntung 460 KK
4. Kelurahan Pelintung 1365 KK

Jumlah penerima beras raskin sampai tahun 2016 ini adalah 597 KK, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras 15 kg/KK.

g. <u>Kecamatan Sungai Sembilan :</u>

Adapun indikator kinerja adalah Kualitas Sumber daya lembaga masyarakat dengan target 65% dan terealisasi 99,26%. Capaian Kinerja ini melebihi target yang diinginkan.

2. **Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat**

a. **Kecamatan Bukit Kapur:**

Capaian indikator kinerja Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat yaitu dengan target tahun 2017 adalah 65% dan terealisasi sebanyak 65% atau capaian 100%.

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa sehingga arah kebijakan meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat.

b. **Kecamatan Dumai Barat :**

Pada Tahun 2017 dan 2016 Realisasi capaian Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 100%, berarti persentase tetap dan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan.

c. **Kecamatan Dumai Kota :**

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Dumai Kota dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya. Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai. Dilihat dari awal tahun Rencana Strategis tahun 2017 ini pada Kecamatan Dumai Kota, belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang dan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan.

d. **Kecamatan Dumai Selatan :**

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pembangunan MelaluiPemberdayaan Masyarakat Meningkat

Untuk indikator kinerja sasaran ini ditetapkan targetnya adalah sebesar 100%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan peningkatan pastisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.Pada kegiatan ini realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pencapaian target ini dikarenakan Kecamatan Dumai Selatan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pada tahun 2017 dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan.

e. **Kecamatan Dumai Timur :**

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (100%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun demikian dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

f. **Kecamatan Medang Kampai :**

Persentase peningkatan swadaya masyarakat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana

pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Medang Kampai dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya. Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai. Dilihat dari awal tahun Rencana Strategis tahun 2017 ini pada Kecamatan Medang Kampai, belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang dan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan.

g. <u>Kecamatan Sungai Sembilan :</u>

Adapun indikator kinerja adalah Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat dengan target 65% dan terealisasi 100%. Capaian Kinerja ini melebihi target yang diinginkan.

Tabel 3.78. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Binaan PKK	132	260	347	74,93
2	PKK Aktif	PKK	41	41	100	41,00
3	Posyandu aktif	Posyandu aktif	195	241	100	241,00
4	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%		94,73	85	111,45
5	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%		100	85	117,65

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Target dari indikator sasaran ini adalah kondisi akhir rata-rata jumlah kelompok binaan dengan target akhir RPJM yaitu 347 binaan PKK dan pada tahun 2017 terealisasi 260 binaan PKK dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 74,93%.

2. **PKK Aktif**

Target dari indikator sasaran ini adalah kondisi akhir PKK aktif dengan target akhir RPJM yaitu 100 PKK dan pada tahun 2017 terealisasi 41 PKK dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 41%.

3. **Posyandu aktif**

Target dari indikator sasaran ini adalah kondisi akhir Posyandu aktif dengan target akhir RPJM yaitu 100 posyandu aktif dan pada tahun 2017 terealisasi 241 posyandu aktif dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 241%.

4. **Kualitas sumber daya lembaga masyarakat**

Target dari indikator sasaran ini adalah Kualitas sumber daya lembaga masyarakat dengan target akhir RPJM yaitu 85% dan pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 94,73% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu sebesara 111,45%

5. **Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat**

Target dari indikator sasaran ini adalah Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat dengan target akhir RPJM yaitu 85% dan pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 100% dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu sebesara 117,65%

Misi Kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan"** Pencapaian misi kelima ini melalui 4 (empat) sasaran strategis, 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 31

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran strategis 31 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memnuhi kebutuhan lokal". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Untuk mengukur sasaran misi kelima ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.83 berikut dibawah ini :

Tabel 3.79. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 31

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita/th	32	31	31	100
2.	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	Kasus	17	3 Kasus	7 Kasus	233,00
3.	Angka Kecukupan Protein	gr/kap/hari	50,05	50	52	104,00
Rata-rata Capaian Kinerja						**145,67**

Terlihat dari tabel 3.79 diatas pada sasaran misi kelima ini 3 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Nilai Konsumsi Ikan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 31 kg/kapita/th, dan target dapat dicapai atau realisasi tahun 2017 yaitu 31 kg/kapita/th. Pencapaian dapat tercapai karena adanya kegiatan sosialisasi makan ikan atau gemar ikan yang dilakukan oleh Forum Gemar Makan Ikan yang diketua oleh Walikota Dumai dengan

bekerjasama PKK Kota Dumai dan Dinas Perikanan Kota Dumai. Program yang capai target ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Hasil Olahan Perikanan. Diluar kegiatan ini dilakukan survey ikan masuk ke Kota Dumai dalam bentuk segar dan produksi ikan di Kota Dumai yang dibantu tenaga pendampingan baik dari Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan APBD Kota Dumai. Bila di kaitkan dengan capaian tahun lalu, dapat dikatakan menurun hal ini karena jumlah penduduk yang terus meningkat sedangkan konsumsi ikan masih pada tahapan normal atau tahapan yang mampu di capai kinerja dinas.

b. **Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan**

Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kasus dengan capaian sebanyak 7 (tujuh) atau 233,00%.

c. **Angka Kecukupan Protein.**

Angka Kecukupan Protein, dari target sebesar 50 gram/kapita/hari tercapai 52,00gram/kapita/hari atau 104,00 %. Standar untuk konsumsi gizi dan protein nasional dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Sedangkan target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2017 yakni Angka Kecukupan Protein sebesar 50 gr/kapita/hari.

Capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Protein sampai dengan tahun 2017 yakni 52 gr/kapita/hari atau 104,00% dari target 50 gr/kapita/hari. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan. Keempat kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Tabel 3.80 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita/th	32	31	31	100
2	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik	Kasus	17	7	8	20,50

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
	pada pangan asal hewan					
3	Angka Kecukupan Protein	gr/kap/hari	50,05	52	50	104

Terlihat dari tabel 3.80 diatas pada sasaran misi kelima ini 3 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Nilai Konsumsi Ikan**

Target dari indikator sasaran ini adalah gemar makan ikan yang dilakukan oleh Forum Gemar Makan Ikan dengan target akhir RPJM yaitu 31 Kg/kapita/th dan pada tahun 2017 terealisasi 31 Kg/kapita/th dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 100%.

b. **Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan**

Target dari indikator sasaran ini adalah semakin rendahnya tingkat kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan,dengan target akhir RPJM yaitu 8 kasus dan pada tahun 2017 terealisasi 7 kasus dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 20,50%.

c. **Angka Kecukupan Protein**

Target dari indikator sasaran ini adalah Standar untuk konsumsi gizi dan protein nasional dengan target akhir RPJM yaitu 50 gr/kap/hari dan pada tahun 2017 terealisasi 52 gr/kap/hari dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 104%.

Sasaran Strategis 32

Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Sasaran strategis 32 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memnuhi kebutuhan lokal". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Untuk mengukur sasaran misi kelima ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.81 berikut dibawah ini :

Tabel 3.81. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 32

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Produksi perikanan budidaya	Ton	260,9	203,24	342,40	168,47
2	Produksi perikanan tangkap	Ton	525	275	930.81	338
3	Populasi ternak unggulan	Satuan ternak	5.945	5.673	5.775	101,79
4	Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	Ton	102.834,07	104.131	105.525	101,34
5	Jumlah penyuluh terlatih	Org	4	2	4	200
Rata-rata Capaian Kinerja						**181,92**

Terlihat dari tabel 3.81 diatas pada sasaran misi kelima ini 5 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Produksi perikanan budidaya

Target dari indikator sasaran ini yaitu 203,24 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 342,36 ton atau 109 % dari target, capaian ini tidak terlepas bagaimana upaya peningkatan dengan pendampingan teknologi baik sektor air tawar maupun air payau, berupa teknologi intensif pemeliharaan udang.

Realisasi program dan kegiatan dalam upaya mendukung tercapainya indikator Program pengembangan budidaya perikanan indikator capaian program sebesar 203,24 ton dan dicapai target melalui beberapa kegiatan antara lain:

b. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran tersedianya peralatan pembenihan sebanyak 13 item, tersedianya pakan untuk budidaya 9.8 kg. tolak ukur hasil pekerjaan berupa produksi benih ikan sebanyak 800.000 ekor. Realisasi fisik telah dilaksanakan 100 %, Produksi benih dicapai sebesar 833.773 ekor. Memenuhi kebutuhan akan benih ikan tahun 2017 pada awalnya sulit di capai karena adanya kerusakan sumur artesis sebagai sumber air pembenihan namun selesai pekerjaan perbaikan sumur artesis, maka capaian terhadap benih dapat di penuhi yaitu sebesar 104 %.

c. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan indikator pencapaian kegiatan terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 14 kali dan hasilnya mendapat pendampingan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 25 kelompok. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya 25 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, nilai produksi air tawar pada tahun 2017 sebesar 336,40 ton dari pembudidaya ikan Kota Dumai tercatat sebesar 230,005 ton, produksi budidaya air payau 17,93 ton dan keramba 88,46 ton dari total produksi perikanan tahun 2017 yaitu sebesar 336,40 ton, hal ini merupakan peluang pasar bagi masyarakat Dumai yang mau melakukan aktifitas budidaya ikan.Program dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar adalah produksi perikanan budidaya sebesar 217,87 ton

d. Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya Perikanan

Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran operasional tambak tambak plastik untuk 1 periode, Realisasi fisik telah dilaksanakan 100 %, Produksi tambak sebesar 2,5 ton.

e. Produksi Perikanan Tangkap

Target dari indikator sasaran ini yaitu 275 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 930,81 ton atau 338 % dari target, capaian ini tidak terlepas dari pembinaan nelayan melalui tenaga pendamping yang berasal dari pusat dan Kota Dumai sendiri. Bila mencermati angka capaian akan terlihat sangat signifikan sekali, hal ini karena adanya perbaikan cara menghitung data yang dipusatkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Dumai dan pendataan yang dilakukan langsung oleh tenaga pendamping perikanan tangkap/ bidang kenelayanan. Tingkat Pencapaian Program dalam pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan produksi perikanan tangkap sebesar 275,42 ton melalui Kegiatan :

d. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Pada kegiatan ini telah terlaksana 100% karena pada kegiatan ini merupakan honorarium tenaga pendamping bidang kenelayanan sebanyak 3 orang dan

belanja operasional pembinaan untuk tenaga pendamping non PNS 36 kali dengan hasil kunjungan terhadap 25 KUB (Kelompok Usaha Bersama). Realisasi kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang dilakukan oleh tenaga penyuluh Non PNS, meliputi 27 Kelompok nelayan yang ada yang terdaftar di Dinas Perikanan Kota Dumai, Namun sampai saat ini hanya ada 22 kelompok yang masih aktif pelaksanaannya. Adapun kelompok nelayan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. KUB Batu Karang, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
2. KUB Nelayan Bakti, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
3. KUB Nelayan Bersatu, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
4. KUB Lomek, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
5. KUB Nelayan Kurnia, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
6. KUB Camar Laut, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
7. KUB Mekar Jaya, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
8. KUB Kuda Laut, berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan
9. KUB Nelayan Bersatu Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan
10. KUB Mampu Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan
11. KUB Terbut Fajar, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
12. KUB Selat Basilam, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
13. KUB Basilam Pesisir, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
14. KUB Harapan Baru, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
15. KUB Hiu Mas, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan

16. KUB Tanjung Penyembal, berlokasi di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan
17. KUB Nelayan Tuna, berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur
18. KUB Teluk Makmur, berlokasi di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai
19. KUB Guntung Sejati, berlokasi di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai
20. KUB Nelayan Sejahtera, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai
21. KUB Medang Kampai Jaya, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
22. KUB Nelayan Bunga Mawar, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.

a. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

Pada kegiatan ini memiliki indikator capaian keluaran terlaksananya operasional pabrik es balok sebanyak 2 unit selama 1 tahun, hasil yang di peroleh terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung TPI. Kegiatan ini terdiri dari biaya tenaga pemeliharan mesin pabrik es sebanyak 2 orang, pemeliharaan mesin genset untuk pabrik es bila dalam menutupi rentang masa matinya listrik PLN, kemudian penyediaan garam sebagai katalisastor proses pendinginan/pembekuan es balok, service dan penggantian suku cadang mesin es balok, semua kegiatan telah di lakukan 100%.

1. Populasi ternak unggulan

Populasi Ternak Unggulan, dari target pada tahun 2017 sebanyak 5.673 Satuan Ternak dengan capaian 5.775 Satuan Ternak atau 101,79%.

Jenis Ternak unggulan tersebut meliputi sapi, kerbau dan kambing. Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Dua program tersebut kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak dan dan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Untuk mencapai indikator ini pada tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai melaksanakan beberapa upaya melalui kegiatan yaitu Inseminasi buatan sebanyak 650 ekor pada ternak sapi. Inseminasi buatan (IB) disebut juga dengan kawin suntik merupakan suatu trobosan yang boleh dikatakan baru dalam membantu peternak untuk meningkatkan hasil produksi. Sekarang IB diIndonesia boleh dikatakan sudah mulai memasyarkat, khususnya pada sapi karena dapat dengan cepat meningkatkan populasi ternak dengan cepat.

2. Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan

Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan, dari target sebesar 104.131 Ton tercapai 105.525 Ton atau 101,34 %.

3. Jumlah Penyuluh Terlatih

Jumlah Penyuluh Terlatih, dari target pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) orang tercapai 4 (empat) Orang atau 100,00 %.

Tabel 3.82 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Produksi perikanan budidaya	Ton	260,9	342,40	252,21	135,76
2	Produksi perikanan tangkap	Ton	525	930,81	334,77	278,04
3	Populasi ternak unggulan (sapi dan kambing)	Satuan ternak	5.945	5.775	6.303	91,62
4	Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	Ton	102.834	105.525	143.353	73,61
5	Jumlah penyuluh terlatih	Org	4	4	8	50

Terlihat dari tabel 3.86 diatas pada sasaran misi kelima ini 5 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Produksi perikanan budidaya

Target dari indikator sasaran ini adalah Produksi perikanan budidaya dengan target akhir RPJM yaitu 252,21 ton dan pada tahun 2017 terealisasi 342,40ton dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 135,76%.

b. **Produksi perikanan tangkap**

Target dari indikator sasaran ini adalah Produksi perikanan tangkap dengan target akhir RPJM yaitu 334,77 ton dan pada tahun 2017 terealisasi 930,81 ton dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 278,04%.

c. **Populasi ternak unggulan**

Target dari indikator sasaran ini meningkatkan pendapatan peternak atau peningkatan aset peternak dengan target akhir RPJM yaitu 6.303 satuan dan pada tahun 2017 terealisasi 5.775 satuan dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 91,62%.

d. **Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan**

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah produksi komoditi pertanian dan perkebunan dengan target akhir RPJM yaitu 143.353 ton dan pada tahun 2017 terealisasi 105.525 ton dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 73,61%.

e. **Jumlah penyuluh terlatih**

Target dari indikator sasaran ini adalah Jumlah penyuluh terlatih dengan target akhir RPJM yaitu 8 org dan pada tahun 2017 terealisasi 4 org dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 50%.

Sasaran Strategis 33

Meningkatnya Pendapatan Petani/peternak/nelayan

Sasaran strategis 33 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan Kesejahteraan/ Pendapatan petani/peternak/nelayan". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur sasaran misi kelima ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.83 berikut dibawah ini :

Tabel 3.83. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 33

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal	Kasus	3	3 Kasus	7 Kasus	233,00

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
	Hewan					
2	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	33	33	33	100,00
3	Cakupan bina kelompok pembudidaya	kelompok	25	28	28	100
4	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	22	25	25	100
5	Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	Ton	28	29	29	100
Rata-rata Capaian Kinerja						**126,60**

Terlihat dari tabel 3.83 diatas pada sasaran misi kelima ini 5 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan

Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kasus dengan capaian sebanyak 7 (tujuh) atau 233,00%. Data awal pada tahun pertama Renstra sebesar 17 kasus, pada tahun 2017 terdapat 10 kasus sehingga pengurangannya sebanyak 7 kasus. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

b. Cakupan Bina Kelompok Tani

Cakupan Bina Kelompok Tani, dari target sebanyak 33 Kelompok dengan realisasi tercapai 33 Kelompok atau 100,00 %. Kelompok tersebut terdiri dari jumlah kelompok tani pengembangan tanaman non unggulan daerah 11 Kelompok, Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya 15 kelompok dan Jumlah kelompok ternak yang terlatif 8 kelompok.

Capaian indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Tani sampai dengan tahun 2017 yakni 33 Kelompok atau 100,00% dari target 33 kelompok. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan. Ketiga kegiatan tersebut meliputi yaitu Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani.

c. Cakupan bina kelompok pembudidaya

Target dari indikator sasaran ini yaitu 28 Kelompok, capaian kinerja di peroleh sebesar 28 kelompok atau 100 % dari target, hal ini dapat tercapai melalui pendampingan yang dilakukan oleh 5 orang tenaga pendamping yang didanai dari APBD Kota dan pusat sebanyak 3 orang yang merupakan lanjutan pada program PUMP tahun 2015 dan 2016. Realisasi program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program pengembangan budidaya perikanan indikator capaian program sebesar 203,24 ton dan dicapai target melalui Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan.

   Pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan indikator pencapaian kegiatan terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 14 kali dan hasilnya mendapat pendampingan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 28 kelompok. Namun dari hasil pembinaan hanya 25 kelompok saja yang aktif atau terus melaksanakan budidaya ikan. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya 28 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya.

d. Cakupan bina kelompok nelayan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 25 Kelompok, capaian kinerja di peroleh sebesar 25 kelompok atau 100 % dari target, hal ini dapat tercapai melalui pendampingan yang dilakukan oleh 3 orang tenaga pendamping yang didanai dari APBD Kota dan pusat sebanyak 2 orang yang merupakan lanjutan pada program PUMP tahun 2015 dan 2016. Program Pengembangan Perikanan produksi perikanan tangkap sebesar 275,42 ton melalui Kegiatan :

1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Pada kegiatan ini telah terlaksana 100% karena pada kegiatan ini merupakan honorarium tenaga pendamping bidang kenelayanan sebanyak 3 orang dan belanja operasional pembinaan untuk tenaga pendamping non PNS 36 kali dengan hasil kunjungan terhadap 25 KUB (Kelompok Usaha Bersama).

Realisasi kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang dilakukan oleh tenaga penyuluh Non PNS, meliputi 27 Kelompok nelayan yang ada yang terdaftar di Dinas Perikanan Kota Dumai, Namun sampai saat ini hanya ada 22 kelompok yang masih aktif.

2. Peningkatan produksi hasil olahan perikanan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 29 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 29 kelompok atau 100 % dari target, pengukuran hasil produksi olahan dilakukan kepada kelompok yang pernah dibina oleh Dinas Perikanan Kota Dumai, namun untuk tahun berikutnya nilai produksi tidak lagi menjadi target kinerja dari Dinas Perikanan Kota Dumai namun menjadi target kinerja Provinsi Riau khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai wewenang yang diberikan sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Walaupun demikian Dinas Perikanan Kota Dumai masih melakukan survey nilai produksi olahan karena masih terkait dengan penghitungan nilai komsumsi ikan untuk tahun 2017.

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan adalah meningkatnya jumlah produk hasil perikanan sebesar 29 ton melalui kegiatan:

1. Peningkatan keanekaragaman Produk Pengolahan Hasil Perikanan.

Pada kegiatan ini indikator kinerja keluaran yang ingin capai adalah Terlaksananya lomba masak serba ikan 1 kali, realisasi kegiatan ini berupa : Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau semula direncanakan pada tanggal 20 September 2017, namun karena ada perubahan jadwal maka pelaksanaannya pada tanggal 9 November 2017 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Rangkaian acara Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau diawali dengan *tekhnikal meeting* yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan diikuti oleh TP-PKK Kabupaten/Kota yang akan mengikuti lomba. Tema Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau ke-15 Tahun 2017 adalah "Menu Masakan Ikan Untuk Kesehatan Masyarakat".

Berdasarkan hasil penjurian maka Kota Dumai meraih Juara kedua kategori Menu Keluarga, Juara III menu Balita dan Juara Harapan I untuk Menu Kudapan. Untuk Juara Umum diraih oleh Kabupaten Pelalawan dan berhak untuk mengikuti Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional yang diselenggaran di Jakarta pada Tanggal 21 November 2017.

Tabel 3.84 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	Kasus	3	7	8	87,50
2	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	33	33	26	126,92
3	Cakupan bina kelompok pembudidaya	kelompok	25	28	37	75,68
4	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	22	25	37	67,57
5	Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	ton	28	29	34	85,29

Terlihat dari tabel 3.88 diatas pada sasaran misi kelima ini 5 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan

Target dari indikator sasaran ini adalah Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan dengan target akhir RPJM yaitu 8 kasus dan pada tahun 2017 terealisasi 7 kasus dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 87,50%.

b. Cakupan Bina Kelompok Tani

Target dari indikator sasaran ini adalah Cakupan Bina Kelompok Tani dengan target akhir RPJM yaitu 26 kelompok dan pada tahun 2017 terealisasi 33 kelompok dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 126,92%.

c. **Cakupan bina kelompok pembudidaya**

Target dari indikator sasaran ini meningkatnya produksi hasil olahan perikanan dengan target akhir RPJM yaitu 37 kelompok dan pada tahun 2017 terealisasi 28 kelompok dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 75,68%.

d. **Cakupan bina kelompok nelayan**

Target dari indikator sasaran ini meningkatnya produksi hasil olahan perikanan dengan target akhir RPJM yaitu 37 kelompok dan pada tahun 2017 terealisasi 25 kelompok dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 67,57%.

e. **Peningkatan produksi hasil olahan perikanan**

Target dari indikator sasaran ini meningkatnya produksi hasil olahan perikanan dengan target akhir RPJM yaitu 34 ton dan pada tahun 2017 terealisasi 29 ton dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 85,29%.

Sasaran Strategis 34

Mengurangi Angka Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis

Sasaran strategis 34 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Menjaga Kesehatan Masyarakat Veteriner". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Untuk mengukur sasaran misi kelima ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.85 berikut dibawah ini :

Tabel 3.85. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 34

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	35	30	30	100
2	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	35	29	15	233
Rata-rata Capaian Kinerja						166,50

Terlihat dari tabel 3.85 diatas pada sasaran misi kelima ini 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis

Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis, target pada tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) kasus dengan capaian sebanyak 30 (tiga puluh) kasus atau 100,00%. Data awal pada tahun pertama Renstra sebesar 35 kasus, pada tahun 2017 terdapat 30 kasus sehingga penurunan sebanyak 5 kasus. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

b. Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis

Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis, target pada tahun 2017 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus dengan capaian sebanyak 15 (lima belas) kasus atau 233,00%. Data awal pada tahun pertama Renstra sebesar 35 kasus, pada tahun 2017 terdapat 29 kasus sehingga penurunan sebanyak 6 kasus. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Tabel 3.86 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	35	30	7	-228,57
2	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	35	15	10	50

Terlihat dari tabel 3.86 diatas pada sasaran misi kelima ini 5 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis

Target dari indikator sasaran ini adalah Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dengan target akhir RPJM yaitu 7 kasus dan pada tahun 2017 terealisasi 30 kasus dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu -228,57%.

b. Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis

Target dari indikator sasaran ini adalah Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis dengan target akhir RPJM yaitu 10 kasus dan pada tahun 2017 terealisasi 15 kasus dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 50%.

Misi Keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yaitu **"Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan,. industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah"** Pencapaian misi ke enam ini melalui 5 (lima) sasaran strategis, 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 35

Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal

Sasaran strategis 35 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** Untuk mengukur sasaran misi keenam ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.87 berikut dibawah ini :

Tabel 3.87. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 35

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	orang	1.200	1.210	1.210	100
2	Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1	1	1	100
3	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	org	112	16	16	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100

Terlihat dari tabel 3.87 diatas pada sasaran misi keenam ini dengan 3 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan**

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan sesuai dengan jumlah lowongan kerja dan realisasi pencari kerja yang terdaftar ditempatkan sebanyak 1.210.

Langkah awal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan andal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan tenaga kerja yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan.Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan tenaga kerja , baik penempatan tenaga kerja baru maupun lama pada posisi jabatan baru, proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam Jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Saat ini ketenagakerjaan menjadi penting untuk diketahui, baik bagi tenaga kerja maupun bagi perusahaan sebagai pemberi kerja.

Tabel. 3.88 Jumlah Lowongan Kerja Dan Realisasi Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2017

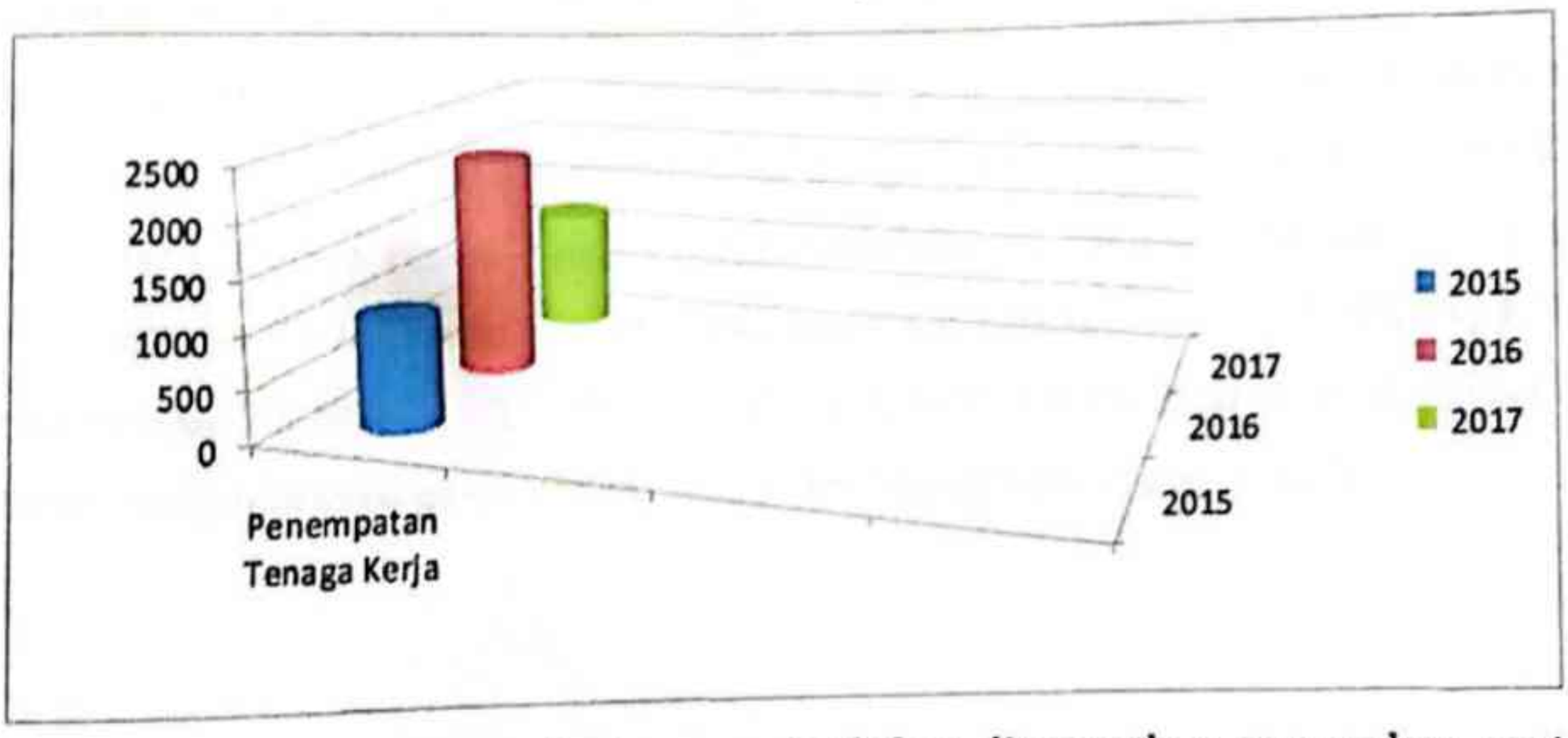
No.	Perusahaan	Jumlah (Orang)	Pendidikan	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	PT. TEGMA	50	SMU/SMK, SI	Safetyman, Grinder, HRD Staff, Welding Inspector	L = 50
2	PT. PACIVIC INDOPALM INDUSTRIES	4	SMU/SMK, DIII, SI	Mekanik, Operator, Technician	L = 4
3	PT GENERALI GALAXY DUMAI	100	SMU/SMK, DIII, SI	Marketing	L = 50 W = 50
4	RAMAYANA PLAZA DUMAI	3	SMU/SMK	Kasir	w = 3
5	PT. SMIP	200	SMU/SMK, DIII, SI	Operator, Teknisi	
6	CITITEL HOTEL	15	SMU/SMK	FO, Cook, Waiter, Teknisi Ac	L = 8
					w = 7
7	ALFAMART	50	SMU/SMK, DIII, SI	Acos, Crew Store, Helper, MRO	L = 25
					w = 25
8	PT. SDS	2	DIII	Teknisi Mekanik, Op. Turbine	L = 2
9	PT. CATUR MAHARASA WARALABA	4	SMA/SMK	Server/Waiter, Helper	L = 2

10	KISEL DUMAI	5	DIII	Mobile Grapari/Sales	L = 3
11	PT. KOIN PRATAMA	23	SMA/SMK	Helper Mekanik, Safetyman	L = 23
12	PT. ELNUSA PETROFIN	20	SMA/SMK	Awak/Kenek	L = 20
13	PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA	10	SMA/SMK	Salesman	L = 5
14	PT. CATUR MAHARASA WARALABA	5	DIII, SI	Supervisor	L = 3
					P = 2
15	PT. SUMBERDAYA DIAN MANDIRI	4	DIII	Marketing Perbankan, Frontliner,	L = 2
				Admin Perbankan, Picker, Driver,	P = 2
				Deliveryman	
16	PT. PATRA TRADING	2	SMA/SMK	Security	L = 2
17	PT. ASURANSI JIWASRAYA	50	SMA/SMK	Marketing Asuransi	L = 25
					P = 25
18	PT. IVOMAS TUNGGAL	4	SMA/SMK, DIII	Mekanik, Operator, Admin, Analis	L = 2
					P = 2
19	PT. LESTARI INDOMABAHARI	10	SMA/SMK	Crew Kapal	L = 10
20	PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA	42	SMA/SMK, DIII, SI	Analisis Lab, Safety, Staff	L = 38
				Purchasing, Maintanance, Operator	P = 4
21	PT. TEGMA	1	DIII, SI	Procurement/Purchasing Staff	L = 1
22	PT. KREASIJAYA ADHIKARYA	3	SMA/SMK, DIII, SI	Sample Boy, Admin, Operator	L = 2
					P = 1
23	PT. KLK DUMAI	2	SMA/SMK	Sample Raw Material	L = 2
24	PT. PERTAMINA	60	SMA/SMK, DIII	Operator	L = 60

25	PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	5	SMA/SMK	Collector	L = 5
26	PT. PACIVIC INDOPALM INDUSTRIES	10	SMA/SMK, DIII, SI	Operator, Foreman	L = 10
27	PT. JOCELYN ANUGRAH JAYA	2	SMA/SMK, DIII	Financial Consultant	L = 1
					P = 1
0	PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	1	SMA/SMK	Collector	L = 1
29	PT. ELNUSA PETROFIN	40	SMA/SMK	Awak/Kenek	L = 40
30	PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA	5	SMA/SMK, DIII, SI	Analisis Lab, Safety, Staff	L = 5
				Purchasing, Maintanance, Operator	
31	KANTOR PERTANAHAN NASIONAL	25	SMA/SMK	Admin, Customer Service, Op. Komp	
	KOTA DUMAI (NON PEGAWAI/PTT)			Teknisi	
32	PT. INDOPALM PACIVIC INDUSTRIES	1	SI	Maintanance Superintendent	L = 1
33	PT. CIPTA REKSA PITAMA	30	SMA/SMK	Sales Marketing	L = 15
					P = 15
34	PT. IVOMAS TUNGGAL	10	DIII	Boiler Op, Admin, Analyst, Mekanik	L = 5
					P = 5
35	PT. MARITIM SINAR UTAMA	10	SMA/SMK	Checker, Op. Driver, Op. Forklift	L = 10
36	PT. INDOPALM PACIVIC INDUSTRIES	2	SI	Operator	L = 2
37	PT. ENERGI SEJAHTERA MAS	6	SMA/SMK	Op. Forklift, Foreman, Trucking	L = 6
38	PT. JAYANIKA (JNP)	2	SMA/SMK	Sales Marketing	
39	PT. PATRA SK	2	DIII, SI	Teknisi	L = 2
40	PT. JOCELYN	20	SMA/SMK, DIII	Sales Marketing	L = 10

	ANUGRAH JAYA				
					P = 10
41	PT. GESINDO	20	SMA/SMK, DIII	Sales Marketing	L = 10
					P = 10
42	PT. PRIORITAS	20	SMA/SMK, DIII	Sales Marketing	L = 10
					P = 10
43	PT. GUDANG GARAM	10	SMA/SMK	Driver, Helper	L = 10
44	Subkontraktor PT. PERTAMINA RU II DUMAI	320	SMA/SMK, DIII, SI	Operator, Teknisi	
	(Bekerja bersifat sementara / TA)				
	TOTAL	**1210**			

Grafik. 3.24. Penempatan Tenaga kerja



Penempatan Tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan merupakan suatu tantangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dalam mengurangi permasalahan pengangguran.

Kepres nomor 04 thn 1980 tentang wajob lapor ketanagakerjaan dan Pemerintah Kota Dumai sudah mengeluarkan PERDA 10 tentang ketenagakerjaan yang terdiri dari 70% tenaga kerja lokal dan 30% dari tenaga kerja luar dan Perwako Dumai juga mengotpimalkan penempatan tenaga kerja helper 100%.

Adapun tingkat kenaikan serta penurun penempatan tenaga kerja sesuai diagram penempatan tenaga kerja dan Tabel 3.89 dibawah ini :

Tabel. 3.89. Penempatana Tenaga Kerja

No	Keterangan	2015	2016	2017
1	Penempatan Tenaga Kerja	1.053	2.156	1.210

2. Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja

Mengumpulkan dan meneliti data hasil antar kerja (data pencari kerja, lowongan kerja, penempatan tenaga kerja), mengatur dan menyusun data dalam kelompok umur, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, dan sektor lapangan usaha di buat dalam suatu Dokumen Rencana Tenaga Kerja (Tabel. C1. C2)

Pemberi kerja wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Informasi lowongan pekerjaan memuat Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan; Jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian, pengalaman kerja dan syarat-syarat lain yang diperlukan, Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan seleksi calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratak jabatan yang dibutuhkan untuk itu perlu adanya BKOL (Bursa Kerja Online) mengenai Kepmenaker 07 /MEN/IV/2008 dan Kep Dirjen Nomor : 251/DPPTK/IX/2008, KEP DIRJEN 258//DPPTK/IX/2008. Sesuai web informasi pasar kerja (https://devinfokerja.kemnaker.go.id/)

Tabel. 3.90
Data pencari kerja yang terdaftar pada
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota dumai
Menurut kelompok Umur Tahun 2017

NO.	BULAN	KELOMPOK UMUR												JUMLAH	
		10-14		15-19		20-29		30-44		45-54		54+			
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	JANUARI	-	-	63	47	472	217	120	24	3	-	1	-	659	288
2	FEBRUARI	-	-	19	18	159	99	45	12	4	-	-	-	227	129
3	MARET	-	-	21	15	160	89	34	48	2	-	-	-	217	152
4	APRIL	-	-	28	24	111	50	15	4	1	-	-	-	155	78
5	MEI	-	-	87	56	151	77	30	6	1	1	-	-	269	140
6	JUNI	-	-	51	27	67	31	18	1		-	-	-	136	59
7	JULI	-	-	106	75	170	103	22	3	3	-	-	-	301	181
8	AGUSTUS	-	-	130	119	345	232	81	10	13	-	-	-	569	361
9	SEPTEMBER	-	-	71	47	162	90	31	8	2	0	1	-	267	145
10	OKTOBER	-	-	64	39	174	96	38	2	2		-	-	278	137
11	NOVEMBER	-	-	60	59	228	142	46	4	-	-	-	-	334	205
12	DESEMBER	-	-	33	26	167	91	38	4		-	-	-	238	121
														3650	1996
														5646	

Tabel. 3.91
BANYAKNYA PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017

NO.	BULAN	KELOMPOK UMUR																JUMLAH	
		Tidak Tamat SD		SD		SLTP/SEDERAJAT		SLTA/SEDERAJAT		DI & DII		SARJANA MUDA /DIII		SARJANA/ S1		PASCA SARJANA/SII			
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	JANUARI	-	-	2	-	9	2	517	183	2	-	29	26	100	77	-	-	659	288
2	FEBRUARI		-	1	-	2	1	186	87	1	-	10	13	27	28		-	227	129
3	MARET	2	-	-	-	5	-	180	78	-	-	4	53	28	21	-	-	217	152
4	APRIL	-	-	-	-	11	4	122	54	-	-	4	8	18	12	-	-	155	78
5	MEI	-	-	3	-	7	4	226	101	1	-	8	6	27	29	-		269	140
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	114	40	-	-	3	5	19	14	-	-	136	59
7	JULI	-	-	-	-	5	-	258	135	-	-	5	12	33	34	-	-	301	181
8	AGUSTUS	-	-	-	-	1	-	477	252	-	-	9	31	81	78	1	-	569	361
9	SEPTEMBER	1	-	1	-	3	-	229	103	-	-	8	18	25	24		-	267	145
10	OKTOBER	-	-	1	-	2	2	221	91	1	-	11	16	40	28	-	-	278	137
11	NOVEMBER	-	-	2	-	3	1	259	139		-	22	22	48	43	-	-	334	205
12	DESEMBER	-	-	2	-	2	-	192	75	-	-	13	28	29	18	-	-	238	121
JUMLAH																		3650	1996

3. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan

Indikator kinerja untuk program ini yaitu besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan dimana Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan

Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas ;

1. Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima. ;
2. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan ;
3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia ;
4. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja ;
5. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi.

Perbandingan Jumlah Kegiatan Pelatihan tahun 2016 s/d 2017 :

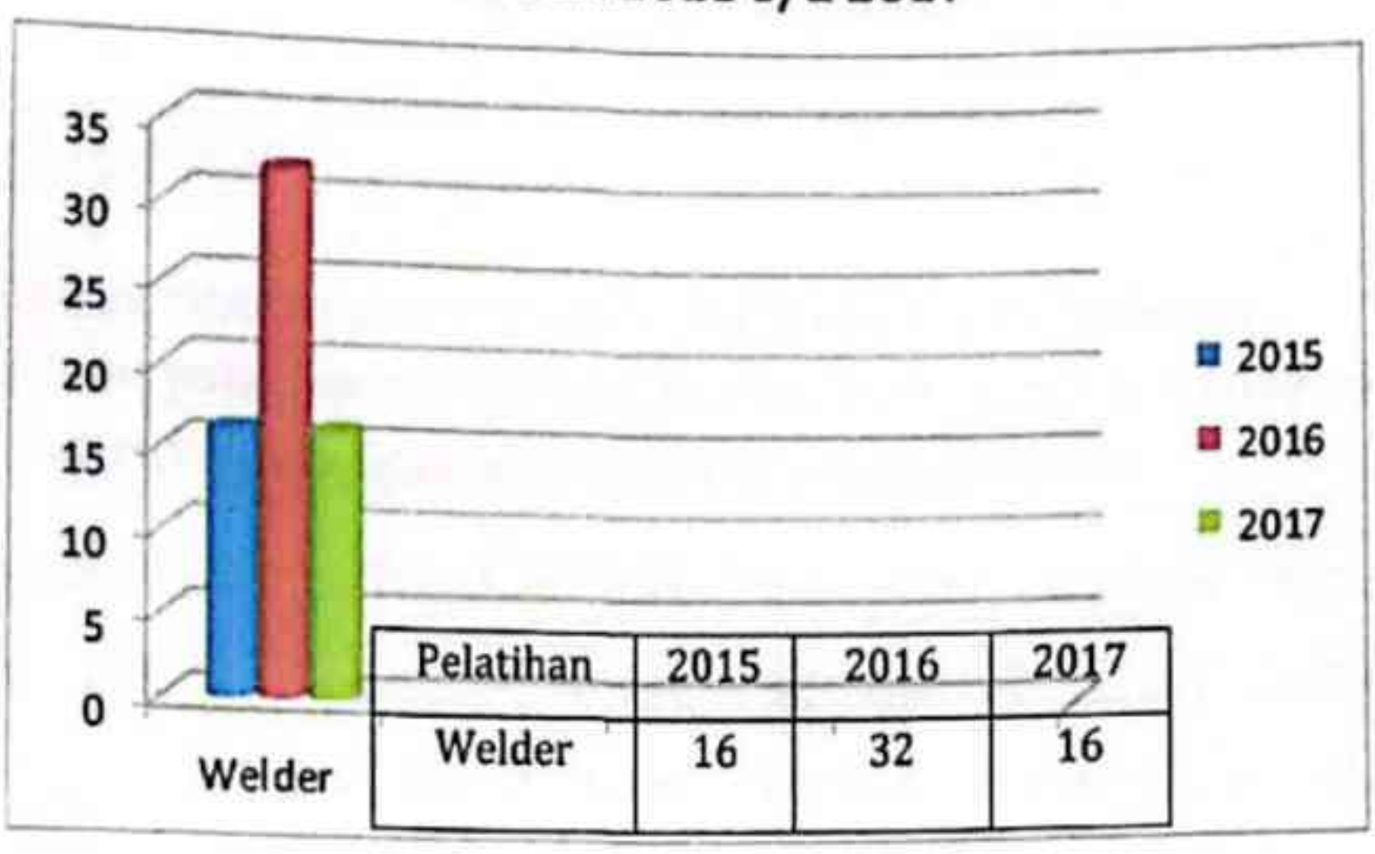
a. Tahun Anggaran 2016 peserta pelatihan sebanyak 112 orang :
   1. Pelatihan Sertfikasi Welder Angkatan I sebanyak 16 org
   2. Pelatihan Welder Angkatan II sebanyak 16 org (yang belum dilaksanakan)
   3. Pelatihan Sertifikasi Boiler sebanyak 16 org (yang belum dilaksanakan)
   4. Pelatihan Salon dan Tata Rias sebanyak 16 org
   5. Pelatihan Instalasi Listrik sebanyak 16 org
   6. Pelatihan menjahit sebanyak 16 org
   7. Pelatihan Bordir sebanyak 16 org

b. Tahun Anggaran 2017 peserta pelatihan sebanyak 16 orang

c. Pelatihan Sertfikasi Welder Angkatan I sebanyak 16 org

Sehubungan dengan adanya pengurangan APBD TA 2017 Kota Dumai bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai hanya dapat melaksanakan pelatihan sebanyak 16 orang atau 100% sehingga tidak tercapainya target Capaian Kinerja , adapun pelatihan yang dilaksanakan yaitu pelatihan Welder

Grafik 3.25. Perbandingan Pelatihan Welder yang Dilaksanakan Tahun 2015 s/d 2017



Pelatihan	2015	2016	2017
Welder	16	32	16

Tabel 3.92. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	orang	1.200	1.210	9.256	13,07
2	Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1	1	1	100
3	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	org	112	16	1.097	11,67

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan**

Target dari indikator sasaran ini besaran tenaga kerja yang ditempatkan dengan target akhir RPJM yaitu 9.256 orang dan pada tahun 2017 terealisasi 1.210 orang dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 13,07%.

b. **Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja**

Target dari indikator sasaran ini adalah penyebarluasan informasi bursa kerja dengan target akhir RPJM yaitu 1 dokumen dan pada tahun 2017 terealisasi 1 dokumen dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 100%

c. **Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan**

Target dari indikator sasaran ini adalah Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan densebesar 112

orang gan target akhir RPJM yaitu 1.097 orgdan pada tahun 2017 terealisasi 16 orang dan pada tahun 2016 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 11,67%.

Sasaran Strategis 36

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan indenpenden, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan

Sasaran strategis 36 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.** Untuk mengukur sasaran misi keenam ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.93 berikut dibawah ini :

Tabel 3.93. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 36

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Kasus	12	24	24	100
2	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	216	416	416	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100

Terlihat dari tabel 3.93 diatas pada sasaran misi keenam ini 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

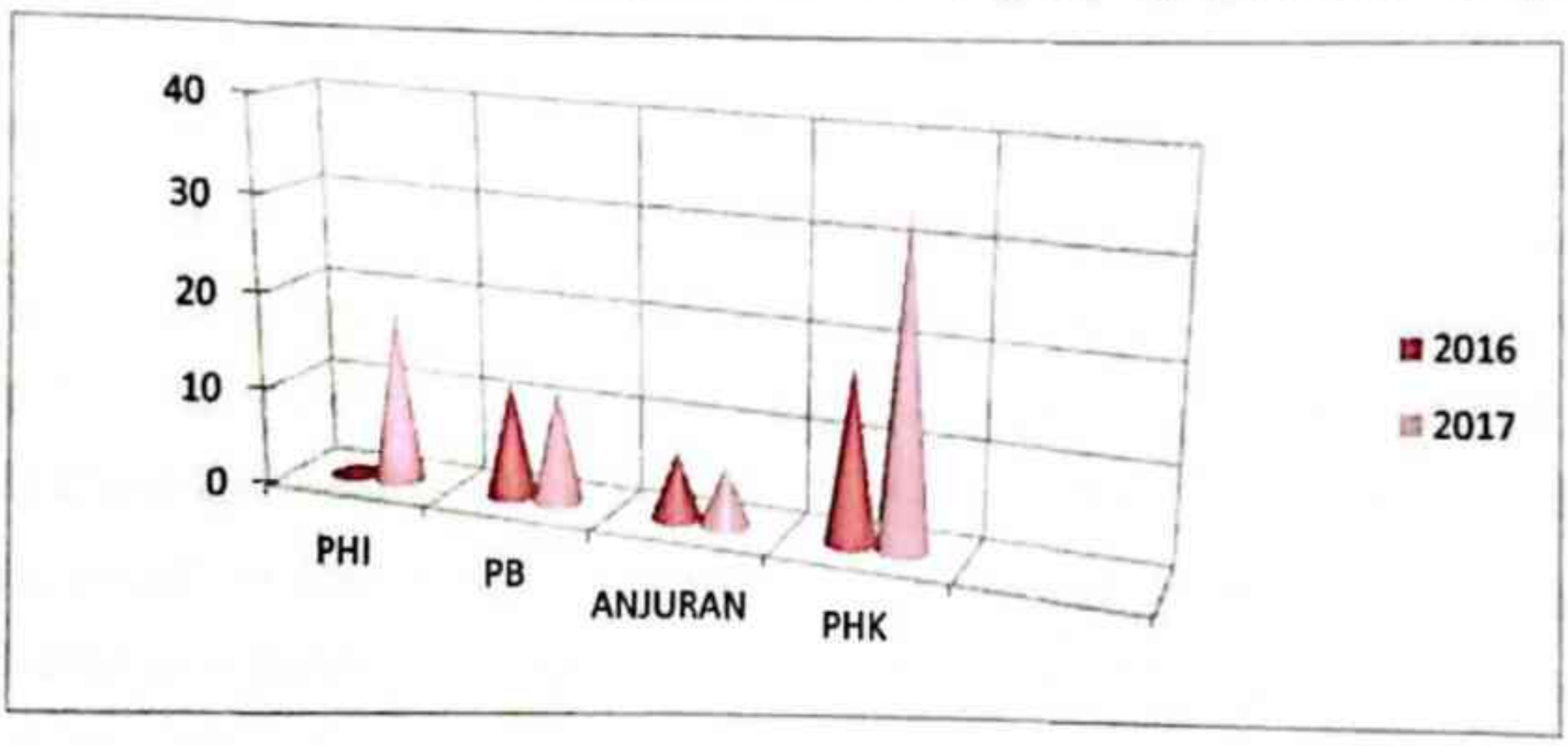
1. Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)

Semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah secara Bipartit, apabila perundingan mencapai persetujuan atau kesepakatan, maka persetujuan bersama (PB) tersebut di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan ticlak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak mencatatkan persel isihannya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota. Salah satu persyaratan yang mutlak dalam pencatatan tersebut adalah bukti atau risalah perundingan Bipartit (Pasal 3), apabila bukti perundingan tidak ada, maka pencatatannya ditolak selanjutnya diberi waktu 30 hari untuk melakukan

perundingan Bipartit, jika perundingan menghasilkan kesepakatan (damai) maka akan dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang akan dicatatkan ke PHI, jika tidak menemui kesepakatan dengan bukti/risalah perundingan yang lengkap, maka kepada para pihak ditawarkan tenaga penyelesaian perselisihan apakah melalui Konsiliator atau Arbitrase, jika para pihak tidak memilih atau justru memilik mediasi maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dalam forum mediasi

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus dicipatkan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Grafik 3. 26 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)



NO	KASUS	2016	2017
1	PHK	18	34
2	PHI	1	18
3	PB	12	12
4	ANJURAN	7	6
	JUMLAH	38	70

2. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Salah satu indikator besaran pemeriksaan perusahaan dimana Upah Minumum juga termasuk pemeriksaan setiap tahunnya yang ada di Perusahaan Kota Dumai Nilai upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum

umumnya ditetapkan oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sektoral, mengikuti rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan/atau dewan pengupahan kabupaten/kota

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah, dibentuk secara tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan pemerintah setara dengan perwakilan dari pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Formula tersebut mengharuskan penyesuaian nilai upah minimum setiap tahun, berdasarkan akumulasi nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

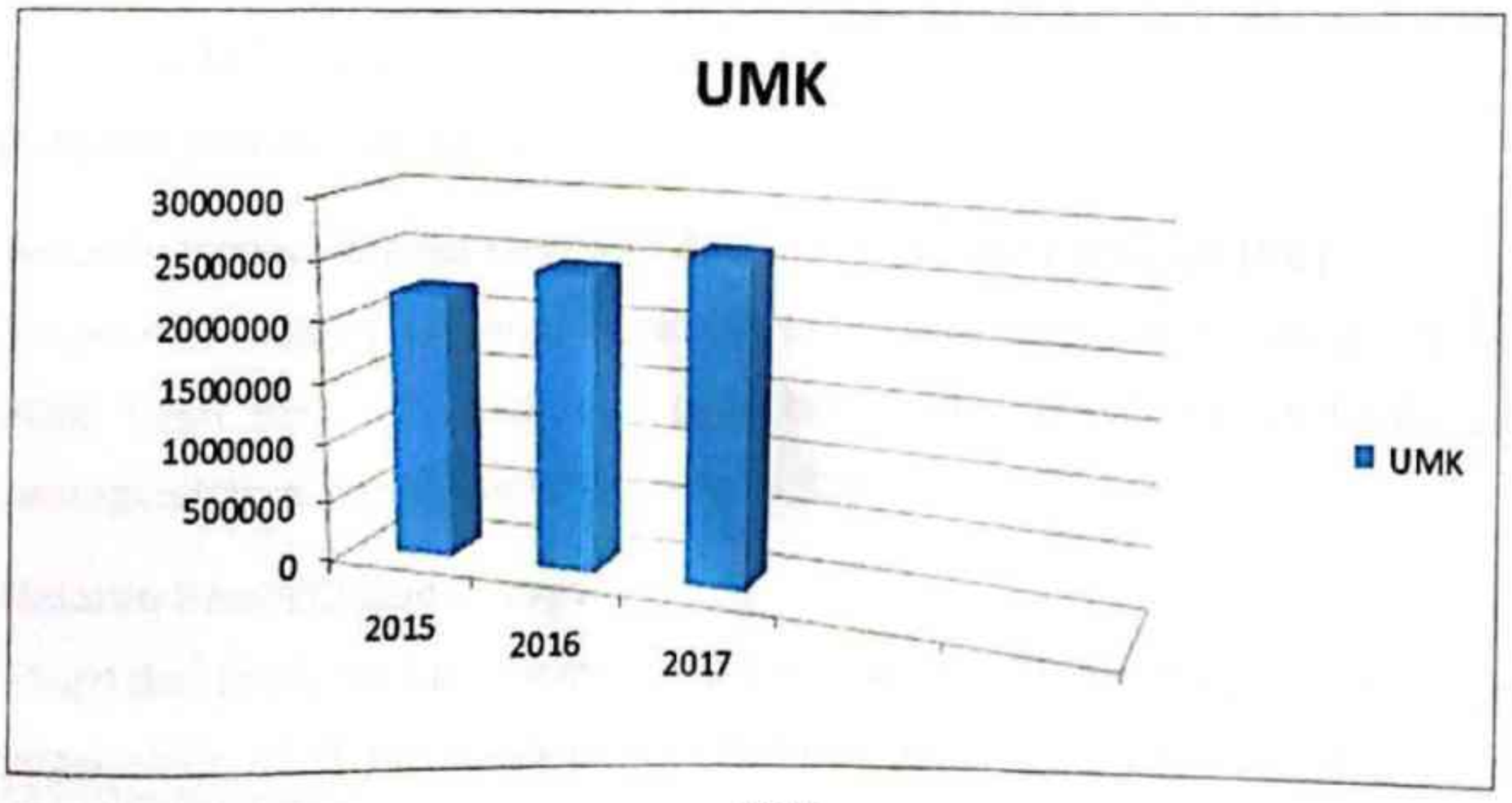
Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi

dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah, dibentuk secara tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan pemerintah setara dengan perwakilan dari pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Adapun begitu Dewan Pengupahan masih berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal pengupahan, seperti membantu melakukan supervisi dan monitor penerapan struktur dan skala upah di perusahaan dan juga melakukan survei kebutuhan hidup layak setiap 5 tahun sekali.

Grafik. 3.27. Persentase Kanaikan Upah Minimum Kota Dalam Tahun 2015-2017



No	TAHUN	UMK	KET (%)
1	2015	2.200.000	90.71%
2	2016	2.453.000	89.68%
3	2017	2.655.372	92.37%

3. Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik, semula hanya diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Tercapainya indikator kegiatan akan mengakibatkan tercapai pula target kinerja program yang telah dirumuskan, yang selanjutnya akan berdampak terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam 2 (dua) urusan, namun di tahun anggaran 2017 program/ kegiatan yang ada dibidang ketransmigrasian tidak dapat dilaksanakan berkenaan masa pembinaan dan pengembangan yang di anggarkan melalui Dana APBN (tugas Pembantuan) sudah tidak ada lagi, target pembinaan dan pengembangan hanya 5 (lima) tahun pelaksanaan oleh Depnakertrans RI

Tabel 3.94 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Kasus	12	24	72	33,33
2	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	216	416	766	54,31

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)**

Target dari indikator sasaran ini adalah kasus yang diselesaikan dengan target akhir RPJM yaitu 72 kasus dan pada tahun 2017 terealisasi 24 kasus dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 33,33%.

b. **Besaran Pemeriksaan Perusahaan**

Target dari indikator sasaran ini adalah besaran pemeriksaan perusahaan dengan target akhir RPJM yaitu 766 perusahaan dan pada tahun 2017 terealisasi 416 perusahaan dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 54,31%.

c. **Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi**

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah pelayanan dan penyuluhan yang diberikan kepada warga transmigrasi dengan target akhir RPJM yaitu 250 KK dan

pada tahun 2017 terealisasi 0 KK dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu tidak aada dikarenakan pada tahun 2017 belum bisa dilaksanakan dikarenakan target untuk tahun 2017 tidak ada.

Sasaran Strategis 37

Meningkatnya investasi di Kota Dumai

Sasaran strategis 37 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.95 berikut dibawah ini :

Tabel 3.95. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 37

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp.	Rp. 257.314.633.379.132,-	Rp. 252.103.974. 540.510,-	Rp. 261.712.742. 159.132,-	101,71
Rata-rata Capaian Kinerja						**101,71**

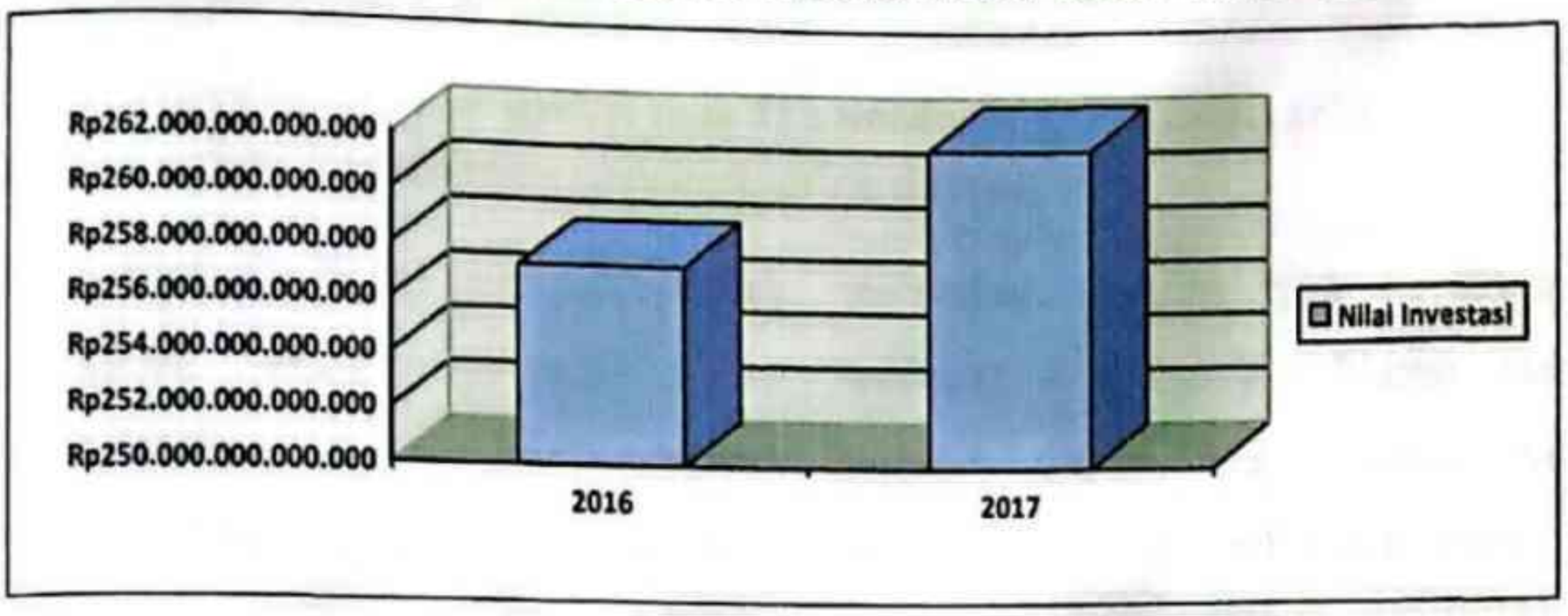
Terlihat dari tabel 3.96 diatas pada sasaran misi keenam ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. **Nilai Investasi PMA dan PMDN**

   Pada tahun 2016 realisasi Investasi PMA dan PMDN sebesar Rp. 257.314.633.379.132,-, sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 261.712.742.159.132,-.

   Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan Nilai Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2016 – 2017 :

Grafik 3.28 Nilai Investasi PMA dan PMDN Tahun 2016 - 2017



Sumber: Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Dumai Tahun 2017

Tabel 3.97

Tabel 3. 96. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp.	257.314.633.379.132	Rp. 261.712.742.159.132,-	Rp. 247.056.772.565.560	105,93

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Nilai Investasi PMA dan PMDN

Target dari indikator sasaran ini adalah nilai investasi pemodal asing dan pemodal dalam negeri dengan target akhir RPJM yaitu Rp.247.056.772.565.560 dan pada tahun 2017 terealisasi Rp. 261.712.742.159.132,- dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 105,93%.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Kenaikan nilai realisasi investasi pada tahun 2017 karena giatnya upaya pembinaan terhadap investor, salah satunya melalui Sosialisasi Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga kesadaran investor untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) makin meningkat pula.

Sasaran Strategis 38

Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah

Sasaran strategis 38 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi"**. Sasaran ini didukung SKPD secara terpadu yaitu **Dinas Perindustrian dan Perdagangan.** Untuk mengukur sasaran misi ke enam ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.97 berikut dibawah ini :

Tabel 3.97. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 38

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB*	Rupiah (juta)	5.026 523,15	4.923.602,95	5.000.294,68	102
2	Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar	unit	2	2	3	150
3	Jumlah pengusaha Dagang terlatih	Unit Usaha	50	5	3	60
4	Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha.	Unit Usaha	3	10	5	50
Rata-rata Capaian Kinerja						90,50

*Catatan : *Sementara, sumber BPS Dumai Dalam Angka 2017*

Terlihat dari tabel 3.97 diatas pada sasaran ke empat ini 4 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB**

   Pencapaian indikator kinerja sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2017 targetnya adalah sebesar Rp 49.236.029,00 sedangkan realisasi adalah sebesar Rp 5.000.294,68. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 102%.

b. **Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha.**

   Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha pada tahun 2017 targetnya adalah sebesar 10 unit sedangkan realisasi adalah sebesar 5 unit. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 50%.

c. Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar

Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah pasar tradisional yang sesuai standard adalah sebesar 2 pasar sedangkan realisasi adalah sebesar 3 pasar. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 150%.

d. Jumlah pengusaha Dagang terlatih

Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah pengusaha Dagang terlatih 5 orang sedangkan realisasi adalah sebesar 3 orang. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 60%.

Tabel 3.98 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	Rupiah (juta)	5.026 523,15	5.000.294,68	5.984.670,14	83,55
	Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar	unit	2	3	4	75
	Jumlah pengusaha Dagang terlatih	Unit Usaha	50	3	300	1
2	Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha.	Unit Usaha	3	5	30	16,67

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB

Target dari indikator sasaran ini adalah PDRB pada sektor jasa dan perdagangan dengan target akhir RPJM yaitu Rp. 5.984.670,14 dan pada tahun 2017 terealisasi 5.000.294,68 dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 83,55%.

b. Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar

Target dari indikator sasaran ini adalah Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar dengan target akhir RPJM yaitu 4 unit dan pada tahun 2017 terealisasi 3 unit dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 75%.

c. Jumlah pengusaha Dagang terlatih

Target dari indikator sasaran ini adalah Jumlah pengusaha Dagang terlatih dengan target akhir RPJM yaitu 300 unit usaha dan pada tahun 2017 terealisasi 3 unit usaha dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 1%.

d. Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha.

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah jatringan kerja sama yang terbentuk dengan target akhir RPJM yaitu 30 unit usaha dan pada tahun 2017 terealisasi 30 unit usaha dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 16,67%.

Sasaran Strategis 39

Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai

Sasaran strategis 39 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM**. Untuk mengukur sasaran ke lima ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.100 berikut dibawah ini :

Tabel 3.99. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 39

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Rupiah (juta)	13.160.756.09	13.029.529,00	20.361.588,50	100
2	Kawasan Industri	Kawasan	2	2	2	100
3	Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif	Pengusaha	893	943	847	89,82
Rata-rata Capaian Kinerja						96,61

Terlihat dari tabel 3.99 diatas pada sasaran misi kelima ini dengan 3 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapalan kinerja sebagai berikut :

a. **Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB**

Pencapaian indikator kinerja sasaran Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, pada tahun 2017 target sebesar 13.029.529 Koperasi sedangkan realisasi sebesar 20.361.588,50 sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 100%.

Adapun kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dalam tahun 2017 sebesar 20.361.588,50 (dalam jutaan rupiah) dan tahun 2016 sebesar 13.160.756.09 (dalam jutaan rupiah) dengan kenaikan sebasar 7.200.832,41 (dalam jutaan rupiah) atau terdapat kenaikan sebesar 54,71 %.

b. **Kawasan Industri**

Pencapaian indikator kinerja sasaran kawasan industri, pada tahun 2017 target sebanyak 2 kawasan sedangkan realisasi sebanyak 2 kawasan sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 100%.

c. **Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif**

Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah pengusaha industri kecil dan menengah dan industri kreatif, pada tahun 2017 target sebanyak 943 pengusaha sedangkan realisasi sebanyak 847 Pengusaha sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 89,82%.

Indikator ini didukung oleh 2 kegiatan:

a. Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT – BLI Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimtek kerajinan Batik dan Kerajinan anyaman tali kur pada IKM di Kota Dumai melalui pelatihan – pelatihan membatik dan pelatihan anyaman dengan target 20 IKM yang mengikuti pelatihan pada tahun 2017 dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian target pada tahun 2017, dilakukan dengan cara memberikan Pelatihan dan bimbingan kerajinan membatik dan kerajinan menganyam bagi IKM yang ada di Kota Dumai dengan harapan meningkatnya pengetahuan IKM dalam membatik dan menganyam dan meningkatnya usaha baru di Kota Dumai.

b. Kegiatan Pembinaan Industri Kerajinan dan Industri Kreaktif

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT – BLI Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan industri kerajinan daerah bagi IkM berupa promosi hasil kerajinan baik didalam daerah maupun keluar daerah seperti Jakarta , bekerja sama dengan Dekranasda sebagai tempat pusat promosi produksi kerajinan daerah Kota Dumai. Pencapaian target pada tahun 2017, dilakukan dengan cara memberikan pembinaan – pembinaan berupa kunjungan ke sentra kerajinan dan usaha kecil menengah Kota Dumai bagi IKM yang ada di Kota Dumai dengan harapan meningkatnya pengetahuan IKM daerah Kota Dumai.

Tabel 3.100 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Rupiah (juta)	13.160.756.09	20.361.588,50	15.837.473,79	128,57
2	Kawasan Industri	Kawasan	0	2	3	66,67
3	Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif	Pengusaha	24	847	1.143	74,10

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

a. **Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB**

Target dari indikator sasaran ini adalah besarnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan target akhir RPJM yaitu Rp. (juta) 15.837.473,79 dan pada tahun 2017 terealisasi sebanyak Rp. (juta) 20.361.588,50dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu sebesara 128,57%

b. Kawasan Industri

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah kawasan industri dengan target akhir RPJM yaitu 3 kawasan dan pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 2 kawasan dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu sebesara 66,67%

c. Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif

Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah pengusaha industri kreatif dan kecil dengan target akhir RPJM yaitu 1.143 perusahaan dan pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 847 perusahaan dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu sebesara 74,10%

Misi Ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yaitu " **Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu**"Pencapaian misi ketujuh ini melalui 5 (lima) sasaran strategis, 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 40

Meningkatnya aktualisasi nilai keagamaan, seni dan budaya dan peranan pemuda serta keolahragaan dalam kehidupan masyarakatdan pembangunan

Sasaran strategis 40 ini merupakan salah satu upaya untukmencapai tujuan "**Penyelenggaraan festival seni dan budaya**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pendidikan dan Budaya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk mengukur sasaran misi ketujuh ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.101 berikut dibawah ini :

Tabel 3.101. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 40

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah grup kesenian	group	35	40	35	87,50
2	Jumlah klub olahraga	klub	0	112	112	100
Rata-rata Capaian Kinerja						**93,75**

Terlihat dari tabel 3.101 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah grup kesenian

Partisipasi masyarakat dalam mengembangan ragam budaya demi menciptakan keserasian hubungan antar antar unit sosial dan antar budaya yang ada di Kota Dumai. Dengan partisipasi dimaksud diharapkan seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam organisasi seni budaya dapat berinteraksi langsung dengan budaya tempatan sehingga menimbulkan feedback antara masyarakat dan pemerintah. Capaian kondisi akhir 2016 terdapat 35 jumlah group kesenian, ditahun 2017 jumlah grup kesenian belum mengalami perubahan yaitu sebanyak 35 group kesenian yang mengikuti kegiatan seni

budaya. Hal ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 40 group kesenian. Oleh karena itu kedepannya diharapkan partisipasi aktif dari seluruh grup kesenian yang ada di Kota Dumai.

Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

b. Jumlah klub olahraga

Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah klub olahraga, dimana pada tahun 2017 target sebesar 112 klub, sedangkan realisasi sebesar 112 klub sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 100%.

Tabel 3.102 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah grup kesenian	Group	35	35	40	87,50
2	Jumlah klub olahraga	Klub	0	112	112	100
Rata-rata Capaian Kinerja						**93,75**

Terlihat dari tabel 3.105 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah grup kesenian

Target dari indicator sasaran ini adalah jumlah grup kesenian dengan target akhir RPJM yaitu 40 group dan pada tahun 2017 terealisasi 35 group dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 87,50%.

b. Jumlah klub olahraga

Target dari indikator sasaran ini adalah Jumlah klub olahraga dengan target akhir RPJM yaitu 112 klub dan pada tahun 2017 terealisasi 112 klub dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 100%.

Sasaran Strategis 41

Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta

Sasaran strategis 44 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Penyelenggaraan festival seni dan budaya"**. Sasaran ini didukung OPD

secara terpadu yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Untuk mengukur sasaran misi ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.103 berikut dibawah ini :

Tabel 3.103. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 44

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	sanggar	80	85	40	47,06
Rata-rata Capaian Kinerja						**47,06**

Terlihat dari tabel 3.103 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Sanggar Seni dan Budaya yang dibina

Sanggar seni dan budaya yang di bina pada tahun 2016 realisasinya adalah sebanyak 80 sanggar yang dibina. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah sanggar yang dapat dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebanyak 40 sanggar. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh terdapat beberapa sanggar yang belum memiliki izin operasional dan terdapat beberapa sanggar yang sedang dalam proses pengurusan izin sehingga hanya sanggar yang sudah memiliki izin saja yang dapat dibina.

Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

Tabel 3.104 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	sanggar	80	40	100	40
Rata-rata Capaian Kinerja						**40**

Terlihat dari tabel 3.104 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Sanggar Seni dan Budaya yang dibina**

Target dari indicator sasaran ini adalah Sanggar seni dan budaya yang dibina dengan target akhir RPJM yaitu 100 sanggar dan pada tahun 2017 terealisasi 40 sanggar dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 40%.

Sasaran Strategis 42

Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian

Sasaran strategis 42 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Penyelenggaraan festival seni dan budaya"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Untuk mengukur sasaran misi ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.105 berikut dibawah ini :

Tabel 3.105. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 42

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	1	2	2	100
Rata-rata Capaian Kinerja						**100**

Terlihat dari tabel 3.105 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Jumlah kegiatan kepemudaan**

Jumlah kegiatan kepemudaan dengan target sebanyak 2 kegiatan dan terrealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100%.

Tabel 3.106 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	1	2	7	28,57
Rata-rata Capaian Kinerja						**28,57**

Terlihat dari tabel 3.106 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah kegiatan kepemudaan

Target dari indicator sasaran ini adalah jumlah kegiatan kepemudaan dengan target akhir RPJM yaitu 7 kegiatan dan pada tahun 2017 terealisasi 2 kegiatan dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 28,57%.

Sasaran Strategis 43

Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten

Sasaran strategis 43 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **"Penyelenggaraan festival seni dan budaya"**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Untuk mengukur sasaran misi ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.107 berikut dibawah ini :

Tabel 3.107 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 43

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	9	28	32	114
Rata-rata Capaian Kinerja						**114**

Terlihat dari tabel 3.107 diatas pada sasaran misi ketujuh ini dengan 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah pembinaan cabang olahraga

Jumlah pembinaan cabang olah raga dengan target sebanyak 28 cabor dan terrealisasi sebanyak 32 cabor atau 114%

Tabel 3.108 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	9	32	28	114,29
Rata-rata Capaian Kinerja						**114,29**

Terlihat dari tabel 3.108 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 1 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Jumlah pembinaan cabang olahraga**

Target dari indicator sasaran ini adalah jumlah cabang olahraga yang dibina dengan target akhir RPJM yaitu 28 cabor dan pada tahun 2017 terealisasi 32 cabor dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 114,29%.

Sasaran Strategis 44

Peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai – nilai tradisi, permusiuman dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan

Sasaran strategis 44 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "**Penyelenggaraan festival seni dan budaya**". Sasaran ini didukung OPD secara terpadu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk mengukur sasaran misi ketujuh ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.109 berikut dibawah ini :

Tabel 3.109. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 44

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kunjungan wisata (Mancanegara)	pengunjung	12.757	12.757	12.515	98,10
2	Kunjungan wisata (Domestik)	pengunjung	39.263	39.263	32.825	83,60
Rata-rata Capaian Kinerja						**90,85**

Terlihat dari tabel 3.109 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Jumlah Kunjungan wisata (Mancanegara)**

   Kunjungan wisata (mancanegara) dengan target 12.757 pengunjung dan terrealisasi sebanyak 12.515 atau 98,10%.

b. **Jumlah Kunjungan wisata (Domestik)**

   Kunjungan wisata (domestik) dengan target 39.263 pengunjung dan terrealisasi sebanyak 32.825 pengunjung atau 83,60 %.

Tabel 3.110 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Target RPJMD 2016-2021	% Capaian RPJMD
1	Kunjungan wisata (Mancanegara)	pengunjung	12.757	12.515	367.133	3,41
2	Kunjungan wisata (Domestik)	pengunjung	39.263	32.825	228.158	14,39
Rata-rata Capaian Kinerja						**8,90**

Terlihat dari tabel 3.110 diatas pada sasaran misi ketujuh ini 2 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. **Kunjungan wisata (Mancanegara)**

   Target dari indikator sasaran ini adalah jumlah kunjungan wisata (Mancanegara) dengan target akhir RPJM yaitu 367.133 pengunjung dan pada tahun 2017 terealisasi 12.515 pengunjung dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 3,41%.

b. **Kunjungan wisata (Domestik)**

   Target dari indicator sasaran ini adalah jumlah kunjungan wisata (Domestik) dengan target akhir RPJM yaitu 228.158 Pengunjung dan pada tahun 2017 terealisasi 32.825 pengunjung dan pencapaian terhadap target RPJM yaitu 14,39%.



BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2017. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Dumai selama tahun 2017 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021 dan telah memenuhi 44 (empat puluh empat) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Dumai dapat dinyatakan sangat berhasil.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Dumai juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.280.663.448.811,46 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp 1.167.815.041.973,93 atau 91,19% (un audit per tanggal 07 Februari 2018). Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2017 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kota Dumai akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama 2017 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN 1

CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

TAHUN 2017

LAMPIRAN : 1

CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2	3	4	5	6
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar						
1	Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	1 Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	7	7	100
		2 Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	%	3.42	2.73	80
		3 Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.79	7.5	277.78
		4 Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	5.92	1.86	168.58
		5 Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	Ha	3,638	3,638	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		145.27
2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	1 Prosentase Jalan dan jembatan yang dibangun	%	2.23	2.05	91.98
		2 Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	3.42	3.31	96.68

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2		3	4	5	6
		3	Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	%	4.2	3.9	92.78
		4	Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	%	24	22.42	93.43
		5	Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air	%	19	18.36	96.63
		6	Persentase Fasiilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an	%	25	24.11	96.45
					Rata-rata Capaian Kinerja		94.66
3	Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	1	Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	Dokumen	2	1	50
					Rata-rata Capaian Kinerja		50
4	Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah lingkungan	1	Kualitas Air	%	75	65	86
		2	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	65	60	92
					Rata-rata Capaian Kinerja		89
5	Terjaganya lingkungan kawasan pesisir	1	Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat	Kelompok	2	0	0
		2	Luas penanaman mangrove	Hektare	0	0	0
					Rata-rata Capaian Kinerja		0
6	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	1020	1726	168

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2	3	4	5	6
		2 Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	Unit/Jenis	201	237	118
		3 Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	6	4	67
		4 Rasio izin trayek	Dokumen	8	112	1400
		5 Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	Unit	2,173	485	22
				Rata-rata Capaian Kinerja		355
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing						
7	Menurunnya Mortalitas	1 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	23	11.63	100
		2 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	32	13.44	100
		3 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per100.000 KH	120	142.63	81.14
		4 Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70.08	70.25	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		195.29
8	Menurunnya Morbiditas	1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 KH	1	0.06	100
		2 Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	per 1.000 KH	88	86.87	98.72
		3 Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	per100.000 KH	< 1	0.75	100
		4 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Tahun	59	30.91	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2		3	4	5	6
					Rata-rata Capaian Kinerja		99.68
9	Meningkatnya Status Gizi	1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3	0.02	199.33
		2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	7	0.3	195.71
					Rata-rata Capaian Kinerja		197.52
10	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.	1	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	78	81.19	104
		2	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	3.57	81
		3	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1.5	1.06	71
		4	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	78	64.8	83
		5	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	%	31	34.31	89.31
		6	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit	%	20	14.23	128.85
					Rata-rata Capaian Kinerja		92.86
11	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah	1	Angka melek huruf	%	99.44	99.53	100.09
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100	121.6	121.6
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100	125.07	125.07
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	107.33	107.33

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2	3	4	5	6
		5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88.76	100.89	113.67
				Rata-rata Capaian Kinerja		113.55
12	Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/satuan pendidikan	1 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah:				
		-SD/MI	(per 1000 siswa)	0.277	0.32	115.52
		-SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0.37	0.293	79.18
				Rata-rata Capaian Kinerja		97.35
13	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	13.33	13.33	100
		2 Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	16	16	100
		3 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	72	75	75
		4 Rasio KDRT	Rasio	1:6253	6:7000	83.42
		5 Kota Layak Anak	Status	Madya	Madya	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		89.61
14	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	1 Rasio akseptor KB	Rasio	01:48.7	02:09.8	143.84
		2 Cakupan peserta KB aktif	%	65	69.79	107.37
				Rata-rata Capaian Kinerja		125.61

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2	3	4	5	6
15	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1 Jumlah Sarana Sosial	lembaga	13	21	100
		2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	13,500	11919	88
		3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	62	127	205
				Rata-rata Capaian Kinerja		131
16	Meningkatnya kualitas pendidikan, mutu dan kreatifitas masyarakat	1 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan Kewirausaan	orang	16	16	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		100
Misi 3 : Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan						
17	Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat	1 Jumlah koperasi yang aktif	Koperasi	139	161	115.83
				Rata-rata Capaian Kinerja		115.83
18	Meningkatnya daya saing produk UMKM	2 Jumlah UMKM aktif yang dibina	UMKM	875	875	100%
				Rata-rata Capaian Kinerja		100%
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.						
19	Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	1 Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konfliksosial yang ditindaklanjuti	%	60	60	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2	3	4	5	6
		2 Persentase perda yang ditegakan	%	40	40	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		100
20	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Kriteria Penilaian LPPD	Peringkat	7	7	100
		2 Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	%	85	97.47	114.67
		3 Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	%	85	85	100
		4 Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	Orang	360	374	103.89
				Rata-rata Capaian Kinerja		106.19
21	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	%	15	13.1	60.4
		2 Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70	96.6	99

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2	3	4	5	6
		3 Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	%	30	17.9	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		86.47%
22	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Penyelesaian konflik tanah masyarakat	kasus	3 Kasus	3 Kasus	100
		2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	75.99	102.69
		1 Kepemilikan KTP Elektronik	%	67.7	95.81	141.52
		2 Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85	94.06	110.66
		3 Kepemilikan Akta Perkawinan	%	65	61.29	94.29
		4 Kepemilikan KIA	%	10	25.63	256.3
		5 Kepemilikan KK	%	93	100	107.53
		6 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	65	93.19	143.37
				Rata-rata Capaian Kinerja		132.05
23	Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Media	20	15	75
			Radio	5	3	60
			TV	3	3	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		78.33

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2	3	4	5	6
24	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	1 Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi (kondisi awal 2015 =	%	95.400.362.433 (0,48%)	Rp.97621918641,91 (-2.82%)	102.33
		2 Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (kondisi awal 2015 = 29.450.000.000,00)	%	41.129.837.394 (18,68%)	Rp.50.418.075.565,00 (45,48%)	122.58
				Rata-rata Capaian Kinerja		112.46
25	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tri fungsi tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD	1 Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD	%	80	100	125
				Rata-rata Capaian Kinerja		125
26	Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	1 Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	%	10%	8.5	85
		2 Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE	SKPD	8	8	100
		3 Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	website	1	1	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		95
27	Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	1 Tingkat waktu tanggap darurat	pemukiman	< 30	< 30	100
			lahan	< 45	< 45	100
			hutan	< 70	< 65	107.14
				Rata-rata Capaian Kinerja		102.38
28	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	%	75	69.15	92.21
		2 Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya	Dokumen	5	3	60
				Rata-rata Capaian Kinerja		76.11

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2	3	4	5	6
29	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	1 Persentase belanja pendidikan	%	20	30.38	151.9
		2 Persentase belanja kesehatan	%	10	21.78	217.8
				Rata-rata Capaian Kinerja		184.85
30	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Binaan PKK	260	260	100
		2 PKK Aktif	PKK	41	41	100
		3 Posyandu aktif	Posyandu aktif	241	241	100
		4 Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	65	94.73	145.74
		5 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	65	100	153.85
				Rata-rata Capaian Kinerja		119.92
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan						
31	Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat	1 Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31	31	100
		2 Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	3 Kasus	7 Kasus	233
		3 Angka Kecukupan Protein	gr/kap/hari	50	52	104
				Rata-rata Capaian Kinerja		145.67
32	Meningkatnya Produksi pertanian dan perikanan	1 Produksi perikanan budidaya	ton	203.24	342.4	168.47
		2 Produksi perikanan tangkap	Ton	275	930.81	338
		3 Populasi ternak unggulan	Satuan ternak	5,673	5,775	101.79

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1		2		3	4	5	6
		4	Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	Ton	104,131	105,525	101.34
		5	Jumlah penyuluh terlatih	org	2	4	200
					Rata-rata Capaian Kinerja		181.92
33	Meningkatnya Pendapatan petani/peternak/nelayan	1	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	Kasus	3 Kasus	7 Kasus	233
		2	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	33	33	100
		3	Cakupan bina kelompok pembudidaya	kelompok	28	28	100
		4	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	25	25	100
		5	Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	ton	29	29	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		126.6
34	Mengurangi angka penyakit hewan menular dan zoonosis	1	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	30	30	100
		2	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	29	15	233
					Rata-rata Capaian Kinerja		166.5
Misi 6 : Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah							
35	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal	1	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	orang	1,210	1,210	100
		2	Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1	1	100
		3	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	org	16	16	100

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
	1		2	3	4	5	6
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
36	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan indenpenden, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	1	Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Kasus	24	24	100
		2	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	416	416	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
37	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	1	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp.	257,314,633,379,132	261,712,742,159,132	101.71
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
38	Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB*	Rupiah (juta)	4,923,602.95	5,000,294.68	102
		2	Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar	unit	2	3	150
		3	Jumlah pengusaha Dagang terlatih	Unit Usaha	5	3	60
		4	Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha.	Unit Usaha	10	5	50
					Rata-rata Capaian Kinerja		90.5
39	Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai	1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Rupiah (juta)	13,029,529.00	20,361,588.50	100
		2	Kawasan Industri	Kawasan	2	2	100
		3	Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif	Pengusaha	943	847	89.82
					Rata-rata Capaian Kinerja		96.61

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%
1			2	3	4	5	6
Misi 7 : Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu							
40	Meningkatnya aktualisasi nilai keagamaan, seni dan budaya dan peranan pemuda serta keolahragaan dalam kehidupan masyarakatdan pembangunan	1	Jumlah grup kesenian	group	40	35	87.5
		2	Jumlah klub olahraga	klub	112	112	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		93.75
41	Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta	1	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	sanggar	85	40	47.06
					Rata-rata Capaian Kinerja		47.06
42	Meningkatkan sarana dan prasana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian	1	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	2	2	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		100
43	Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten	1	Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	28	32	114
					Rata-rata Capaian Kinerja		114
44	Peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai – nilai tradisi, permusiuman dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan	1	Kunjungan wisata (Mancanegara)	pengunjung	12,757	12,515	98.10
		2	Kunjungan wisata (Domestik)	pengunjung	39,263	32,825	83,60
					Rata-rata Capaian Kinerja		90.85

LAMPIRAN 2

CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TAHUN 2017

LAMPIRAN : 2
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Misi 1 : Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar									
1	Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	7	7	100	Pengelolaan Areal Pemakaman	986,111,600.00	922,138,792.00	93.51
		Perventase infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	%	3.42	2.73	80	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5,422,212,476.94	5,299,043,269.00	97.73
							Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	282,345,000.00	278,223,000.00	98.54
		Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.79	7.5	277.78	Pengembangan Perumahan	6,246,101,000.00	4,957,302,255.00	79.37%
		Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	5.92	1.86	168.58				
		Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	Ha	3,638	3,638	100	Pengelolaan Areal Pemakaman	986,111,600.00	922,138,792.00	93.51
				Rata-rata Capaian Kinerja		145.27				
2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun	%	2.23	2.05	91.98	Pembangunan Jalan dan Jembatan	80,230,795,296.00	75,497,537,901.00	94.10
							Rehabilitas / Pemeliharaan jalan dan jembatan	18,829,872,831.00	16,920,520,652.00	89.86
		Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	3.42	3.31	96.68	Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	6,339,510,400.00	6,129,157,931.00	96.68
		Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	%	4.2	3.9	92.78	Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	15,261,374,000.00	14,122,600,142.00	92.54
		Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	%	24	22.42	93.43	Pengendalian Banjir	1,819,620,900.00	1,699,995,534.00	93.43
		Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air	%	19	18.36	96.63	Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3,434,591,800.00	3,324,928,784.00	96.81
		Persentase Fasilitas Perulatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an	%	25	24.11	96.45	Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	2,137,479,850.00	2,061,659,800.00	96.45
				Rata-rata Capaian Kinerja		94.66				
3	Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	Dokumen	2	1	50	Perencanaan Tata Ruang	425,543,210.00	415,353,350.00	97.61%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rata-rata Capaian Kinerja		50				
4	Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah lingkungan	Kualitas Air	%	75	65	86	Program pengendalian pencemaran d	107,965,000.00	107,396,123.00	99.47%
		Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	65	60	92	Program Pengembangan kinerja peng	4,880,225,600.00	4,864,381,350.00	99.68%
				Rata-rata Capaian Kinerja		89				
5	Terjaganya lingkungan kawasan pesisir	Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat	Kelompok	2	0	0	-	-	-	
		Luas penanaman mangrove	Hektare	0	0	0	-	-	-	
				Rata-rata Capaian Kinerja		0				
6	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	1020	1726	168	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3,633,071,803.00	3,572,536,225.00	98.33%
		Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	Unit/Jenis	201	237	118	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	2,734,589,000.00	2,716,233,000.00	99.33%
		Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	6	4	67	Program pada Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lla	596,328,110.00	590,464,660.00	99.02%
		Rasio izin trayek	Dokumen	8	112	1400	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1,315,187,500.00	1,293,116,000.00	98.32%
		Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	Unit	2,173	485	22	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	127,716,000.00	127,716,000.00	100.00%
				Rata-rata Capaian Kinerja		355				
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing									
7	Menurunnya Mortalitas	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	23	11.63	100	Program Obat dan Perbekalan Kesehs	4,110,328,889.00	3,911,691,874.50	95.17
		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	32	13.44	100				
		Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per100.000 KH	120	142.63	81.14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	28,141,611,108.19	26,078,357,035.83	92.67
		Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70.08	70.25	100	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	104,145,550.00	102,088,700.00	98.03
				Rata-rata Capaian Kinerja		195.29				
8	Menurunnya Morbiditas	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 KH	1	0.06	100	Program Pengawasan Obat dan Makanan	82,500,000.00	82,243,000.00	99.69
		Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	per 1.000 KH	88	86.87	98.72	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	483,970,550.00	482,010,550.00	99.6
		Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	per100.000 KH	< 1	0.75	100				
		Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Tahun	59	30.91	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,516,931,900.00	1,453,775,590.00	95.84
				Rata-rata Capaian Kinerja		99.68				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Meningkatnya Status Gizi	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3	0.02	199.33	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	174,631,385.00	168,142,575.00	96.28
		Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	7	0.3	195.71				
				Rata-rata Capaian Kinerja		197.52				
10	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	78	81.19	104	Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (dapur, loundry, ruang pasien, ruang tunggu dan lain lain)	82,783,053,402.00	58,565,855,201.00	95.16
		ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	3.57	81				
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1.5	1.06	71	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3,830,053,402.00	3,385,112,335.00	99.72
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	78	64.8	83	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD	8,953,000,000.00	8,118,195,000.00	90.68
		GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	%	31	34.31	89.31				
		NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit	%	20	14.23	128.85	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	70,000,000,000.00	73,161,527,553.00	104.516
				Rata-rata Capaian Kinerja		92.86				
11	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah	Angka melek huruf	%	99.44	99.53	100.09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	87,565,382,152.00	49,785,442,955.00	56.86%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100	121.6	121.6	Program Pendidikan Menengah	149,790,000.00	149,790,000.00	100.00%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100	125.07	125.07	Program Pendidikan Non Formal	102,766,000.00	74,626,000.00	72.62%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	107.33	107.33				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88.76	100.89	113.67				
				Rata-rata Capaian Kinerja		113.55				
12	Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/satuan pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah:					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,542,249,596.00	14,079,684,177.00	80.26%
		-SD/MI	(per 1000 siswa)	0.277	0.32	115.52	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2,264,671,375.00	1,704,804,468.00	75.28%
		-SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0.37	0.293	79.18				
				Rata-rata Capaian Kinerja		97.35				
13	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	13.33	13.33	100	Program Kesetaraan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	93,871,000.00	92,241,842.00	98.26%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Meningkatnya Status Gizi	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3	0.02	199.33	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	174,631,385.00	168,142,575.00	96.28
		Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	7	0.3	195.71				
				Rata-rata Capaian Kinerja		197.52				
10	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	78	81.19	104	Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (dapur, loundry, ruang pasien, ruang tunggu dan lain lain)	82,783,053,402.00	58,565,855,201.00	95.16
		ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	3.57	81				
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1.5	1.06	71	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3,830,053,402.00	3,385,112,335.00	99.72
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	78	64.8	83	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD	8,953,000,000.00	8,110,195,000.00	90.68
		GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	%	31	34.31	89.31				
		NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit	%	20	14.23	128.85	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	70,000,000,000.00	73,161,527,553.00	104.516
				Rata-rata Capaian Kinerja		92.86				
11	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah	Angka melek huruf	%	99.44	99.53	100.09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	87,565,382,152.00	49,785,442,955.00	56.86%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100	121.6	121.6	Program Pendidikan Menengah	149,790,000.00	149,790,000.00	100.00%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100	125.07	125.07	Program Pendidikan Non Formal	102,766,000.00	74,626,000.00	72.62%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	107.33	107.33				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88.76	100.89	113.67				
				Rata-rata Capaian Kinerja		113.55				
12	Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/satuan pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah:					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,542,249,596.00	14,079,684,177.00	80.26%
		-SD/MI	(per 1000 siswa)	0.277	0.32	115.52	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2,264,671,375.00	1,704,804,468.00	75.28%
		-SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0.37	0.293	79.18				
				Rata-rata Capaian Kinerja		97.35				
13	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	13.33	13.33	100	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	93,871,000.00	92,241,842.00	98.26%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	16	16	100	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	219,358,682.00	204,605,692.00	93.28%
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	72	75	75	Program Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	1,946,705,000.00	1,918,276,905.00	98.54%
		Rasio KDRT	Rasio	1:6253	6:7000	83.42				
		Kota Layak Anak	Status	Madya	Madya	100				
				Rata-rata Capaian Kinerja		89.61				
	14 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	Rasio akseptor KB	Rasio	01:48.7	02:09.8	143.84	Program Pelayanan Kontrasepsi	270,746,000.00	266,021,390.00	98.25%
		Cakupan peserta KB aktif	%	65	69.79	107.37	Program Keluarga Berencana	663,505,000.00	655,538,000.00	98.80%
							Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	250,000,000.00	249,751,304.00	99.90%
							Penguatan kelembagaan pengarutamaan gender dan anak	508,318,200.00	505,770,292.00	99.50%
				Rata-rata Capaian Kinerja		125.61				
	15 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Sarana Sosial	lembaga	13	21	100	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	128,960,000.00	106,041,582.00	82.23%
		PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	13,500	11919	88	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	408,229,000.00	345,016,220.00	84.52%
							Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	298,341,500.00	275,317,000.00	92.28%
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	62	127	205	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1,186,236,200.00	1,010,267,937.00	85.17%
							Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	90,697,900.00	89,297,600.00	98.46%
							Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	181,719,000.00	92,404,000.00	50.85%
				Rata-rata Capaian Kinerja		131				
	16 Meningkatnya kualitas pendidikan, mutu dan kreatifitas masyarakat	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan Kewirausaan	orang	16	16	100	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	262,338,350.00	256,806,224.00	97.89%
				Rata-rata Capaian Kinerja		100				
	Misi 3 : Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan									
	17 Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat	Jumlah koperasi yang aktif	Koperasi	139	161	115.83	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	443,978,400.00	435,402,200.00	98.07
				Rata-rata Capaian Kinerja		115.83				
	18 Meningkatnya daya saing produk UMKM	Jumlah UMKM aktif yang dibina	UMKM	875	875	100%	Penciptaan iklim Usaha-usaha kecil menengah yang kondusif	283,497,450.00	236,797,450.00	83.53
							Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	202,780,650.00	176,471,445.00	87.03

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rata-rata Capaian Kinerja		100%				
	Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.									
19	Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konfliksosial yang ditindaklanjuti	%	60	60	100	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 1.670.100.000,-	Rp. 1.645.063.318,-	98.50%
							Program pengembangan wawasan kel	Rp. 95.000.000,-	Rp. 82.696.000,-	87.04%
							Program Kemitraan pengembangan w	Rp. 121.626.000,-	Rp. 121.626.000,-	100%
							Program pemberdayaan masyarakat u	Rp. 55.600.000,-	Rp. 41.033.038,-	73.80%
							Program Pendidikan Politik Masyarak	Rp. 135.000.000,-	Rp. 131.306.000,-	97.26%
		Persentase perda yang ditegakan	%	40	40	100	Program pemeliharaan Kantrantibmas	174,460,000.00	174,460,000.00	100
							Program Peningkatan Keamanan dan	1,366,833,000.00	1,366,833,000.00	100
							Program Pemberdayaan masyarakat u	176,675,000.00	176,675,000.00	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		100				
20	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kriteria Penilaian LPPD	Peringkat	7	7	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	469,893,300.00	435.334.238	92.65
		Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	%	85	97.47	114.67	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3,677,119,000.00	3,445,555,800.00	93.70
		Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	%	85	85	100	Program Peningkatan Disiplin Apar	42,023,100.00	30,499,000.00	72.58
		Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	Orang	360	374	103.89				
				Rata-rata Capaian Kinerja		106.19				
21	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	%	15	13.1	60.4	Program Perencanaan Pembangunan daerah	1,670,968,975.00	1,483,285,770.00	88.77%
		Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70	96.6	99	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	253,210,700.00	232,299,510.00	91.74%
							Program Perencanaan Pembangunan sosial budaya	626,333,850.00	595,427,800.00	95.07%
		Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	%	30	17.9	100	Program Kerja sama Pembangunan	226,910,000.00	163,367,600.00	72.00%
				Rata-rata Capaian Kinerja		86.47%				
22	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penyelesaian konflik tanah masyarakat	kasus	3 Kasus	3 Kasus	100	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	332,338,550.00	316,193,700.00	95.14
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	75.99	102.69	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	328,000,000.00	325,520,000.00	99.2439

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	739,620,000.00	727,943,800.00	98.4213
		Kepemilikan KTP Elektronik	%	67.7	95.81	141.52	Penataan Administrasi Kependudukan	2,808,399,070.00	2,786,290,727.00	99.21
		Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85	94.06	110.66				
		Kepemilikan Akta Perkawinan	%	65	61.29	94.29				
		Kepemilikan KIA	%	10	25.63	256.3	Pendataan Administrasi Kependudukan	200,000,000.00	199,108,000.00	99.55
		Kepemilikan KK	%	93	100	107.53				
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	65	93.19	143.37	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Bukit Kapur)	997,427,060.00	944,339,290.00	94.68
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Barat)	972,698,650.00	956,006,248.00	98.28
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Kota)	886,884,400.00	856,012,509.00	96.52
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Selatan)	873,863,023.00	861,048,687.00	98.53
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Timur)	1,123,403,085.00	1,081,874,985.00	96.30
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Medang Kampai)	870,017,250.00	859,884,514.00	98.84
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Sungai Sembilan)	1,192,883,000.00	1,164,726,082.00	97.64
				Rata-rata Capaian Kinerja		132.05				
23	Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Media	20	15	75	Program kerjasama informasi dan media massa	2,671,403,000.00	2,512,012,325.00	94.03
			Radio	5	3	60				
			TV	3	3	100				
				Rata-rata Capaian Kinerja		78.33				
24	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi (kondisi awal 2015 =	%	95.400.362.433 (0,48%)	Rp.97621918641,91	102.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5,951,412,713.00	4,674,187,662.00	78.54%
					-2.82%					
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (kondisi awal 2015 = 29.450.000.000,00)	%	41.129.837.394 (18,68%)	Rp.50.418.075.565,00 (45,48%)	122.58				
				Rata-rata Capaian Kinerja		112.46				
25	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tri fungsi tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD	Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD	%	80	100	%	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	380,000,000.00	136,950,000.00	36.04%
							Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah	12,821,480,000.00	6,777,496,196.00	52.86%
				Rata-rata Capaian Kinerja		112.46				
26	Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	%	10%	8.5	85	pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	158,258,500	134,667,000	85%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							perbaikan sistem administrasi kearsipan	65,946,850	59,634,500	90%
							penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	11,082,275	9,218,000	83%
							pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	8,807,900	7,850,700	89%
		Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE	SKPD	8	8	100	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,672,486,000.00	1,567,544,225.00	58.66
		Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	website	1	1	100	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	489,830,000.00	466,925,030.00	95.32
				Rata-rata Capaian Kinerja		95				
	Terwujudnya perlindungan masyarakat serta 27 pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	Tingkat waktu tanggap darurat	pemukiman	< 30	< 30	100	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	403,750,000.00	171,735,000.00	42.53
			lahan	< 45	< 45	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	82,517,000.00	77,451,600.00	93.86
			hutan	< 70	< 65	107.14	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	91,765,000.00	65,834,000.00	71.74
				Rata-rata Capaian Kinerja		102.38	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran	631,328,000.00	590,714,925.00	93.57
	28 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	%	75	69.15	92.21	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2,012,219,115.00	1,721,412,950.00	85.55
		Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya	Dokumen	5	3	60				
				Rata-rata Capaian Kinerja		76.11				
	Terlaksananya penatausahaan keuangan 29 daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase belanja pendidikan	%	20	30.38	151.9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,459,635,261.00	5,522,341,931.00	85.49%
		Persentase belanja kesehatan	%	10	21.79	217.8				
				Rata-rata Capaian Kinerja		184.85				
	30 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Binaan PKK	260	260	100	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	556,966,345.00	508,718,280.00	91.34
		PKK Aktif	PKK	41	41	100	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	179,476,200.00	177,581,200.00	98.94
		Posyandu aktif	Posyandu aktif	241	241	100	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	493,373,100.00	478,260,355.00	96.94
		Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	65	94.73	145.74	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Bukit Kapur)	272,925,000.00	272,925,000.00	100
							Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Barat)	287,630,000.00	287,630,000.00	100
							Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Kota)	361,165,000.00	361,165,000.00	100
							Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Selatan)	343,940,000.00	343,694,460.00	99.93

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Timur)	399,492,000.00	398,292,000.00	99.70
							Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Medang Kampai)	242,576,000.00	242,576,000.00	100.00
							Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Sungai Sembilan)	302,700,000.00	299,920,000.00	99.08
		Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Prvgram pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	65	100	153.85	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Bukit Kapur)	25,700,000.00	25,700,000.00	100.00
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Barat)	44,300,000.00	44,300,000.00	100.00
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Kota)	39,743,000.00	39,743,000.00	100.00
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Selatan)	31,550,000.00	30,940,000.00	98.07
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Timur)	19,780,000.00	19,780,000.00	100.00
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Medang Kampai)	71,910,000.00	71,910,000.00	100.00
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Sungai Sembilan)	32,200,000.00	32,200,000.00	100.00
				Rata-rata Capaian Kinerja		119.92				
	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan									
	31 Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat	Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita /th	31	31	100	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan	49,650,000.00	49,491,200.00	99.68%
		Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	3 Kasus	7 Kasus	233				
		Angka Kecukupan Protein	gr/kap/ha ri	50	52	104	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1,500,986,765.00	1,482,251,932.00	98.75
				Rata-rata Capaian Kinerja		145.67				
	32 Meningkatnya Produksi pertanian dan perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton	203.24	342.4	168.47	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	454,611,800.00	454,350,000.00	99.94%
		Produksi perikanan tangkap	Ton	275	930.81	338	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	235,585,600.00	235,109,200.00	99.80%
		Populasi ternak unggulan	Satuan ternak	5,673	5,775	101.79	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	710,834,700.00	692,885,000.00	97.52

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	Ton	104,131	105,525	101.34	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	586,178,893.00	579,897,427.00	98.93
							Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	289,050,000.00	281,631,095.00	97.43
							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	547,412,500.00	532,874,000.00	97.34
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1,500,986,765.00	1,482,251,932.00	98.75
		Jumlah penyuluh terlatih	org	2	4	200	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	289,050,000.00	281,631,095.00	97.43
							Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	396,058,000.00	386,272,000.00	97.53
				Rata-rata Capaian Kinerja		181.92				
33	Meningkatnya Pendapatan petani/peternak/nelayan	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	Kasus	3 Kasus	7 Kasus	233	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	388,680,000.00	386,090,000.00	99.33%
		Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	33	33	100	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1,162,705,750.00	1,159,024,201.00	99.68
		Cakupan bina kelompok pembudidaya	kelompok	28	28	100				
		Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	25	25	100	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	235,585,000.00	235,109,200.00	99.80%
							Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan	49,650,000.00	49,491,200.00	99.68%
		Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	ton	29	29	100	Program Pengembangan budidaya per	454,611,800.00	454,350,000.00	99.94%
							Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	174,504,996.00	174,458,000.00	99.97%
				Rata-rata Capaian Kinerja		126.6				
34	Mengurangi angka penyakit hewan menular dan zoonosis	Jumlah kasus bewan menular strategis zoonosis	kasus	30	30	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	388,680,000.00	386,080,000.00	99.33
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	29	15	233				
				Rata-rata Capaian Kinerja		166.5				
	Misi 6 : Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah									
35	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	orang	1,210	1,210	100	Peningkatan kesempatan kerja	314,549,900.00	312,164,634.00	99.24
		Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1	1	100				
		Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	org	16	16	100	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	262,338,350.00	256,806,224.00	97.8912
				Rata-rata Capaian Kinerja		100				
36	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan independen, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Kasus	24	24	100	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	144,425,100.00	140,375,000.00	97.20

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	416	416	100	Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	174,635,000.00	174,635,000.00	100
				Rata-rata Capaian Kinerja		100				
	37 Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp.	257,314,633,379,132	261,712,742,159,132	101.71	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	899,728,900.00	874,262,900.00	97.17
				Rata-rata Capaian Kinerja		100				
	38 Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB*	Rupiah (juta)	4,923,602.95	5,000,294.68	102	*Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*	715,122,000.00	553,461,550.00	77.39
		Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar	unit	2	3	150	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	36,670,000.00	36,310,900.00	99.02
		Jumlah pengusaha Dagang terlatih	Unit Usaha	5	3	60	Program pembinaan pedagang kaklima dan asongan	96,500,000.00	52,140,000.00	54.03
		Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha	Unit Usaha	10	5	50	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	495,042,425.00	458,921,816.00	92.70
				Rata-rata Capaian Kinerja		90.5				
	39 Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Rupiah (juta)	13,029,529.00	20,361,588.50	100	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	58,860,000.00	57,958,246.00	98.47
		Kawasan Industri	Kawasan	2	2	100	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	495,042,425.00	458,921,816.00	92.70%
		Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif	Pengusaha	943	847	89.82				
				Rata-rata Capaian Kinerja		96.61				
	Misi 7 : Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu									
	40 Meningkatnya aktualisasi nilai keagamaan, seni dan budaya dan peranan pemuda serta keolahragaan dalam kehidupan masyarakatdan pembangunan	Jumlah grup kesenian	group	40	35	87.5				
		Jumlah klub olahraga	klub	112	112	100	Peningkatan sarana & prasarana olahraga	150,000,000.00	149,781,000.00	99.85
				Rata-rata Capaian Kinerja		93.75				
	41 Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	sanggar	85	40	47.06	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
				Rata-rata Capaian Kinerja		47.06				
	42 Meningkatkan sarana dan prasana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	2	2	100	Peningkatan peran serta kepemudaan	624,838,000.00	623,243,000.00	99.74
							Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	171,963,100.00	169,854,773.00	98.77
				Rata-rata Capaian Kinerja		100				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA TAHUN 2016	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43 Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten	Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	28	32	114	Pembinaan dan Pemasyarakatan olah	891,873,500.00	881,693,000.00	98.86
				Rata-rata Capaian Kinerja		114				
	44 Peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai – nilai tradisi, permusiuman dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan	Kunjungan wisata (Mancanegara)	pengunjung	12,757	12,515	98.10	Pengembangan Pemasaran Pariwisat	559,572,900.00	554,080,800.00	99.0185
		Kunjungan wisata (Domestik)	pengunjung	39,263	32,825	83.60	Pengembangan destinasi pariwisata	316,170,000.00	314,995,500.00	99.6285
							Pengembangan kemitraan	246,599,000.00	241,871,734.00	98.083
				Rata-rata Capaian Kinerja		90.85				

LAMPIRAN 3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran 3

Pemerintah Kota Dumai

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 (*un audit*)

NO.	URAIAN	TARGET APBD-P TAHUN 2017	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
	PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)	**1.295.452.128.604,00**	**1.184.647.139.864,23**	**91,45%**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (A+B+C+D)**	**228.331.050.400,85**	**229.030.944.242,62**	**100,31%**
A	**PAJAK DAERAH**	**93.044526.897,72**	**94.994.377.648,91**	**102,10%**
1.	Pajak Hotel	3.500.000.000,00	3.596.681.295,50	102,76%
2.	Pajak Restoran	3.750.000.000,00	4.178.485.984,01	111,43%
3.	Pajak Hiburan	650.000.000,00	909.846.165,05	139,98%
4.	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.657.347.947,75	118,38%
5.	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.000.000.000,00	16.979.000.148,00	106,12%
6.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	8.091.270.000,00	9.258.015.780,60	114,42%
7.	Pajak Air Bawah Tanah	2.366.844.000,00	2.621.254.094,00	110,75%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	606.700.000,00	2.985.200,00	0,49%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	47.631.438.397,42	50.418.075.565,00	105,85%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.206.114.500,30	5.242.795.469,00	63,89%
11.	Pajak Parkir	750.000.000,00	37.500.000,00	5,00%
12.	Pajak Sarang Burung Walet	92.160.000,00	92.390.000,00	100,25%
B	**RETRIBUSI DAERAH**	**40.208.241.844,20**	**35.868.514.170,00**	**89,21%**
1.	Retribusi Izin Gangguan	2.654.814.844,20	2.757.430.993,00	103,87%
2.	Retribusi Pelayanan Pasar	600.000.000,00	561.410.000,00	93,57%
3.	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	2.140.671.000,00	2.224.240.840,00	103,90%
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000.000,00	427.890.000,00	71,32%
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.350.000.000,00	18.510.000,00	1,37%
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.187.999.000,00	554.755.050,00	46,70%

NO.	URAIAN	TARGET APBD-P TAHUN 2017	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
7.	Retribusi Jasa Usaha Terminal	17.949586.000,00	18.138.887.500,00	101,05%
8.	Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	344.000.000,00	14.814.000,00	4,31%
9.	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	285.000.000,00	120.802.701,00	42,39%
10.	Retribusi Perizinan Tertentu	12.541.171.000,00	10.521.501.186,00	83,90%
11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	450.000.000,00	414.931.900,00	92,21%
12.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	105.000.000,00	113.340.000,00	107,94%
C	**Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**7.347.426.187,00**	**1.626.568.826,00**	**22,14%**
1.	PT. Bank Riau	1.347.426.187,00	1.347.426.187,00	100,00%
2.	PT. Pembangunan Dumai	5.000.000.000,00	232.388.639,00	4,65%
3.	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	1.000.000.000,00	46.754.000,00	4,68%
D	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**87.730.855.471,93**	**96.541.483.597,71**	**110,04%**
1.	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	15.950.000,00	18.792.000,00	117,82%
2.	Jasa Giro Kas Daerah	1.285.000.000,00	1.200.517.154,76	93,43%
3.	Jasa Giro Bendahara	82.197.263,00	144.485.539,00	175,78%
4.	Penerimaan Bunga Deposito	3.192.636.986,30	3.415.745.731,37	106,99%
5.	Pendapatan Denda Pajak	305.207.811,00	587.157045,00	192,38%
6.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	625.500,00	225.611.324,00	36068,96%
7.	Pendapatan Denda Retribusi	9.792.900,00	24.411.665,00	249,28%
8.	Pendapatan dari Pengembalian dari Temuan	627.345.989,20	1.092.808.729,34	174,20%
9.	Pendapatan lain-lain	-	999.603.953,00	100,00%
10.	Fasilitas Umum	92.500.000,00	37.500.000,00	40,54%
11.	Pendapatan BLUD RSUD Kota Dumai	70.000.000.000,00	78.085.174.497,50	111,55%
12.	Pendapatan BLUD Puskesmas	12.119.599.022,43	10.709.675.958,74	88,37%

NO.	URAIAN	TARGET APBD-P TAHUN 2017	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
II.	**DANA PERIMBANGAN (A+B+C)**	**855.435.909.105,13**	**755.592.886.590,00**	**88,33%**
A.	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	**269.563.719.105,13**	**184.407.972.937,00**	**68,41%**
1.	Bagi Hasil Pajak	57.465.831.928,00	42.924.641.373,00	74,70%
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	212.097.887.177,3	141.483.331.564,00	66,71%
B.	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**408.643.780.000,00**	**408.643.780.000,00**	**100,00%**
C.	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**177.228.410.000,00**	**162.541.133.653,00**	**91,71%**
1.	DAK Fisik	117.514.352.000,00	107.041.407.132,00	91,09%
2.	DAK Non Fisik	59.714.058.000,00	55.499.726.521,00	92,94%
III.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (A+B+C)**	**211.685.169.098,02**	**200.023.309.031,61**	**94,99%**
A.	**Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya**	**91.258.360.711,17**	**84.630.386.181,00**	**92,74%**
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.717.954.093,64	17.414.332.698,00	88,32%
	• Perkiraan PKB TW. IV (Desember 2016)	1.778.517.283,00	1.778.517.283,00	100,00%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.738.447.530,41	14.018.603.538,00	89,07%
	• Perkiraan BBNKB TW.IV (Desember 2016)	1.150.775.101,00	1.150.775.101,00	100,00%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	35.519.570.498,16	34.177.999.461,00	96,22%
	• Perkiraan PBBKB TW. IV (Desember 2016)	(82.279.558,00)	-	0,00%
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.989.805.359,44	618.503.864,00	31,08%
	• Perkiraan Pajak AP TW. IV (Desember 2016)	91.059.155,00	91.059.155,00	100,00%
5.	DBH Pajak Rokok	10.830.599.862,52	10.856.683.695,00	100,24%
	• Perkiraan Pajak Rokok TW. IV (Desember 2016)	91.059.155,00	91.059.155,00	100,00%
B.	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya**	**84.605.008.386,85**	**79.503.402.850,61**	**93,97%**
1.	Alokasi Gaji Guru Bantu	7.296.000.000,00	7.062.000.000,00	96,79%

NO.	URAIAN	TARGET APBD-P TAHUN 2017	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
2.	Alokasi Kesehatan	6.041.008.386,85	1.340.998.000,00	22,20%
3.	Alokasi Pendidikan	31.408.000.000,00	29.698.092.680,00	94,56%
4.	Alokasi PERKIM	11.072.500.000,00	910.645.920,00	8,22%
5.	Alokasi PU & PR	5.787.500.000,00	13.155.326.780,00	227,31%
6.	MTQ	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00%
7.	RSUD	17.000.000.000,00	21.336.339.470,61	125,51%
C.	**Pendapatan Hibah**	**35.821.800.000,00**	**35.889.520.000,00**	**100,19%**
1.	Hibah Dana BOS	35.821.800.000,00	35.889.520.000,00	100,19%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)	**1.295.452.128.604,00**	**1.184.647.139.864,23**	**91,45%**

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran 4

Pemerintah Kota Dumai

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (*un audit*)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
2	**BELANJA**	**1,280,663,488,811.46**	**1,167,815,041,973.93**	**(112,848,446,837.53)**	**91.19**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**503,322,728,116.67**	**475,375,211,298.00**	**(27,947,516,818.67)**	**94.45**
2.1.1	Belanja Pegawai	486,664,738,836.67	462,009,896,218.00	(24,654,842,618.67)	94.93
2.1.3	Belanja Subsidi	2,442,720,000.00	2,442,348,000.00	(372,000.00)	99.98
2.1.4	Belanja Hibah	8,290,000,000.00	7,645,200,000.00	(644,800,000.00)	92.22
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,772,500,000.00	1,032,500,000.00	(1,740,000,000.00)	37.24
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2,652,769,280.00	2,245,267,080.00	(407,502,200.00)	84.64
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	-	(500,000,000.00)	0.00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**777,340,760,694.79**	**692,439,830,675.93**	**(84,900,930,018.86)**	**89.08**
2.2.1	Belanja Pegawai	163,189,813,817.00	145,217,963,204.00	(17,971,850,613.00)	88.99
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325,840,166,860.00	282,971,940,732.10	(42,868,226,127.90)	86.84
2.2.3	Belanja Modal	288,310,780,017.79	264,249,926,739.83	(24,060,853,277.96)	91.65

REVISI PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2017

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	1 Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	1 Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	7
		2 Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	%	3.42
		3 Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.79
		4 Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	5.92
		5 Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	Ha	3,638
	2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan	1 Prosentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	%	2.23
		2 Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	3.42
		3 Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	%	4.2
		4 Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	%	24
		5 Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air	%	19
		6 Persentase Fasilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an	%	25
	3 Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata	1 Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	Dokumen	2
	4 Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah lingkungan	1 Kualitas Air	%	75
		1 Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	65
	5 Terjaganya lingkungan kawasan pesisir	1 Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat	Kelompok	2

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
		2 Luas penanaman mangrove	Hektare	0
	6 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1 Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	1020
		2 Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	Unit/Jenis	201
		3 Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	6
		4 Rasio izin trayek	Dokumen	8
		5 Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	Unit	2,173
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing	7 Menurunnya Mortalitas	1 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	23
		2 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	32
		3 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per100.000 KH	120
		4 Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70.08
	8 Menurunnya Morbiditas	1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 KH	1
		2 Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	per 1.000 KH	88
		3 Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	per100.000 KH	< 1
		4 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Tahun	59
	9 Meningkatnya Status Gizi	1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3
		2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	7
	10 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.	1 Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	78
		2 ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3
		3 TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1.5
		4 BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	78
		5 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	%	31

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
		6 NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap dari rumah sakit	%	20
	11 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah	1 Angka melek huruf	%	99.44
		2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	>100
		3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	>100
		4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
		5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88.76
	12 Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/satuan pendidikan	1 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah:		
		-SD/MI	(per 1000 siswa)	0.277
		-SMP/MTs	(per 1000 siswa)	0.37
	13 Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	13.33
		2 Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	16
		3 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	72
		4 Rasio KDRT	Rasio	1:6253
		5 Kota Layak Anak	Status	Madya
	14 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	1 Rasio akseptor KB	Rasio	01:48.7
		2 Cakupan peserta KB aktif	%	65
	15 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1 Jumlah Sarana Sosial	Lembaga	13
		2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	13,500
		3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	62

MISI	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN 2017
	16	Meningkatnya kualitas pendidikan, mutu dan kreatifitas masyarakat	1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan Kewirausaan	Orang	16
Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan	17	Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat	1	Jumlah koperasi yang aktif	Koperasi	139
	18	Meningkatnya daya saing produk UMKM	1	Jumlah UMKM aktif yang dibina	UMKM	875
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.	19	Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	1	Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konfliksosial yang ditindaklanjuti	%	60
			2	Persentase perda yang ditegakan	%	40
	20	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Kriteria Penilaian LPPD	Peringkat	7
			2	Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	%	85
			3	Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	%	85
			4	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	Orang	360
	21	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	%	15
			2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
		3 Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	%	30
	22 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Penyelesaian konflik tanah masyarakat	kasus	3 Kasus
		2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74
		3 Kepemilikan KTP Elektronik	%	67.7
		4 Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85
		5 Kepemilikan Akta Perkawinan	%	65
		6 Kepemilikan KIA	%	10
		7 Kepemilikan KK	%	93
		8 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	65
	23 Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Media	20
			Radio	5
			TV	3
	24 Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	1 Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi (kondisi awal 2015 = 98.989.908.086,00)	%	95.400.362.433 (0,48%)
		2 Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (kondisi awal 2015 = 29.450.000.000,00)	%	41.129.837.394 (18,68%)
	25 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tri fungsi tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD	1 Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD	%	80
	26 Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	1 Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	%	10%

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
		2 Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE	SKPD	8
		3 Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	website	1
	27 Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai	1 Tingkat waktu tanggap darurat	Pemukiman	< 30
			Lahan	< 45
			Hutan	< 70
	28 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	%	75
		2 Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya	Dokumen	5
	29 Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	1 Persentase belanja pendidikan	%	20
		2 Persentase belanja kesehatan	%	10
	30 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Binaan PKK	260
		2 PKK Aktif	PKK	41
		3 Posyandu aktif	Posyandu aktif	241
		4 Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	65
		5 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	65
Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan	31 Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat	1 Nilai Konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31
		2 Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	3 Kasus
		3 Angka Kecukupan Protein	gr/kap/hari	50

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
	32 Meningkatnya Produksi pertanian dan perikanan	1 Produksi perikanan budidaya	ton	203.24
		2 Produksi perikanan tangkap	Ton	275
		3 Populasi ternak unggulan	Satuan ternak	5,673
		4 Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	Ton	104,131
		5 Jumlah penyuluh terlatih	org	2
	33 Meningkatnya Pendapatan petani/peternak/ nelayan	1 Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	Kasus	3 Kasus
		2 Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	33
		3 Cakupan bina kelompok pembudidaya	kelompok	28
		4 Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	25
		5 Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	ton	29
	34 Mengurangi angka penyakit hewan menular dan zoonosis	1 Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	30
		2 Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	29
Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah	35 Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal	1 Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	orang	1,210
		2 Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1
		3 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	org	16
	36 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan indenpenden, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	1 Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Kasus	24

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
		2 Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	416
	37 Meningkatnya investasi di Kota Dumai	1 Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp.	257,314,633,379,132
	38 Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	1 Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB*	Rupiah (Juta)	4,923,602.95
		2 Jumlah Pasar Tradisional yang sesuai standar	unit	2
		3 Jumlah pengusaha Dagang terlatih	Unit Usaha	5
		4 Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha.	Unit Usaha	10
	39 Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai	1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Rupiah (Juta)	13,029,529.00
		2 Kawasan Industri	Kawasan	2
		3 Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif	Pengusaha	943
Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu	40 Meningkatnya aktualisasi nilai keagamaan, seni dan budaya dan peranan pemuda serta keolahragaan dalam kehidupan masyarakatdan pembangunan	1 Jumlah grup kesenian	group	40
		2 Jumlah klub olahraga	klub	112
	41 Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta	1 Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	sanggar	85
	42 Meningkatkan sarana dan prasana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian	2 Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	2

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
	43 Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten	1 Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	28
	44 Peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai – nilai tradisi, permusiuman dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan	1 Kunjungan wisata (Mancanegara)	Pengunjung	12,757
		2 Kunjungan wisata (Domestik)	pengunjung	39,263

Program dan Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp 986,111,600
2	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 5,422,212,477
3	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp 282,345,000
4	Pengembangan Perumahan	Rp 6,246,101,000
5	Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp 986,111,600
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 80,230,795,296
7	Rehabilitas / Pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp 18,829,872,831
8	Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 6,339,510,400
9	Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	Rp 15,261,374,000
10	Pengendalian Banjir	Rp 1,819,620,900
11	Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp 3,434,591,800
12	Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	Rp 2,137,479,850
13	Perencanaan Tata Ruang	Rp 425,543,210
14	pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp 107,965,000
15	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp 4,880,225,600
16	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 3,633,071,803
17	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 2,734,589,000
18	pada Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj	Rp 596,328,110
19	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 1,315,187,500
20	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Rp 127,716,000
21	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 4,110,328,889

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
22	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	28,141,611,108
23	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp	104,145,550
24	Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	82,500,000
25	Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	483,970,550
26	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	1,516,931,900
27	Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	174,631,385
28	Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (dapur, loundry, ruang pasien, ruang tunggu dan lain lain)	Rp	82,783,053,402
29	Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp	3,830,053,402
30	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD	Rp	8,953,000,000
31	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp	70,000,000,000
32	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	87,565,382,152
33	Pendidikan Menengah	Rp	149,790,000
34	Pendidikan Non Formal	Rp	102,766,000
35	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	17,542,249,596
36	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	2,264,671,375
37	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Rp	93,871,000
38	peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Rp	219,358,482
39	Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	Rp	1,946,705,000
40	Pelayanan Kontrasepsi	Rp	270,746,000
41	Keluarga Berencana	Rp	663,505,000
42	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp	250,000,000
43	Penguatan kelembagaan pengasutamaan gender dan anak	Rp	508,318,200
44	pembinaan panti asuhan/panti jompo	Rp	128,960,000
45	pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Rp	408,229,000
46	pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Rp	298,341,500
47	pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp	1,186,236,200
48	pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp	90,697,900
49	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp	181,719,000
50	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	262,338,350
51	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	443,978,400
52	Penciptaan iklim Usaha-usaha kecil menengah yang kondusif	Rp	283,497,450
53	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp	202,780,650
54	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp	1,670,100,000
55	Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	95,000,000
56	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	121,626,000
57	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp	55,600,000
58	Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	135,000,000
59	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp	174,460,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
60	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	1,366,833,000
61	Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp	176,675,000
62	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	469,893,300
63	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	3,677,119,000
64	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	42,023,100
65	Perencanaan Pembangunan daerah	Rp	1,670,968,975
66	Perencanaan Pembangunan ekonomi	Rp	253,210,700
67	Perencanaan Pembangunan sosial budaya	Rp	626,333,850
68	Kerja sama Pembangunan	Rp	226,910,000
69	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Rp	332,338,550
70	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	328,000,000
71	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Rp	739,620,000
72	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	2,808,399,070
73	Pendataan Administrasi Kependudukan	Rp	200,000,000
74	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Bukit Kapur)	Rp	997,427,060
75	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Barat)	Rp	972,698,650
76	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Kota)	Rp	886,884,400
77	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Selatan)	Rp	873,863,023
78	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Dumai Timur)	Rp	1,123,403,085
79	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Medang Kampai)	Rp	870,017,250
80	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. Sungai Sembilan)	Rp	1,192,883,000
81	Kerjasama informsi dan media massa	Rp	2,671,403,000
82	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	5,951,412,713
83	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp	380,000,000
84	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah	Rp	12,821,480,000
85	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Rp	158,258,500
86	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp	65,946,850
87	Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Rp	11,082,275
88	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Rp	8,807,900
89	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	2,672,480,000
90	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Rp	489,830,000
91	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp	403,750,000
92	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp	82,517,000
93	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	91,765,000
94	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Rp	631,328,000
95	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Rp	2,012,219,115
96	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	6,459,635,261

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
97	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	556,966,345
98	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	179,476,200
99	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	493,373,100
100	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Bukit Kapur)	Rp	272,925,000
101	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Barat)	Rp	287,630,000
102	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Kota)	Rp	361,165,000
103	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Selatan)	Rp	343,940,000
104	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Dumai Timur)	Rp	399,492,000
105	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Medang Kampai)	Rp	242,576,000
106	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kec. Sungai Sembilan)	Rp	302,700,000
107	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Bukit Kapur)	Rp	25,700,000
108	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Barat)	Rp	44,300,000
109	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Kota)	Rp	39,743,000
110	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Selatan)	Rp	31,550,000
111	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Dumai Timur)	Rp	19,780,000
112	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Medang Kampai)	Rp	71,910,000
113	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa (Kec. Sungai Sembilan)	Rp	32,200,000
114	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan	Rp	49,650,000
115	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Rp	1,500,986,765
116	Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp	454,611,800
117	Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	235,585,000
118	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	710,034,700
119	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Rp	586,178,893
120	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Rp	289,050,000
121	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	547,412,500
122	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Rp	1,500,986,765
123	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Rp	289,050,000
124	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	396,058,000
125	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	388,680,000
126	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	1,162,705,750
127	Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	235,585,000
128	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan	Rp	49,650,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
129	Pengembangan budidaya perikanan	Rp	454,611,800
130	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Rp	174,504,996
131	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	388,680,000
132	Peningkatan kesempatan kerja	Rp	314,549,900
133	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	262,338,350
134	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Rp	144,425,100
135	Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Rp	174,635,000
136	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	899,728,000
137	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	715,122,000
138	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp	36,670,000
139	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp	96,500,000
140	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	495,042,425
141	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	58,860,000
142	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	495,042,425
143	Peningkatan sarana & prasarana olahraga	Rp	150,000,000
144	Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp	624,838,000
145	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Rp	171,963,100
146	Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	Rp	891,873,500
147	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	559,572,900
148	Pengembangan destinasi pariwisata	Rp	316,170,000
149	Pengembangan kemitraan	Rp	246,599,000

WALIKOTA DUMAI

Drs. H. ZULKIFLI, AS. M.Si

PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Walikota Dumai - Bagan Besar
DUMAI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 24 /BAPPEDA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
KOTA DUMAI TAHUN 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, partisipasi dan akuntabilitas, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdaayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Pemerintah Kota Dumai diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota Dumai Tahun 2017;

b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota Dumai Tahun 2017 dapat berjalan optimal, perlu dibentuk Panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota Dumai Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KotaMadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdaayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai TAhun 2017 Nomor 6 Seri A).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait serta menyiapkan dan menghimpun baha-bahan guna Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota Dumai Tahun 2017;
2. Menyusun jadwal kerja kegiatan penyusunan LKj IP Tahun 2018 dan;
3. Menyampaikan Dokumen LKj IP Kota Dumai Tahun 2017 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Riau melalui Inspektorat Provinsi Riau.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal : 2 Januari 2018

Plt. Kepala,

PEMERINTAH KOTA DUMAI
BAPPEDA

MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19650122 199903 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI
NOMOR /BAPPEDA/2018
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
KOTA DUMAI TAHUN 2017

PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
KOTA DUMAI TAHUN 2017

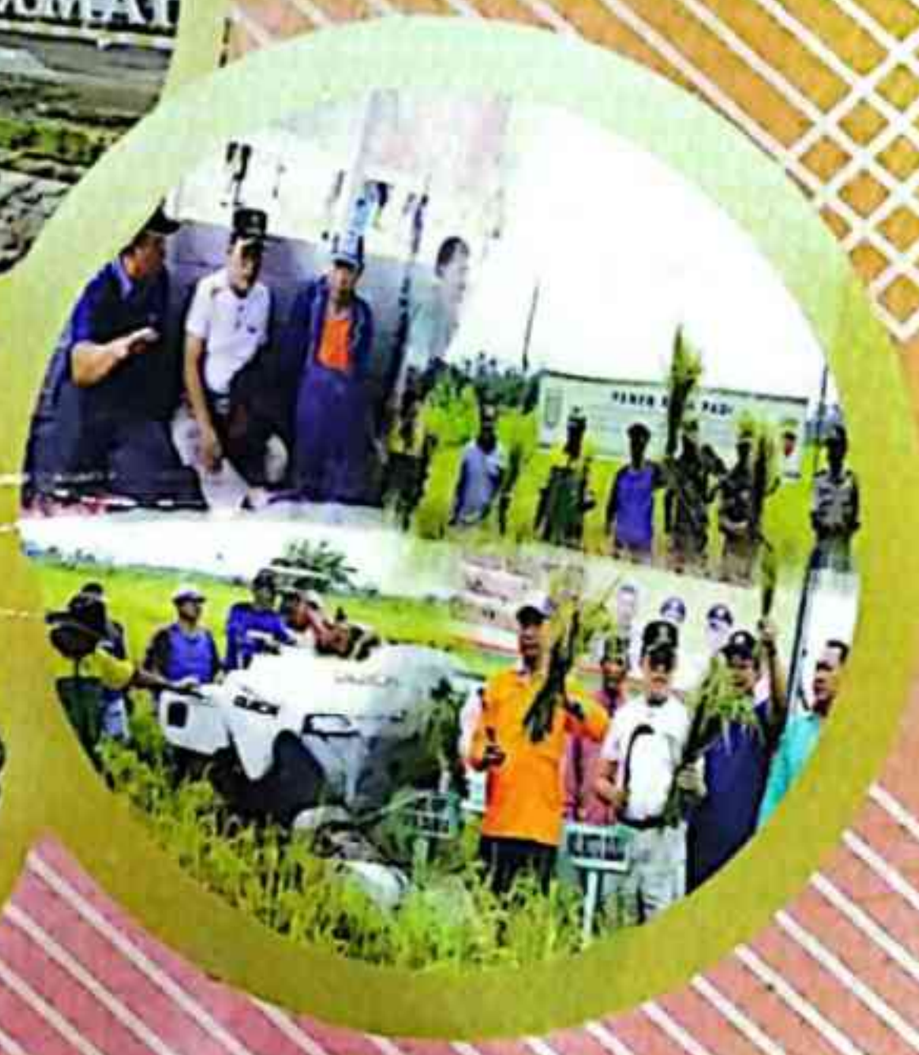
NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si	Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	PENANGGUNG JAWAB
2.	Drs. BUDHI HASNUL, M.Si	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN LITBANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	KETUA
3.	JAYA HANDAYANA, SE, MM	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	WAKIL KETUA
4.	FINALDI, ST, M.Soc.Sc	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	SEKRETARIS
5.	T. SUPRIANSAH, S.Sos, M.Si	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN KERJA SAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
6.	NURDIANA LINDAYANI SIREGAR, ST	PELAKSANA GOLONGAN III PERENCANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
7.	LUSI ADRIANI, S.Kom	PELAKSANA GOLONGAN III PRANATA KOMPUTER BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
8.	ARIE FEBRIMA, S. Sos	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
9.	ARIPUDDIN, A.Md	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
10.	MERIYAM	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
11.	DWI HARRY JUNARKO	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
12.	TAUPIK RAMLAN	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA

Plt. Kepala,

PEMERINTAH KOTA DUMAI
BAPPEDA

MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19650122 199903 1 002


PELABUHAN DUMAI








Gambar Zoo

